



Merekatkan Kembali Bangsa yang Retak

Suatu Pendekatan Budaya

**KUMPULAN MAKALAH
SEMINAR STRATEGI PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**

**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2000**

TIDAK DIPERDAGANGKAN

MEREKATKAN KEMBALI BANGSA YANG RETAK

SUATU PENDEKATAN BUDAYA

KUMPULAN MAKALAH
SEMINAR STRATEGI PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2000

**MEREKATKAN KEMBALI
BANGSA YANG RETAK**
SUATU PENDEKATAN BUDAYA

EDITOR
TIM DITJENBUD

PENERBIT
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

DISAIN COVER
RISMAN MARAH

GAMBAR COVER
KAIN TENUN TIMOR

COPYRIGHT
DITJENBUD 2000

ISBN 979-95068-8-3

PENGANTAR

Perkembangan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini berada pada titik rawan yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan kesatuan negara. Tampaknya masyarakat tidak memahami proses yang sedang terjadi, mereka seperti kehilangan pedoman dalam menentukan arah dan harapan bangsa Indonesia pada masa depan. Berbagai kerusuhan dan perusakan yang terjadi di beberapa wilayah dan daerah nyaris mencampakkan bangsa Indonesia yang dahulu dikenal sebagai bangsa yang bersatu, ramah, dan berbudaya menjadi bangsa yang rapuh dan mudah retak. Integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mulai diragukan banyak pihak. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika seolah-olah tak menjiwai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Isu-isu politik, ekonomi, agama, suku bangsa, dan antargolongan telah memicu pergolakan keretakan persatuan bangsa dan kesatuan negara. Untuk itulah Direktorat Jenderal Kebudayaan menggelar “Seminar Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan”, untuk menampung berbagai pendapat dan gagasan, serta aspirasi dari para pakar dan budayawan guna meningkatkan ketahanan budaya yang dapat memberikan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan bangsa di tengah-tengah persiapan memasuki era globalisasi.

Seminar yang diselenggarakan pada tanggal 21-24 Februari 2000, di Hotel Ibis, Slipi, Jakarta itu dihadiri oleh para pakar, budayawan, pejabat yang menangani kebudayaan dan pendidikan serta pihak lain yang relevan dengan penanganan ikhwal kebudayaan.

Seminar Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. mendiskusikan arah dan harapan bangsa Indonesia pada masa depan;

- b. memberikan sumbangan pemikiran tentang upaya memahami dan menyiasati keanekaragaman budaya dalam rangka merekatkan persatuan bangsa dan kesatuan negara;
- c. memberi arti penting terhadap proses perubahan sosial yang sedang dan akan terjadi pada masa depan;
- d. menempatkan posisi kebudayaan dan pendidikan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lain.

Tema seminar adalah “Merekatkan Kembali Bangsa yang Retak”, dengan sub-tema (I) “Peran Kebudayaan sebagai Pemersatu Bangsa” dan (II) “Peningkatan Apresiasi Budaya Bangsa”. Tema seminar dikupas dalam dua pemakalah kunci, sedangkan sub-tema (I) dan sub-tema (II) masing-masing diturunkan kedalam empat topik. Setiap topik dibahas oleh dua pemakalah.

Makalah kunci pertama diberikan oleh Dr. Daoed Joesoef dengan judul “Peran Kebudayaan sebagai Pemersatu Bangsa”, dan makalah kunci kedua oleh Prof. Dr. Fuad Hassan dengan judul “Peningkatan Apresiasi Budaya Bangsa”.

Makalah sub-tema (I)

1. Peran Bahasa sebagai Pemersatu Bangsa oleh Dr. Asim Gunarwan dan Prof. Dr. Fuad Abdul Hamied.
2. Peran Sejarah sebagai Pemersatu Bangsa oleh Dr. Kuntowijoyo, M.A. dan Dr. Azyumardi Azra, M.A.
3. Peran Kreativitas sebagai Pemersatu Bangsa oleh Putu Wijaya dan Slamet Sukirnantono.
4. Peran Warisan Budaya sebagai Pemersatu Bangsa oleh Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A. dan Dr. Mukhlis Paeni.

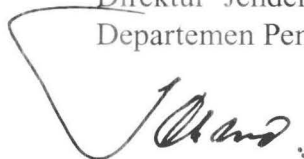
Makalah sub-tema (II)

1. Peningkatan Apresiasi Budaya Bangsa Melalui Pendidikan Formal/Sekolah oleh Prof. Dr. H.A.R. Tilaar
2. Peningkatan Apresiasi Budaya Bangsa Melalui Keluarga oleh Prof. Dr. Sardjono Jatiman, dan Dr. Imam B. Prasodjo.

3. Peningkatan Apresiasi Budaya Bangsa Melalui Pendidikan Masyarakat oleh Drs. Endro Sumarjo, dan Prof. Dr. Bambang Pranowo, M.A.
4. Peningkatan Apresiasi Budaya Bangsa Melalui Media Massa oleh Drs. Djafar H. Assegaff.

Buku ini merupakan kumpulan dari keseluruhan makalah dalam seminar “Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan” yang khusus diterbitkan dalam upaya lebih menyebarluaskan aspirasi, pandangan, serta gagasan dari para pakar dan budayawan yang telah dikemukakan dalam seminar tersebut. Dengan demikian diharapkan para pembaca akan memiliki persepsi serta visi yang sama dalam menyongsong terbentuknya masyarakat Indonesia Baru yang didambakan; yaitu masyarakat yang berperilaku sosial secara berbudaya, mempunyai daya respon kultural yang tinggi, mempunyai toleransi kultural antarbangsa, berketahanan budaya tinggi, serta mampu memberikan kontribusi di dalam percaturan budaya global.

Direktur Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan Nasional



I G.N. Anom

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
1. Era Kebudayaan Oleh: Prof. Dr. Daoed Joesoef	1
2. Krisis Metafisis Dalam Ilmu Pengetahuan Oleh: Prof. Dr. Daoed Joesoef	47
3. Satu Kebudayaan di Abad Iptek Oleh: Prof. Dr. Daoed Joesoef	111
4. Peran Kebudayaan Sebagai Pemersatu Bangsa Oleh: Prof. Dr. Daoed Joesoef	137
5. Pertemuan Antar Budaya Dalam Era Globalisasi Oleh: Prof. Dr. Fuad Hassan	149
6. Peran Bahasa Sebagai Pemersatu Bangsa Oleh: Dr. Asim Gunarwan	169
7. Peran Bahasa Sebagai Pemersatu Bangsa Oleh: Prof. Dr. Fuad Abdul Hamied	199
8. Mengalami Sejarah Oleh: Dr. Kuntowijoyo, MA	209
9. Peranan Sejarah Dalam Integrasi Bangsa Oleh: Prof. Dr. Azyumardi Azra	217
10. Seminar Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Oleh: Prof. Dr. Sardjono Jatiman	227
11. Budaya Bangsa Dalam Sosialisasi Keluarga Oleh: Dr. Imam B. Prasodjo	231

12. Kreativitas Untuk Persatuan Oleh: Putu Wijaya	237
13. Peran Kreativitas Sebagai Pemersatu Bangsa Oleh: Slamet Sukirnantono	251
14. Peningkatan Apresiasi Budaya Bangsa Melalui Masyarakat Oleh: Prof. Dr. Bambang Pranowo, MA	267
15. Peningkatan Apresiasi Budaya Bangsa Melalui Masyarakat Oleh: Drs. Endro Sumarjo	271
16. Peranan Warisan Budaya Sebagai Perekat Kerukunan Bangsa Oleh: I Wayan Ardika	283
17. Peran Warisan Budaya Sebagai Pemersatu Bangsa Oleh: Dr. Mukhlis Paeni	291
18. Peningkatan Apresiasi Budaya Sebagai Perekat Persatuan Bangsa dan Kesatuan Negara Melalui Proses Pendidikan Oleh: Prof. Dr. H. A. R. Tilaar, M.Sc.Ed.....	305
19. Peningkatan Apresiasi Budaya Bangsa Melalui Media Massa Oleh: Djafar H. Assegaff	335

ERA KEBUDAYAAN

Oleh: Daoed Joesoef

Pengantar

Abad XXI yang empat tahun lagi akan dimasuki makhluk manusia dalam perjalanannya menempuh dimensi waktu telah diberi julukan “Zaman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” atau, disingkat, “Zaman Iptek”. Disebut demikian karena sekarang ini sudah bisa diperkirakan bahwa di abad mendatang tersebut kedua faktor buatan manusia itu betul-betul akan menguasai kehidupan manusia. Perkiraan yang diucapkan dengan begitu pasti ini datang dari sekelompok manusia yang dengan sadar dan sengaja telah mengembangkannya selama berabad-abad sejak sebelum Abad XX melalui pengembangan kebudayaan. Mengetahui dengan baik kebudayaan Barat ini, demi menyadari mengapa kebudayaan asing ini sampai bisa memproduksi faktor-faktor yang begitu ampuh, dan tidak tanpa bahaya bagi kemasniaan, menjadi penting sekali bagi kita yang lahir dan dibesarkan di luar lingkungan kebudayaan tersebut. Sebab umat manusia yang tidak menyadarinya pasti akan sulit dapat survive dalam menempuh zaman Iptek di Abad XXI yang pasti penuh dengan tantangan, perubahan dan peluang-peluang baru yang serba cepat.

Maka berturut-turut akan dibahas “apakah kebudayaan itu?” dan kemudian “akan dipengapakan kebudayaan kita sendiri?!”

I. Apakah Kebudayaan ?

I.1. Kebudayaan

Kebudayaan adalah hal-hal atau segala sesuatu yang mempunyai ciri atau sifat budaya. Budaya adalah sistem nilai yang dihayati. Budaya nasional adalah sistem nilai yang dihayati oleh sesuatu bang-

sa. Budaya Indonesia adalah sistem nilai yang dihayati oleh bangsa Indonesia.

Nilai adalah, pertama, apa-apa yang dipakai sebagai standar *judgment* atau digunakan sebagai dasar pengambilan sesuatu keputusan. Nilai adalah juga, kedua, apa-apa yang (dianggap) bernilai itu sendiri. Baik dalam artian yang pertama maupun yang kedua, nilai dapat berupa atau berbentuk, jadi dapat dilihat atau dijamah (*tangible*), misalnya : ukuran panjang/berat/kecepatan dan bangunan bersejarah atau religius serta berbagai jenis karya seni, dan lain-lain. Nilai bisa pula tidak berupa atau tidak berbentuk, jadi tidak terlihat atau terjamah (*intangible*), seperti : adat-istiadat, tradisi, kebiasaan normatif, moral, etika, harga diri (*honour*), kepercayaan, disiplin, gagasan (*idea*), pegangan hidup, nalar, semangat ilmiah, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

Sistem adalah suatu susunan yang berfungsi, terdiri dari bagian-bagian tertentu, yang terletak pada tempat-tempatnya sendiri dan mempunyai fungsi masing-masing yang spesifik. Makna bagian yang satu punya interdependensi dengan makna bagian yang lain secara komplementer dan sangat konsisten. Maka sistem yang baik adalah ibarat mobil yang bergerak dan bukan mobil yang sedang mogok. Sebagai suatu sistem, budaya mengenal pasang-surut, bisa berkembang dan dapat menyusut, lahir-hidup-mati, lalu lenyap dan terlupakan. Jadi kebudayaan, menurut Edward Herriot, adalah segala sesuatu yang masih diingat, dihayati dan diberlakukan apabila yang lain-lain telah dilupakan.

Hidup matinya suatu budaya jadi juga budaya tergantung pada ada tidaknya perkembangan nilai atau nilai-nilai yang membentuk budaya yang bersangkutan. Perkembangan ini dilakukan oleh penghayat atau penganut budaya tersebut. Dengan perkataan lain, penganut budaya itu, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok, dengan sadar dan sengaja membuat dirinya menjadi pengolah atau pengembang budaya (sistem nilai) yang dihayatinya.

Budaya Barat yang hidup, tumbuh dan berkembang begitu rupa hingga mendunia, terjadi berkat ketekunan orang-orang Eropa mengembangkan salah satu unsur budaya yang mereka hayati, yaitu dari pengetahuan menjadi pengetahuan ilmiah (ilmu pengetahuan), melalui renungan filosofis, pikiran pedagogis, pelajaran yang sistematis dan sistem pendidikan serta penelitian yang terarah selama berabad-abad.

Ilmu pengetahuan adalah budaya karena ia adalah nilai. Ia merupakan nilai karena ia tidak lain dari penerapan nalar manusia (*human reason*) dengan cara selogis mungkin. Jadi nalar adalah nilai yang mendasari ilmu pengetahuan. Karena yang terlibat itu adalah nalar manusia, ilmu pengetahuan berarti erat bersendikan kehidupan manusia (*human life*) yang dalam dirinya merupakan pula suatu nilai dan bersendikan juga pengaturan yang rasional dari kehidupan tersebut; sedangkan pengaturan tersebut dalam dirinya adalah juga suatu nilai.

1.2. Makna dan Fungsi Ilmu Pengetahuan

Perkembangan budaya Barat yang berdampak universal itu bukanlah karena akumulasi ilmu pengetahuan itu *an sich* tetapi lebih banyak oleh pergeseran (*shift*) dalam pengkaitan makna dan fungsi ilmu pengetahuan itu.

Di Barat sejak Plato makna dan fungsi pengetahuan dikaitkan pada *being*, pada keber-ada-an atau kepribadian manusia individual. Menurut Socrates satu-satunya fungsi dari pengetahuan adalah membantu perkembangan intelektual, moral dan spiritual dari diri pribadi manusia. Jadi pengetahuan bermakna "*self-knowledge*" dan "*self development*". Dengan perkataan lain, hasil pemikiran dan penguasaan pengetahuan adalah internal, berupa citra/gambaran pribadi (*self-image*).

Menurut Protagoras, lawan Socrates, fungsi pengetahuan adalah untuk membuat pemiliknya menjadi efektif, dengan membuatnya

mampu untuk tahu mengatakan apa dan bagaimana mengatakan apa tersebut. Untuk dia pengetahuan bermakna logika, grammar dan retorika. Hal ini kemudian menjadi *trivium*, inti dan sistem pendidikan formal di Abad Pertengahan, yang bahkan sampai sekarang ini masih kelihatan kehadirannya dalam apa yang di Barat disebut "*liberal education*" atau "*allgemeine Bildung*". Maka logika, grammar dan retorika adalah alat (*means*) yang diperlukan manusia untuk memutuskan mengatakan apa dan bagaimana mengatakan apa tersebut. Dengan perkataan lain, ketiga hal itu bukan merupakan alat untuk berbuat apa dan bagaimana melakukannya.

Ini bukan berarti bahwa Socrates dan Protagoras meremehkan keterampilan (*skills*) berbuat sesuatu. Mereka sangat menghargai keterampilan. Mereka menyebutnya *techne*', namun *techne*' bukan pengetahuan. Makna *techne*' dikaitkan pada satu penerapan spesifik dan dianggap tidak punya asas-asas umum. Karena itu ia tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, baik diucapkan maupun ditulis; ia hanya dapat diperagakan atau didemonstrasikan. Maka satu-satunya jalan untuk mempelajari atau menguasai *techne*' adalah melalui permagangan dan pengalaman. Menjelang akhir Abad XVII *techne*' dikaitkan dengan kerajinan, seni dan kiat (*art*), bahkan dengan misteri.

Selama lebih dari 2000 tahun makna dan fungsi pengetahuan yang seperti ini mendominasi keterpelajaran dunia Barat dan sekaligus mendefinisikan apa yang disebut dengan pengetahuan ilmiah. Tangapan seperti ini tentang pengetahuan banyak sedikitnya juga terdapat di dunia Timur. Konghucu, misalnya, memaknakan pengetahuan: tahu mengatakan apa dan bagaimana mengatakannya sebagai jalan ke kemajuan dan keberhasilan pribadi. Bagi pengikut pikiran Tao dan Zen, pengetahuan bermakna "*self-knowledge*" dan jalan ke pencerahan serta kebijaksanaan. Walaupun antara kedua pihak tersebut terdapat perbedaan tentang apa makna pengetahuan yang sebenarnya, mereka sependapat penuh mengenai bukan makna dari pengetahuan. Menurut mereka pengetahuan pasti bukan bermakna

kemampuan berbuat. Ia bukan berarti kegunaan (*utility*), karena kegunaan bukan pengetahuan, sama dengan *techne*'. Tanggapan tradisional tentang pengetahuan di Indonesia kiranya tidak berbeda dengan tanggapan umum dunia Timur ini. Hal ini tercermin dalam inti dari uraian-uraian atau pesan yang dikandung oleh lakon-lakon wayang dan gambaran dari tokoh-tokoh dunia pewayangan yang terpuji dan dipujikan sampai sekarang.

Di sekitar tahun 1700 di Eropa lagi-lagi dunia barat makna pengetahuan, yang sementara itu sudah dikembangkan menjadi pengetahuan ilmiah, dikaitkan pada *doing*, pada **perbuatan**. Dengan begini fungsi pengetahuan adalah membantu manusia **membuat barang dan memindah-mindahkan barang**. Periode pergeseran dalam pengkaitan makna dan fungsi pengetahuan ini mengenal tiga fase distingsif.

Sewaktu fase pertama yang berlangsung selama lebih kurang 100 tahun, pengetahuan diterapkan pada **peralatan, proses dan produk**. Maka hasil penghayatan dan penguasaan pengetahuan adalah **eksternal**, terlihat di luar diri pemiliknya dalam masyarakat dan ekonomi atau dalam kemajuan pengetahuan itu sendiri, berupa perlipatgandaan barang dan peredarannya di antara manusia dan perlipatgandaan serta penyebaran pengetahuan. Artinya, pengetahuan baru disebut pengetahuan hanya bila ia telah membuktikannya "*in action*". Jadi yang dimaksudkan dengan pengetahuan sekarang adalah *information effective in action*, informasi yang difokuskan pada hasil dan hasil ini harus berada dan dapat dilihat di luar diri pemilik pengetahuan itu sendiri.

Maka untuk bisa menghasilkan lebih banyak, pengetahuan itu sendiri harus spesialis. Dan pengetahuan yang spesialis atau spesifik ini tidak lagi disebut kecakapan tetapi **disiplin**. Suatu disiplin mengubah kecakapan, *art* dan *techne*' menjadi suatu **metodologi** seperti *engineering*, metode ilmiah, metode kuantitatif. Setiap metodologi mengubah keterampilan/kecakapan menjadi suatu disiplin

ilmiah yang dapat diajarkan dan dipelajari. Hal ini dalam dirinya merupakan suatu perubahan besar dalam sejarah kebudayaan dan intelektual Barat.

Dari pergeseran dalam pengkaitan makna dan fungsi pengetahuan seperti ini lahirlah **Revolusi Industri**. Lima puluh tahun sejak dimulainya pergeseran ini manusia Barat menginovasi teknologi. Istilah ini jelas merupakan suatu manifesto dari kombinasi antara *techne*, yaitu misteri dari kerajinan/keterampilan, dengan *logy* atau *logos*, yaitu “*organized, systematic, purposeful knowledge*”. Karena *techne* langsung ditautkan pada pengetahuan, yaitu nilai yang dapat dipelajari dan diajarkan, merebaklah hasrat menyebarluaskan kemampuan berbuat dan penguasaan pengetahuan. Artinya, pengetahuan, termasuk yang mantap diakui, yang sudah berupa pengetahuan ilmiah, menjadi *public goods*.

Berhubung dengan itu di Perancis dan Jerman didirikan “*engineering schools*” sejak tahun 1747. Yang lebih menentukan lagi adalah penerbitan “*Encyclopaedie*” di Perancis antara tahun 1751-1772, atas prakarsa dan usaha Denis Diderot dan Jean d’Alembert. Dalam fase ini terbit pula buku “*The Wealth of Nations*” yang berisi buah pikiran Adam Smith, hampir bersamaan waktunya dengan penyempurnaan **mesin uap** oleh **James Watt**. Lalu lahirlah **kapitalisme** di bidang ekonomi. Di bidang sosial timbul **kelas kapitalis** dan **proletar** sebagai suatu dikotomi. Di bidang politik tampil marxisme sebagai gagasan dan komunisme sebagai sistem.

Dalam fase kedua dari periode pergeseran ini, dimulai kira-kira di tahun 1880 dan berlangsung hingga akhir Perang Dunia II, makna dan fungsi pengetahuan bergeser lagi, kini dikaitkan pada **kerja manusia** (*human work*) dalam rangka *doing* seperti diuraikan di atas tadi. Upaya ini dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor (1815-1915), yang menerapkan ilmu pengetahuan pada analisis mengenai kerja dan “*engineering work*”. Menurut Taylor kerja manusia dapat dipelajari, dianalisis dan dibagi-bagi menjadi

berbagai gerakan repetitif dimana setiap gerakan seharusnya dilakukan menurut satu cara yang tepat, menurut waktunya sendiri yang sesuai dan dengan peralatannya sendiri yang spesifik. Bagi dia menaikkan produksi bukan dengan jalan bekerja lebih lama, tetapi dengan jalan membagi-bagi setiap gerakan kerja menjadi satu bagian-gerak (*sub-movement*) yang khas. Jadi kalau Adam Smith mencetuskan gagasan "*division of labor*", Taylor mengetahui gagasan "*division of work*". Motivasinya bukan menaikkan efisiensi (Adam Smith) demi menaikkan keberuntungan pemilik modal, tetapi menaikkan produktivitas demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Hal inilah yang kini disebut Revolusi Produktivitas. Melalui cara bekerja seperti ini kemudian ternyata pekerja tidak lagi merupakan proletar dari kelas pendapatan rendah tetapi memang terangkat menjadi anggota kelas pendapatan menengah yang relatif makmur, salah satu penyangga utama (yang berupa manusia) dari demokrasi Amerika.

Setelah berlangsung selama lebih kurang 70 tahun, makna dan fungsi pengetahuan bergeser lagi, yang berarti tampilnya fase ketiga dari pengkaitan makna dan fungsi pengetahuan pada *doing*, pada perbuatan. Selama fase ini, yang berawal sejak akhir Perang Dunia II, makna dan fungsi tersebut ditautkan pada penerapannya pada pengetahuan itu sendiri. Memasukkan pengetahuan guna mengetahui bagaimana pengetahuan yang sudah ada dapat diterapkan sebaik-baiknya agar lebih berhasil lagi adalah apa yang sebenarnya disebut manajemen. Dalam perkembangan selanjutnya pengetahuan diterapkan juga secara sistematis dan sadar guna untuk menetapkan pengetahuan baru apa yang diperlukan, apakah ia layak dan apa yang harus dilakukan agar pengetahuan menjadi efektif. Dengan perkataan lain, pengetahuan diterapkan demi inovasi yang sistematis. Hal ini telah, antara lain, merambah jalan tumbuh dan berkembangnya pengetahuan informatika serta peralatan teknologi canggih seperti komputer dan lain-lain.

Transformasi ketiga ini dalam dinamika pengetahuan dapat disebut kiranya sebagai **Revolusi Manajemen**. Sama halnya dengan kedua revolusi sebelumnya yang telah digerakkan oleh dinamika makna pengetahuan yaitu pengetahuan yang diterapkan pada peralatan, pada proses dan pada produk (revolusi industri) dan pada kerja manusia (revolusi produktivitas) revolusi manajemen ini pun menjalar ke seluruh dunia. Untuk menjadi dominan dan mendunia, revolusi industri memerlukan waktu seratus tahun, dari pertengahan Abad XVIII hingga pertengahan Abad XIX. Untuk menjadi dominan dan mendunia, revolusi produktivitas memerlukan waktu kira-kira tujuh puluh tahun, dari tahun 1880 hingga akhir Perang Dunia II. Untuk menjadi dominan dan mendunia, revolusi manajemen memerlukan waktu kurang dari lima puluh tahun, dari tahun 1945 hingga tahun 1990.

I.3. Transformasi Masyarakat

Berkat dinamika dari makna dan fungsi pengetahuan ilmiah ini, setiap seratus tahun dalam sejarah dunia Barat terjadi suatu transformasi yang jelas memisahkan keadaan sebelum dan sesudah transformasi yang bersangkutan. Artinya, sewaktu berlangsung transformasi selama beberapa dekade terjadilah perubahan-perubahan yang mendasar dan mendalam, dalam pandangan hidup, dalam nilai-nilai dasar yang dihayati, dalam struktur sosial dan politik, dalam seni dan dalam lembaga-lembaga kehidupan. Begitu rupa sehingga seusai perlangsungan transformasi seolah-olah lahir suatu dunia baru. Anak-anak yang lahir dalam suasana baru itu tidak dapat membayangkan bagaimana gambaran dunia di mana lahir dan hidup kakek neneknya dan di mana lahir orang tuanya sendiri.

Salah satu transformasi itu adalah yang terjadi di Abad XIII ketika dunia Eropa menjadi terpusat di kota-kota yang baru tumbuh, dengan tampilnya gilda-gilda sebagai kelompok sosial dominan dan

dengan ramainya kembali perdagangan jarak jauh; dengan lahirnya arsitektur gaya Gotik; dengan pergeseran ke Aristoteles sebagai sumber kebijaksanaan; dengan berdirinya universitas-universitas di kota sebagai pusat-pusat kebudayaan menggantikan biara-biara terpencil di pedesaan, dengan pembentukan ordo-ordo baru urban Dominikan dan Fransiskan yang tampil sebagai penyiara agama, keterpelajaran dan spiritualitas; dan dengan pergeseran dari bahasa Latin ke bahasa lokal dan penciptaan kesusastraan Eropa oleh Dante.

Dua ratus tahun kemudian menyusul transformasi berikutnya, yang terjadi selama enam puluh tahun antara invensi alat mencetak dari Johannes Gutenberg di tahun 1455 dengan reformasi Protestan oleh Martin Luther di tahun 1517. Inilah dekade-dekade perkembangan **Renaissance**, yang memuncak di antara tahun 1470 dan 1500 di Florensia dan Venesia; penemuan kembali zaman antik; penemuan benua Amerika oleh Eropa; pembentukan infanteri Spanyol, yaitu angkatan bersenjata tetap (*standing army*) pertama sejak keberadaan legiun Romawi; penemuan kembali anatomi dan penelitian ilmiah; dengan adopsi angka-angka Arab di dunia Barat.

Transformasi berikutnya lagi mulai di tahun 1776 tahun Revolusi **Amerika**, mesin uap yang disempurnakan dari James Watt dan penerbitan buku "***The Wealth of Nations***" dari Adam Smith. Peristiwa penting ini berakhir hampir 40 tahun kemudian di Waterloo yaitu jangka waktu di mana lahir berbagai "isme" modern. Kapitalisme, Komunisme dan Revolusi Industri lahir selama dekade-dekade tersebut. Di tahun-tahun itu pula berdiri universitas gaya baru di Berlin (1809) dan pelaksanaan "*universal schooling*". Selama jangka waktu ini pula lahir dan berkembang peradaban baru Eropa.

Periode di mana kita hidup sekarang, dua ratus tahun sesudah transformasi tersebut di atas, adalah juga suatu transformasi. Namun kali ini transformasi yang sedang berjalan ini tidak terbatas pada masyarakat dan sejarah Barat. Memang, perubahan-perubahan fundamental sekarang ini bukan lagi merupakan sejarah Barat, tidak lagi

hanya merupakan peradaban Barat. Yang ada adalah sejarah dunia dan sejarah peradaban manusia di dunia, tetapi kedua-duanya jelas “*westernized*”. Masa depan yang dibina oleh transformasi ini adalah zaman ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dari abad XXI.

Masa depan ini mungkin bisa disebut **Pasca Barat**. Ia bisa saja **anti Barat** tetapi pasti **tidak non Barat**. Betapa tidak. Peradaban materialnya dan pengetahuan-pengetahuannya bersendikan nilai Barat: pengetahuan ilmiah Barat; peralatan dan teknologi Barat; produksi Barat; ekonomika Barat; gaya pembiayaan dan perbankan Barat. Tidak satu pun dari faktor-faktor yang disebut ini dapat “bekerja” kecuali bila berdasarkan atas pemahaman dan penerimaan gagasan (nilai) Barat dan nyaris keseluruhan tradisi bernalar dan berpenalaran (bernilai) Barat. Tidak hanya ekonomi menjadi ekonomi pengetahuan (*knowledge economy*), masyarakatpun lama kelamaan juga menjadi masyarakat pengetahuan (*knowledge society*) di mana peranan persekolahan (pendidikan formal), menjadi penting dan sentral dalam penyebaran semangat ilmiah.

Penggerak utama dari transformasi ini adalah “*American G.I. Bill of Rights*” sesudah Perang Dunia II dan penjelmaan Jepang sebagai suatu “*economic power*”, juga sesudah perang besar tersebut. Berkat undang-undang keveteranan Amerika ini ribuan warga negara Amerika yang cerdas mampu menempuh pendidikan tinggi yang dalam keadaan “normal” tidak dapat terjadi karena ketidakmampuan menanggung biayanya. Setelah lulus tidak sedikit dari mereka, termasuk pemegang gelar Ph.D’s, pergi ke negara-negara terbelakang melaksanakan bantuan Amerika, termasuk membangun jenjang pendidikan tinggi di mana dipupuk benih-benih keilmuan. Jepang tumbuh menjadi negara industrial termaju semata-mata berkat penerapan yang konsekuen dan sistematik dari ilmu pengetahuan dalam kegiatan-kegiatan produktif.

Dengan perbuatan Jepang itu terbukti bahwa sekarang ini kemakmuran tidak lagi didasarkan pada luasnya tanah, yang adalah

satu faktor horisontal terbatas yang dahulu telah mencetuskan peperangan-peperangan tetapi semata-mata bersumberkan ilmu pengetahuan, yang adalah satu faktor vertikal tidak terbatas, yang memungkinkan adanya "*penetration pacifique*". Bala tentara Jepang ketika bergerak ke Selatan di awal tahun 40-an tidak pernah berhasil memasuki wilayah Australia. Namun produk ilmu pengetahuan dan teknologi Nippon, hasil kerja "*knowledge workers*" Jepang, kini tanpa bayonet, tambur dan terompet, tidak hanya "menguasai" (ekonomi) Australia, tetapi praktis setiap penjuru bumi yang didiami manusia. Telusurilah Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Thamrin yang bergengsi di Jakarta. Kita tidak perlu terlalu cerdas untuk bisa mengetahui betapa mantapnya kehadiran IPTEK Jepang ini.

I.4. Pengilmuan Budaya dan Ekonomi

Berkat perkembangan akumulatif pengetahuan ilmiah, pengetahuan formal lama-kelamaan diakui sebagai satu-satunya sumber yang "*meaningfull*" dan hal inilah yang kiranya membuat Abad XXI menjadi zamannya IPTEK. Sekarang saja, di pengujung Abad XX, pengetahuan ilmiah sudah semakin menentukan sebagai "*the key formal resource*" dan "*the key economic resource*". Dengan demikian ekonomi faktor produksi menjadi ekonomi pengetahuan dan ekonomi internasional menjadi ekonomi dunia (*world economy*) yang mengglobal, sementara masa kapitalis menjadi pasca kapitalis. Artinya, faktor-faktor produksi tradisional-tanah, tenaga kerja, sumber alam dan modal tidak hilang sama sekali, tetapi peran ekonominya masing-masing menjadi nomor dua. Semua faktor itu dapat diperoleh dengan mudah asalkan ada pengetahuan ilmiah. Pengetahuan formal bermakna kegunaan (*utility*), pengetahuan formal menjadi alat (*means*) untuk mendapatkan hasil-hasil sosial dan ekonomi.

Dalam ekonomi pengetahuan (*knowledge economy*) ini kegiatan-kegiatan sentral pencipta kemakmuran bukan lagi alokasi modal,

tenaga kerja, tanah dan bahan-bahan alamiah pada penggunaan-penggunaan produktif. Nilai dan nilai lebih dewasa ini diciptakan oleh produktivitas dan inovasi dan kedua hal tersebut adalah tidak lain daripada penerapan pengetahuan ilmiah pada usaha manusia. Dengan perkataan lain, kemakmuran suatu bangsa bukan lagi fungsi dari satu faktor yang horisontal terbatas, yaitu tanah (wilayah), seperti telah disinggung di atas tadi, tetapi ditentukan oleh suatu faktor yang vertikal tidak terbatas, yaitu pengetahuan ilmiah, yang secara alamiah berpembawaan (bersifat) universal. Maka itu hubungan ekonomi antara bangsa-bangsa, yang lazimnya dahulu disebut ekonomi internasional, kini menjadi ekonomi dunia yang mengglobal. Maka itu pula kini dimungkinkan adanya negara-kota (*city-state*), tanpa memiliki wilayah nasional yang berarti, namun rakyatnya hidup dalam kemakmuran yang relatif tinggi, berkat IPTEK yang mereka kuasai dan terapkan dalam ekonomi nasionalnya.

Dalam ekonomi pengetahuan ini kelompok sosial terkemuka (*leading social groups*) adalah pekerja pengetahuan atau pekerja otak (*knowledge workers*), yaitu eksekutif yang tahu bagaimana mengalokasikan pengetahuan pada kegunaan produktif, orang-orang berkeahlian dengan modal pengetahuan, seperti *knowledge professionals* dan *knowledge employees*. Maka dalam ekonomi pengetahuan di zaman IPTEK dan di masa pasca kapitalis ini, kelompok pekerja bukan lagi proletar yang bermodalkan keterampilan tangan (*manual workers*) dengan pengetahuan formal minim, tetapi pekerja bermodalkan keterampilan otak dan pekerja jasa penunjang (*knowledge workers*).

Namun masa pasca kapitalis ini bukan berarti anti kapitalis dan non kapitalis. Sebab lembaga-lembaga kapitalisme, seperti pasar dan bank, tetap ada, tetapi pusat gravitasi dari masa pasca kapitalis ini berbeda dengan yang dahulu berlaku di masa kapitalis, baik strukturnya, dinamika sosial dan ekonominya, kelas sosialnya, nilai-nilainya, maupun masalah-masalah politiknya. Perusahaan-perusa-

haan tetap menjual saham-sahamnya di bursa, namun fokus perhatian yang mendorong penabung dan spekulan membeli saham sudah lain daripada di masa pra ekonomi pengetahuan. Dewasa ini para pemilik saham "*Microsoft Corp.*", misalnya, tidak lagi memperdulikan aset fisik perusahaan seperti gedung dan *plants*, tetapi pikiran "*scientific researchers*" dan "*microsoft engineers*" yang dimiliki perusahaan, yang sanggup menemukan solusi yang positif dan konkrit terhadap suatu masalah produktif dan/atau mampu menghasilkan gagasan serta mengubah gagasan menjadi keuntungan. Pembeli-pembeli saham terbesar bukan lagi perorangan borjuis kapitalis tetapi investor institusional berupa lembaga pengelola dana pensiun pekerja/pegawai, lembaga asuransi, finansial dan bank, yang pada umumnya dikendalikan dan diurus oleh pekerja-pekerja otak juga.

II. Dipengapakan Kebudayaan Kita ?

II.1. Pengembangan Khusus Kebudayaan

Dewasa ini setiap orang terdidik kiranya telah menyadari bahwa abad yang empat tahun lagi akan kita masuki, Abad XXI, adalah zaman ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sekarang saja sudah jelas terlihat betapa satu nilai, yaitu ilmu pengetahuan yang kemudian melahirkan teknologi, sudah memegang peranan yang semakin besar dan semakin menentukan dalam perkembangan budaya manusia di dunia. Dengan begitu nilai yang *intangible* ini semakin menggeser ke samping peranan yang dahulu dipegang oleh seni dalam kemajuan budaya, dalam pemberdayaan budaya dan manusia-manusia penghayatnya. Kalau dahulu dalam melaksanakan keyakinan religiusnya manusia banyak sekali melibatkan seni, kini untuk kegiatan yang sama ilmu pengetahuan (dan teknologi) juga telah meminggirkan seni tersebut. Berhubung dengan itu kelompok-kelompok manusia (negara, bangsa, masyarakat) yang belum mampu menguasainya

sebagai bagian yang integral dari sistem nilai (kebudayaan) yang dihayatinya, pasti akan sulit sekali dapat *survive* dalam kemandirian budayanya, apalagi kemandirian di bidang politik, ekonomi., militer dan diplomasi.

Maka perkembangan zaman menurut kita, manusia-manusia Indonesia, untuk bisa juga menguasai ilmu pengetahuan tersebut, demi kelangsungan kemerdekaan nasional yang sudah berhasil direbut kembali dengan harga yang begitu mahal. Namun bila sekarang kita renungkan tuntutan zaman ini akan segera terasa betapa beratnya usaha penguasaan pengetahuan ilmiah tersebut. Berat karena kita harus bekerja dan belajar ekstra keras berhubung nilai yang satu ini betul-betul “asing” dalam keseluruhan sistem nilai asli kita dan karena itu, untuk menguasainya, kita harus mampu menciptakan tradisi baru dalam berbudaya dan kemudian berdisiplin untuk melaksanakan tradisi itu. Betapa tidak. Di dalam sistem nilai warisan nenek moyang kita, yang samar-samar kehadirannya, dan kalaupun ada secara embrional, justru adalah ilmu pengetahuan tersebut dan, berkaitan erat dengan itu, semangat ilmiah (*scientific spirit*).

Maka diperlukanlah suatu aksi pengembangan kebudayaan yang khusus bertujuan mengembangkan nilai-nilai keilmuan dalam budaya kita. Pelaksanaan kebijakan ini perlu diawali dengan redefinisi dari berbagai pengertian kerja yang harus dipegang terus menerus secara konsisten selama proses keilmuan budaya nasional ini.

Kebudayaan pertama bukan lagi tidak semata-mata pembentukan manusia individual melalui pengenalan dan pelaksanaan kesenian, dilengkapi dengan penghayatan karya-karya kesusastraan masa lalu. Renungan mengenai berbagai jenis dan bentuk seni serta pemahaman dunia imajinasi tersebut memang tergolong budaya, tetapi kebudayaan itu sendiri melebihi semua yang disebut tadi. Di Abad XXI, di zaman IPTEK ini, kebudayaan harus diartikan sekaligus sebagai suatu pengetahuan, suatu pilihan hidup dan suatu praktek komunikasi, tiga nilai (gagasan) pokok krusial.

Kebudayaan sebagai pengetahuan karena ia jelas merupakan perbendaharaan dari apa-apa yang diketahui mengenai masa lampau dan masa kini, mengenai apa-apa yang pernah dan sedang diciptakan. Berkat perbendaharaan yang tidak habis-habisnya inilah orang mampu memahami dengan lebih baik hubungannya dengan diri sendiri, dengan alam dan dengan kegiatan-kegiatan manusia, bahkan dengan Sang Pencipta. Dalam artian ini kebudayaan tumbuh dari pendidikan dan informasi. Kebudayaan sebagai pilihan hidup karena penghayatannya membantu orang untuk meninjau sikapnya terhadap diri sendiri dan terhadap dunia, untuk membuat pilihan dengan kebebasan yang semakin mantap. Dalam artian ini, kebudayaan yang dihayati menuntun manusia ke arah suatu hierarki baru dari syarat-syarat tentang pengaturan hidup individual atau kolektif. Kebudayaan sebagai praktek komunikasi karena manusia semakin lama semakin butuh mengutarakan apa-apa yang diketahui, dipikir atau dirasakannya kepada siapa saja. Dan berkat ilmu pengetahuan pula makhluk manusia kini memasuki suatu era baru, **revolusi komunikasi**: membangun jaringan amat luas dari sistem komunikasi informatif dengan memanfaatkan spektrum frekuensi radio dan orbit geostasioner berkat kemajuan teknik dan jasa telekomunikasi yang dimungkinkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan hingga merupakan bagian vital dalam kehidupan dan keselamatan dari semua yang ada di planet biru kita ini.

Aksi pengembangan khusus kebudayaan dalam arti baru yang luas ini mau tidak mau harus dipercayakan pada pendidikan, terutama pendidikan formal. Bukankah fungsi alamiah pendidikan adalah memberdayakan manusia menjadi tidak hanya pendukung sistem nilai yang berlaku tetapi lebih-lebih menjadi pengolahnya hingga sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu satu kebudayaan masa depan, kebudayaan zaman IPTEK di Abad XXI. Untuk keperluan ini pendidikan harus diperlakukan sebagai bagian dari kebudayaan dan bukan sebaliknya. Bila demikian untuknya perlu pula suatu redefinisi. Maka

pendidikan adalah satu proses belajar-mengajar yang membiasakan orang sedini mungkin untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai terpuji, dikehendaki dan berguna bagi kehidupan dan perkembangan diri pribadi, masyarakat dan negara bangsa.

Hidup kita ini tidaklah berupa sesuatu yang serba jadi, siap untuk dipakai. Kehidupan manusia bergerak dari satu saat ke saat lainnya. Pada setiap saat kita harus menilai, menetapkan pendirian, mengambil keputusan mengenai langkah selanjutnya yang harus diambil. Sebab, hidup bukanlah merupakan suatu misteri untuk sekedar dilakoni tetapi suatu masalah yang harus dipecahkan. Memang, kehidupan manusia merupakan rangkaian dari masalah-masalah. Supaya dapat memutuskan pada satu saat tentang apa yang harus dilakukannya pada saat berikutnya, manusia terdorong untuk membuat sesuatu penilaian (*judgment*), sesuatu rencana, betapapun sederhana rencana itu. Terdorong untuk membuat rencana bukanlah karena dipaksa untuk membuat rencana. Tidak ada satu pun langkah kehidupan yang diambil tanpa referensi pada sesuatu nilai. Dan nilai ini, lebih-lebih demi *survival* di abad mendatang, adalah ilmu pengetahuan.

Bila demikian, demi efektivitas misi proses belajar-mengajar, perlakuan pendidikan terhadap ilmu pengetahuan juga harus diredefinisi. Dalam proses ini, lebih-lebih di jenjang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan harus diperlakukan agar dihayati secara lengkap, yaitu ilmu pengetahuan dalam artian produk dan proses dan masyarakat.

Ilmu pengetahuan sebagai **produk**, adalah pengetahuan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya oleh masyarakat ilmuwan. Jadi dalam dirinya pengetahuan ilmiah terbatas pada kenyataan-kenyataan yang mengandung kemungkinan untuk diteliti, diuji ataupun dibantah oleh seseorang. Ilmu pengetahuan sebagai proses (penelitian, penyidikan, percobaan), adalah kegiatan kemasyarakatan yang

dilakukan demi penemuan dan pemahaman dunia alamiah sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana yang dikehendaki. Metode yang khas dipakai dalam proses ini adalah analisis rasional, abstrak, “obyektif”, sejauh mungkin bersifat *impersonal*, dari masalah-masalah yang didasarkan pada percobaan dan *observable data*. Pengetahuan ilmiah dalam artian proses inilah yang disebut oleh Thomas S. Kuhn *normal science*. Ilmu pengetahuan sebagai **masyarakat** adalah suatu community di mana tindak-tanduk, perilaku dan sikap serta tutur kata para warganya diatur oleh empat ketentuan, yaitu universalisme, komunalisme, *disinterestedness* dan skeptisisme yang teratur. Universalisme berarti bahwa ilmu pengetahuan bebas dari warna kulit, ras, keturunan maupun keyakinan keagamaan. Komunalisme berarti bahwa ilmu pengetahuan merupakan *public knowledge* (pengetahuan bersama, milik masyarakat). *Disinterestedness* berarti ilmu pengetahuan bukan propaganda, pempropagandaan diri pribadi. Skeptisisme yang teratur berarti keinginan mengetahui dan mempertanyakan berdasarkan nalar dan keteraturan berpikir.

Demi efektivitas misi proses belajar-mengajar, lingkungan pendidikan juga harus ditata kembali. Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan lainnya dari manusia, pendidikan terjadi tidak dalam suatu kevakuman. Maka perlu dibina suatu lingkungan pendidikan yang positif-kondusif dan bukan negatif-destruktif bagi pengembangan apa-apa yang dicita-citakan oleh pendidikan ini. Pengertian lingkungan ini hendaknya tidak ditanggapi semata-mata dalam artian fisik-lokasi, tetapi lebih banyak dalam artian suasana kondisional dari proses belajar-mengajar di lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Mulai jenjang SMTA ke bawah lingkungan sekolah perlu dibina menjadi pusat kebudayaan, pemusatan dari nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai terpuji dan dipujikan. Pula pembinaan ini dilakukan melalui serangkaian program aksi untuk menjamin adanya pemasyarakatan kedua bagi anak didik. Artinya, sekolah adalah tempat di mana anak-anak untuk pertama kalinya bertemu dan berkenalan,

dengan skala yang cukup besar, baik organisasi formal yang mencerminkan kedewasaan hidup maupun bentuk, jenis dan intensitas hubungan-hubungan yang jauh melampaui apa-apa yang selama ini dialaminya di dalam keluarga dan kelompok kecil tetangga serta kenalannya. Sekolah adalah tempat dimana anak juga mempelajari dan diajarkan nilai-nilai yang dituntut oleh zamannya guna dapat melaksanakan perannya kelak sebagai orang dewasa terdidik.

Di atas SMTA, di jenjang pendidikan tinggi atau pendidikan universitas, lingkungan pendidikan (kampus) perlu dibina menjadi suatu **masyarakat ilmiah** dalam artian disebut di atas tadi. Pola pembinaan ini, selain dilakukan dengan berusaha sebaik mungkin semua ketentuan yang disyariatkan oleh suatu masyarakat ilmiah, juga melalui serangkaian aksi program yang dimaksudkan untuk mengembangkan semangat ilmiah yang dasar-dasarnya sudah diperkenalkan di lingkungan pusat kebudayaannya sekolah-sekolah pada jenjang SMTA ke bawah. Dengan demikian disempurnakanlah citra orang terdidik di zaman IPTEK yang adalah juga **era komunikasi**, yaitu manusia yang mampu mengubah (mengolah/mengembangkan) informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan menjadi kebijaksanaan hidup, baik kebijaksanaan praktis maupun teoretis.

Pembinaan citra tersebut dilakukan melalui berbagai program persuasif ke arah pembentukan **manusia penganalisis** (*man of analysis*) pada diri mahasiswa yang sebenarnya sudah dimulai sejak tingkat pendidikan menengah seperti, misalnya lomba karya penelitian remaja, penulisan ilmiah, pengulasan buku, riset ke pustakaan, dan lain-lain. Manusia penganalisis yang tekun berusaha mengembangkan dalam dirinya semangat ilmiah ini sering diejek oleh aktivis politik kampus sebagai “kutu buku” atau “anak mama” yang tidak peka terhadap masalah-masalah masyarakat. Kalau kita semua mengakui bahwa umat manusia akan memasuki zaman IPTEK dan Era Informasi di Abad XXI dan bahwa IPTEK sesuatu masyarakat bangsa

makin memainkan peran penting dalam menentukan kedudukan peran masyarakat bangsa tersebut di kalangan masyarakat bangsa-bangsa, maka sebenarnya yang peka terhadap masalah-masalah masyarakat adalah justru mahasiswa manusia penganalisis ini dan bukan sekali-kali mahasiswa aktivis politik kampus yang hingar-bingar itu.

Barat menjelma menjadi pemimpin dunia di antara tahun 1500 dan 1650 untuk sebagian besar karena ia telah mereorganisasi perguruannya di seputar teknologi baru dari buku-buku tercetak. Padahal sewaktu ia dahulu masih tetap berselimutkan ketidaktahuan nalar Timur sudah menggeliat. Di Mesir sudah ada lembaga pendidikan tinggi hukum Islam lama sebelum berdiri Fakultas Hukum dari Universitas tertua Eropa di Bologna. Di Cina ilmu pastinya sudah lanjut ratusan tahun sebelum pengetahuan ini ditemukan di Babilonia dan kemudian di Yunani Purba. Sedangkan kebudayaan India Purba telah mengenal banyak bentuk tindakan keilmuan praktis. Bahkan dua ribu tahun yang lalu pengetahuan medis telah diajarkan di persekolahan kuil-kuil Budha di Thailand. Namun keengganan Cina dan Islam menata kembali perguruan mereka di seputar buku-buku tercetak menjadi penyebab utama kemerosotan mereka dan akhirnya ketidakberdayaan mereka menghadapi Barat. Kedua entitas kebudayaan ini memang sudah mengenal percetakan, bahkan Cina sudah sejak berabad-abad, tetapi mereka sama-sama menjauhkan buku tercetak dari sekolah; mereka sama-sama menolak buku tersebut sebagai alat belajar-mengajar.

Sebelum tahun 1550 Kerajaan Cina dan Empirium Ottoman penjelmaan politis dari Islam terus menanjak hingga merupakan “*superpowers*” di setiap arena kehidupan: politik, militer, ekonomi, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Mulai tahun tersebut kedua penjelmaan budaya Timur ini mulai mandek. Kedua-duanya mengambil sikap “defensif”, menjadi “*inward looking*”, mengalami stagnasi di mana-mana. Pendidikan formal di kedua lingkungan budaya tersebut tetap berpegang pada kebiasaan menghafal dan resitasi. Kelihatannya ada

kekhawatiran bahwa kehadiran buku-buku tercetak akan merongrong kewibawaan para ulama dan cendekiawan Konghucu justru karena murid-murid akan terdorong untuk membaca sendiri. Para penghayat ajaran Konghucu itu bahkan sangat menitikberatkan kaligrafi berhubung penguasaan seni tulisan ini dianggap sebagai mutu kepe-mimpinan.

Maka bila di Barat perguruan diperlakukan sebagai lembaga progresif dan motor kemajuan di semua bidang kebudayaan pada umumnya, seni, sastra dan ilmu pengetahuan pada khususnya dan ekonomi, politik serta militer, di kedua entitas budaya Timur yang pernah berjaya, Cina dan Islam, perguruan dibiarkan menjadi penghambat kemajuan. Kesimpulan lain yang dapat diperoleh dari revolusi belajar-mengajar Barat ini adalah bahwa teknologi itu sendiri kurang berarti dibandingkan dengan perubahan-perubahan yang dicetuskan-nya dalam substansi, isi dan fokus dari keterpelajaran, perguruan dan kelembagaan sekolah-sekolah. Perubahan-perubahan dalam substansi, isi dan fokus inilah yang kiranya menentukan. Semua ini efektif walaupun hanya ada suatu perubahan minimum dalam teknologi belajar dan mengajar.

Menetapkan kaitan yang erat antara kebudayaan dan pendidikan dan mengakui pentingnya kehadiran nilai-nilai keilmuan dalam budaya kita berarti aksi pengembangan khusus kebudayaan meliputi pula pembangunan sarana dan lembaga didaktis seperti museum, perpustakaan, baik yang menetap maupun yang berkeliling, pusat pengenalan dan peragaan IPTEK, kebun percontohan pertanian modern, akuarium, klub olahraga, dan lain-lain.

Sumbangan museum dan pusat kinerja ilmu pengetahuan sangat penting bagi proses modernisasi maupun transformasi kebudayaan ke arah peradaban pada umumnya dan bagi pemupukan suatu budaya keilmuan yang mendasar pada khususnya. Pusat seperti ini dapat berupa lembaga Matematika di mana publik dapat berkenalan dengan metode analisa modern, turut serta dalam aktivitas laboratorium,

menghadiri ceramah dan demonstrasi yang menampilkan penggunaan yang semakin meningkat dari matematika di segala bidang kehidupan. Ia dapat pula berupa Lembaga penemuan di mana publik diperkenalkan dengan proses penelitian dasar yang menghasilkan ilmu pengetahuan baru ataupun benda-benda yang selama ini digunakan manusia sehari-hari. Ia dapat pula berupa Lembaga Teknologi yang dapat membantu publik untuk memahami suatu cara berpikir dan cara hidup yang berkaitan dengan teknologi yang tidak dapat kita elakkan tetapi yang harus kita manfaatkan demi kesejahteraan masyarakat sebagai keseluruhan. Di antara pembangunan perpustakaan perhatian secukupnya harus diberikan pada pengadaan perpustakaan surau dan perpustakaan keliling. Kedua jenis perpustakaan ini disiapkan untuk mendekatkan buku pada kelompok dan lapisan masyarakat yang karena keadaan kehidupan dan pendidikan formalnya serba kurang, tidak tahu manfaat buku dan atau tidak mengetahui kegunaan membaca walaupun membaca sudah merupakan perintah ilahiah.

Dengan perlakuan ilmu pengetahuan dalam ketiga artian itu dan pemantapan kampus sebagai masyarakat ilmiah serta kehadiran aneka ragam lembaga didaktif di masyarakat yang menunjang usaha pengenalan dan pengembangan nilai-nilai keilmuan dalam budaya kita, klasifikasi ilmu pengetahuan dalam **“ilmu pengetahuan dasar”** (*basic sciences*) dan **“ilmu pengetahuan terapan”** (*applied sciences*) dalam skala prioritas penetapan program studi dan penelitian sudah tidak relevan lagi, lebih-lebih bila penetapan skala prioritas ini dikaitkan pada kebutuhan usaha-usaha pembangunan. Bahkan distingsi ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini kiranya sulit untuk dipertahankan, paling sedikitnya tidak dalam artian yang ketat. Semasa ilmu pengetahuan akademik menguasai produksi pengetahuan, sebelum Perang Dunia II, memang ada distingsi yang jelas antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan akademik adalah pengetahuan ilmiah dalam arti yang ketat, yaitu kegiatan yang bertujuan memperoleh pengetahuan obyektif tentang alam dan tidak mengacu

pada teknologi, yaitu kegiatan-kegiatan yang berguna bagi beberapa sektor sosial.

Sebaliknya kegiatan-kegiatan pokok ilmiah sesudah perang besar itu misalnya, proyek fusi nuklir dan program satelit banyak sekali dibiayai dan ditetapkan oleh para sponsor, baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta, yang sama sekali berada di luar masyarakat ilmiah dan cenderung untuk kurang punya perhatian atau respek pada ilmu pengetahuan "*for its own sake*", hingga dalam pikiran mereka tidak ada distingsi yang tajam antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka itu dalam periode sesudah perang ini ilmu pengetahuan dan teknologi begitu erat terjalin satu dengan lainnya hingga terminologi distingsif tersebut menjadi tidak berarti.

Ilmu pengetahuan dan teknologi pasca perang merupakan bidang di mana beradu kepentingan dari berbagai sektor kemasyarakatan. Kini kelihatan jelas sekali betapa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang menurut dinamika hubungan kerjasama dan konflik antara tiga sektor: akademik, pemerintah dan swasta. Masih ada satu sektor lagi, jadi yang keempat, yaitu sektor penduduk (kewarganegaraan), yang seringkali dianggap "*outsider*" dalam daya upaya keilmuan dan keteknologian. Padahal kepentingan penduduk pada umumnya perlu diperhitungkan walaupun tidak langsung memberikan keuntungan finansial, dan karenanya perlu ada partisipasi warga negara dalam "*assessment*" ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka penetapan skala prioritas keilmuan dan keteknologian, baik bagi penetapan program studi maupun penelitian, perlu dilakukan berdasarkan **pendekatan empat sektor kemasyarakatan**: akademik, pemerintah, swasta dan penduduk. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada para "*assessors*" ketimbang pada "*performers*" ilmu pengetahuan di mana pun mereka berkarya. Sebab akhirnya, sekarang ini, *assessment* dari para *assessors* itulah yang memutuskan jenis pengetahuan mana dan teknologi macam apa yang perlu diberi prioritas untuk dikembangkan.

Pertama, **ilmu pengetahuan sektor akademik** atau disingkat **ilmu pengetahuan akademik (IPA)**. Nilai budaya yang satu ini adalah hasil kinerja ilmiah *“talented individuals”* di lingkungan masyarakat ilmiah tanpa referensi ke sektor-sektor kemasyarakatan lainnya dan nilai serta diakui oleh sesama ilmuwan. IPA adalah satu bentuk ilmu pengetahuan yang didasarkan atas asas keingintahuan, martabat akademis pribadi dan/atau keterbukaan serta pembeberan hasil penelitian yang ditemukan pada masyarakat ilmiah. Di lingkungan masyarakat ilmiah para warganya mengetengahkan penelitian mereka guna dibahas secara kritis oleh sesamanya. Maka walaupun di bidang teknologi, misalnya, bila seorang guru besar dalam *engineering* membeberkan karyanya dalam sebuah jurnal akademis, dia seharusnya dianggap sebagai seorang ilmuwan akademik dan karyanya itu diperlakukan sebagai suatu ilmu pengetahuan akademik tentang *engineering*. Mekanisme seperti inilah yang sejak Abad XVII telah menjamin dan memperkuat universitas dan okyektivitas ilmu pengetahuan modern. Jadi ilmuwan penghayat IPA di sektor akademik dibenarkan *“to promote scientific knowledge for its own sake, scientific knowledge as a self justifying, emotion free method possessing an objectivity that transcends secular interets”*. Kinerja seperti ini sebaiknya diberikan *“credit point”* tertinggi dalam kriteria kenaikan pangkat di bidang pendidikan formal.

Kedua, sektor pemerintah atau **ilmu pengetahuan sektor pemerintah** atau disingkat **ilmu pengetahuan pemerintah (IPP)**. Harus diakui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan sejak awal Abad XX tidak ditandai hanya oleh pertimbangan ilmuwan akademik. Kebijakan birokrat di sektor pemerintah semakin menentukan arah pokok kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Biasanya titik temu pemerintah dengan ilmuwan difokuskan terutama pada penelitian yang berkaitan dengan kebutuhan pertahanan dan peperangan. Kecenderungan ini jelas kelihatan pada Nazi-Jerman di tahun 30-an dan di Proyek Manhattan Amerika selama Perang Dunia II. Dewasa ini

di berbagai negara maju IPP dengan sadar dan sengaja dikembangkan dalam “*nationwide surveying of resources, the maintenance of national standards, the health care system and even industrial development.*” Kegiatan-kegiatan ilmiah yang menjurus ke arah pengembangan nilai budaya yang satu ini tidak jarang dikontrakkan pada dunia akademik, tetapi adakalanya dilaksanakan sendiri oleh pusat penelitian dan/atau laboratorium pemerintah di lingkungan berbagai departemen/kementerian yang bersangkutan. Maka itu pengetahuan ilmiah yang berkembang dan dikembangkan dengan tujuan tertentu dari pemerintah ini sebaiknya disebut “ilmu pengetahuan sektor pemerintah” atau “ilmu pengetahuan yang diupayakan di sektor pemerintah”.

Ketiga, sektor swasta atau **ilmu pengetahuan sektor swasta (IPS)**. Disebut demikian karena pengembangan nilai budaya yang satu ini dilakukan di sektor swasta oleh perusahaan-perusahaan swasta demi kenaikan laba usaha. Pada umumnya kegiatan seperti ini, disebut **R & D**, dilakukan berdasarkan asas-asas *entrepreneurial* yang berlaku di lingkungan produksi barang-barang industrial. Di Jepang pengetahuan ilmiah jenis ini diberi julukan “*mechatronics*”, gabungan dari “*mechanical engineering*” dan “*electronics*”. Di Amerika jumlah dana yang dipakai oleh laboratorium riset swasta selama periode antara Perang Dunia Pertama dan Kedua adalah sebesar dua per tiga dari keseluruhan pengeluaran nasional untuk R & D di negeri tersebut. Segera terlihat bahwa persamaan antara IPP dan IPS ini adalah bahwa dua-duanya berkembang berkat “*evaluation by sponsors*” dan bukan karena “*assessment by academic peers.*”

Keempat, adalah ilmu pengetahuan yang berkembang berkat kepedulian murni dari penduduk, terutama dari kalangan warga negara yang terdidik dan terpelajar. Maka dapatlah kiranya budaya yang satu ini disebut “**ilmu pengetahuan warga**” (**IPW**). Para warga ini adalah orang-orang yang tidak tergolong pada sektor akademik, pemerintah atau swasta seperti yang terpapar di atas tadi. Dengan

perkataan lain, orang-orang biasa yang tidak punya “*vested interest*” dalam kemajuan IPTEK dan tidak memperoleh keuntungan finansial dari situ. Walaupun mereka tidak langsung terlibat dalam kerja ilmiah dan teknologis, mereka pikir IPTEK ini seharusnya dikembangkan demi manfaat makhluk manusia. Dengan berlangsungnya “*technocratic state of affairs*” mereka menganggap perlu menegakkan kembali demokrasi dalam pengembangan dan pengamalan semangat ilmiah. Dalam memperjuangkan aspirasinya ini, adakalanya mereka bergerak sendirian, adakalanya berkelompok (LSM), dengan atau tanpa organisasi yang rapi. Yang mereka hadapi kadang-kadang pihak swasta, tidak jarang pihak pemerintah. Kesejahteraan umat manusia yang ingin diabdikan oleh kegiatan ilmiah penduduk ini beragam, mulai dari pelayanan kesehatan umum, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kelestarian flora dan fauna, penanggulangan kenakalan remaja, penyebaran perpustakaan umum hingga, akhir-akhir ini pencegahan serta pemberantasan penyakit HIV/AIDS, respek terhadap hak asasi manusia dan jaminan keselamatan dari bahaya pembangkit listrik tenaga nuklir. Berhubung dengan ini pengetahuan ilmiah yang berkembang berkat kegiatan para warga yang peduli ini kiranya dapat disebut juga ilmu pengetahuan jasa warga individual atau ilmu pengetahuan individual. “*Library science*”, misalnya lahir, tumbuh dan berkembang dalam rangka kegiatan ilmu pengetahuan berkat adanya kepedulian individual ini.

Demikianlah, fitrah dan karakteristik ilmu pengetahuan dan teknologi dari sesuatu bangsa sekarang ini ditentukan terutama oleh fitrah dan keseimbangan yang ada di antara pengetahuan ilmiah dari keempat sektor tersebut di atas antara IPA, IPP, IPS dan IPW bukan lagi oleh prioritas kategorial antara ilmu pengetahuan dasar (IPD) dan ilmu pengetahuan terapan (IPT). Kedua jenis pengetahuan ilmiah yang disebut terakhir ini dianggap sama penting dan urgensinya bagi perkembangan setiap jenis pengetahuan; walaupun ada perbedaan penanganannya hanyalah bersifat temporal. Demi adanya keseim-

bangan yang mantap, setiap sektor yang memproduksi ilmu pengetahuan punya tanggung jawab intelektual untuk mendefinisikan misinya secara gamblang dan terbuka. Sebab tujuan setiap kegiatan terorganisasi berada, sebagian atau seluruhnya, di luar dirinya sendiri. Maka itu setiap misi harus menyatakan siapa dan apa yang dilayannya dan demi tujuan apa. Dengan demikian para pelaku atau penanggungjawab dari sektor-sektor yang bersangkutan memperoleh gambaran yang jelas tentang posisi kepentingan masing-masing. Pembinaan jati diri “manusia penganalisis” selama periode pendidikan formal sangat membantu evaluasi dan diskusi di antara orang-orang yang terlibat dalam kepentingan keempat sektor tersebut di atas menjadi suatu dialog yang bermutu karena tidak didasarkan atas “*hear say*” atau “*wishful thinking*” semata-mata.

II.2. Pengembangan Umum Kebudayaan

Disetiap penjuru Tanah Air, di setiap saat melalui berbagai peristiwa ulah manusia, diselang seling gemuruh usaha pembangunan ekonomi, terlihat adanya kegelisahan. Kegelisahan permanen yang relatif merata ini adakalanya melonjak karena kejadian alam yang tak terduga sebelumnya. Di kalangan kaum terpelajar gejala ini menimbulkan kecemasan tentang tempat manusia Indonesia, sebagai subyek dan sebagai obyek, dalam mutasi besar-besaran dari masyarakat kita dewasa ini.

Masyarakat kita yang sedang giat membangun dengan sendirinya mengadakan perubahan-perubahan terus menerus dan hal ini berarti mengandung potensi permanen ketidakstabilan. Usaha mencapai laju pertumbuhan yang tetap tinggi menimbulkan transformasi yang semakin meningkat dari sarana dan lingkungan sosial ekonomi. Ia mendorong migrasi besar-besaran, terutama dari desa ke kota, dalam satu daerah, diantara daerah-daerah, dan dengan demikian menciptakan suatu massa mengambang dari orang-orang yang

terenggut dari akar budaya asalnya. Ia memang menggerakkan pembangunan pusat-pusat pemukiman, khususnya Ibukota, yang ternyata semakin sulit untuk dikuasai sebagai suatu lingkungan hidup, jadi lingkungan budaya, dari semakin besar bagian penduduk kita. Keadaan menjadi bertambah runyam berhubung akibat-akibat sampingan dari pertumbuhan yaitu kepenyuhsesakan, perubahan transformatif dan ketidaksetaraan (*inequalities*) yang diabaikan begitu saja oleh rencana-rencana induk pembangunan, berdampak relatif lebih berat secara alamiah di pusat-pusat pemukiman tersebut. Maka itu mutasi fisik dan psikologis yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh penduduk kota, baik pemukim baru maupun pemukim lama, lebih banyak sebagai suatu siksaan ketimbang sebagai suatu keberuntungan.

Kini di mana-mana orang semakin gencar dan terbuka mempertanyakan krisis ini dan di mana-mana orang mencari-cari jawabannya. Delapan belas tahun yang lalu masalah ini sudah saya ingatkan agar tidak diremehkan dan pemecahannya pun sudah saya kemukakan ketika itu dan kini saya ulangi: pengembangan kebudayaan yang sejalan dan setaraf dengan derap pembangunan ekonomi, bahkan dalam beberapa hal mengilmukan budaya, misalnya harus didahulukan demi kelancaran jalannya pertumbuhan yang diharapkan. Jalan serta peralatan yang terpikir ketika itu dan jalan serta peralatan yang kini tersedia untuk melaksanakannya mungkin sudah agak berbeda, namun tujuan pengembangan kebudayaan tersebut tetap sama dan jelas, yaitu perluasan akses pada kebudayaan yang akan dapat membantu manusia Indonesia lebih menguasai nasib mereka, baik secara individual maupun kolektif. Kebudayaan, memang, merupakan rispons pokok terhadap kegelisahan yang menyiksa penduduk, terutama yang menetap di pusat-pusat pemukiman baru.

Kini teknologi modern kelihatannya menawarkan cara-cara yang ampuh untuk perluasan akses pada kebudayaan tersebut berupa peralatan-peralatan baru komunikasi. Namun penggunaannya malah

memberikan lebih banyak persoalan ketimbang pemecahan bagi orang-orang yang berurusan dengan yang non-teknis atau yang nir-laba, tetapi dengan perkembangan kebudayaan. Jika keberhasilan dari penggunaan peralatan tadi ternyata serba terbatas, hal ini karena masalah-masalah yang harus mereka tangani itu tidak terletak semata-mata di tingkat teknologis, tetapi erat berkaitan dengan keseluruhan faktor politik, ekonomi dan sosial yang menentukan evolusi yang cepat dari masyarakat kita.

Di samping konsekuensi pembangunan ekonomi, yang dalam dirinya sudah cukup merisaukan bidang kebudayaan, semakin lama semakin menonjol tuntutan-tuntutan baru yang kiranya semakin menjelaskan urgensi pengembangan kebudayaan. Kenaikan tingkat hidup, yang merupakan hasil yang sangat diharapkan dari pertumbuhan, telah melahirkan tuntutan-tuntutan baru dari berbagai kategori penduduk terutama pemuda, wanita, sebagian pekerja yang mendambakan akses yang lebih luas pada kebudayaan, terutama pada nilai-nilai yang lebih halus. Jadi suatu rangkaian aksi kebudayaan memang perlu berperan menandingi akibat-akibat yang meresahkan dari pertumbuhan. Dengan perkataan lain, diperlukan adanya suatu pengembangan umum kebudayaan guna memungkinkan manusia Indonesia tidak hanya menjadi lebih kaya secara material tetapi juga lebih kaya secara spiritual.

Dalam rangka pengembangan umum ini, rangkaian aksi kebudayaan diarahkan pada hal-hal yang menyangkut hiburan, pemanfaatan teknik dari peralatan audio-visual dan kehidupan bermasyarakat urban. Ketiga sektor esensial ini dijadikan sasaran karena perubahan-perubahan transformatif yang digerakkan oleh pembangunan ekonomi beserta akibat-akibat sampingannya telah melahirkan tiga situasi yang mencemaskan dipandang dari sudut budaya, mengingat semua itu ternyata tidak mampu menguasai hubungan antara kerja dan kesantiaian, pertumbuhan kota dan penggunaan alat-alat audio-visual.

Dengan meningkatnya usaha pembangunan ekonomi, melalui sistem ban berjalan yang rasional demi kenaikan produktivitas dan efisiensi, semakin banyak pekerja tangan melakukan pekerjaan repetitif yang menjemukan, walaupun tidak mematikan keutuhan manusiawinya. Ritme mesin industrial mendikte gerak-gerik manusia, mengurangi keluangan inisiatifnya dan mendorongnya menjadi faktor yang pasif. Gejala pasivitas seperti ini mulai kelihatan juga pada para pelaksana elite pekerja otak yang diberi wewenang bertanggung jawab di berbagai lapisan jenjang teknostruktur.

Kalaupun ada waktu senggang untuk menghilangkan kejenuhan kerja, waktu bersantai ini umumnya diisi dengan hiburan ringan yang sama sekali tidak membantu perkembangan nilai-nilai budaya di dalam diri orang yang bersangkutan. Acapkali hiburan itu berupa tiga jenis pelarian. Pertama, secara pasif duduk di muka pesawat televisi atau mendengarkan radio yang menampilkan tontonan atau hiburan musik yang tidak kultural apalagi edukatif. Kedua, secara aktif melakukan aktivitas erotik yang hanya memuaskan naluri elementer yang tidak banyak berbeda dengan naluri hewani. Akhirnya, plesiran konsumtif begitu rupa hingga kesantiaian dijadikan *means* untuk mengkonsumsi lebih banyak, mengimbangi kerja yang telah dijadikan *means* untuk memperoleh tenaga beli lebih banyak. Berhubung dengan itu kebudayaan terpanggil untuk memanusiawikan mekanisme dan lingkungan kerja di satu pihak dan membudayakan kesantiaian di lain pihak. Integrasi kebudayaan ke dalam waktu kerja dan waktu bebas memang memerlukan biaya kolektif tetapi ia terang bukan satu aksi yang mewah sebab nilai-nilai kebudayaan inilah yang membedakan manusia dari hewan sedangkan kebudayaan merupakan data yang permanen dari kehidupan manusia dan di setiap tahap aktivitas manusia.

Sesudah kerja dan kesenggangan waktu, aksi kebudayaan diperlukan pula untuk memanusiawikan kehidupan urban, terutama kehidupan di kota-kota besar. Hal ini bukan berarti bahwa kehidupan di sektor pedesaan tidak perlu disentuh oleh usaha pengembangan kebudayaan. Namun urbanisasi tanpa urbanisme seperti yang telah

terjadi dewasa ini tidak hanya menurunkan mutu budaya dari kehidupan penduduk kota, termasuk para pendatang yang telah terputus dari akar budaya aslinya, tetapi juga mengasingkan manusia kota dari alam lingkungannya. Maka pada setiap kesempatan manusia kota ini melarikan diri dari rumah, bahkan dari kota kediamannya, yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung, karena dia lebih mencintai kendaraannya daripada tempat kediamannya. Dia memencilkan diri di dalam massa sebagai cara terbaik untuk mengelakkan komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya.

Guna mencegah akibat yang merugikan perkembangan manusia ini kota-kota perlu dijadikan forum kebudayaan, forum pertemuan dan komunikasi seni dan sastra, forum ilham dan penciptaan. Mulanya orang menaruh harapan besar pada kemajuan teknologi komunikasi audio-visual bagi penyebaran nilai-nilai budaya. Namun seringkali acara yang disajikan lebih banyak berupa tontonan dan hiburan yang secara esensial berupa konsumsi kebudayaan yang tidak mendidik apresiasi nilai budaya. Maka mengatur perkembangan kota sebagai pusat pemukiman dan rumah sebagai lingkungan hunian yang beradab seharusnya dijadikan bagian dari suatu aksi kebudayaan dan tidak hanya meruupakan bagian dari aksi teknis atau aksi administratif.

Selain memanfaatkan prasarana yang dibangun dalam rangka mengilmukan budaya seperti disebut di atas, perpustakaan, museum, dan lain-lain usaha dan aksi pengembangan umum kebudayaan ini meliputi pula pengadaan sarana bagi pagelaran dan pementasan kegiatan serta karya artistik baik klasik maupun modern, asing atau asli Indonesia seperti gedung-gedung teater, konser, pameran, fasilitas olahraga dan kecintaan/kelestarian alam, taman rekreatif, hutan kota, dan lain-lain. Sarana-sarana tersebut ini masih perlu dilengkapi dengan pengadaan pamong kebudayaan, yaitu orang-orang yang khusus dididik untuk berfungsi sebagai animator budaya.

Animasi yang sekaligus berarti pengenalan dan pengertian bukan sekedar berupa suatu penyajian baru dari karya kesenian.

Jangkauannya meliputi penampilan bidang kebudayaan sebagai keseluruhan. Animasi bukan sekedar satu pendidikan kebudayaan, tetapi jauh lebih luas daripada itu. Ia berusaha menyalakan api perhatian, memberikan pandangan tetapi tidak mendesakkan sesuatu kehendak. Ia harus dapat memberikan alasan-alasan perasaan apabila pikiran tidak dapat menjelaskannya kepada orang-orang yang berada di tingkat pengetahuan yang berbeda tetapi sama di dalam emosi terhadap keindahan, sama di dalam mencari kekayaan spiritual, sama di dalam keinginan menikmati kekayaan kebudayaan.

Jadi pamong kebudayaan, yang berfungsi sebagai animator kebudayaan, diperlukan agar publik yang awam dapat menangkap pesan spiritual yang dikandung oleh sesuatu benda budaya. Karya kesenian yang kita rawat, misalnya, dan yang ingin kita wariskan kepada generasi penerus, pasti bukan sekedar benda yang harus dikagumi atau dianggap keramat. Baik nilai maupun artinya terletak pada gema yang dipantulkannya kepada orang yang memperhatikannya. Karya tersebut harus dibuat dapat bertindak sebagai penggugah, sebagai pembugah, sebagai penghibur, sebagai pengingat, sebagai faktor referensi.

Agar supaya terjalin kontak antara sesuatu karya dengan pengamatnya tidak cukup hanya pameran. Jumlah cara menanggapi sesuatu lukisan, arca ataupun pementasan sesuatu cerita akan sama banyaknya dengan jumlah orang yang menyaksikan karya-karya tersebut. Banyak di antara tanggapan itu seringkali berupa tanggapan yang dangkal. Maka diperlukan adanya suatu perantara, yang disebut pamong kebudayaan, yang tugasnya berupa animasi.

II.3. Ilmu Pengetahuan dan Kesenian

Salah satu prasangka modern yang paling merusak adalah anggapan bahwa seni dan pengetahuan ilmiah adalah dua jenis kepentingan hidup yang berbeda dan tidak cocok satu dengan lainnya. Kita didorong untuk biasa mempertentangkan temperamen artistik

dengan temperamen ilmiah. Ada kecenderungan untuk mengidentifikasi yang pertama dengan pendekatan kreatif-kritis dan yang kedua sebagai pendekatan spekulatif-individualistis. Bahkan adakalanya pandangan agamis dan etis ikut menuding ilmu pengetahuan sebagai materialistis dan tidak spiritual.

Masih ada saja orang yang menganggap ilmu pengetahuan semakin lama semakin mencekik seni atau paling sedikitnya memadatkannya demi efisiensi sehingga kebudayaan menjadi “modern” tetapi “kerdil”. Maka itu seni hanya dapat dikembangkan kembali sesuai dengan fitrah alamiahnya dengan jalan mengeluarkan ilmu pengetahuan dari ruang lingkup tradisional dari kesenian, yaitu kebudayaan. Berhubung seni sudah terlanjur dianggap umum sebagai suatu unsur kebudayaan *par excellence*, tiada budaya tanpa seni, tudingan orang ini oleh umum dianggap wajar. Namun kalau kita renungi lebih dalam, yang dikeluhkan oleh orang atau “pencinta seni” tersebut bukanlah ilmu pengetahuan, tetapi perubahan. Para penuding itu tiba-tiba merasa “asing” di dalam gelombang perubahan yang dituntut oleh zamannya.

Anggapan bahwa ilmu pengetahuan merusak kebudayaan kadang-kadang didukung oleh pernyataan historis bahwa seni berkembang hanya bila pengetahuan ilmiah diabaikan. Jalannya peradaban lama di Timur dan di Barat ternyata membantah hal tersebut. Pujangga Omar Khayam dari Persia, misalnya, bukan hanya membuat puisi tetapi juga mengembangkan matematika dan astronomi. Di Yunani, tempat bermula kebudayaan Barat, pada masa keemasannya seni dan ilmu pengetahuan saling menunjang dan bekerja sama lebih erat daripada yang terjadi sekarang di zaman modern. Kehadiran tokoh yang sekaligus seniman dan ilmuwan, Socrates, membidani kelahiran era modern di zaman *Renaissance*. Dan yang menjadi tokoh dan lambang dari manusia *renaissance* itu dari sejak semula adalah Leonardo da Vinci yang adalah sekaligus pelukis, pematung, matematikawan dan teknikus. Dirinya paling jelas mencerminkan

keuniversalan dan kesatuan dari intelek. Di negeri kita pun dahulu tidak dipertanyakan apakah seorang empu atau wali itu ahli sastra atau ahli pengetahuan. Yang jelas dia disebut pujangga, budayawan, karena ahli sekaligus dalam seni, kiat, pengetahuan (kawruh), orang bijaksana dan dihormati sebagai jauhari tempat bertanya semua hal. Di Inggris, tempat bermula tumbuh dan berkembang ilmu pengetahuan modern, zaman keemasan susastra adalah justru era di mana pengetahuan ilmiah dan seni maju bahu-membahu.

Ilmu pengetahuan dewasa ini jelas jauh lebih berkembang dan berkemampuan jauh lebih besar daripada pengetahuan ilmiah di zaman Newton. Sebaliknya seni sastra dewasa ini dinilai tidak semaju seni sastra di masa Dryden, yaitu sastrawan yang sezaman dengan ilmuwan Newton dan sama-sama menjadi anggota dari *The Royal Society*. Namun kenyataan ini bukan berarti bahwa kemajuan ilmiah yang pesat ini terjadi dengan mengorbankan seni. Begitu pula kalau di Indonesia seni dianggap kurang berkembang relatif terhadap ilmu pengetahuan, tidak dengan sendirinya berarti karena di sini untuk seni belum ada “Menterinya” sendiri. Sama halnya dengan seni, ilmu pengetahuan pun selalu gelisah. Namun dalam kegelisahan itu ilmu pengetahuan terus-menerus berusaha mengatasi gagasan-gagasan lamanya dan untuk itu bersedia mengadakan revolusi-revolusi dalam metode, pendekatan dan penalarannya sendiri. Dalam berbuat demikian ilmu pengetahuan memang bersaing dengan seni dalam merebut otak-otak muda yang cemerlang. Persaingan itu sendiri dalam dirinya merupakan bukti nyata bahwa seni dan ilmu pengetahuan sama-sama memerlukan kecerdasan manusia bagi perkembangannya masing-masing. Dan di sinilah tampil salah satu dari sedikit penemuan psikologis masa kini yang dapat dipegang, yaitu betapa konfigurasi faktor-faktor kecerdasan yang membedakan antara kepandaian dan kependiran adalah sama pada diri setiap orang, sama pada seniman maupun pada ilmuwan. Kita bisa saja terpisah karena pendidikan dan pengalaman; kita juga dapat berbeda sikap. Namun di balik semua

ini kita sama-sama berpegang pada suatu dasar yang lebih mendalam dari kemampuan bersama.

Banyak orang tidak tahu bahwa berkat kreativitas ilmu pengetahuanlah maka karya-karya seni sekarang dapat lebih luas memasyarakat dan dengan lebih cepat serta lebih murah. Mereka kiranya juga tidak menyadari bahwa berkat kekritisian semangat ilmiahlah orang awam dapat mengenal gradasi mutu dari karya-karya artistik. Sebagian besar dari ilmu pengetahuan memang berurusan dengan materi tetapi hal ini tidak berarti bahwa pengetahuan ilmiah dan ilmuwan yang mengembannya bersifat materialistis. Kalau kita amati penampilan dan pandangan hidup dari banyak ilmuwan, terutama yang diakui besar dalam bidang keilmuannya, secara jujur harus kita akui betapa sederhananya hidup mereka sehari-hari, bahkan adakalanya jauh lebih tidak materialistis ketimbang seniman dan agamawan kondang. Saya kira keliru menganggap ilmu pengetahuan dan ilmuwan adalah individualistis. Yang benar adalah bahwa ilmu pengetahuan dan ilmuwan pada umumnya memiliki individualitas. Hal ini wajar karena ilmu pengetahuan adalah nilai yang membiasakan orang yang mengembannya untuk selalu tahu (sadar) tentang apa yang dia lakukan dan mandiri dalam penelitian. Terlepas dari kebiasaan ini, kiranya dapat juga dikatakan bahwa karya seni dan seniman besar juga memiliki individualitas.

Dalam masyarakat di mana berlaku sistem pembagian kerja, kiranya dianggap wajar pula adanya spesialisasi fungsi. Kalaupun hal ini sampai terjadi di bidang seni dan ilmu pengetahuan, saya pikir hal tersebut demi kemudahan kerja belaka. Memang hanya sebagai suatu kemudahan kita membedakan fungsi ilmiah dan fungsi artistik. Dengan pertimbangan yang sama pula kita lihat perbedaan dan komplementaritas, antara fungsi pemikiran dan fungsi perasaan. Namun hendaknya kita tetap sadar bahwa nasib tidak membagi makhluk manusia dalam pemikir dan perasa. Kalau dahulu, baik di Barat maupun di Timur, seni dan ilmu pengetahuan bukan merupakan dua nilai yang saling

tidak cocok, mengapa kini dibuat berbeda begitu rupa sehingga yang satu, ilmu pengetahuan, harus dikeluarkan dari kebudayaan dan yang lain, kesenian, harus dianggap asing bagi peradaban.

II.4. Kebudayaan dan Peradaban

Di lingkungan kaum terpelajar istilah **“kebudayaan”** dan **“peradaban”** sering dipakai, dengan anggapan setiap orang yang mendengar atau membacanya sama-sama mengerti maknanya yang persis. Pengertian ini tentu memainkan peran yang krusial di dalam kehidupan intelektual sehari-hari. Dan karena ia begitu penting, ia harus dipahami dengan betul (correct). Namun tidak jarang kita menjadi bingung mengenai makna konseptual mana yang cocok bagi maksud kajian kita.

Kebingungan ini tidak mengherankan. Jangankan makna yang persis dari kedua istilah tersebut bila diperbandingkan satu dengan lainnya, makna istilah kebudayaan itu sendiri saja sudah sangat beragam. Padanan kata asing untuk “kebudayaan” adalah *“culture”*, *“cultivation”*, diturunkan dari kata Latin *“cultura”*, yang berarti membudidayakan. Kata *“culture”*, *“cultivation”* ini menyatakan suatu hubungan yang spesifik dari manusia dengan alam. Kata-kata tersebut dari abad ke abad berangsur-angsur memperoleh tempat yang layak dalam kosakata bahasa-bahasa Eropa. Di tahun 1952 Kroeber dan Kluckhohn menemukan, misalnya, tidak kurang dari 166 definisi mengenai *“culture”*, jadi “kebudayaan”, selama kurun waktu 1871-1952, yang diajukan oleh para ilmuwan bidang antropologi, sosiologi, psikologi, filosofi, bahkan kimia dan biologi. Setiap ilmuwan ini menyatakan suatu pengertian definisional sendiri, tekanan makna sendiri dan kadangkala meliputi berbagai isu yang bertentangan satu dengan lainnya.

Keragaman pengertian dan makna ini juga tidak tanpa alasan mengingat dalam kebudayaan tentu terdapat suatu fungsi normatif,

suatu aspek struktural, suatu aspek psikologis dan aspek kebangsaan (kebudayaan Indonesia, kebudayaan Perancis, dan lain-lain). Juga memang benar bahwa kebudayaan mencakup banyak unsur, dengan bentuk serta rupa yang berbeda-beda, yang dalam dirinya merupakan suatu warisan sosial dan sekaligus, suatu produk dari perilaku manusia. Namun kalau kita usut lebih dalam sampai ke unsur asalnya, akan kita temui hakikat kebudayaan ini, yaitu **NILAI**, seperti yang telah saya utarakan di permulaan tulisan ini.

Pengertian definisional atau makna istilah “peradaban” juga tidak lebih sederhana. Padanan kata asing dari “peradaban” ini adalah “*civilization*”, diturunkan dari kata Latin “*civis*” (*citizen* atau warga negara), “*civitas*” (*city state*, negara-kota, masyarakat, warga, penduduk) dan “*civilitas*” (*citizenship*, kewarganegaraan). Semua makna ini berkaitan dengan konsep kehidupan kota yang relatif lebih progresif dan lebih berkembang.

Kalau ilmuwan Boas memperlakukan “peradaban” (*civilization*) banyak sedikitnya sinonim dengan “kebudayaan” (*culture*), di kalangan akademikus Perancis ia biasa dipakai untuk mencakup konsep “kebudayaan” dalam makna yang seluas-luasnya. Sedangkan sejarawan Toynbee jelas sekali memisahkan peradaban dari masyarakat-masyarakat primitif. Menurut dia kebudayaan primitif merupakan medan ilmu antropologi. Dia menulis “*Civilization on Trial*” dan bukan “*Culture on Trial*”. Dalam bukunya “*A Study of History*” (1954) dia mengindentifikasi keberadaan 21 peradaban, yang kemudian (1961) diperbaikinya menjadi 28 buah; dari jumlah ini yang ada sekarang tinggal sebanyak enam buah. Sebaliknya filosof Oswald Spengler di tahun 1917 mengetengahkan delapan peradaban pokok dan yang terus “hidup” hingga kini sebanyak lima buah.

Para pemikir Jerman di Abad XIX telah mengetengahkan pengertian yang berguna untuk menghilangkan kebingungan makna ini. Dalam bukunya “*Der Untergang des Abendlandes*” Spengler, misalnya, mengatakan bahwa peradaban adalah takdir yang tak

terelakkan dari kebudayaan, adalah akhir dari kehidupan suatu budaya. Peradaban merupakan jenjang keberadaan tertinggi yang dapat dicapai oleh suatu kebudayaan; ia adalah artifisial, tidak metafisis, tidak berjiwa, dikuasai oleh intelek. Bagi akademikus Alfred Weber, penulis "*Prinzipien der Geschichts und Kultursoziologie*" proses peradaban dan gerakan kebudayaan adalah dua kejadian yang berbeda. Selain bentuk-bentuknya berlainan dan tunduk pada hukum-hukum perkembangan yang tidak sama, keduanya punya fenomenologi yang berbeda. Proses peradaban adalah praktis, terdiri atas suatu totalitas pengetahuan intelektual, logis dan bersendikan hukum kausal yang inheren. Pengetahuan tidak diciptakan, tetapi ditemukan. Sebelum ditemukan, pengetahuan ini sudah ada, sudah berada sebelumnya, "*it is already there*". Sebaliknya, kebudayaan tidak terdiri atas suatu totalitas yang logis, universal dan kausal. Ia bukan suatu totalitas obyektif, tetapi suatu sistem lambang-lambang sebagai ekspresi kejiwaan.

Bila demikian dapat kiranya disimpulkan bahwa walaupun "kebudayaan" dan "peradaban" sama-sama mencerminkan perkembangan dan kemajuan makhluk manusia, kebudayaan mengacu pada aspek spiritual dari kehidupan manusia sementara peradaban mengenai aspek teknologisnya. Berarti kebudayaan mencakup nilai-nilai pengetahuan, agama, pendidikan, arts sebagai faktor-faktor pengembangan pikiran manusia, sementara peradaban adalah suatu konsep yang terkait secara integral dengan industri, teknologi, ekonomi dan hukum, diadakan guna mengontrol alam demi pemuasan kebutuhan manusia.

Maka istilah kebudayaan dan istilah peradaban mewakili pandangan yang berbeda mengenai gejala yang sama; yang satu bersifat deskriptif, yang lain valuatif. Asal-usul linguistik dari kedua kata itu, bila kita batasi pada padanan asingnya, dapat membantu menjelaskan perbedaan antara makna kedua kata tersebut. Bila "*culture*", untuk kebudayaan, berkaitan dengan hal membudidayakan, "*civilization*", untuk peradaban, berkaitan dengan negara dan kewargaan,

yang dalam dirinya merupakan suatu keadaan yang relatif lebih maju dari hal pembudidayaan itu. Dengan perkataan lain, menjadi “beradab” bermakna hampir sama dengan menjadi “terpelajar”. Makhluk hewan “*survive*” dengan menundukkan diri pada hukum-hukum alam. Hanya makhluk manusia yang mengolah, membudidayakan alam tersebut.

Jadi baik manusia primitif maupun manusia modern sebenarnya sama-sama “*culture-oriented*”. Masyarakat primitif berbeda dengan masyarakat modern hanya dalam karakteristik budayanya mengingat kata “*culture*” dan “*cultivation*” menyatakan, antara lain, suatu hubungan yang spesifik dari manusia yang menghayatinya dengan alam. Baik kebudayaan primitif maupun kebudayaan modern dapat dievaluasi menurut tingkat dan kualitas pembudidayaan keberdayaannya dalam hidup dengan alam dan di tengah-tengah alam. Dipandang dari sudut ini masyarakat manusia dapat dibeda-bedakan dan diperbandingkan satu dengan lainnya.

Peradaban adalah pendekatan dari konsep pembudidayaan yang bergairah, yaitu kebudayaan yang berkembang ke satu jenjang tertentu. Kebudayaan butuh maju ke satu tingkat untuk dapat dikualifikasikan sebagai peradaban. Mengingat sejarah atau kebudayaan manusia berkembang dari suatu keadaan primitif, maka sejarah makhluk manusia, “*the history of mankind*”, sebaiknya dianggap sebagai sejarah kebudayaan (*the history of culture*) dan bukan sejarah peradaban (*the history of civilization*) seperti yang dibayangkan oleh Toynbee.

Belakangan ini istilah peradaban tampil kembali menjadi bahan pembicaraan serius di kalangan akademisi berkat tulisan Samuel P. Huntington di majalah *Foreign Affairs* edisi 1953 berjudul “*The Clash of Civilization?*” Jika pengaruh Toynbee jelas membayang di dalam teori yang dikemukakannya, pada waktu yang sama mudah pula disimpulkan bahwa tulisannya ini bersifat politis dan berorientasi masa depan sedangkan tulisan Toynbee bersifat akademis dan berorientasi masa lalu.

"Civilization", menurut Huntington, *"is a cultural entity ... the highest cultural grouping of people and the broadest level of cultural identity people have short of that which distinguishes humans from other species"*. Peradaban ini dinyatakan oleh unsur-unsur kebersamaan obyektif seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, lembaga dan oleh identifikasi diri orang secara subyektif. Ia dapat saja mencakup berbagai bangsa atau *"subcivilizations"*. Islam, misalnya, meliputi Arab, Turki dan Melayu sebagai unsur-unsur bagiannya (*subvisions*), tetapi semua bangsa tersebut mengidentifikasikan diri masing-masing dengan peradaban Islam. Ia adalah dinamis, jatuh dan bangun, terpecah dan bergabung dan sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah, dapat saja lenyap dan tertimbun pa'ir waktu.

Walaupun Huntington membahas kebudayaan dan peradaban, kosakata tulisannya bernada permusuhan. Menurut dia pengelompokan umat manusia dan sumber utama dari konflik akan bersifat *"cultural"*. Sebab di masa pasca perang dingin pengelompokan bangsa-bangsa menurut ideologi atau ekonomi tidak lagi relevan. Perbedaan-perbedaan di antara peradaban memang tidak dengan sendirinya berarti konflik tidak dengan sendirinya berarti kekerasan (*violence*). Namun dari abad ke abad perbedaan-perbedaan di antara peradaban ternyata telah menyulut konflik menjadi sangat berkepanjangan dan membuatnya menjadi sangat keras. Bentrokan antar peradaban akan mendominasi politik global. *"The fault lines between civilizations will be the battle lines of the future"*.

Bila bentrokan antar peradaban diperkirakan akan terjadi, maka deskripsi definisional peradaban menjadi sangat penting. Ternyata deskripsi Huntington ini cukup ambigu. Apakah mungkin menyatakan masyarakat Cina, misalnya, sebagai peradaban Konghucu dan meliputi Cina daratan, Taiwan dan keseluruhan Cina perantauan yang bertebaran di Asia Timur? Bukankah Cina daratan tidak pernah merupakan suatu masyarakat Konghucu, bahkan tidak sebelum Mao Tse-tung berkuasa?! Sejak dahulu kala Cina merupakan satu entitas

budaya yang sangat rumit dengan keseluruhan “sembilan sistem dan sepuluh mazhabnya”. Kesepuluh mazhab ini meliputi Konghucuis, Taois, yin-yang kosmologis, legalis, dialektisian, Mohis, diplomatis, peramu berbagai sumber, penutur-penutur cerita dan agraris. Kemudian ratusan filosof semakin memperkaya kebudayaan dan pemikiran Cina ini.

Selanjutnya adalah keliru sekali bila Huntington menganggap keseluruhan masyarakat Cina perantauan sebagai suatu masyarakat Konghucu. Apakah Hongkong Konghucuis? Tidak, ia adalah sebuah ekonomi pasar. Apakah Singapura Konghucuis? Bukan, ia juga merupakan sebuah ekonomi pasar dengan suatu pemerintahan yang serba tegas dan “*zakelijk*”. Apakah Taiwan Konghucuis? Tidak, ia adalah sebuah sistem kapitalis yang dibangun sebagian besar berdasarkan industri kecil dan menengah. Bahkan, apakah Republik Rakyat Cina Konghucuis? Juga tidak. Ia sedang bereksperimen dengan kapitalisme di bawah pemerintahan komunis.

Bentrokan-bentrokan yang sudah mulai terjadi di sana sini, baik antar peradaban pokok maupun antar subdivisi dari suatu peradaban, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda konflik peradaban seperti yang dibayangkan oleh Huntington. Artinya, “*civilization clash*” tersebut bukanlah berkaitan dengan Jesus Kristus, Konghucu dan Rasulullah Muhammad SAW, melainkan lebih banyak berurusan dengan pembagian yang tidak seimbang dari kekuasaan, kekayaan serta pengaruh dunia dan tidak adanya respek atas negara, bangsa, kelompok etnis yang relatif kecil, terbelakang dan miskin oleh negara, bangsa, kelompok etnis yang relatif besar, maju dan kaya. Jadi dalam hal ini kebudayaan merupakan pengantar (*vehicle*) dari ekspresi konflik dan bukan sebab dari konflik.

Bila demikian cara mencegah konflik “budaya” ini merupakan urusan pengembangan kebudayaan seperti yang telah dipaparkan di atas tadi. Sebab aksi pengembangan khusus kebudayaan (pendidikan) bertujuan untuk menguasai nilai universal, yaitu ilmu pengetahuan,

yang selama ini telah mendukung Eropa, kemudian Amerika dan sekarang Jepang, ke puncak kemajuan dunia dan sekaligus bermaksud untuk membangun dasar manusiawi (*human foundation*) dari pembangunan di dalam satu kesatuan nasional yang jelas memerlukan waktu yang lebih lama daripada membangun superstruktur fisik. Sedangkan aksi perkembangan umum kebudayaan bermaksud menciptakan satu bentuk baru peradaban di mana pembangunan dan kebudayaan dapat sejalan serta saling menunjang dengan serasi berhubung kebudayaan kini berada di muara pertemuan dua arus besar gagasan yang menandai peradaban dan pemikiran kontemporer, yaitu pengertian pembangunan di satu pihak dan tuntutan martabat manusia di lain pihak.

Penutup

Tidak ada manusia, bangsa, yang tidak berbudaya. Namun ternyata tidak semua budaya, tidak sembarang kebudayaan, yang *condusive* bagi pertumbuhan apalagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perkataan lain, tidak semua sistem nilai dengan sendirinya mampu memberdayakan penghayatnya untuk memproduksi kedua faktor yang akan menentukan sekali kehidupan manusia di Abad XXI mendatang.

Dunia sangat berterima kasih pada Eropa di samping mengutuk penyalahgunaan kemajuan dan kekuasaannya terhadap kelompok-kelompok manusia yang relatif terbelakang. Berterima kasih karena berbagai usaha uji-coba kreatif yang ia lakukan melalui kebudayaannya, kebudayaan Barat, terutama dalam kurun waktu lima abad terakhir ini, telah membawa makhluk manusia pada umumnya ke zaman IPTEK. Bila tidak keadaan kita tidak akan jauh berbeda dengan keadaan di Zaman Kegelapan berdasarkan pengamatan apa-apa yang telah terjadi antara Abad X dan Abad XV. Memang Eropa telah mengusung dunia di punggung budaya Baratnya memasuki zaman IPTEK.

Kita pun harus berusaha keras membuat kebudayaan kita mampu memberdayakan bangsa Indonesia untuk dapat *survive* di Abad XXI dan abad-abad seterusnya melalui berbagai program aksi kebudayaan yang terencana, terpadu, sistematis dan konsisten dengan tuntutan zaman yang berlaku. Hal ini berarti bahwa **era pembangunan jangka panjang kedua** nanti seharusnya dibuat pula menjadi **era kebudayaan**. Dan berhasil-tidaknya kita mengembangkan satu kebudayaan, jadi satu sistem nilai, yang menyatu-padu dengan zamannya itulah yang kiranya akan menentukan ada-tidaknya kebangkitan nasional kedua yang kita bayangkan itu.

Kepustakaan:

Alisyahbana, S. Takdir, *The Concept of Culture and Civilization* (Jakarta: Dian Rakyat, 1989).

_____, "Sejarah Kebudayaan Indonesia Masuk Globalisasi Umat Manusia", *Kebudayaan*, no. 02 Th. 1 1991/1992.

Beerling, R.P., *Het Wankelende Westen* (Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1950).

Bronowski, J. and Bruce Mazlish, *The Western Intellectual Tradition* (New York: Barnes & Noble, 1993).

Cohen, Morris R., *Reason and Nature* (New York: Dover Publications, Inc., 1931).

Delumeau, Jean, *La Civilisation de la Renaissance* (Paris: Arthaud, 1967).

Duhamel, Jacques, "L'Ere de la Culture", *La Nouvelle Revue des Deux Mondes*, Sept. 1972.

Delmas, Claude, *La Civilisation Europeenne* (Paris: Presses Universitaires de France, 1980).

Drucker, Peter F., *Post-Capitalist Society* (New York: Harper Collins Publishers, Inc., 1993).

Featherstone, Mike (ed.), *Global Culture* (London: SAGE Publications, 1991).

Fuller, Graham, "The Next Ideology", *Foreign Policy*, no. 98, Spring 1995.

Huntington, Samuel F., "The Clash of Civilizations?", *Foreign Affairs*, Vol. 72, no. 3, Summer 1993.

Hall, Victor, *L'Idée de la Culture* (Paris: Presses Universitaires de France, 1981).

Joesoef, Daoed, "Knowledge Economy and World Economy", *The Indonesian Quarterly*, Vol. II, no. 2, Jan. 1974.

_____, "Era Pembangunan Kebudayaan dan Kaitannya dengan Pendidikan", *Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan*, Yogyakarta, 12 Mei 1978.

_____, “Bacalah-Iqra’!”, *Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, meresmikan pembentukan perpustakaan di desa Cicurug* (Kabupaten Sukabumi) dalam rangka peringatan Hari Nuzulul Qur’an, 21 Agustus 1978.

_____, “Membina Lingkungan Sekolah dan Ketahanan Sekolah”, *Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan*, 6 Mei 1982.

_____, “Membudayakan Ilmu Pengetahuan”, *Sinar Harapan*, 3-6 Oktober 1986.

_____, “Krisis Metafisis dalam Ilmu Pengetahuan”, *Menerawang Masa Depan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni* (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1991).

_____, “Satu Kebudayaan di Abad IPTEK”, *Analisis CSIS*, Th. XX, no. 4, Juli-Agust. 1991; *Kebudayaan*, no. 01, Th. 1, 1991/1992.

Kuhn, Thomas S., *The Structure of Scientific Revolution* (Chicago: The University of Chicago Press, 1962).

Kim Yongkoo, “Ambiguity in ‘The Clash of Civilization?’ : A Korean View”, *Korea Focus*, Vol. 2, no. 1, 1994.

Kroeber, A.L. and Clyde Klackhohnm *Culture, a Critical Review of Concept and Definitions* (Papers of the Peabody Museum of American Archeology and Ethnology, Harvard University Press, Vol. XLVII, no. 1), Cambridge Massachusetts, 1952.

Lee Won-sul, “Clash of Civilization”, *Newsreview*, Oct. 29, 1994.

Mahbuni, Kishore, “The Pacific Way”, *Foreign Affairs*, Vol. 74, No. 1 Jan/Feb. 1995.

Nakayama, Shigeru, *Science, Technology and Society in Post-war Japan* (New York: Kegan Paul International, 1991).

_____, *Academic and Scientific Traditions in China, Japan, and the West* (University of Tokyo Press, 1984).

Needham, Joseph, *La Tradition Scientifique Chinoise* (Paris: Hermann, 1974).

Nasr, Seyyed Hossein, *Science and Civilization in Islam* (New York: Barnes & Nible, 1992).

Plater, William M., "Future Work, Faculty Time in the 21st Century", *Change*, May/June, 1995.

Park Ynhui, "Culture or Civilization", *The Dong-A Ilbo*, March 12, 1995.

Penrose, Roger, *The Emperor's New Mind Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics* (New York: Penguin Books, 1991).

Russel, Robert J., William R. Stoeger, S.J. and George V. Coyne, S.J. (ed.) *Physics, Philosophy, and Theology: A Common Quest for Understanding* (Vatican Observatory-Vatican City State, 1988).

Sue, Roger, *Le Loisir* (Paris: Presses Universitaires de France, 1980).

Snow, C.P., *The Two Cultures and the Scientific Revolution* (New York: Cambridge University Press, 1961).

Santayana, George, *Reason in Art* (New York: Dover Publications, Inc., 1982).

_____, *Reason in Science* (New York: Dover Publications, Inc., 1983).

Tarnas, Richard, *The Passion of the Western Mind* (New York: Ballantine Books, 1991).

UNESCO, *Islam, Philosophy and Science* (Paris: The Unesco Press, 1981).

Van Peursen, C.A., *Filosofie van de Wetenschappen* (Leiden: Martinus Nijhoff, 1986).

Wallerstein, Immanuel, *Geopolitics and Geoculture* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991).

KRISIS METAFISIS DALAM ILMU PENGETAHUAN

Oleh: Daoed JOESOEF *

Mereka ini satu bangsa dengan
Satu bahasa untuk semuanya,
Ini barulah permulaan usaha mereka;
Mulai dari sekarang apa pun juga
Yang mereka rencanakan, tidak ada
Yang tidak akan dapat terlaksana.

(Alkitab, Kejadian – 11: 6)

Pendahuluan

Institut Teknologi Bandung mengajak kita untuk “menerawang masa depan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam perkembangan budaya masyarakat Indonesia”. Sebelum memulai dengan “terawangan” ini, untuk mencegah “de Babylonische spraakverwarring”, ada baiknya dikemukakan apa yang saya maksudkan dengan istilah “budaya” itu.

Budaya adalah **sistem nilai** yang dihayati oleh sekelompok manusia (di satu lingkungan hidup tertentu, di suatu kurun waktu tertentu). Jadi “budaya masyarakat Indonesia” adalah sistem nilai

*Ketua Dewan Direktur CSIS, Jakarta. Doctorat de l’Universite’ (Hubungan dan Keuangan Internasional), Universite’ de Paris (1967). Doctorat d’Etat (Ekonomi), Universite’ Pluridisciplinaires de Paris I Pantheon-Sorbonne (1973). Pelukis otodidak, turut mendirikan dan bendahara dari “Angkatan Seni Rupa Indonesia” di Medan (1945-1946). Ketua “Seniman Indonesia Muda” cabang Yogyakarta (1946-1947). Anggota Executive Board UNESCO (1979-1981). Penyanggah bintang “Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Letters” (1983).

yang dihayati oleh manusia Indonesia (dalam dan selama waktu tertentu). **Nilai** adalah, (i) standar nilai atau asas yang dipakai sebagai dasar (sadar atau tidak sadar) dalam manusia yang bersangkutan membuat penilaian (*judgement*) mengenai apa saja dan, (ii) yang bernilai itu sendiri. Yang terakhir ini, pada gilirannya, dapat dibedakan antara lain (ii.a) yang berbentuk riil atau dapat dijamah (*tangible*) seperti : benda-benda sejarah peninggalan nenek-nenek moyang (rumah adat, benteng kuno, candi, istana), rumah ibadat/pemujaan (mesjid, gereja, kuil, dan lain-lain), benda-benda purbakala, baik yang di alami maupun artifisial dan, (ii.b) yang tidak dapat dijamah (*intangible*) seperti : adat-istiadat, budi pekerti, disiplin, hukum, gagasan-gagasan vital (ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, Pancasila), dan lain-lain. Kerja dan proses pendidikan banyak berurusan dengan nilai-nilai yang *intangible* tersebut sebab, *after all*, pendidikan adalah bagian dari budaya dan bukan sebaliknya.

Dengan pengertian budaya yang seperti ini, kalau kita sekarang “menerawang masa depan”, segera terlihat betapa satu nilai, yaitu **ilmu pengetahuan** yang kemudian melahirkan **teknologi**, memegang peranan yang semakin besar dan semakin menentukan sekali dalam perkembangan budaya manusia di dunia. Dengan begitu ia semakin menggeser ke samping peranan yang dahulu dipegang oleh seni dalam kemajuan budaya dan peradaban. Kalau dahulu dalam melaksanakan keyakinan religiusnya manusia banyak sekali melibatkan seni, kini untuk kegiatan yang sama ilmu pengetahuan (dan teknologi) juga telah mendesak seni tersebut. bahkan sekarang ada dikatakan bahwa Abad-XXI, yang sudah ada di ambang pintu kemanusiaan, adalah abadnya ilmu pengetahuan dan berhubungan dengan itu kelompok-kelompok manusia (negara, bangsa, masyarakat) yang belum mampu menguasainya sebagai bagian yang integral dari sistem nilai yang dihayatinya, pasti akan sulit sekali dapat “*survive*” dalam kemandirian budayanya, apalagi kemandirian politik, ekonomi, militer dan berdiplomasi.

Bila demikian, dari “terawangan ke masa depan” itu, kita seperti mendapat suatu “peringatan keras” bahwa kita, manusia-manusia Indonesia, dituntut oleh perkembangan zaman untuk juga bisa menguasai ilmu pengetahuan tersebut, demi kelangsungan kemerdekaan nasional yang sudah berhasil direbut kembali dengan “harga” yang begitu mahal. Namun bila sekarang “peringatan keras” itu kita “renungkan”, akan segera terasa betapa beratnya usaha penguasaan pengetahuan ilmiah ini. Berat karena kita harus bekerja dan belajar ekstra keras berhubung nilai yang satu ini betul-betul “asing” dalam keseluruhan sistem nilai asli kita dan karena itu, untuk menguasainya, kita harus mampu menciptakan tradisi baru dan kemudian berdisiplin untuk melaksanakan tradisi itu. Betapa tidak! Di dalam sistem nilai (budaya) warisan nenek moyang kita, yang samar-samar kehadirannya, walaupun ada secara embrional, justru adalah ilmu pengetahuan tersebut dan, berkaitan erat dengan itu, semangat ilmiah (*scientific spirit*).

Kalaupun kehadiran ilmu pengetahuan dan semangat ilmiah sangat minim dalam sistem nilai yang kita warisi dari nenek moyang, hal ini kiranya merupakan akibat sampingan dari jalan khas yang telah dipilih oleh para pendahulu kita itu dalam menangani kenyataan hidup sehari-hari yang dianggap tidak memuaskan. Jika sejarah kita telusuri secara analitis akan terlihat bahwa bila makhluk manusia merasa tidak puas dengan kenyataan hidup sehari-hari yang dilihat dan dialaminya, di manapun dan bilamanapun, dia lalu memimpikan suatu kehidupan yang lebih layak dan lebih indah. Mimpi semacam ini mendorongnya, nenek moyang kita tidak terkecuali, untuk menempuh tiga macam jalan.

Pertama, dengan melarikan diri dari kenyataan yang tidak disenanginya itu. Mungkin menjauhinya secara badaniah atau mengingkarinya secara rohaniah (mental-spiritual). Kedua, dengan memperindah kenyataan yang tidak memuaskan itu di dalam angan-angan. Melalui jalan ini manusia menggambarkan kehidupan menurut

suatu khayalan indah tentang sesuatu ideal. Jalan ketiga adalah berupa penyempurnaan rasionil terhadap kenyataan hidup yang tidak memuaskan itu. Jadi berupa suatu usaha yang dengan penuh kesadaran dilakukan ke arah perbaikan, perombakan atau pembaruan dari tata kehidupan, tata masyarakat atau tata negara yang dianggap tidak memuaskan itu, berdasarkan nalar.

Nenek moyang kita dahulu praktis menempuh jalan pertama dan kedua semata-mata. Apabila jalan pertama yang dipilih, maka usaha mengatasi kenyataan hidup yang tidak memuaskan itu lebih banyak berupa “bertapa”, yaitu suatu pelarian jasmaniah, mengasingkan diri ke tempat sunyi selama satu jangka waktu tertentu – sampai “kesaktian” untuk mengatasi kenyataan telah diperoleh – atau untuk selama-selamanya demi penyempurnaan batin dan kesucian jiwa. Lain halnya dengan jalan pertama, jalan kedua lebih banyak berupa suatu pelarian mental, mengembara dalam angan-angan, menggambarkan hidup dan kehidupan menurut suatu khayalan indah tentang sesuatu ideal. Idealisasi seperti ini adalah jalan yang termudah di antara ketiga jalan yang telah disebut untuk menolak kenyataan hidup yang tidak dikehendaki, tetapi merupakan jalan yang tidak membuat tujuan menjadi lebih dekat pada yang diinginkan.*

*Walaupun begitu jalan kedua ini akhirnya menghasilkan suatu khazanah nilai-nilai seni, sastra, moral, sosial dan estetis yang serba luhur, didaktis: seperti mitos, epik, dan lirik yang bertemakan kepahlawanan, kekesatriaan, kesucian, kebijaksanaan atau nilai-nilai hidup di tengah-tengah alam dan menurut kodrat alam. Hal ini jelas terlihat pada “wayang” suatu karya budaya menurut Dr. Stutterheim merupakan “bengkel (arsenaal) dari bentuk-bentuk kehidupan dan kesopansantunan”. Maka kalau bangsa kita di kawasan Asia-Pasifik tidak dikenal sebagai bangsa yang di masa silam telah menghasilkan filosofi abstrak yang berat, analitis dan mendalam, berkat jalan kedua yang telah ditempuh oleh nenek moyang kita itu, kini disadari dan diakui bahwa dalam hal seni dan sastra-yaitu penjelmaan kekayaan perasaan dan kesuburan fantasi yang mengubah segala sesuatu menjadi ciptaan yang indah-bangsa kita dapat bertanding dan dipertandingkan dengan bangsa mana pun di muka bumi ini.

Di bagian lain dari dunia ini, orang-orang Yunani purba telah memilih jalan ketiga dimasa sebelum Masehi, kemudian diulangi kembali secara sadar oleh orang-orang Eropa Barat sejak bagian kedua abad-15 dan dengan penuh keyakinan dilakukan pula oleh sejumlah besar orang-orang terpelajar di Inggris di abad-17. Dan jalan ketiga ini adalah jalan yang, sebagaimana kita ketahui, telah mengembangkan dalam diri para penempuhnya semangat, sikap dan tingkah-laku, yang dituntut oleh perkembangan pengetahuan ilmiah modern.

Dalam bekerja dan belajar keras menguasai ilmu pengetahuan kita juga tidak boleh bersikap "*indifferent*" terhadap krisis metafisis yang kini sedang melanda nilai yang satu ini. Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan kita lihat betapa (ilmu) fisika telah dijadikan semacam "*kroonwetenschap*" di kalangan masyarakat ilmiah. Ke dalam fisika ini telah ditanamkan disiplin intelektual-akademis selama empat abad terus-menerus dan doktrinnya berhubungan akrab dengan konsep dari manusia yang beradab tentang Tuhan dan masyarakat, tentang materi dan yang bukan materi, serta tentang semua hal lainnya yang esensiil bagi upaya nalar manusia menerangi kehidupan dan menjelaskan rahasia serta kebenaran alam. Beruntung filosof, ilmuwan dan saintis yang menggeluti pengetahuan ilmiah yang diagung-agungkan itu kini menyadari adanya krisis metafisis dalam pendekatan dan cara berpikir ilmiah, terutama yang telah mendasari penalaran fisika yang diikuti oleh semua disiplin ilmiah yang ada, selama ini. Dalam usaha mengatasi krisis tersebut para pemikir itu mencari gagasan atau pendekatan yang menyatu dan gagasan/pendekatan yang holistik serta integralistik ini pada umumnya sudah merupakan tradisi berpikir Timur, termasuk nenek moyang kita sebagaimana tersurat dan tersirat dalam "kawruh" Jawa.

Maka tulisan ini akan dibatasi pada pembahasan mengenai: (i) semangat ilmiah, (ii) krisis metafisis ilmu pengetahuan, dan (iii) pendekatan holistik. Bahan bacaan pokok yang dipakai sebagai

sumber dalam penyusunan essai analitis ini dicantumkan dalam daftar kepustakaan pada akhir tulisan ini.

I. SEMANGAT ILMIAH

Baru di awal Abad-XX orang Indonesia dengan sadar dan sengaja berusaha menempuh jalan ketiga yang praktis tidak dikenal oleh nenek moyangnya dalam abad-abad sebelumnya. Baru pada saat itu di lingkungan kecil orang-orang yang terpelajar dan telah mengalami pendidikan formal Barat timbul suatu kesadaran baru yang, dengan menguasai pengetahuan ilmiah melalui pendidikan formal modern, memberikan harapan dan keberanian kepada rakyat untuk mampu memperbaiki kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setelah Indonesia berhasil merebut kembali kemerdekaannya kesempatan mengembangkan ilmu pengetahuan terbuka luas. Dengan segala keterbatasan dana, peralatan dan tenaga pengajar yang ada kesempatan ini memang telah dimanfaatkan semaksimal mungkin melalui, antara lain, pembangunan pendidikan tinggi yang mengajarkan berbagai disiplin ilmiah. Namun harus diakui bahwa semangat ilmiah (*scientific spirit*) – yang seharusnya melahirkan, membesarkan, menjiwai dan memotori ilmu pengetahuan – berkembang jauh lebih lambat dari kenaikan jumlah penyandang gelar-gelar universitas. Dengan perkataan lain jumlah **ilmuwan** jauh lebih sedikit daripada jumlah **sarjana**, padahal masyarakat pada umumnya menganggap “ilmuwan” dan “sarjana” adalah identik, karena tindak-tanduk para “sarjana” dan “ikatan-ikatan kesarjanaan” mereka memang hendak mengesankan bahwa kedua hal tersebut memang identik.

Sebab utama dari kepincangan dan kekeliruan ini kiranya terletak pada perlakuan yang tidak *correct* terhadap ilmu pengetahuan selama sang “sarjana” mengikuti pendidikan formal keilmuan di

perguruan tinggi kita, pada anggapan yang tidak *correct* tentang pengertian kegiatan ilmiah sesudah menyelesaikan pendidikan tersebut dan pada tipisnya integritas ilmiah di dunia kesarjanaan itu.

Maka akan dibahas berturut-turut : (1) perlakuan terhadap ilmu pengetahuan, (2) pengertian kegiatan ilmiah, dan (3) integritas ilmu pengetahuan.

I.1 Perlakuan terhadap Ilmu Pengetahuan

Ada perlakuan yang tidak *correct* terhadap ilmu pengetahuan di perguruan tinggi pada khususnya, di lingkungan kampus pada umumnya, perlakuan yang persis hendak dikoreksi oleh kebijakan normalisasi kehidupan kampus. Dikatakan tidak *correct* karena di situ ilmu pengetahuan dihayati tidak dalam artinya yang lengkap, yaitu ilmu pengetahuan dalam artian produk, ilmu pengetahuan dalam artian proses dan ilmu pengetahuan dalam artian masyarakat (*community*). Keadaan keilmuan menjadi bertambah runyam karena, setelah dihayati secara tidak lengkap, ilmu pengetahuan ini dibina dan dikembangkan di situ secara terbalik urutan-urutannya.

Ilmu pengetahuan, sebagai produk, adalah pengetahuan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya oleh masyarakat ilmuwan. Jadi dalam dirinya pengetahuan ilmiah terbatas pada kenyataan-kenyataan yang mengandung kemungkinan untuk disepakati dan terbuka untuk diteliti, diuji ataupun dibantah oleh seseorang. Oleh karena itu satu fakta ilmiah tidak mungkin bersifat original seperti halnya pada suatu karya kesenian. Yang mungkin original adalah penemuan fakta ilmiah tersebut dan bukannya fakta ilmiah itu sendiri. Inilah sebabnya mengapa dianggap penting *timing* dari suatu penemuan atau suatu publikasi gagasan keilmuan.

Ilmu pengetahuan, sebagai proses, adalah kegiatan kemasyarakatan (penelitian, penyidikan, percobaan) yang dilakukan demi penemuan dan pemahaman dunia alami sebagaimana adanya dan

bukan sebagaimana yang dikehendaki. Metode ilmiah yang khas dipakai dalam proses ini adalah analisis rasional, abstrak, “obyektif”, sejauh mungkin bersifat *impersonal*, dari masalah-masalah yang didasarkan pada percobaan dan data yang dapat diamati (*observable data*). Bagi Thomas S. Kuhn, *normal science* adalah ilmu pengetahuan dalam artian proses ini.

Ilmu pengetahuan, sebagai **masyarakat**, adalah suatu *community* di mana tindak-tanduk, perilaku dan sikap serta tutur-kata para warganya diatur oleh empat ketentuan (*imperatives*), yaitu universalisme, komunalisme, tanpa pamrih (*disinterested-ness*) dan skeptisisme yang teratur. Universalisme berarti bahwa ilmu pengetahuan bebas dari warna kulit, ras, keturunan maupun keyakinan keagamaan.* Komunalisme berarti bahwa ilmu pengetahuan merupakan milik masyarakat (*public knowledge*). Tanpa pamrih berarti ilmu pengetahuan bukan propaganda. Skeptisisme yang teratur berarti keinginan untuk mengetahui dan mempertanyakan didasarkan pada nalar dan keteraturan berpikir.

Tetapi bagaimana mungkin orang menjadi pengolah ilmu pengetahuan kalau tidak memiliki **semangat ilmiah** karena praktis tidak dibiasakan menekuni ilmu pengetahuan dalam artian **proses**. Selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan dan semangat ilmiah menjadi semakin tidak tertolong dengan diubahnya kampus menjadi anjang politik praktis oleh mahasiswa di depan mata yang *indifferent*

*Bila semua ini tidak diperhitungkan yang ada hanya metode. Jadi ilmu pengetahuan disebut universal dalam artian : mencoba ilmiah yang empiris-eksperimental dan rasionil-bekerja menurut “logical inference”; ia dapat dipakai bilamana dan di tempat mana pun. Kepastian ilmiah-yaitu pengetahuan yang tidak tergantung pada kepercayaan subyektif-tetap berlaku betapapun ciri-ciri khas tempat yang bersangkutan. Namun ilmu pengetahuan dapat tidak universal dalam disiplin-disiplinnya. Sebab obyek penelitian/penyelidikan ilmiah ditentukan tidak hanya oleh ilmu pengetahuan, tetapi juga oleh masyarakat beserta nilai-nilainya di lingkungan mana ilmu pengetahuan yang bersangkutan berkembang.

dari para pengajar yang membiarkan saja masyarakatnya diobrak-abrik oleh mahasiswa dengan dalih “demokrasi”.

Maka dalam pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, bila karena sesuatu hal pengetahuan ilmiah ini belum dapat diperlakukan sebagai satu kesatuan yang lengkap, yang seharusnya diutamakan adalah pemantapannya dalam artian yang ketiga, yaitu **ilmu pengetahuan sebagai masyarakat**, bukan dalam artian produk seperti yang sudah terlanjur dilakukan. Sebab hanya apabila kita berhasil membangun ilmu pengetahuan sebagai masyarakat, dalam artian mampu membuat kompleks pendidikan formal sebagai satu masyarakat ilmiah, baru akan dapat dikembangkan penelitian-penelitian, yaitu ilmu pengetahuan sebagai proses, dan hanya apabila ada ilmu pengetahuan sebagai proses akan berkembang semangat ilmiah dan lahir ilmu pengetahuan sebagai produk. Inilah hakikat dari kebijakan normalisasi kehidupan kampus dahulu.

Menurut pengamatan saya gejala kemasyarakatan yang sedang berkembang semakin menjelaskan secara obyektif betapa penting dan mendesaknya **membina kampus menjadi masyarakat ilmiah**. Berhubung di negeri kita di luar kampus embrio masyarakat ilmiah relatif sedikit sekali, bila kampus gagal dibina menjadi masyarakat ilmiah, hilanglah satu-satunya modal yang begitu kita perlukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebaliknya masyarakat ilmiah yang tidak turut hancur baik di Jerman (Timur dan Barat) maupun di Jepang terbukti sangat berperan dalam pembangunan kembali kedua negara tersebut dengan ritme yang bahkan relatif lebih cepat dari negara-negara Barat yang telah mengalahkan mereka dalam Perang Dunia Kedua itu.

Gejala kemasyarakatan yang sama menunjukkan juga betapa pentingnya pembinaan ilmu pengetahuan dalam artian proses. Setelah di tingkat legislatif para politisi menerima bulat Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kini tanggung jawab pemerintah di tingkat eksekutif untuk mewujudkan

pembangunan sebagai pengamalan Pancasila itu. Pihak eksekutif harus mampu tidak hanya membentuk teknostruktur yang diperlukan bagi kerja besar tersebut tetapi juga menempatkan di posisi-posisi kunci pada teknostruktur itu **pekerja-pekerja otak** (*knowledge workers*) yang sepadan. Mereka inilah yang melaksanakan *engineering* sebagai penerapan rasionalitas dan keahlian/kewenangan (*authority*) pada benda-benda dan organisasi sosial modern sebagai penerapan kedua tersebut pada manusia dan kelompok-kelompok sosial. Setiap demokrasi, termasuk demokrasi Pancasila, akan gagal bila ia tidak mampu menempatkan putra-putranya yang terbaik di tempat-tempat yang strategis pada jaringan kaitan teknostruktural. Termasuk putra-putri terbaik itu, untuk sebagian terbesar, walaupun tidak seluruhnya, adalah pekerja otak. Pekerja otak ini pada tahap penggemblengannya tiada lain adalah mahasiswa yang dibina menjadi **manusia penganalisis**, yang bersemangat ilmiah melalui ilmu pengetahuan dalam artian proses.

Manusia penganalisis yang tekun berusaha mengembangkan semangat ilmiah dalam dirinya ini sering dicap oleh aktivis politik kampus sebagai kutu buku yang tidak peka terhadap masalah-masalah masyarakat. Kalau kita semua mengakui bahwa umat manusia akan memasuki era IPTEK di Abad-XXI dan bahwa "IPTEK sesuatu masyarakat bangsa makin memainkan peran yang penting di dalam menentukan kedudukan peran masyarakat bangsa tersebut di antara masyarakat bangsa-bangsa di dunia,"* maka yang sebenarnya "peka" terhadap masalah-masalah masyarakat adalah justru mahasiswa-manusia penganalisis ini dan bukan sekali-kali mahasiswa-aktivis politik kampus yang hinggar-binggar itu. Terlepas dari ada-tidaknya Era IPTEK itu, mendalami ilmu pengetahuan dan mengembangkan semangat ilmiah itu memang sudah merupakan suatu kepekaan

* Brosur, Simposium "Menerawang Masa Depan Ilmu, Teknologi dan Seni", dalam rangka memperingati Lustrum VI ITB, 27-28 September 1989.

tersendiri karena kegiatan-kegiatan tersebut dalam dirinya merupakan latihan membuat nalar menjadi peka terhadap perkembangan hidup hari ini dan di hari-hari mendatang. Maka itu tidak sedikit analisis ilmiah yang bersifat futuristik, walaupun bukan profetis, di mana perhitungan dan model-model matematis sering dilibatkan.

Sebagai akibat penerapan IPTEK yang semakin intensif dan ekstensif di bidang komunikasi dewasa ini kita sudah hidup dalam *era informasi*.

Bila demikian hanya keberhasilan internalisasi ilmu pengetahuan dalam artian proses inilah kiranya yang dapat mencegah merosotnya ilmu pengetahuan menjadi sekedar *informasi* belaka dalam tanggapan dan pemahaman peserta didik sebagai akibat sampingan dari era informasi yang semakin mencekam umat manusia itu. Betapa tidak! Perspektif penguasaan ilmu pengetahuan oleh peserta didik berupa sebuah tangga keilmuan melalui mana dia beranjak naik dari **informasi ke pengetahuan ke ilmu pengetahuan ke kebijaksanaan** (*wisdom*), mula-mula **kebijaksanaan praktis** lalu (yang tertinggi) **kebijaksanaan teoretis**.

Proses peralihan progresif dari informasi hingga kebijaksanaan tidak terjadi secara otomatis. Pendidikan dalam ilmu pengetahuan dalam artian proses inilah yang menuntun peserta didik selangkah demi selangkah beranjak dari tingkat ketahuan tertinggi (kebijaksanaan teoretis).

Informasi berubah menjadi pengetahuan bila ia tidak “ditelan” begitu saja oleh yang menerima, tetapi “dicernakan” melalui (a) [sistem, tatanan (order), hubungan logis antara fakta-fakta, suatu persepsi tentang sebab-sebab-sebab terdekatnya dan beberapa dari akibat-akibatnya]. Bila “pencernaan” itu berupa (b) [penelitian, penyidikan, dan eksperimentasi pribadi yang dilakukan secara kontinu, konsisten dan terarah], pengetahuan berubah (meningkat) menjadi ilmu pengetahuan dalam diri peserta didik. Kalau keadaan sudah sampai pada tahap ini biasanya semangat ilmiah sudah berkembang

sebagai suatu “*second nature*” bagi orang yang bersangkutan dan hanya kemantapan perkembangan semangat ilmiah yang seperti itu orang tersebut bisa mendapatkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan praktis (*practical wisdom*) memungkinkan seseorang menerapkan keterpelajaran dan pengetahuannya demi peningkatan arti (*significance*), mutu, daya guna dan efektivitas kegiatannya sehari-hari (untuk kebaikan dirinya dan/atau kebaikan masyarakat). Kebijaksanaan teoritis (*theoretical wisdom*) adalah “*the search for truth about the world and man’s proper place in it.*” Ini adalah wawasan (*vision*) dari seorang ilmuwan/saintis murni atau peneliti, filosof dan “*man of great intellectual power, who is concerned with knowing things for their own sake.*” Gabungan (a) + (b) tadi adalah hakikat ilmu pengetahuan dalam artian proses. Maka hanya ilmu pengetahuan dalam artian proses inilah yang memungkinkan informasi menjadi kebijaksanaan, melalui pengetahuan dan ilmu pengetahuan, bagi yang menerimanya.

Era informasi, di mana kita sekarang hidup, membombardir kita dengan aneka ragam ketahuan – melalui berbagai macam media massa, pengajaran, training-yang satu belum sempat dipahami, diinternalisasikan, sudah datang puluhan lainnya, dan begitu terus-menerus. Dipandang dari sudut si pemberi informasi, ketahuan yang bersangkutan bisa saja berupa pengetahuan ilmiah-buah pikiran seorang guru besar atau produk penelitian seorang peneliti di laboratorium atau hasil eksperimen seorang saintis-tetapi bagi si penerima, karena datangnya bertubi-tubi, pengetahuan ilmiah ini menjadi informasi belaka, jangankan menjadi pengetahuan. Tanpa persiapan intelektual yang sepadan, si penerima menjadi bersikap pasrah, pasif, percaya begitu saja, menerima apa adanya. Jadi tanpa pendidikan yang ketat dalam ilmu pengetahuan dalam artian proses-yang membuahkan semangat ilmiah sebagai “*second nature*”-peserta didik, sebagai penerima ketahuan, mengalami tangga keilmuan yang terbalik : bukannya dari informasi terus merayap naik hingga

menjadi kebijaksanaan, bahkan jangankan mencapai kebijaksanaan, pengetahuan ilmiah saja merosot menjadi informasi tok dan tetap merupakan informasi belaka sampai dia merah gelar “kesarjanaannya”.

Dengan ini kiranya juga menjadi jelas bahwa ilmu pengetahuan dalam artian proses ini sama sekali tidak identik, bahkan berbeda sekali, dengan “dharma kedua” (penelitian) dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hakikat, *sense*, rasionale dan missi antara kedua hal tersebut sungguh berlainan, seperti siang dengan malam. Bagaimana mungkin peserta didik berilmu pengetahuan, apalagi berkebijaksanaan, kalau dia tidak pernah dituntun mengalami sendiri proses kehidupan ilmu pengetahuan, sejak pembentukan embrional hingga pembatalannya, dari alpha hingga omega.

I.2 Pengertian Kegiatan Ilmiah

Ilmu pengetahuan bukanlah segala sesuatu, apa saja, yang kita kehendaki. Berhubung dengan itu tidak semua kegiatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan adalah kegiatan ilmiah. Artinya, bekerja di laboratorium atau di perpustakaan atau memberi kuliah tidak dengan sendirinya merupakan kegiatan ilmiah.

Ilmu pengetahuan sebagai suatu jenis pengetahuan atau suatu cabang studi berurusan dengan dunia yang kasatmata (*visible world*). Untuk meng-**ada**-kan pengetahuan ilmiah tersebut orang menempuh metode tertentu yang bila dinyatakan dalam term kegiatan berupa : mengumpulkan fakta, membentuk hipotesis atau hukum guna mensistematik serta mengkorelasikan fakta-fakta itu dalam suatu tatanan yang logis dan melaksanakan percobaan (*experiments*) atau mencari fakta-fakta selanjutnya untuk menguji hipotesis atau hukum tadi. Dengan kata lain, demi mendapatkan fakta-fakta, ilmuwan dan/atau saintis mula-mula mengamati dunia alami di sekitarnya, menempatkan hasil-hasil pengamatan tersebut dalam proses testing (*experiments*)

yang cukup ketat dan lalu merumuskan suatu teori umum atau hukum.

Jadi fakta-fakta, betapapun banyaknya, tidak merupakan “ilmu pengetahuan”. Metode yang dipakai untuk menangani fakta-fakta itulah yang merupakan ilmu pengetahuan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk metode itu secara esensiil berupa mengubah fakta menjadi teori, yaitu membuat masalah (fakta) menjadi permasalahan (teori), mengerjakannya dan merumuskan pemecahannya. Jadi ciri pokok dari ilmu pengetahuan adalah kultivasi permasalahan dan skeptisisme yang teratur. Artinya ilmu pengetahuan terbentuk dari dorongan untuk memahami dan memecahkan masalah (mendapatkan kebenaran). Semakin dalam pengetahuan ilmiah ini terlibat dalam kesibukan seperti ini semakin ia mendekati tuntutan missinya. Kesibukan atau kegiatan seperti itu adalah meneliti, menyidiki (investigasi) atau mengkaji.

Meneliti adalah usaha menemukan kebenaran ilmiah atau membuktikan kekeliruannya. Ilmu pengetahuan adalah kreasi yang terbentuk dari dorongan untuk mencari pemahaman kebenaran melalui pemecahan masalah. Jadi tidak benar bahwa kegiatan ilmiah adalah tidak kreatif. Mencari kebenaran merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia dan kebenaran itu sendiri tak terelakkan. Andaikata dahulu apel tidak jatuh di atas kepala Newton pada waktu t , buah ini pasti akan jatuh menimpa kepala orang lain pada waktu $t + 1$, atau pada waktu $t + n$. mungkin saja hal tersebut telah terjadi sebelumnya, pada waktu $t - 1$, atau pada waktu $t - n$, hanya orang yang tertimpa apel itu tidak bereaksi seperti newton. Orang tersebut hanya kaget, tetapi *curiosity* dan nalarnya tidak tergugah. Maka yang dilakukan oleh sorang ilmuwan sebenarnya mencetuskan sesuatu lebih cepat daripada yang akan terjadi secara normal. Jadi dia tidak hanya kreatif, dia benar-benar seorang katalis. Namun mulai dari saat pemecahan (kebenaran) itu diperoleh, segala sesuatu kegiatan yang dilakukan dengan pemecahan (kebenaran) itu, bukan lagi ilmu pengetahuan tetapi ekspertis atau kegiatan profesional. Dan hal inilah yang persis

semakin lama semakin banyak dilakukan sekarang oleh para “sarjana” kita baik di dalam maupun, bahkan lebih-lebih, di luar kampus berupa seminar, komperensi, raker, dan lain-lain.

I.3 Integristas Ilmu Pengetahuan

Harus diakui bahwa integritas masyarakat ilmiah kita masih jauh dari sempurna. Keadaan yang memprihatinkan ini bukan saja karena ia belum mampu mendesakkan sepenuhnya keempat ketentuan disebut di atas tadi sebagai pengatur perilaku para “sarjana” tetapi juga disebabkan para warga masyarakat ilmiah kita kiranya belum menghayati sepenuhnya asas-asas integritas ilmu pengetahuan. Mungkin justru karena tidak adanya penghayatan tersebut maka keempat pengatur perilaku di masyarakat ilmiah itu masih lebih banyak merupakan “huruf mati” belaka. Saintis Gerald Holton yang beruntung hidup se-zaman dengan Niels Bohr melihat betapa fisikawan Denmark ini sampai akhir hayatnya menghayati empat asas integritas ilmiah, yang menurut Holton tetap pantas dipujikan dikalangan ilmuwan generasi sekarang.*

Ilmuwan membedakan dirinya dari lain-lain pencari kebenaran dengan jalan menguji “kebenaran” itu dengan ketegasan logika dan percobaan yang diulang-ulang terus-menerus. Akibatnya para ilmuwan seharusnya mengadakan kontak satu dengan lainnya dengan cara-cara yang tidak lazim dilakukan di lingkungan kelompok-kelompok sosial lainnya. Maka asas pertama dari integritas ilmiah yang dihayati oleh Bohr itu adalah: **utarakan dengan jelas sebagaimana adanya**. Ilmuwan bisa saja meminta bantuan dan advis apabila mungkin; namun dia lalu harus berani jalan terus untuk membuktikan kepada orang lain bahwa gagasan ilmiahnya adalah *correct*.

* Gerald Holton, “Niels Bohr: Model of Scientific Integrity”, *American Scientist* (May-Jun. 1986)

Bohr kelihatan selalu bergulat untuk memahami dan mengkomunikasikan apa yang dipahaminya; dalam berbuat begitu uraian lisannya bisa begitu kompleks, jauh lebih kompleks ketimbang tulisan-tulisannya. Ketika ditanyakan oleh Holton mengapa demikian, Bohr menjawab: *"I do not choose to speak more clearly than I think . . ."*. Kebiasaan menyebarluaskan penemuan dan gagasan ilmiah ini bukan sekali-kali karena ingin "sok tahu" tetapi karena hanya melalui pemasyarakatan seperti inilah ilmuwan dapat menegaskan haknya atas penemuan atau gagasan tersebut. Berhubung sifat studi para ilmuwan yang begitu esoteris, mereka dapat memperoleh pengakuan yang absah hanya dari sesama warga masyarakat ilmiah dan saingan-saingan potensiil yang ada di situ.

Namun Bohr dapat mengutarakan apa yang dipikirkannya di bidang ilmu pengetahuan karena dia tidak bertepuk sebelah tangan; masyarakat ilmiah Barat sudah punya tradisi "gayung bersambut, kata berjawab". Di situ mendengarkan uraian ilmiah orang lain sudah dianggap merupakan suatu keharusan yang wajar dipenuhi oleh seorang ilmuwan, suatu sikap justru belum membudaya di kalangan "sarjana" kita. Maka kalau di Barat hal ini sudah dianggap "biasa", di negeri kita kiranya perlu dinyatakan pula sebagai suatu asas integritas ilmiah: **keharusan para ilmuwan saling menilai karya masing-masing berdasarkan** *"preestablished impersonal criteria"*.

Kriteria itu bisa berlainan untuk masing-masing disiplin ilmiah namun hakikatnya sama, yaitu berupa penegasan yang ideal dari ketentuan dan norma metodologis dalam penelitian/penyidikan. Mematuhi ketentuan dan norma ini bagi ilmu pengetahuan sama pentingnya artinya dengan pemaksaan hukum dagang dan bea-cukai bagi ekonomi. Maka itu serajat kepatuhan atau ketaatan pada norma dan ketentuan tersebut di berbagai bidang dan tempat keilmuan menentukan sekali tingkat perkembangan ilmu pengetahuan, paling sedikitnya pemahaman keadaan tersebut. Kemungkinan pencurian

penemuan ilmiah terjadi semakin besar dengan semakin berkurangnya kegairahan para ilmuwan menekuni tulisan-tulisan analitis orang lain. Penemuan-penemuan ilmiah dapat saja dicuri karena nilainya tidak terganung pada *style* pribadi. Berdasarkan pengamatan atas masyarakat ilmiah bangsa-bangsa maju kiranya dapat dikatakan bahwa kepatuhan yang konsekuen pada norma dan ketentuan itu bahkan dapat menegakkan “obyektivitas” ilmu pengetahuan. Sebab “obyektivitas” ini bukan dijamin oleh perspektif sosial pada umumnya tetapi oleh kemampuan dan integritas dari masyarakat ilmiah itu sendiri, yaitu masyarakat dari ilmuwan yang menghayati asas integritas ilmu pengetahuan.

Kedua asas integritas ilmiah yang baru disebut tadi mengingatkan kepada para ilmuwan bahwa parameter manusiawi dari pengetahuan ilmiah ada bukan saja karena pengetahuan jenis ini diadakan oleh manusia tetapi juga diadakan untuk manusia. Yang dimaksudkan dengan “untuk manusia” ini bukanlah sekedar mengingatkan adanya fungsi-fungsi terapan dan praktis dari ilmu pengetahuan, tetapi kenyataan bahwa pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang melalui metode ilmiah seharusnya dapat dipahami dan dikuasai juga oleh orang-orang lain, paling sedikitnya oleh sesama warga masyarakat ilmiah.

Asas integritas ilmiah ketiga (yang kedua kalau bagi Niels Bohr) adalah: **usahakan pertama-tama (dan terutama) menjadi ilmuwan/saintis, baru sesudah itu (yang kedua) menjadi spesialis.** Artinya, bila kita merasa terpenggil untuk menyumbang lebih banyak dari sekedar batu bata - batu bata lepas (*individuil*), sebaiknya seluruh energi hidup kita digunakan untuk membangun apa yang disebut Einstein “*the great temple of science*”. Dalam hal ini Bohr lagi-lagi memberikan contoh ketika, dalam makalahnya di tahun 1913, dia mengetengahkan “*the corespondence principle*” dalam bentuk awalnya justru untuk mengkaitkan fisika kuantum dengan fisika klasik dalam batas orbit-orbit yang luas.

Asas ketiga tersebut pasti bukan hendak mengatakan bahwa spesialisasi tidak berguna. Memang ada kebutuhan terhadap spesialis. Berhubung dengan itu kegunaan dari hasil spesialisasi ilmiah memang tidak terbantah. Perkembangan yang pesat dari disiplin yang spesialis ini merupakan akar dari hegemoni ilmu pengetahuan dan, karenanya, lembaga-lembaga yang memupuk akar tersebut cenderung untuk dijadikan model bagi banyak lingkungan kerja ilmiah. Namun walaupun pengkotak-kotakan ilmu pengetahuan sulit untuk dielakkan, ilmuwan itu sendiri seharusnya jangan mengurung dirinya dalam sel disiplin ilmiahnya masing-masing. Penelitian-penelitian yang dilakukan hendaknya tidak dipecah belah lebih banyak dari yang sangat diperlukan, lebih-lebih bila penelitian itu dimaksudkan hendak mencari jawaban terhadap kualitas yang menjadi ciri keutuhan manusia.

Terlepas dari apa yang diteliti hendaknya ilmuwan, lebih-lebih bila di samping itu dia bergerak juga di bidang pendidikan, tetap mempunyai komitmen terhadap kesatuan ilmu pengetahuan dan, lebih dari itu, terhadap kesatuan budaya intelektual. Artinya, para dosen dari berbagai disiplin yang berbeda perlu mengadakan pertemuan secara berkala untuk mendiskusikan kuliah masing-masing, untuk saling memberi tahu bacaan-bacaan (*readings*) tertentu dan untuk menemukan perspektif-perspektif baru dalam buku dan tulisan analitis serta esai yang sudah beredar. Kebiasaan seperti ini akan membentuk suatu masyarakat *civitas academica* yang riil dan integer – walaupun dibentuk oleh orang-orang yang berlainan disiplin – di mana anggota-anggotanya tidak takut-takut untuk mengutarakan keterpelajarannya atau ketidaktahuannya, keragu-raguannya atau dogmanya di bidang keilmuan. Tentu saja mahasiswa-mahasiswa yang sudah dilatih dalam dan terbiasa dengan ilmu pengetahuan dalam artian proses baik sekali bila diikutsertakan dalam pertemuan-pertemuan dosen seperti ini agar diskusi-diskusi yang bersifat pluri dan interdisipliner tersebut menjadi *revealing*,

menggugah dan sugestif bagi pengembangan semangat ilmiah mereka.

Asas integritas ilmu pengetahuan yang keempat (ketiga kalau bagi Bohr) adalah: **ilmu pengetahuan adalah, dan seharusnya merupakan, bagian dari keseluruhan pandangan dunia zaman sekarang.** Karena “zaman sekarang” adalah masa waktu di mana ilmuwan yang bersangkutan sedang menjalani hidupnya, maka “pandangan dunia” itu adalah wawasan (*vision*) yang seharusnya dijajaki secara imaginatif, dipertahankan dan turut dikembangkan oleh sang ilmuwan.

Asas terakhir (keempat dari yang dihayati Bohr), adalah: **tugas khusus kewarganegaraan andalan yang harus dilaksanakan oleh ilmuwan, masing-masing dengan caranya sendiri** (sesuai dengan disiplin ilmiahnya masing-masing). Setiap zaman membawa masalahnya sendiri bagi setiap Negara-Bangsa, Abad-XXI menadatang tidak terkecuali. Maka tugas ilmuwan Indonesia sebagai warga andalan – *la noblesse oblige!* – adalah memupuk kepekaan nalar terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan oleh era IPTEK bawaan Abad-XXI dan sekaligus memikirkan jawaban-jawaban ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang tersebut. Demi memupuk kepekaan nalar itulah perlunya membangun kampus menjadi masyarakat ilmiah dan sekaligus membina semangat ilmiah melalui pendidikan ilmu pengetahuan dalam artian

II. KRISIS METAFISIS DALAM ILMU PENGETAHUAN

Sejak Abad-XVII (ilmu) fisika telah merupakan contoh cemerlang dari suatu disiplin ilmiah eksak dan dijadikan model dari semua ilmu pengetahuan lainnya. Keadaan seperti ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan. Sebab-sebab, fisika, dan metode kerjanya, merupakan salah satu dari alat-alat penting yang esensiil bagi perkembangan pikiran modern.

Selama dua setengah abad ilmuwan-ilmuwan fisika memakai pandangan dunia yang mekanistik dan dualistik untuk mengembangkan dan menyempurnakan kerangka konseptual dari disiplin yang kini dikenal sebagai fisika klasik. Mereka mendasarkan gagasan-gagasannya atas teori matematik dari Isaac Newton, filosofi Rene Descartes serta metodologi ilmiah yang dianjurkan oleh Francis Bacon dan mengembangkan gagasan-gagasan tersebut sesuai dengan konsepsi umum tentang realitas yang berlaku selama abad-abad XVII, XVIII dan XIX.

Berkat penemuan-penemuan baru yang dilakukan oleh pemikir-pemikir yang tampil pada akhir Abad-XIX-awal Abad-XX Einstein, Planck, Bohr, Broglie, Rutherford, Oppenheimer, Heisenberg, Prigogine, Capra, Wheeler dan lain-lain – fisika klasik berkembang menjadi apa yang sekarang dinamakan fisika modern. Fisika modern ini punya pengaruh yang mendalam pada hampir semua aspek masyarakat manusia. Ia menjadi dasar dari ilmu kealaman dan kombinasi antara ilmu kealaman dan ilmu keteknikan telah mengubah secara fundamental kondisi hidup di bumi ini, baik dalam arti yang positif maupun yang negatif. Dewasa ini hampir tidak ada satu industri pun di negara maju yang tidak memanfaatkan hasil-hasil kerja fisika atom dan pengaruh pemanfaatan ini atas struktur politik dunia melalui penerapannya pada sistem persenjataan atom telah menjadi rahasia umum. Namun pengaruh fisika modern ternyata jauh melampaui teknologi. Pengaruh ini meluas sampai ke bidang pemikiran dan kebudayaan begitu rupa sehingga menimbulkan revisi dalam konsep manusia tentang alam semesta dan hubungan manusia dengan alam semesta tersebut.

Eksplorasi dunia atom dan subatom oleh fisika modern dalam Abad-XX ini telah mengungkapkan keterbatasan-keterbatasan dari gagasan-gagasan klasik yang tak terduga sama sekali sebelumnya dan mengharuskan para saintis modern mengadakan revisi yang cukup radikal mengenai banyak konsep dasar yang selama ini di-

pegang teguh sebagai kebenaran. Bahkan lebih jauh lagi dari itu, berkat sifat alami dari disiplin ilmiah yang digeluti mereka, beberapa ilmuwan fisika modern – bersama-sama dengan berbagai saintis dan filosof – melihat adanya gejala-gejala krisis metafisis dalam sains pada khususnya dan ilmu pengetahuan modern pada umumnya. Celakanya, ilmuwan-ilmuwan dari disiplin nonfisika yang selama ini berkiblat pada pola pikir disiplin fisika pada umumnya bersikap acuh tak acuh pada perkembangan krisis tersebut.

Berhubung dengan itu, di samping berusaha keras untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk sains, pada waktu yang bersamaan seharusnya kita tidak bersifat *“indifferent”* terhadap krisis metafisis yang kini melanda sistem pengetahuan ilmiah. Situasi fisika sebagaimana dikatakan tadi kiranya merupakan peringatan profetis bagi semua pengetahuan ilmiah tradisional. Belum lama yang lalu pendapat serta pernyataan dalam fisika dianggap sudah lengkap dan *“closed”* dan asas-asas utamanya sudah mantap untuk selama-lamanya. Sir Isaac Newton telah mensistensiskan dan menjabarkan apa-apa yang disurat dan disratkan Tuhan dalam dunia materi; karena itu yang harus dilakukan oleh guru dan peserta didik hanyalah *“to master the master”*. Sekarang berangsur-angsur sudah terungkap adanya *“creative confusion”* dalam rekonstruksi ilmu yang terunggul di antara ilmu-ilmu kealaman ini. Begitu rupa sehingga salah seorang fisikawan kontemporer mengatakan betapa fisika selama ini ternyata *“leaps from one lie to another by means of intermediate falsehoods”*.

Untuk mengenal rangkaian krisis dan/atau *“falsehoods”* ini akan dibahas berturut-turut, (1) pandangan dualistis, mekanistik, fragmentaris sains klasik, (2) paradoksa dan kontradiksi realitas alam, (3) partisipasi versus observasi ilmuwan dalam obyek yang diteliti dan, (4) abstraksi dan keterbatasan bahasa dalam penyampaian kebenaran ilmiah.

11.1 Pandangan Dualistis, Mekanistik, Fragmentaris

Kelahiran ilmu pengetahuan modern pada umumnya dan kemajuan yang begitu pesat dari sains dan teknologi modern pada khususnya, telah terjadi berdasarkan seperangkat asumsi metafisis yang meliputi, (i) **obyektivisme** – asumsi bahwa ada suatu *objective universe* yang dapat dieksplorasi melalui observasi eksternal dan penelitian ilmiah, serta didekati, semakin lama semakin akurat, dengan model-model kuantitatif; (ii) **positivisme** – asumsi bahwa apa-apa yang riil (secara ilmiah) adalah hal-hal yang dapat diukur secara fisik; (iii) **reduksionisme** – asumsi bahwa pemahaman ilmiah diperoleh dengan jalan mereduksi gejala-gejala menjadi hal-hal yang lebih elemental (seperti gerakan dari partikel-partikel elementer atau konfigurasi dari medan elektromagnetik); (iv) **dualisme** – asumsi bahwa alam terbagi dalam dua bidang yang terpisah dan mandiri, yaitu bidang nalar (*res cogitans*) dan bidang materi (*res extensa*); (v) **mekanisme** – asumsi bahwa dunia materi merupakan sejumlah besar obyek yang berbeda-beda yang dirakit ke dalam sebuah “mesin raksasa”.

Salah satu dari “*the great surprises*” di bidang penalaran ilmiah dalam dasawarsa yang baru lalu adalah bahwa “*the adequacy*” dari semua asumsi tersebut benar-benar ditantang dan sangat dipersoalkan. Bahkan pandangan dunia yang serba dualistis, mekanistik dan fragmentaris itu dipersalahkan sebagai penyebab timbulnya krisis metafisis tidak hanya dalam ilmu pengetahuan tetapi juga di berbagai bidang kehidupan manusia lainnya.

Betapa tidak. Perumusan ekstrem tentang dualisme nalar (jiwa) – materi muncul di Abad XVII dalam filosofi **Rene Descartes**. Pembagian “*cartesian*” yang dualistis ini memungkinkan para ilmuwan memperlakukan materi sebagai **mati** serta benar-benar **terpisah dari mereka sendiri** dan melihat dunia materi sebagai sejumlah besar obyek yang berbeda-beda yang dirakit ke dalam sebuah **mesin**

raksasa. Pandangan dunia yang serba mekanistik tersebut dimiliki pula oleh **Isaac Newton**, yang menyusun mekanikanya menurut pandangan itu dan menjadikannya dasar dari fisika klasik.

Materi dipikirkan sebagai dasar dari semua eksistensi dan dunia materi ini dianggap sebagai sekumpulan obyek-obyek lepas yang direkayasa ke dalam sebuah mesin raksasa. Sama halnya dengan mesin buatan manusia, mesin kosmis ini pun dianggap terdiri dari unsur-unsur elementer. Maka itu ada anggapan bahwa gejala-gejala yang kompleks selalu dapat dipahami dengan jalan meredusirnya sampai unsur-unsur dasarnya yang terkecil dan dengan jalan mencari mekanisme yang memungkinkan unsur-unsur bagian tersebut berinteraksi. Sikap seperti ini, dikenal sebagai “reduksionisme”, telah berurat berakar di dalam budaya akademis Barat begitu rupa sehingga ia diidentifikasi sebagai **metode ilmiah**. Ilmu pengetahuan-ilmu pengetahuan lainnya menerima pandangan mekanistik dan reduksionistik dari fisika klasik ini sebagai deskripsi yang tepat mengenai **realitas** dan merumuskan teori-teori mereka sendiri sesuai dengan itu. Sejak paruh kedua Abad-XVII hingga akhir Abad-XIX, model mekanistik Newton tentang alam semesta ini praktis menguasai semua pemikiran ilmiah. Bilamana psikolog, sosiolog, atau ekonom ingin bersikap dan berbuat serba ilmiah, mereka pasti menghadapkan nalar ke arah konsep-konsep dari fisika Newton.

Filosofi Descartes tidak hanya penting bagi perkembangan (ilmu) fisika klasik, tetapi juga sangat mempengaruhi jalan pikiran umum Barat hingga dewasa ini. Ungkapan Descartes “*cogito ergo sum*” – “saya berpikir maka itu saya ada” – mengarahkan orang-orang Barat untuk menyamakan identitas mereka dengan nalar dan bukan dengan keseluruhan organisme mereka. Sebagai konsekuensi dari pembagian “*cartesian*” ini, menurut fisikawan capra, kebanyakan individu (Barat) menganggap diri mereka sebagai *ego* yang terpisah-pisah “di dalam” badan masing-masing. Nalar dipisahkan dari badan dan nalar ini mendapat tugas berat untuk mengawasi badan. Hal ini

menyebabkan timbulnya konflik yang terbuka antara kemauan yang sadar dengan naluri yang terpaksa. Setiap individu terpecah-belah lagi ke dalam sejumlah besar kotak-kotak tersendiri – sesuai dengan kegiatan, bakat, perasaan dan kepercayaannya – yang terlibat dalam konflik-konflik yang berkepanjangan, yang menimbulkan kebingungan dan frustrasi yang berkesinambungan.

Fragmentasi batin ini mencerminkan pandangan Barat tentang dunia yang di “luar” dirinya, yang dilihatnya sebagai sejumlah besar obyek dan peristiwa yang terpisah-pisah. Lingkungan alami diperlakukan seolah-olah terdiri dari bagian-bagian yang terpisah, yang siap untuk digarap oleh “*interest groups*” yang berbeda-beda. Pandangan yang terpecah-belah ini selanjutnya meluas ke dalam kehidupan bermasyarakat yang juga terpisah-pisah menjadi golongan rasial, kelompok politik, dan lain-lain. Kepercayaan bahwa semua bagian yang terpisah-pisah ini – yang terdapat dalam diri pribadi, dalam lingkungan dan dalam masyarakat – adalah memang benar-benar terpisah kiranya dapat dilihat sebagai penyebab pokok dari timbulnya rangkaian krisis sosial, krisis lingkungan dan krisis kebudayaan dewasa ini. Jadi menurut para pemikir Barat sendiri, pembagian “*cartesian*” serta pandangan dunia yang serba mekanistik ini pada waktu yang bersamaan telah membawa **manfaat** dan **kerusakan**. Keduanya memang sangat berhasil dalam mengembangkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah (termasuk ilmu fisika klasik) dan teknologi, tetapi setiap pengetahuan ilmiah menjadi fragmentaris. Fragmentaris tidak hanya secara ekstensif, yaitu membuat suatu bagian kenyataan yang dibatasi secara tertentu sebagai bidang penelitiannya, tetapi juga dalam arti intensif, yaitu memandang obyek penelitiannya semata-mata melalui suatu sudut pandang tertentu dengan mengabaikan sudut pandang lain yang mungkin. Fragmentasi ini pada gilirannya membawa banyak juga konsekuensi buruk terhadap peradaban. Maka ilmu pengetahuan modern di penghujung Abad-XX, yang berasal dari pembagian “*cartesian*” dan pandangan dunia yang

mekanistik serta reduksionistik – dan yang perkembangannya memang hanya dimungkinkan oleh pembagian dan pandangan seperti itu – kini kelihatan berusaha mengatasi fragmentasi tersebut dengan memandang kearah gagasan kesatuan.*

II.2 Paradoks dan Kontradiksi

Setiap kali para ilmuwan fisika mempertanyakan alam dalam suatu eksperimen atom, alam menjawabnya dengan suatu paradoks dan semakin banyak mereka berusaha menjelaskan keadaan ini, menurut Capra, semakin menonjol jadinya paradoks tersebut. Diperlukan waktu yang lama juga bagi mereka untuk menerima fakta bahwa paradoks-paradoks itu tergolong pada struktur instrinsik dari fisika atom dan untuk menyadari bahwa paradoks-paradoks itu timbul apabila ada usaha-usaha untuk memaparkan kejadian-kejadian atom menurut pengertian-pengertian fisika klasik. Begitu hal ini disadari, mereka mulai memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan mengelakkan kontradiksi. “Mereka ini”, kata Heisenberg, “kerasukan semangat teori kuantum”, dan akhirnya mereka berhasil menemukan perumusan matematis yang tepat dan konsisten dari teori tersebut.

Konsep teori kuantum tidak mudah diterima walaupun perumusan matematisnya sudah dibuat lengkap. Efeknya pada imajinasi ilmuwan fisika benar-benar menguncangkan. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford, misalnya, menunjukkan bahwa atom, yang semula dikira keras dan tak terpecahkan, alih-alih terdiri dari ruang berwilayah luas di mana bergerak partikel-partikel yang kecil sekali. Sekarang teori kuantum menegaskan bahwa partikel-partikel itu sama sekali bukan obyek-obyek solid seperti dalam gambaran fisika klasik. Kesatuan-kesatuan subatom dari materi adalah kesatuan-

* Lihat uraian dalam Bab III dari tulisan ini.

kesatuan yang sangat abstrak dan beraspek ganda. Tergantung pada bagaimana kita melihatnya, kesatuan-kesatuan tersebut kadang-kadang tampil sebagai partikel, kadang-kadang sebagai gelombang. Sifat kegandaan ini juga ditampilkan oleh cahaya yang bisa berwujud sebagai gelombang elektromagnetis atau berupa partikel.

Ciri-ciri materi dan cahaya yang seperti ini memang aneh. Maka itu mula-mula memang sulit untuk diterima bahwa sesuatu, pada waktu yang bersamaan, dapat berupa partikel – yaitu satu kesatuan yang bervolume sangat kecil – dan berwujud gelombang, yang menyebar di keluasan wilayah suatu ruang. Aspek ganda yang kontradiktif dari materi dan cahaya ini menimbulkan sebagian besar dari paradoks yang akhirnya menjurus ke perumusan teori kuantum. Keseluruhan perkembangan ini bermula ketika Max Planck menemukan bahwa energi dari radiasi panas tidak terpancar terus-menerus, tetapi tampil berupa “*energy packets*”. Einstein menamakan paket-paket energi ini **kuanta** dan mengakuinya sebagai suatu aspek fundamental dari alam. Dia bahkan cukup berani untuk berpostulat bahwa cahaya dan lain-lain bentuk radiasi elektromagnetis dapat tampil tidak hanya sebagai gelombang elektromagnetis tetapi juga berupa kuantum tersebut. Kuantum cahaya, yang memberikan namanya pada **teori kuantum**, sejak itu diterima sebagai “*bonafide particles*” dan kini disebut *photon*. Namun ia adalah partikel-partikel dari jenis yang khusus, tidak bermassa dan selalu bergerak dengan kecepatan cahaya.

Kontradiksi yang begitu jelas antara gambaran partikel gambaran gelombang yang dipecahkan dengan cara yang sama sekali tidak terduga ini sebenarnya mempersoalkan dasar dari pandangan dunia yang mekanistik – konsep tentang realistik materi. Di tingkat subatom materi tidak berada dengan pasti di tempat-tempat tertentu, tetapi menunjukkan “*tendencies to exist*” dan peristiwa-peristiwa atom tidak terjadi dengan pasti pada waktu-waktu tertentu dan dengan cara-cara tertentu, tetapi lebih menunjukkan “*tendencies to accur*”. Dalam perumusan teori kuantum “*tendencies*” tersebut dinyatakan sebagai

probabilitas dan diasosiasikan dengan kuantitas matematis yang berupa gelombang-gelombang. Inilah sebabnya mengapa partikel pada waktu yang sama dapat pula berupa gelombang. Namun ia bukan merupakan gelombang tiga dimensional “riil” seperti gelombang-gelombang suara dan air. Ia adalah “gelombang-gelombang probabilitas”, kuantitas-kuantitas matematis abstrak dengan semua ciri-ciri yang khas dari gelombang yang berkaitan dengan probabilitas penemuan partikel titik-titik tertentu dalam ruang pada waktu-waktu tertentu. Semua hukum dari fisika atom dinyatakan dalam term probabilitas ini. Kita tidak akan dapat meramalkan suatu peristiwa atom secara pasti; yang dapat kita katakan hanyalah bagaimana ia kira-kira akan terjadi.

Jadi teori kuantum telah meruntuhkan konsep-konsep klasik tentang obyek-obyek solid dan hukum-hukum alam yang betul-betul deterministik. Di tingkat subatom obyek-obyek materi solid yang dikonsepkan oleh fisika klasik lebur menjadi pola-pola mirip gelombang dari probabilitas dan pola-pola ini, akhirnya, tidak menyatakan probabilitas dari interkoneksi. Analisis yang teliti mengenai proses pengamatan dalam fisika atom telah menunjukkan bahwa partikel-partikel subatom tidak punya arti sebagai kesatuan-kesatuan yang menyendiri tetapi hanya dapat dipahami sebagai interkoneksi antara persiapan suatu eksperimen dengan pengukuran-pengukuran berikutnya. Jadi teori kuantum mengungkapkan suatu kesatuan yang begitu mendasar dari alam semesta. Dengan perkataan lain, ia menunjukkan bahwa kita tidak dapat memilah-milah dunia menjadi kesatuan-kesatuan terkecil yang berdiri sendiri-sendiri secara mandiri.

Semakin jauh kita menyusupi alam, alam ini sama sekali tidak menunjukkan adanya “*basic building block*”, seperti yang dikatakan oleh Descartes, tetapi tampil sebagai sebuah jaringan yang jelimet dari hubungan-hubungan antara berbagai bagian dari suatu keseluruhan. Dan hubungan-hubungan ini selalu meliputi sang pengamat secara esensiil. Manusia pengamat ini merupakan “*the final link*” di

dalam mata rantai proses pengamatan dan ciri-ciri khas dari sesuatu obyek atom dapat dipahami hanya dalam term interaksi obyek yang bersangkutan dengan sang pengamat. Hal ini berarti bahwa ideal klasik tentang deskripsi yang obyektif mengenai alam tidak lagi berlaku. Pembagian Descartes antara aku dan dunia, antara pengamat dan yang diamati, tidak dapat dilakukan bila berurusan dengan masalah atom. Dalam fisika atom, tidak mungkin kita berbicara mengenai alam tanpa, pada waktu yang sama, kita berbicara tentang diri kita sendiri. Jadi sekarang sudah dipertanyakan apakah ilmuwan masih sekedar berupa pengamat (*observer*) atau sudah berupa peserta (*participator*) terhadap obyek yang diminatinya.

II.3 Partisipasi Versus Observasi

Pembawaan krusial dari fisika atom adalah bahwa manusia pengamat diperlukan tidak hanya untuk mengamati ciri-ciri khas sesuatu obyek, tetapi bahkan diperlukan untuk mendefinisikan ciri-ciri khas tersebut. Dalam fisika atom kita tidak bisa begitu saja membicarakan ciri-ciri khas sesuatu obyek. Ciri-ciri itu dalam konteks interaksi obyek yang bersangkutan dengan sang pengamat. “Apa-apa yang kita amati”, kata Heisenberg, “bukanlah alam itu sendiri, tetapi alam yang diekspos metode pertanyaan-pertanyaan kita.” Pengamat menentukan bagaimana dia menyusun pengukuran dan pengaturan tersebut akan menetapkan, sampai tingkat tertentu, ciri-ciri khas dari obyek yang diamati. Jika pengaturan eksperimentil ini diubah, ciri-ciri khas dari obyek yang diamati itu pada gilirannya akan berubah.

Bila pada tingkat atom “obyek” dapat dipahami hanya dalam term interaksi antara proses persiapan dan pengukuran, akhir dari rangkaian proses-proses tersebut selalu terletak di dalam kesadaran dari manusia pengamat. Pengukuran-pengukuran adalah interaksi yang mencetuskan “sensasi” di dalam kesadaran kita (manusia) –

misalnya, sensasi visual dari sebersit cahaya atau dari sebuah bercak hitam pada sebuah plat fotografi – dan hukum-hukum fisika atom mengatakan kepada kita berapa besar probabilitas suatu obyek atom akan mencetuskan suatu sensasi tertentu bila ia dibiarkan berinteraksi dengan kita. “Ilmu alam”, kata Heisenberg, “tidak semata-mata memaparkan dan menjelaskan alam; ia adalah bagian dari *interplay* antara alam dan kita sendiri.

Jadi dalam fisika atom, saintis tidak dapat berperan sebagai pengamat obyektif yang tak terkait, tetapi menjadi terlibat dengan dunia yang diamatinya begitu rupa sehingga dia mempengaruhi ciri-ciri khas dari obyek yang diamatinya. John Wheeler malah melihat pelibatan dari pengamat ini sebagai “*the most important feature*” dari teori kuantum dan karena itu dia mengusulkan untuk mengganti-kan sebutan “*observer*” (pengamat) dengan sebutan “*participator*” (peserta). Bila ucapannya mengenai hal ini dikutip, berbunyi: “*Nothing is more important about the quantum principle than this, that it destroys the concept of the world as “sitting out there”, with the observer safely separated from it by a 20-centimeter slab of plate glass. Even to observe so minuscule an object as an electron, he must shatter the glass. He must reach in. he must install his chosen measuring equipment. It is up to him to decide whether he shall measure position or momentum. To install the equipment to measure the one prevents and excludes his installing the equipment to measure the other. Moreover, the measurement changes the state of the electron. The universe will never after ward be the same. To descibe what has happened, one has to cross out that old world “observer” and put in its place the new word “participator”. In some strange sense, he universe is a parsicipatory universe.*”*

*J.A Wheeler, dalam J. Mehra (ed.), *The Physicist's Conception of Nature* (D. Reidel, Dordrecht-Holland, 1973)

Masalah “observer” versus “participator” ini sampai dikatakan merupakan pertanda adanya krisis metafisi dalam ilmu pengetahuan modern bukan saja karena ia menyangkut fisika yang selama ini dijadikan kiblat ketepatan penalaran ilmiah oleh semua disiplin keilmuan, tetapi karena hal tersebut sekaligus mempertanyakan pengertian “obyektivitas” dan “rasionalitas” yang selama ini dibangga-banggakan oleh para ilmuwan pada umumnya. Obyektivitas dan rasionalitas ilmiah sampai sekarang pun masih digambarkan sebagai satu jaminan dari kebenaran yang dikemukakan oleh ilmu pengetahuan (termasuk sains). Dengan metodenya yang rasionil-obyektif ilmu pengetahuan bertujuan memahami “*the true laws*” yang memungkinkan alam dapat dimengerti dan diperkirakan. Maka itu melalui ilmu pengetahuan seperti inilah manusia, kata Descartes, menjadi “*masters and prossessors of nature*”.

Immanuel Kant juga mengatakan bahwa alam secara esensiil terdiri dari hukum-hukum. Namun filosof yang disebut sebagai salah seorang pemikir terpenting dari jaman modern ini telah mengingatkan bahwa hukum-hukum tersebut tidak diberikan kepada kita berupa sesuatu yang siap-pakai, tetapi berasal dari subtektivitas orang yang memikirkannya karena hal itulah yang merupakan prasyarat bagi semua pengetahuan. Jadi pengetahuan mengenai alam bukan sekali-kali sesuatu yang diterima begitu saja apa adanya, tetapi merupakan suatu konstruksi yang ditentukan oleh sejenis kegiatan yang khas dari manusia. Setiap eksperimen mengungkapkan hal ini karena ia jelas didasarkan atas suatu konstruksi pikiran bersama-sama pengajuan suatu pertanyaan artifisiil. Eksperimen, kata Kant, diolah dalam pikiran menurut asas-asas nalar. Eksperimen memeras pemahaman-pemahaman baru dari alam dan pemahaman-pemahaman ini pada gilirannya dapat diberikan terapan-terapan teknisnya.

Kalau di Abad-XVIII itu saja sebenarnya sudah diingatkan oleh Kant peran subyektivitas dalam pembentukan kebenaran (pengetahuan) ilmiah, dewasa ini perubahan-perubahan epistemologis – berkat

pikiran-pikiran Einsten, Planck, Bohr, Fermi, Dirac, Pauli, De Broglie, dan lain-lain, yang dengan sadar dibangun menjadi suatu “philosophy of no” dalam menantang rasionalisme dan obyektivisme dari Decartes, Newton dan Lavoisier – telah begitu meluas sehingga jangkauannya melampaui kepastian-kepastian yang nyata (apparent) sehingga telah memastikan turut diperhitungkannya subtektivitas. Terletak di antara **imajinasi** para ilmuwan dan **kenyataan** alami yang merupakan fokus pengamatan dan perhatian mereka, **lambang** (tanda matematis dan kata-kata biasa) kini harus dipakai sebagai alat/cara melalui mana subyektivitas bisa dinyatakan dan sama-sama diakui. Bukan kebetulan kalau Jean-Francois Doucet, saintis dari Universitas Oslo, mengatakan bahwa “*a scientific objectivity is simply a shared subjectivity*”. Maka sejalan dengan ini Monod, pemenang Hadiah Nobel untuk biologi, menegaskan bahwa walaupun “true knowledge” tidak mengakui nilai apa pun, ia tidak dapat didasarkan pada apa pun kecuali pada suatu **nilai aksiomatis**. Dengan kata lain, menurut saya+ “*there is no such thing as a value-free science*”. Yang ada adalah metode ilmiah yang **bebas emosi** (*emotion-free*). Artinya, bila ia diterapkan ilmiah sebaik-baiknya, ia menjadi begitu ketat sehingga tidak memperdulikan nilai-nilai yang dapat menimbulkan rekasi emosional berupa “pro” atau “kontra”. Walaupun begitu hal ini tidak membuat ilmu pengetahuan menjadi bebas nilai. Dan Bachelard dalam bukunya mengenai “semangat ilmiah yang baru” menulis bahwa (pengertian) rasionalisme bukanlah suatu agama: ia berubah menurut “*son point d’application*”.

II.4 Abstraksi dan Keterbatasan Bahasa

Pengetahuan rasionil diturunkan dari pengalaman manusia dengan obyek dan peristiwa di lingkungannya sehari-hari. Bidang pengetahuan ini, yang merupakan urusan intelek, tentu saja adalah bidang ilmu pengetahuan, termasuk sains, yang mengukur dan

mengkuantifikasi, mengklasifikasi dan menganalisis. Dengan begini terciptalah suatu dunia distingsi intelektual, dunia perbedaan dan pertentangan, yang dapat berada hanya dalam keterkaitan yang satu dengan lainnya.

Abstraksi merupakan ciri krusial dari pengetahuan ilmiah ini karena untuk bisa membanding dan mengklasifikasi bentuk, sktruktur dan gejala yang beraneka ragam ada di sekitar hidup manusia, ilmuwan/saintis tentu tidak dapat memperhitungkan semua ciri yang terlihat ada pada hal-hal tersebut, tetapi hanya beberapa yang dianggap penting. Dalam berbuat begitu mereka telah mengabaikan gejala-gejala lainnya dan berhubung dengan itu tidak akan memberikan suatu deskripsi yang lengkap mengenai situasi riil. Gejala-gejala yang tidak turut diperhitungkan itu mungkin efeknya begitu kecil sehingga walaupun dimasukkan tidak akan mengubah teori secara berarti atau, ia dikeluarkan semata-mata karena ia tidak diketahui pada saat teori yang bersangkutan dirumuskan. Apa pun yang menjadi pertimbangan pengabaian tersebut, dengan deskripsi yang serba terbatas itu terbentuklah sebuah “peta intelektual” tentang realitas di mana semua direduksi sampai ke garis-garis besarnya saja. Jadi dalam memikirkan dunia, para pemikir rasionil-abstrak terbentur pada sejenis masalah yang sama seperti yang dihadapi oleh kartograf yang berusaha meliputi permukaan bumi yang bergelombang dengan sederetan peta datar. Biar bagaimanapun, seperti kata semantis **Alfred Korzybski**, “*the map is not the territory*”, peta sama sekali bukan merupakan lanskap.

Di pihak lain, dunia alami, lanskap, adalah sesuatu yang serba kompleks dan sarat dengan keanekaragaman yang tak terbatas, suatu dunia multidimensionil yang mengandung bukan garis-garis lurus atau bentuk-bentuk yang sempurna teratur, di mana hal-hal tidak terjadi secara berurutan tetapi serentak bersama-sama; suatu dunia di mana, menurut fisika modern, *even empty space is curved*”. Sedangkan pengetahuan rasionil adalah suatu sistem lambang dan

konsep abstrak, ditandai oleh struktur sikuensiil dan linier. Jelas bahwa sistem abstrak pemikiran konseptuil ini tidak pernah mampu memaparkan atau memahami sepenuhnya realitas alami. Dengan pendekatan dan prosedur seperti ini orang hanya dapat mengharapkan memperoleh suatu representasi aproksimatif dari realitas. Berhubung dengan itu semua ilmu pengetahuan, yang adalah pengetahuan rasionil, sebenarnya serba terbatas.

Sebagai ilustrasi mari kita lihat salah satu model yang terkenal dalam fisika, yaitu mekanika “klasik” dari Newton. Efek resistensi udara atau friksi, misalnya, pada umumnya tidak ikut diperhitungkan dalam model ini karena hal itu biasanya kecil sekali. Terlepas dari pengabaian tersebut, mekanika Newton sejak lama dianggap merupakan “*the final theory*” mengenai deskripsi semua gejala alam, sampai ditemukannya gejala elektris dan magnetis yang tidak punya tempat dalam teori Newton. Penemuan gejala-gejala tersebut menunjukkan bahwa model yang dipakai selama ini tidak lengkap, bahwa ia dapat diterapkan hanya pada sekelompok terbatas gejala, utamanya gerakan dari *solid bodies*.

Mempelajari sekelompok kecil gejala dapat pula berarti mempelajari ciri-ciri fisiknya sebatas tertentu saja, yang merupakan alasan lagi mengapa teori itu disebut hanya aproksimatif. Aspek aproksimasi seperti ini betul-betul subtil karena kita tidak akan pernah bisa mengetahui sebelumnya di mana letak keterbatasan-keterbatasan sesuatu teori. Hanya pengalamanlah yang dapat mengatakan hal itu. Maka citra mekanika klasik menjadi semakin luntur ketika fisika Abad-XX mulai menunjukkan keterbatasan-keterbatasannya yang esensiil. Dewasa ini kita mengetahui bahwa mdel Newton berlaku hanya bagi obyek-obyek yang terdiri dari sejumlah besar atom dan hanya bagi kecepatan-kecepatan yang kecil bila dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Bila kondisi pertama tidak ada, mekanika klasik harus diganti dengan teori kuantum. Bila kondisi kedua tidak ter-

penuhi teori relativitaslah yang harus diterapkan. Namun hal ini bukan berarti bahwa model Newton “salah” atau bahwa teori kuantum dan relativitas “benar”. Semua model itu adalah aproksimasi yang berlaku bagi *a certain range of phenomena*. Di luar “range” tersebut, model-model itu tidak lagi memberikan suatu deskripsi yang memuaskan tentang alam. Bila demikian model-model yang baru harus ditemukan untuk menggantikan yang lama atau, lebih tepat, untuk memperluasnya dengan jalan memperbaiki aproksimasi.

Keterbatasan-keterbatasan dari setiap pengetahuan yang diperoleh dengan jalan metode tersebut tadi kiranya menjadi semakin jelas kelihatan dalam sains modern, terutama fisika modern, yang diakibatkan oleh “bahasa” yang dipakai dalam penyajiannya. Menurut Capra, dalam fisika pengetahuan diperoleh melalui proses penelitian ilmiah yang dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama terdiri dari pengumpulan bukti-bukti eksperimentil tentang gejala-gejala yang hendak dijabarkan. Pada tahap kedua, fakta-fakta eksperimentil itu dikolerasikan dengan lambang-lambang matematis dan sebuah skema matematis dirumuskan yang menghubungkan lambang-lambang tersebut satu dengan lainnya dengan tepat dan konsisten. Skema seperti ini biasanya disebut model matematis atau, bila perumusannya lebih komprehensif lagi, suatu teori. Teori ini lalu dipakai untuk memperkirakan hasil-hasil dari eksperimen-eksperimen berikutnya yang dilakukan demi mencek semua aplikasinya.

Pada tingkat ini para fisikawan bisa puas bila mereka dapat menemukan sebuah skema matematis serta kiat teknis bagaimana memakainya untuk memprakirakan eksperimen. Namun tidak jarang ada kebutuhan mereka untuk membicarakan penemuan-penemuan mereka itu dengan ilmuwan-ilmuwan dari disiplin lainnya, termasuk orang-orang awam, dan karena itu mereka perlu mengutarakannya dalam bahasa biasa. Hal ini berarti mereka harus menyusun sebuah model dalam bahasa sehari-hari yang menafsirkan skema matematis

semula. Bahkan bagi para fisikawan sendiri, susunan model verbal seperti itu, yang dalam dirinya merupakan tahap ketiga dari penelitian, akan menjadi kriteria mengenai tingkat pemahaman yang mereka capai.

Sedangkan kata-kata dari bahasa literer, bahasa sehari-hari, tidak didefinisikan dengan jelas dan ketat. Tidak sedikit kata-kata yang mengandung berbagai arti, banyak di antaranya yang melintas dalam benak kita secara samar-samar belaka dan menetap lebih banyak di dalam bawah sadar kita bila kita mendengar sebuah ucapan. Ketidakpastian dan kerancuan bahasa sehari-hari mungkin penting sekali bagi penyair yang pada umumnya bekerja dengan lapisan dan keterkaitan bawah sadar dari bahasa ini. Sebaliknya ilmu pengetahuan dan sains mengacu pada definisi yang jelas dan kaitan-kaitan yang tidak ambigu. Maka itu bahasa ini diabstraksi lebih jauh lagi oleh ilmu pengetahuan dan sains dengan membatasi lagi arti dari kata-katanya dan membakukan strukturnya menurut aturan-aturan logika. Abstraksi terakhir terjadi dalam matematika di mana perkataan diganti dengan lambang (tanda) dan dimana operasi pengkaitan antara lambang/tanda itu ditentukan seketat-ketatnya. Dengan jalan ini ilmuwan/saintis dapat memadatkan informasi dalam sebuah persamaan, yaitu dalam satu barisan lambang-lambang, yang memerlukan beberapa halaman bila mereka uraikan hal yang sama dalam bahasa tulis biasa.

Dalam praktek tentu saja ketiga tahap tersebut tidak terpisahkan se jelas skema tersebut di atas dan tidak selalu terjadi dengan urutan yang sama. Bisa saja terjadi seorang fisikawan sampai pada perumusan sebuah model, misalnya, karena dorongan ajaran filosofis tertentu yang dihayatinya, yang mungkin akan tetap dia yakini timbul bukti-bukti eksperimental yang berlawanan. Dia lalu berusaha mengubah modelnya begitu rupa – dan hal seperti ini memang sering terjadi – sehingga model yang sudah disesuaikan itu dapat memperhitungkan eksperimen-eksperimen yang baru tadi. Namun bila

bukti-bukti eksperimentil terus-menerus menentang model tersebut, biasanya fisikawan yang bersangkutan lalu membatalkannya.

Apakah proses penelitian yang menghasilkan ilmu pengetahuan terjadi dalam tiga tahap yang berurutan atau secara simultan, apakah ada pergantian model atau tidak, pengetahuan ilmiah yang rasionil itu tetap merupakan suatu abstraksi dari realitas. Metode abstraksi dari pengetahuan ilmiah memang sangat efisien dan efektif tetapi beberapa ilmuwan, saintis dan filosof Barat sendiri mengakui betapa mahalnyanya “harga” yang harus mereka bayar untuk itu. Dengan semakin persis mereka definisikan sistem konsep mereka, dengan terus berusaha menyempurnakannya dan dengan membuat kaitan-kaitan yang diperhitungkan semakin ketat, sistem konsep “ilmiah” itu menjadi semakin terlepas dari dunia yang riil. Dengan tampilnya bahasa matematis tercapailah suatu keadaan di mana kaitan-kaitan dengan realitas menjadi begitu kabur sehingga hubungan antara lambang-lambang dengan pengalaman kinderaan menjadi semakin tidak jelas lagi.

Pandangan bahwa matematika adalah tak lain dari sebuah bahasa yang diabstraksi dan dipadatkan tidak berjalan tanpa tantangan. Banyak matematikawan benar-benar percaya bahwa matematika bukanlah sekedar suatu bahasa untuk memaparkan alam, tetapi inheren dengan alam itu sendiri. Originator dari pendirian ini adalah Pythagoras yang membuat pernyataan terkenal “segala sesuatu adalah bilangan” dan mengembangkan sejenis khusus mistik matematis. Tanpa mengurangi respek terhadap Pythagoras, para fisikawan komptemporer kiranya tahu benar bahwa metode analisis dan penalaran logis mereka tidak akan pernah dapat menjelaskan seluruh bidang gejala alam sekaligus dan karena itu mereka memilih sekelompok tertentu gejala dan berusaha membentuk sebuah model untuk memaparkan kelompok ini. Maka kesadaran bahwa semua model dan teori sebenarnya bersifat aproksimatif belaka adalah betul-betul esensiil dalam penelitian ilmiah modern. Bukan kebetulan kalau aforisme dari Einstein berbunyi : *“As far as the laws of mathematics*

refer to reality, they are not certain; and as far as they are certain, they do not refer to reality.”

III. PENDEKATAN HOLISTIS

Ilmu pengetahuan memang kita perlukan – kita sebagai manusia individu maupun, bahkan lebih-lebih, kita sebagai manusia berkelompok: masyarakat, bangsa dan negara. Keperluan ini menjadi semakin mendesak, tidak dapat ditawar-tawar, mengingat Abad-XXI, yang mau tidak mau akan masuki, adalah abadinya ilmu pengetahuan dan “anaknya”, yaitu teknologi. Maka itu jauh lebih daripada yang terjadi di masa lampau, ilmu pengetahuan pada umumnya dan sains pada khususnya tetap menjadi *“the official knowledge-validating system”* dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Bila demikian, jika ada krisis dalam ilmu pengetahuan/sains mengenai apakah yang disajikannya kepada kita itu benar-benar merupakan suatu gambaran realitas yang akurat, maka krisis itu pasti mempunyai dampak atas setiap lembaga yang ada di seluruh masyarakat.

Mengingat asumsi-asumsi metafisis yang selama ini mendasari pengetahuan ilmiah dianggap tidak lagi sesuai, dan karenanya sangat diragukan ketepatannya, para pemikir mencari kemungkinan-kemungkinan menegakkan kembali ilmu pengetahuan berdasarkan asumsi-asumsi metafisis yang secara lebih langsung mencakup kesadaran (tak terukur secara fisik), keterkaitan (secara empatis dan non-fisik) dan tujuan (suatu asas penjelasan yang nonreduksionistis). Ada pula yang mengutarakan asumsi-asumsi baru berupa *“new dualism”*, *“pan-psychism”* (asumsi bahwa materi punya suatu aspek internal, bukan dalam artian fisik, tetapi lebih berupa suatu *“mind-like dimension”*). Betapapun pentingnya perbedaan-perbedaan yang ada di antara asumsi-asumsi pengganti tersebut, selain yang berupa dualisme baru itu – sains memang jauh lebih dualistis dalam tahun-

tahun awal pembentukannya – semua asumsi sama-sama mencari sejenis gagasan kesatuan, suatu pendekatan yang holistik.*

Dalam usaha pencarian itu pada umumnya pandangan diarahkan pada hakikat esoterik dari tradisi-tradisi spiritual dunia, terutama *yang sering disebut-sebut sebagai “kebijaksanaan kekal” (perennial wisdom) yang dikandung oleh pemikiran-pemikiran mistik/kebatinan Timur.*

Mengingat keterbatasan ruang penyajian, pembahasan akan dibatasi pada pendekatan holistik ini. Maka akan diutarakan berturut-turut, (1) gagasan kesatuan pemikiran Yunani (Barat), (2) gagasan kesatuan yang ada dalam pemikiran nenek moyang kita di Jawa (Timur) dan, (3) paralel pemikiran Timur dan penalaran fisika.

III.1 Gagasan Kesatuan Pemikiran Yunani

Untuk menemukan gagasan kesatuan yang ada di Barat, kita harus mundur kembali menelusuri alam pikiran Yunani purba. Sebenarnya akar dari semua pengetahuan ilmiah Barat, termasuk ilmu fisika, dapat dijumpai dalam periode awal dari filsafat Yunani di Abad-VI SM (Sebelum Masehi), di dalam sistem nilai di mana ilmu pengetahuan, filosofi dan agama tidak dipisah-pisahkan. Para pemikir dari Mazhab Milesian di Tonia sama sekali tidak memperdulikan perbedaan/pemisahan seperti itu. Tujuan kegiatan pemikiran mereka adalah menemukan hakikat, atau konstitusi riil dari materi-materi yang mereka sebut “*physis*”. Istilah “*physics*” atau “fisika” tak pelak lagi diturunkan dari perkataan Yunani ini dan karena itu berarti, pada

* Istilah “holistik” – berasal dari kata Yunani “*holos*”, berarti suatu keseluruhan – mengacu kepada pemahaman realitas dalam artian menyeluruh, suatu keseluruhan yang terintegrasi, di mana ciri-ciri dari keseluruhan itu tidak dapat direduksi ke ciri-ciri dan unsur-unsur bagiannya yang lebih kecil, bahkan yang terkecil sekalipun.

awalnya, usaha mengetahui hakikat dari semua materi. Hal ini tentu saja merupakan pula tujuan utama dari semua mistik dan filosofi Mazhab Milesian ini memang sangat berbau mistis. Maka itu kemudian orang-orang Yunani menamakan mereka "*hylozoists*" atau "Makhluk yang menganggap materi sebagai hidup", karena mereka tidak membedakan antara hidup dengan tak-hidup, antara jiwa dan materi. Sebenarnya mereka bahkan tidak memiliki satu kata pun untuk menyatakan materi berhubung mereka melihat semua bentuk eksistensi sebagai manifestasi dari "*physis*", yang dianugerahi kehidupan dan kejiwaan. Maka itu Thales menyatakan semua hal sarat dengan dewa dan Anaximander melihat alam semesta semacam organisme yang dihidupi oleh "*pneuma*", napas kosmis, persis seperti tubuh manusia dihidupi oleh udara.

Pandangan monistis dan organis dari kelompok Milesia dekt sekali dengan pandangan orang India kuno serta filosofi Cina dan paralelisme pemikiran Timur bahkan lebih jelas lagi terlihat dalam filosofi Heraclitus dan Ephesus. Heraclitus percaya akan adanya dunia yang terus-menerus berubah, akan **Kejadian** yang abadi (*eternal Becoming*). Bagi dia semua **Keberadaan** (*Being*) yang statis dilandasi oleh kekecewaan dan asas universalnya adalah api, lambang dari arus dan perubahan yang terus-menerus dari semua hal. Heraclitus mengajarkan bahwa semua perubahan di dunia timbul dari interaksi yang dinamis dan siklis dari pertentangan-pertentangan dan dia melihat setiap pasangan dari yang saling bertentangan sebagai suatu kesatuan. Kesatuan ini, yang sekaligus mengandung dan mengatasi kekuatan-kekuatan yang bertentangan, disebutnya "*logos*".

Perpecahan terhadap kesatuan ini dimulai dengan mazhab Eleatik yang berasumsi adanya suatu Asas Ilahiah yang berada diatas semua dewa dan manusia. Asas ini mula-mula diidentifikasi dengan kesatuan alam semesta, tetapi kemudian dilihat sebagai suatu persona Ketuhanan yang cerdas yang mengatasi dan mengendalikan

dunia. Dengan begini mulai berkembang suatu kecenderungan berpikir yang, akhirnya, menimbulkan perpisahan antara jiwa/semangat dan materi serta suatu dualisme yang menjadi ciri khas dari filosofi Barat.

Langkah yang drastis ke arah ini diambil oleh Parmenides dari Elea yang memang sangat menentang Heraclitus. Dia menamakan asas dasarnya **Keberadaan** (*the Being*) yang unit dan abadi. Dia menganggap perubahan tidak mungkin ada dan menganggap perubahan-perubahan yang kita lihat terjadi dalam dunia sebagai ilusi indera semata-mata. Konsep tentang suatu hakikat yang tak terhancurkan sebagai subyek dari ciri yang berbeda-beda timbul dari filosofi ini dan menjadi salah satu konsep fundamental dari pemikiran Barat.

Di Abad-V SM para filosof Yunani berusaha mengatasi perbedaan yang begitu tajam antara pandangan-pandangan Parmenidas dan Heraclitus. Untuk mempertemukan gagasan **Keberadaan** yang tak berubah (dari Parmenides) dan gagasan **Kejadian** yang abadi (dari Heraclitus), mereka menganggap bahwa **Keberadaan** itu ada di dalam substansi tertentu yang tak berubah-ubah, yang penggabungan dan pemisahannya mencetuskan perubahan-perubahan dalam dunia. Pemikiran begini menjurus ke konsep tentang atom, kesatuan terkecil yang tak terbagi-bagi dari materi, yang paling jelas diungkapkan dalam filosofi Leucippus dan Democritus. Para pemikir atom Yunani membuat garis pemisah yang jelas antara jiwa/(semangat) dan materi, dan menggambarkan materi terbuat dari berbagai "*basic building blocks*". Butir-butir dasar ini merupakan partikel-partikel pasif, dan secara intrinsik mati, yang bergerak di dalam vakum. Sebab dari gerakan itu tidak dijelaskan tetapi kadang-kadang dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang dianggap berasal-usul spirituil dan secara fundamenal berbeda dengan materi. Dalam abad-abad berikutnya gambaran seperti itu menjadi suatu unsur esensiil

dari pemikiran Barat, dari dualisme antara pikiran (nalar) dan materi, antara jiwa dan raga (badan), antara rohani dan jasmani.

Dengan semakin mantapnya gagasan mengenai pemisahan antara pikiran dan materi, para filosof mengalihkan perhatian mereka pada dunia spirituil, bukannya pada dunia materi, pada jiwa manusia dan pada masalah-masalah etika. Masalah-masalah inilah yang membuat sibuk pemikiran Barat selama lebih dari dua ribu tahun sesudah memuncaknya ilmu pengetahuan dan kebudayaan Yunani di abad kelima dan keempat SM. Pengetahuan ilmiah zaman purba ini disistematisasikan dan ditata oleh Aristoteles, yang dengan berbuat demikian, menciptakan skema yang (kemudian) menjadi dasar dari pandangan Barat tentang alam semesta selama dua ribu tahun. Namun Aristoteles sendiri percaya bahwa pertanyaan-pertanyaan mengenai jiwa manusia dan renungan tentang kesempurnaan Tuhan adalah jauh lebih bernilai ketimbang penyidikan mengenai dunia materiil. Maka yang menjadi sebab-sebab mengapa model Aristoteles ini tetap tidak tergugat untuk jangka waktu yang selama itu justru karena tidak adanya perhatian atas dunia materiil ini dan karena dukungan Gereja Kristen terhadap doktrin Aristoteles selama abad pertengahan.

Lalu perkembangan yang lebih lanjut dari ilmu pengetahuan Barat harus menunggu sampai tibanya zaman Renaissance, ketika manusia mulai membebaskan diri dari pengaruh Aristoteles dan Gereja dan mencurahkan kembali perhatian pada alam. Berhubung perkembangan baru ini dibarengi dengan perhatian yang semakin besar pada matematika, proses ini akhirnya bermuara pada perumusan teori-teori ilmiah yang sesungguhnya, didasarkan atas eksperimen dan dinyatakan dalam bahasa matematika. Adalah Galileo yang dahulu mula-mula mengkombinasikan pengetahuan empiris dengan matematika dan karena itu kiranya dapat dikatakan sebagai Bapak dari ilmu pengetahuan modern.

III.2 Gagasan Kesatuan Pemikiran Jawa

Gagasan kesatuan yang kiranya dapat menyelamatkan ilmu pengetahuan modern dari krisis yang ditimbulkan oleh pendekatan dualistis dan pandangan mekanistik yang selama ini telah melahirkan dan membesarkannya, dapat juga diperoleh dalam salah satu “buah” dari kebudayaan Jawa, yaitu : **Kawruh**. Sebagai “pengetahuan”, **kawruh** memang lain dari “pengetahuan” yang dihasilkan oleh abstraksi deduktif Yunani, berbeda dengan metode analistis “obyektif” dari Descartes, tetapi kelainan dan perbedaan ini bukanlah satu kekurangan. Berbeda tidak dengan sendirinya berlawanan, apalagi saling mematikan. Rasionalitas tradisional Jawa adalah berupa suatu pemahaman yang menyeluruh, sedangkan rasionalitas ilmiah Barat adalah analitis dan divisionil. Karena perbedaan yang mendasar ini maka baik aturan main maupun cara menangani masalah menjadi berbeda pula.

Metode ilmiah mendefinisikan obyek perhatian dan penelitiannya begitu rupa, dengan mengeluarkan semua yang lain daripadanya, sehingga ia dapat dijadikan obyek eksperimen yang dapat diulangi di berbagai pusat penelitian dan pemikiran di mana pun di dunia ini, betapapun keadaan politik, ideologi, dan sosial yang melingkupi lembaga-lembaga ini. Pertanyaan-pertanyaan umum yang bulat menyeluruh dielakkan demi penanganan pertanyaan-pertanyaan terbatas untuk mana kiranya lebih mudah dirumuskan jawaban-jawaban yang langsung dan tidak samar-samar. Seperti yang dikatakan oleh Descartes: Bagi setiap masalah dalam bagian-bagian yang sekecil mungkin dan kemudian pecahkan satu per satu.

Kawruh berusaha memahami baik eksistensi manusia maupun keberadaan dunia – siapa yang menciptakannya, bagaimana ia diciptakan, bagaimana ia berkembang dan menimbulkan hidup, kehidupan serta kemanusiaan dan bagaimana ia akan berakhir kelak di suatu hari. Semua gagasan ini mempunyai suatu ciri khas yang sama, **yaitu**

sama-sama diarahkan pada keseluruhan gejala, semua memperhitungkan setiap yang ada. Semua bermaksud menyatakan kebenaran yang bulat, kebenaran yang mutlak, dengan jalan tidak memisahkan rohani dari jasmani, pikiran dari badan, dengan jalan tidak mengabstrakan nalar dari rasa dan dengan jalan memahami keseluruhan sebagai rasionalitas berpikir.

Jadi kawruh adalah pengetahuan yang **menyatu**, berkat pandangan budaya Jawa yang sekaligus bersifat **organis, holistis, integralistis** dan **ekologis**, walaupun bukan monistis, dekat sekali dengan filosofi Heraclitus dari Ephesus yang sejalan dengan pandangan Mazhab Milesian. Pemikiran kawruh dengan pandangan yang seperti itu kiranya dapat memberikan suatu latar belakang, walaupun bukan suatu dasar, filosofi yang relevan dan konsisten pada teori-teori dari ilmu pengetahuan masa kini, suatu konsepsi tentang dunia di mana penemuan-penemuan ilmiah dapat berada sangat akrab dan serasi dengan kehendak spirituil dan kepercayaan keagamaan.

Kedua tema yang mendasar dari konsep ini adalah **kesatuan** dan **hubungan timbal-balik** dari semua gejala dan kodrat intrinsik yang dinamis dari alam semesta. Bilamana ilmuwan fisika bersedia semakin dalam memasuki dunia submikroskopis bersama-sama kawruh, akan semakin jelas betapa ilmu fisika modern, yang begitu gelisah terhadap **krisis metafisis ilmu pengetahuan** sebagaimana tercermin dalam ilmu fisika klasik, dapat melihat dunia sebagai satu sistem komponen-komponen yang tak terpisahkan satu dari lainnya, yang berinteraksi dan terus bergerak, di mana si pengamat merupakan satu bagian yang integral dari sistem itu sendiri.

Bukankah hal ini benar yang hendak disampaikan kepada kita oleh lakon “Dewa Ruci” dalam wayang purwa. Lakon wayang pada hakikatnya adalah suatu “*tesching story*”, cerita yang mengandung pelajaran dan/atau pesan tertentu. Lakon ini menceritakan pengembaraan Bima mencari “sari perwita” (air pengetahuan) atas dorongan guru kebatinannya “Sari perwita” itu, yang siap untuk dihirup

agar menjadi pintar, sebenarnya tidak ada.* Dalam perjalanan mencari yang tidak ada itulah Bima kemudian bertemu dengan Dewa Ruci yang mengatakan tidak mungkin ada air yang dapat membuat orang berpengetahuan. Maka demi mendapatkan pengetahuan yang di-dambakan itu, untuk menjadi makhluk yang pintar, Bima diminta oleh Dewa Ruci supaya memasuki tubuhnya.

Bima bertanya bagaimana mungkin dia yang begitu “besar” dapat menyusup ke dalam Dewa Ruci yang jauh lebih “kecil” daripadanya. Hakikat jawaban Sang Dewa atas pertanyaan tersebut berupa suatu peringatan sebesar-besar kamu (manusia), mana yang lebih besar, kamu atau alam semesta?** Bima memang “besar”, tetapi karena sadar masih mencari, tetap bersikap polos dan terbuka. Setelah bersamadi dia menjadi insaf dan keinsafan ini membuatnya menjadi begitu “kecil” hingga akhirnya, tanpa melenyapkan kepribadiannya, dapatv masuk ke dalam raga Dewa Ruci. Pada saat itulah Bima bersatu pandangan dunia dengan alam semesta, manunggal antara si pengamat dengan yang diamati antara si pencari dengan pengetahuan yang dicari. Baru ketika tercapai kemanunggalan itu pulalah Bima mendapatkan kebenaran sejati (*the ultimate truth*), menjadi makhluk yang “terang” (arif). Setelah menjadi makhluk yang “terang” ini dia diharuskan kembali ke dunia yang nyata.

* Ada versi yang mengatakan bahwa yang disuruh cari itu adalah “serang angin” yang sebenarnya juga tidak ada.

** *Hangandika, gede endhi sira lawan jagat, kabeh iki saisine, kalawan gunungipun, samodrane alase sami, tan sesak lumebuwa, gua garbaningsun*”; dikutip dari ceramah M.S.A. Sastoamidjojo berjudul “*Pertunjukan Wayang Purwo di Mata Seorang Fisikawan*” di depan Bima Lembaga Javanologi, Yogyakarta, 6 Februari 1987. Penceramah adalah staf pengajar pada Fakultas Teknik UGM, memperoleh BSc. Dalam “physics” dari MIT (1959), MSc.E. dalam “nuclear engineering” dari UCLA (1963) dan Ph.D. dalam “solid state” dari ANU (1974).

Di samping mengajar, beliau memegang Pimpinan dari Pusat Penelitian Penerapan Tenaga Matahari dan anggota senior team Zat Padat F.MIPA-UGM

Bukanlah awal dari pengerusakan ekologis yang kini diributkan itu adalah anggapan manusia tentang “aku”-nya yang terlalu besar untuk menjadi “bagian” yang terintegrasi dari alam, apalagi untuk “memasuki” alam. “Aku”-nya yang besar itu adalah “subyek” dan alam adalah “obyek” untuk diamati, diteliti mekanisme kerjanya. “Pengetahuan” yang diperoleh dari pendekatan dualistis-mekanistik ini dianggap “obyektif” dan dengan pengetahuan ini manusia menganggap wajar menguasai dan mengeksploitasi alam menurut pertimbangan serta kepentingannya sendiri karena dia tidak menganggap dirinya bagian yang tak terpisahkan dari alam. Kisah runyam selanjutnya dari pendirian yang picik dan angkuh ini sekarang telah kita ketahui dan alami bersama.

III.3 Paralel Pemikiran Timur dan Penalaran Fisika

Sejarah telah menunjukkan bahwa pikiran manusia berkemampuan untuk dua jenis pengetahuan atau cara kesadaran, yang kadang kala disebut “rasional” dan “intuitif”, dan secara tradisional masing-masing diasosiasikan dengan ilmu pengetahuan dan religi. Di Barat pengetahuan intuitif dan religius ini sering diremehkan demi kepentingan pengetahuan rasional dan ilmiah, sedangkan perlakuan sikap tradisional Timur justru sebaliknya. Walaupun urusan utama fisika mengenal pengetahuan rasional sedangkan mistikus/penghayat kebatinan Timur mengenai pengetahuan intuitif, kedua jenis pengetahuan ini sebenarnya ada di kedua bidang tersebut. Bukankah ada dikatakan bahwa Newton, di samping seorang ilmuwan, adalah juga seorang mistikus.

Pengetahuan dan kegiatan rasional pasti merupakan bagian terbesar dari penelitian-penelitian ilmiah, tetapi tidak semua keberhasilan (kebenaran) di bidang ilmu pengetahuan telah disebabkan oleh yang serba rasional itu. Fakta-fakta yang diketengahkan oleh Capra dan berbagai saintis lainnya menunjukkan bahwa bagian yang

rasional dari penelitian itu akan menjadi tidak berguna bila ia tidak dilengkapi dengan intuisi yang memberikan kepada ilmuwan dan saintis kepehaman-kepehaman mendalam (*insights*) yang baru dan membuat mereka menjadi kreatif. Kepehaman-kepehaman seperti itu cenderung datang dengan tiba-tiba dan, sungguh unik, tidak pada waktu duduk menjabarkan persamaan-persamaan di meja studi atau meja-percobaan, tetapi ketika sedang santai berendam di bak mandi (Archimedes), di kebun (Newton), berjalan-jalan di tengah kesunyian hutan atau pegunungan (Heisenberg), di tepi pantai (Capra), dan lain-lain.

Selama masa bersantai setelah melaksanakan serangkaian kegiatan intelektual yang terkonsentrasi inilah kelihatannya pikiran intuitif merebut kendali penalaran dan dapat menghasilkan "*the sudden clarifying insights*" yang memberikan begitu banyak kegembiraan dan kepuasan pada kegiatan penelitian ilmiah. Namun kiranya cepat disadari bahwa kepehaman-kepehaman intuitif tidak ada manfaatnya bagi sains, termasuk fisika, kecuali bila ia dapat dirumuskan dalam suatu kerangka matematis yang konsisten, dengan atau tanpa ditopang oleh suatu tafsiran dalam bahasa biasa. Abstraksi merupakan suatu ciri krusial dari kerangka ini. Jadi bukan kebetulan kalau matematikawan Poincare mengatakana : "*Dengan intuisi kita menemukan, dengan nalar kita membuktikan.*"

Jika ada unsur intuitif dalam ilmu pengetahuan dan sains, maka ada pula unsur rasional dalam mistik/kebatinan Timur. Namun besar-kecilnya pemberian tekanan pada nalar dan logika ini berbeda-beda antara satu mazhab dengan mazhab lainnya. Vedanta (Hindu) dan Madhyamika (Budha), misalnya, adalah mazhab-mazhab yang sangat intelektual dan hal ini tidak hanya tercermin dalam ucapan tetapi juga dalam perbuatan; kebudayaan India purba banyak menunjukkan bentuk perilaku yang kini disebut oleh Prof. Van Peursen sebagai "*praktische wetenschaps beoefening.*" Sebaliknya ajaran Tao selalu waspada terhadap nalar dan logika, mungkin untuk tidak terlalu

dihanyutkan oleh matematika yang di Cina sudah sangat maju ratusan tahun sebelum ia dipelajari di Babilonia dan kemudian dikembangkan oleh para filosof Yunani purba. Sedangkan Zen, yang tumbuh dari Budhisme tetapi sangat dipengaruhi oleh Taoisme, membanggakan dirinya berkeadaan “tanpa kata-kata, tanpa penjelasan, tanpa petunjuk, tanpa pengetahuan”.

Walaupun bervariasi dalam penekanan pada nalar dan logika, pengalaman mistis yang langsung dialami merupakan inti dari semua mistik/kebatinan Timur karena pengalaman seperti ini dianggap identik dengan pemahaman langsung (*direct insight*) yang berada di luar bidang intelek dan diperoleh dengan jalan mengamati dan bukan memikirkan; dengan jalan melihat ke dalam diri sendiri, dengan jalan mawas diri. Budhisme Zen memusatkan perhatian hampir seluruhnya pada pengalaman *enlightenment* dan hanya sedikit sekali tertarik pada penafsiran pengalaman tersebut. hal ini diungkapkan oleh diktumnya yang terkenal: “Pada saat Anda mengatakan sesuatu, Anda kehilangan pengenalnya.” Hal yang sama tersirat dalam ucapan Lao Tzu: “Tidak mengetahui bahwa mengetahui adalah yang terbaik”, dan di Barat dalam kata-kata Socrates: “Saya tahu bahwa saya tidak tahu”.

Titik berat pada pengalaman pribadi yang tak terucapkan sebagai dasar pengetahuan dan filosofi inilah yang memberikan kepada tradisi mistik/ kebatinan Timur sifat empirisnya yang begitu kuat. Joseph Needham, misalnya, berulang-ulang mengetengahkan sikap empiris dari Tao dalam bukunya “*Science and Civilization in China*” dan berkesimpulan bahwa sikap inilah yang membuat Taoisme menjadi dasar dari sains dan teknologi Cina. Bahkan kelompok mistik/kebatinan yang melibatkan diri dalam argumentasi yang sangat *sophisticated* sekalipun tidak pernah menganggap intelek tok sebagai sumber pengetahuan mereka tetapi memakainya semata-mata untuk menganalisis dan menafsir pengalaman mistik pribadi masing-masing. Semua pengetahuan kukuh berdasarkan

pengalaman langsung ini dan dari situ kiranya dapat disimpulkan bahwa mistik/kebatinan Timur adalah **empirisme** atau **experiential-isme** yang radikal, walaupun logika kemudian mengembangkan penelitian untuk menemukan makna dari pengalaman, dari “*enlightenment*” yang dialami pribadi. Dalam tradisi kebatinan Jawa bersamadi dan menjalankan latihan-latihan kebatinan seperti berpuasa, ndikir (bersembahyang), disebut “nglakoni”. Sebutan yang berakar-kata “lakon” ini, menurut M.S.A Sastroamidjojo, dapat diartikan sebagai mengalami sendiri kemanunggalan dengan apa yang diceritakan bila dikaitkan dengan pagelaran (lakon) wayang purwa. Secara umum titik berat ungkapan “nglakoni” adalah pada pengertian empirisme mengenai persatuan perbuatan dan pemikiran, persatuan materi, waktu dan ruang, persatuan pengamat dan yang diamati.

Pengetahuan yang kukuh berdasarkan pengalaman langsung dalam mistik/kebatinan Timur tersebut kiranya lagi-lagi menunjukkan adanya paralel dengan pengetahuan yang kukuh bersendikan percobaan (eksperimen) dalam tradisi ilmiah Barat. Paralel ini semakin diperkuat oleh cara “*training*” yang dituntut oleh kedua sistem pengetahuan ini kepada orang-orang yang ingin mendapatkan pengetahuan (kebenaran) menurut cara masing-masing.

Paralel antara eksperimen ilmiah dan pengalaman mistik/kebatinan bisa dianggap aneh mengingat sifat yang sangat berbeda antara pengamatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Fisikawan mengadakan percobaan-percobaan yang melibatkan sebuah tim-kerja yang terperinci serta teknologi yang sangat canggih, sedangkan penghayat mistik/kebatinan mendapatkan pengetahuannya semata-mata melalui introspeksi, dengan atau tanpa peralatan, dalam kesendirian meditasi. Selanjutnya percobaan-percobaan ilmiah kelihatannya dapat diulangi setiap waktu oleh siapa saja, sementara pengalaman-pengalaman mistik/kebatinan kelihatannya terbatas bagi sedikit orang saja dalam keadaan yang sangat khusus. Namun bila ditinjau lebih

dalam akan terlihat bahwa perbedaan-perbedaan antara kedua macam pengamatan itu terletak hanya di dalam pendekatan masing-masing dan bukan dalam *reliability* atau kompleksitasnya.

Siapa pun yang ingin mengulangi suatu percobaan dalam fisika subatom modern, menurut pengalaman Capra, harus menjalani *training* bertahun-tahun. Hanya setelah itu dia mampu menanyakan kepada alam sebuah pertanyaan khusus melalui percobaan dan memahami jawabannya. Demikian pula, suatu pengalaman mistik/kebatinan yang mendalam pada umumnya menuntut adanya *training* bertahun-tahun di bawah asuhan seorang pandai (master) atau guru (shinsei/suhu) dan, sama halnya dengan “*training*” ilmiah, jumlah waktu yang terpakai itu sendiri tidak menjamin adanya sukses. Namun bila siswa atau cantrik yang bersangkutan berhasil, dia akan mampu mengulangi percobaan atau pengalamannya itu. Bisa mengulang-ulangi pengalaman, memang, adalah esensiil bagi setiap training mistik/kebatinan dan hal itu benar yang menjadi tujuan dalam pengajaran-pengajaran spirituil.

Jadi pengalaman mistik tidaklah lebih unik dari percobaan modern dalam fisika. Di pihak lain ia juga tidak kurang canggih walaupun, harus diakui, jenis kecanggihannya itu berlainan sekali. Kompleksitas dan efisiensi dari peralatan teknis dari fisikawan diimbangi, walaupun tidak diatasi, oleh media kesadaran mistik/kebatinan – baik jasmaniah maupun spirituil – dalam bermeditasi. Dan perkataan lain, para ilmuwan/saintis dan penghayat mistik/kebatinan telah mengembangkan metode-metode yang sangat canggih guna mengamati alam yang tidak begitu saja terbuka bagi orang-orang awam. Tulisan di halaman-halaman majalah fisika eksperimentil modern akan sama misteriusnya bagi yang tidak terlatih dengan jenis-jenis tulisan di mandala Tibet atau di pustaka Wali Songo.

Ciri khas yang terpenting dari pandangan dunia Timur – bahkan dapat dikatakan inti daripadanya – adalah kesadaran tentang kesatuan dan hubungan timbal-balik dari semua hal dan kejadian, pengalaman

dari semua gejala di dunia sebagai manifestasi dari suatu kesatuan yang mendasar. Semua hal dilihat sebagai bagian-bagian yang saling tergantung dan tak terpisahkan dari keseluruhan kosmos ini; sebagai manifestasi yang berbeda dari realitas sejati. Tradisi Timur terus-menerus mengacu pada realitas sejati yang tak terbagi-bagi ini, yang menyatakan dirinya dalam semua hal dimana semua hal tersebut merupakan bagian daripadanya. Ia disebut *Brahman* dalam Hinduisme, *Dharmakaya* dalam Budhisme dan *Tao* dalam Taoisme. Gambaran kesatuan ini juga jelas terlihat pada cara-cara wayang purwo dipagelarkan dan tidak hanya dalam “lakon-lakon” yang dipertunjukkan.

Kesatuan yang mendasar dari alam semesta bukanlah semata-mata merupakan ciri khas sentral dari pengalaman mistik/kebatinan, tetapi juga merupakan salah satu pengungkapan penting dari fisika modern. Maka pada tema kesatuan dan saling keterkaitan antara semua hal dan kejadian inilah kiranya terlihat paralel yang paling mencolok antara inti pandangan-dunia dari Timur dengan model-model dan teori-teori fisika modern. Kesatuan tersebut membayangkan sudah di tingkat atom dan menjadi semakin lama semakin jelas dengan semakin dalamnya kita menyusupi materi hingga ke bidang partikel subatom. Kesatuan dari semua hal dan kejadian akan tampil kembali setiap kali kita membandingkan fisika modern dengan filosofi Timur. Bila kita mempelajari berbagai model dari subatomic physics akan terlihat betapa model-model itu lagi-lagi menyatakan, dengan cara yang berbeda-beda, pemahaman yang sama: bahwa unsur-unsur pokok materi dan gejala-gejala dasar yang berpautan dengannya adalah saling berhubungan, saling terkait dan saling tergantung; bahwa semua itu tidak dapat dipahami sebagai kesatuan-kesatuan tersendiri, tetapi semata-mata sebagai bagian-bagian yang terintegrasi dari suatu keseluruhan. Jadi yang ada bukanlah “*fundamental building blocks*” dalam alam yang terkeping-keping (*fragmented*) tetapi “*fundamental dynamic relationships*” dalam alam

yang holistik. Arthur Koestler telah menciptakan istilah "*holons*" untuk menyatakan subsistem-subsistem dari suatu keseluruhan holistik ini, subsistem-subsistem yang sekaligus merupakan bagian dan keseluruhan. Pemikir ini selanjutnya menegaskan bahwa setiap holon punya dua kecenderungan yang berlawanan: suatu kecenderungan integratif dalam berfungsi sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih luas pada tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dan suatu kecenderungan "*self-assertive*" demi mempertahankan otonomi individuilnya.

Kapan saja dan di mana saja mistik/kebatinan Timur dan fisika modern hendak mengkomunikasikan pengetahuan masing-masing, keduanya sama-sama menyadari keterbatasan-keterbatasan yang ada pada bahasa sehari-hari dan pemikiran "linier". Berhubung baik kata-kata maupun matematika selalu merupakan peta yang abstrak dan aproksimatif tentang realitas, tafsiran verbal dan model matematis dari suatu percobaan ilmiah atau ungkapan literer suatu pemahaman mistik/kebatinan, tidak bisa lain dari tidak akurat dan tidak lengkap. Dalam fisika sifat aproksimatif dari semua *statements* dikuantifikasikan dan kemajuan (*progress*) dilakukan dengan jalan memperbaiki aproksimasi pada banyak langkah yang suksesif.

Untuk sains, termasuk fisika masalah keterbatasan bahasa sehari-hari ini menjadi semakin merepotkan karena bahasa mau tidak mau adalah "*cultuurgebonden*", terikat erat pada budaya setempat yang menumbuhkannya, sedangkan ilmu pengetahuan, di mana sains berada, seharusnya berpembawaan universiil dan abstrak. Sebenarnya abstraksi adalah sesuatu yang sudah terkandung dalam setiap bahasa manusia. Istilah-istilah umum (manusia, binatang, kata bilangan, kata keterangan waktu) berada jauh di atas kejadian-kejadian yang ditemui dan dialami secara konkrit. Namun biar bagaimanapun kata-kata yang umum dan abstrak sifatnya dari bahasa sehari-hari jelas lahir dan tumbuh dari kekhasan dan kekhususan setiap budaya yang banyak sedikitnya unik. Maka demi mempertahankan keuniversilan

pembawaannya, ilmu pengetahuan (termasuk sains dan fisika) masih harus terus membentuk dan membina bahasa keilmuan karena di dalam bahasa ilmu pengetahuan ini abstraksi menjalankan perannya yang semakin sentral. Sebab-sebab yang dijadikan titik tolak bagi deksripsi gejala-gejala yang konkrit bukan lagi pengalaman hidup sehari-hari yang mengelompokkan pengertian-pengertian abstrak mengenai gejala-gejala konkrit, tetapi aturan-aturan abstraksi dari bahasa keilmuan itu. Lalu bagaimana caranya tradisi mistik/kebatinan Timur menangani masalah komunikasi verbal itu?

Seperti telah disinggung di atas, mistik/kebatinan Timur terus-menerus mengacu pada fakta bahwa realitas (kebenaran) sejati itu tidak akan dapat menjadi obyek penalaran atau pengetahuan yang demonstrable. Ia tidak akan dapat dipaparkan secukupnya dengan kata-kata karena ia terletak di luar bidang indera dan intelek dari mana diturunkan kata-kata dan konsep yang rasionil-abstrak. Mistik/kebatinan Timur selalu didasarkan atas pemahaman langsung mengenai sifat realitas dan pengetahuan yang diperoleh dengan jalan ini dianggap absolut. Jadi pengetahuan absolut adalah suatu pengalaman pribadi yang langsung tentang ketahuan yang tidak membedakan, tidak memilah-milah, tidak terbatas, yang sama sekali non-intelektuil, suatu pengalaman yang timbul dalam suatu keadaan yang luar biasa dari kesadaran, suatu keadaan meditatif atau mistik. Bahwa keadaan seperti itu ada dan bisa saja ada tidak hanya dibenarkan oleh puluhan penghayat mistik/kebatinan di Timur dan di Barat, tetapi juga diungkapkan oleh penelitian psikologis. Kata psikolog William James: *"Our normal working consciousness, rational consciousness as we call it, is but one special type of consciousness, whilst all about it, parted from it by the filmiest of screens, there lie potential forms of consciousness entirely different."* Karena semua mistik/kebatinan terutama tertatik pada pengalaman realitas dan bukan pada deskripsi pengalaman itu, maka mistik/kebatinan ini pada umumnya tidak tertarik pada analisis dari deskripsi dan karena itu konsep

mengenai aproksimasi yang *well defined*, baik secara lisan maupun tulisan, tidak pernah muncul dalam dalam pemikiran Timur.

Walaupun begitu penghayat mistik/kebatinan telah mengelakkan komunikasi terutama kepada para peminat yang sedang berguru kepada mereka. Dalam berkomunikasi itu bahasa mistik/kebatinan tidak begitu dibatasi oleh logika dan *common sense*. Bahasa tersebut sarat dengan situasi magis dan paradoksal, kaya dengan gambaran sugestif dan tidak pernah persis dan karenanya membuka jalan di mana mistik/kebatinan mengalami realitas lebih baik daripada bahasa faktuil.

Mistik India – terutama Hiduisme – menyajikan pernyataannya dalam bentuk mitos, menggunakan metafor dan lambang, gambaran poetis, simil dan allegori. Mistik Cina dan Jepang menempuh jalan lain untuk menanggulangi masalah keterbatasan kata-kata dalam bahasa ini. Alih-alih membuat sifat yang paradoksal dari realitas yang masuk akal melalui lambang dan gambaran mitologis, acapkali mereka lebih suka menonjolkannya dengan menggunakan bahasa faktuil. Maka penghayat ajaran Tao, misalnya, biasa memakai paradoks untuk mengekspos *inconsistencies* yang timbul dari komunikasi verbal dan menunjukkan keterbatasan-keterbatasannya. Mereka meneruskan teknik ini kepada Budhis Cina dan Jepang untuk dikembangkan lebih lanjut. Teknik ini mencapai puncaknya dalam Budhisme Zen dengan apa yang disebut “*koan*”, berupa teka-teki *nonsensical* yang dipakai oleh banyak guru Zen untuk meneruskan ajaran-ajaran mereka. Dan “*koan*” ini, menurut Capra, membina suatu paralel yang penting dengan fisika modern. Di samping ini untuk menunjukkan ke-ADA-an realitas guru-guru Zen menggunakan suatu bentuk yang khusus dari puisi yang pendek dan padat. Bentuk puisi spirituil ini mencapai kesempurnaannya dalam “*haiku*”, sebuah sajak klasik Jepang dalam tujuh belas suku kata saja umumnya, yaitu tiga baris dari 5-7-5 suku kata atau kadang-kadang dalam empat belas suku kata. Yaitu dua baris dari 7-7 suku kata.

PENUTUP

Abad-XXI tak pelak lagi adalah abadnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam abad itu kita mau tak mau harus sudah mampu menguasainya. Kita sebagai **manusia individu** barangkali masih bisa bahagia dan “*survive*” tanpa susah payah mengetahui apa itu ilmu pengetahuan tetapi kita sebagai **sekelompok manusia** yang sudah bersumpah untuk hidup bersama sebagai suatu **Negara-Bangsa** pasti tidak akan mampu mempertahankan “collective survival” kita tanpa menggadaikan kehormatan dan martabat nasional. Hal ini bukan berarti bahwa untuk bisa “survive” itu kita semua harus menjadi ilmuwan. Cukup sejumlah kecil secara prosentuil, asalkan ilmuwan/saintis (dan teknologi) dalam arti sebenarnya. Pada minoritas warga inilah kelak pasti tergantung keseluruhan Negara-Bangsa kita di abad mendatang itu.

Minoritas warga yang bakal dibebani dengan tugas maha berat itu pasti memerlukan tempat penggemblengan yang sesuai. Dalam tahap perkembangan keilmuan kita dewasa ini dan diperkuat oleh tuntutan waktu yang sudah begitu mendesak, tempat penggemblengan yang sangat diperlukan itu adalah kampus-kampus di bidang pendidikan tinggi formal. Kampus ini jadi merupakan **modal satu-satunya** bagi kita untuk dapat duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan Negara-Bangsa Negara-Bangsa maju lainnya di bidang IPTEK itu kelak. Celaknya kampus itu kemarin dulu, kemarin dan bahkan hari ini masih jauh dari normal diukur dari peran yang diharapkan darinya. Maka ia, sang kampus itu, harus segera benar-benar dibenahi supaya menjadi normal.

Kampus adalah normal bila ia berupa **masyarakat ilmiah** dan benar-benar berfungsi sebagai masyarakat ilmiah yang berdisiplin ilmiah. Maka demi “survival” kita di Abad-XXI itu, yang adalah abadnya IPTEK, yang pertama harus kita tuntaskan adalah menormalkan kampus dalam artian membina kampus menjadi suatu masya-

rakat ilmiah dalam arti yang sebenarnya. Mengingat waktu sudah begitu mendesak sedangkan ketinggalan keilmuan kita sudah besar sekali dan semakin membesar saja, bersamaan dengan membina kampus menjadi masyarakat ilmiah, tugas besar kita yang kedua adalah menginternalisasi ilmu pengetahuan dalam artian proses dalam diri peserta didik (mahasiswa). Hanya dengan kegiatan seperti ini **semangat ilmiah** dapat ditumbuh dan dikembangkan. Tanpa semangat ini para mahasiswa kita setelah menjadi “sarjana” paling jauh hanya menjadi “konsumen” atau “pemakai” yang baik dari IPTEK dan bukan sekali-sekali “produsen” atau “pencipta” IPTEK.

Keberadaan sebagai “konsumen” IPTEK ini mudah sekali menjadi runyam dalam era informasi karena tanpa memiliki semangat ilmiah adakalanya orang tanpa sadar sebenarnya memanfaatkan pengetahuan ilmiah yang di daerah asalnya sudah dianggap basi, kalaupun tidak batal. Dalam era informasi seperti yang kita alami sekarang ini, ditandai oleh pasang-naik fakta-fakta baru yang terus meluap, kiranya tidak lagi cukup memahami asas-asas kandungan ilmu (*subject matter*) satu kali dan untuk selama-lamanya. Bidang-bidang yang secara tradisionil digarap oleh ilmu pengetahuan sudah ditransform oleh penemuan asas-asas yang terus meluas, oleh wawasan dari hubungan-hubungan yang baru. Bukankah ilmu-ilmu kealaman sedang mengembangkan “*interstitial fields of investigations*” bidang-bidang antara kimia dan biologi, analogi dan astronomi, biologi dan fisika dan demikian selanjutnya. Dan matematika, itu pintu gerbang ke khasanah asing sedang mengalami, sungguh mengagetkan banyak orang, suatu revolusi di lingkungan pemikir generasi masa kini.*

Maka itu, walaupun sudah agak terlambat, baik sekali diajukan kepada kampus, yang sampai kini belum juga tertata sebagai masyarakat ilmiah, pertanyaan yang sepuluh tahun yang lalu diucapkan

* Lihat tulisan mengenai “geometri fraktal” dalam kumpulan karangan ini.

oleh Eliot kepada masyarakatnya: *“where is the knowledge we have lost in information?”* Sebab memang benar bahwa dengan mengabaikan pencarian teori-teori baru, dengan menyetop *“reordering”* tradisi-tradisi ilmiah yang kita warisi, berarti kita menuruni tangga keilmuan dari ilmu pengetahuan ke informasi tok. *“the merely well informed man,”* demikian filosof Whitehead telah mengingatkan, *“is the greatest bore on God’s earth.”*

Sungguh memperhatikan bila disadari bahwa kenaikan usia dan jenjang pendidikan tidak dengan sendirinya meningkatkan pengetahuan atau kebijaksanaan seseorang betapapun besarnya pertumbuhan khazanah informasinya. Hanya pendidikan dalam ilmu pengetahuan dalam artian proses inilah yang membantu orang mampu tidak hanya *“to learn”*, di tengah-tengah era informasi ini, tetapi juga *“to unlearn”* dan *“to relearn”* sepanjang hidup. Hanya ilmu pengetahuan dalam artian proses inilah yang dapat membantu kita memahami kebijaksanaan Goethe yang tersirat dalam ucapannya: *“He only deserves freedom and existence who daily conquers them anew.”* Termasuk dalam keadaan yang harus dapat kita kuasai lagi itu adalah krisis metafisis ilmu pengetahuan. Keadaan fisika tak pelak lagi bersifat profetis bagi semua pengetahuan tradisional.

Abad-XXI dikatakan adalah abadnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perkembangan hingga ke situasi seperti itu ternyata pengaruh fisika modern jauh melampaui teknologi. Pengaruh ini meluas sampai ke bidang pemikiran dan budaya begitu rupa sehingga menimbulkan revisi dalam konsep manusia tentang alam semesta dan hubungan manusia dengan alam semesta itu. Begitu agungnya citra (ilmu) fisika dalam pemikiran rasional sehingga ketika Presiden Lyndon Johnson memerlukan nasihat mengenai urusan peperangan di Vietnam dua dasawarsa yang lalu, pemerintah Amerika yang dipimpinnya mengacu kepada sekelompok *theoretical physicists* – bukan karena mereka ini dianggap ahli dalam metode perang elektronis, tetapi karena mereka diakui sebagai “pendeta agung” dalam ilmu

pengetahuan, sebagai “*guardians of supreme knowledge*”. Apakah bukan karena pertimbangan dan anggapan yang sama kalau di tahun 1989 yang baru lalu Presiden Bush memilih seorang ilmuwan fisika nuklir, Prof. Bromley, untuk menjadi penasihat utamanya di bidang kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi?! Saya pikir memang begitu.

Mungkin dianggap biasa-biasa saja kebenaran yang menggambarkan bahwa dunia kita adalah nonlinier dan serba kompleks; bukanlah pengalaman hidup sehari-hari tidak pernah mengajarkan kita hal-hal yang berbeda dengan gambaran ini. Walaupun begitu fisika dan matematika, diikuti pula oleh berbagai sains lainnya, selama ini berhasil mengabaikan gambaran kebenaran yang begitu jelas. Dengan memusatkan perhatian pada masalah-masalah sederhana yang dapat mereka pecahkan, disiplin-disiplin ilmiah tersebut punya dampak yang kuat sekali pada teknologi dan dengan demikian secara drastis mengubah wajah planit kita. Namun sekarang ini rupanya mulai disadari bahwa umat manusia memerlukan jauh lebih banyak daripada sekedar pengetahuan tentang gejala-gejala linier. Hampir serentak di banyak bidang yang berbeda, tokoh-tokoh tertentu dari masyarakat ilmiah semakin prihatin mengenai kenyataan bahwa terlalu sedikit yang diketahui manusia tentang konsekuensi dari hukum-hukum nonlinier. Sungguh merupakan suatu “kejutan” bagi fisikawan setelah mengetahui bahwa ada “*chaos*” di dalam persamaan-persamaan yang sangat mereka sederhanakan melalui abstraksi, bahwa realitas fisis dari materi, yang merupakan obyek pemikiran dan penyelidikan fisika, di tingkat atom dan partikel subatom kehilangan realitasnya dan lenyap dalam kesemestaan yang begitu misterius, yang selama ini merupakan obyek renungan religi, mistik dan kebatinan. Maka itu mereka lalu mengarahkan pandangannya pada filosofi Timur yang serba holistik, yang juga sudah berurat-berakar dalam tradisi berpikir (kawruh) Jawa.

Ciri khas yang terpenting dari pandangan dunia Timur – bahkan dapat dikatakan intinya – adalah kesadaran tentang kesatuan dan hubungan timbal-balik dari semua hal dan kejadian; pengalaman dari semua gejala di dunia sebagai manifestasi dari suatu kesatuan yang mendasar. Segala sesuatu dilihat sebagai bagian-bagian yang saling tergantung dan takterpisahkan dari keseluruhan kosmos ini, sebagai manifestasi yang berbeda-beda dari realitas akhir. Tradisi Timur terus-menerus mengacu pada realitas akhir yang tak terbagi-bagi ini yang menyatakan dirinya dalam semua hal dimana semua hal ini merupakan bagian daripadanya.

Orang-orang yang dibesarkan melalui training keilmuan Barat tidak begitu menyadari kesatuan dari semua hal tersebut, karena penalaran ilmiahnya terbiasa membagi dunia ke dalam obyek-obyek dan kejadian-kejadian yang terpisah. Pembagian seperti ini pasti bukan merupakan gambaran yang fundementil dari realitas. Ia tidak lebih dari suatu abstraksi yang dibuat oleh intelek yang terbiasa memilih, memilah, memisah dan mengelompokkan dalam kategori dan hal ini menentukan keterbatasan dan relativitas dari pengetahuan konseptuil yang dihasilkannya. Karena representasi pengetahuan ini tentang realitas jauh lebih mudah terjangkau ketimbang realitas itu sendiri, orang-orang ini cenderung mencampuradukkan kedua hal tersebut dan lalu menerima konsep dan lambang yang terjangkau itu sebagai realitas itu sendiri. Salah satu tujuan pokok dari tradisi mistik/kebatinan Timur adalah justru melenyapkan kekeliruan akibat pencampuradukkan tadi.

Orang yang apriori menolak pandangan holistis-integral-istis hanya karena ia berasal dari Timur (sic!), hendaknya mengetahui bahwa kesatuan dari semua hal dan kejadian akan tampil kembali setiap kali kita membandingkan fisika modern dengan filosofi Timur. Kesatuan tersebut membayangkan sudah di tingkat atom dan menjadi semakin jelas dengan semakin dalamnya fisikawan menyusupi materi hingga bidang partikel subatom. Bila kita mempelajari berbagai model

dari *subatomic physics* akan terlihat betapa model-model itu lagi-lagi menyatakan, dengan cara yang berbeda-beda, pemahaman yang sama: bahwa unsur-unsur pokok materi dan gejala-gejala dasar yang berpautan dengannya adalah saling berhubungan, saling terkait dan saling tergantung; bahwa semua itu tidak dapat dipahami sebagai kesatuan-kesatuan tersendiri, tetapi semata-mata sebagai bagian-bagian yang terintegrasi dari keseluruhan.

Suatu transformasi pandangan ke arah ini di dalam dinding akademi ternyata telah dimulai dimana-mana. Pemisahan disiplin-disiplin tradisional menjadi semakin tidak menonjol (*indistinct*). Pusat-pusat studi “Complex Dynamics”, “Non-linier Phenomena” dan topik-topik lain sejenis itu telah bermunculan, yang dengan hati-hati sengaja tidak menyatakan apakah studi yang bersangkutan menangani gejala-gejala dari fisika, kimia, biologi atau dari bidang-bidang yang sangat berlainan. Dalam seminar-seminar di pusat-pusat studi ini, dipelajari metamorfosis dari tumbuh-tumbuhan dan binatang, demikian pula masalah-masalah plasma fisika, psikologi perseptuil atau perilaku sosial. Dari pembahasan dan pengakajian itu tumbuh kejelasan yang meyakinkan bahwa proses-proses formasi dan *self-organization* berkembang menurut beberapa skenario khusus yang tidak tergantung pada sistem spesifik yang sedang dilibatkan. Di Jerman Barat, misalnya, Herman Haken telah berusaha sejak tahun 1960-an di Universitas Stuttgart untuk membina disiplin yang disebutnya “*Synergetics*”. Sebagai perumus dari teori laser dia menemukan bahwa formasi struktur internal di dalam laser terjadi menurut asas-asas yang sangat mirip dengan kompetisi spesis molekuler yang dipaparkan oleh Manfred Eigen (Institut Marx-Planck) dalam analisisnya tentang evolusi awal kehidupan. “*Synergetics*” berusaha secara sistematis untuk menemukan ketentuan-ketentuan yang mengatur timbulnya tatanan (*order*) di dalam sistem-sistem yang kompleks.

Masih ada masalah lain lagi yang juga perlu ditangani berkaitan dengan usaha mengatasi masalah krisis metafisis dari ilmu

pengetahuan modern ini, yaitu masalah *bahasa*. Pengetahuan yang dikomunikasikan secara lisan atau tulisan, dinyatakan dalam bahasa, dalam kata-kata. Maka itu pertanyaan “*apakah pengetahuan?*” berkaitan erat dengan pertanyaan “*apakah bahasa?*” Jawaban terhadap pertanyaan ini tidak sederhana karena tidak sedikit kata-kata yang mengacu tidak hanya pada satu hal/benda. Kemudian ada kata-kata yang menunjuk bukan pada hal/benda tetapi pada aspek-aspek tertentu dari hal/ benda tersebut. tidak boleh pula dilupakan kenyataan bahwa setiap bahasa memiliki kata-kata untuk hal-hal yang tidak dapat kita tunjuk, misalnya istilah-istilah biologi seperti “*fenotype*” atau “*jenis*”; bahwa bahasa dan kata-kata terikat pada budaya setempat yang melahirakannya sedangkan ilmu pengetahuan maunya bersifat universal; akhirnya, dasar pertimbangan abstraksi dalam pembentukan kata-kata belum tentu sama dengan dasar pertimbangan abstraksi ilmu pengetahuan yang hendak dijelaskannya.

Penggunaan matematika sebagai bahasa ilmu pengetahuan, bila sangat berlebihan, malah bisa mengaburkan realitas yang justru hendak dipahami dan dijelaskan oleh ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Disiplin-disiplin ilmiah yang kurang eksak kiranya lebih mampu membantu ilmu pengetahuan tersebut mendekati realitas itu. Hal ini terutama dialami oleh ilmu-ilmu sosial, seperti ilmu ekonomi, yang terlalu “gandrung” pada metode ilmu-ilmu kealaman. “*Nowdays*”, kata Dr. Veit Pittioni dari Innsbruck, “*theories un the science of economics are often perfect in terms of formal mathematics, but are scarcely suited to getting to grips with economic problems or to forecasting developments.*”

Demikianlah, manusia telah berada di muka bumi selama kira-kira sejuta tahun. Makhluk ini telah memiliki sistem tulisan selama kurang lebih 6.000 tahun, pertanian agak lebih lama lagi, tetapi mungkin tidak terlalu melebihi jangka waktu tersebut. ilmu pengetahuan, sebagai faktor dominan dalam menentukan kepercayaan orang-orang terdidik, telah ada selama kira-kira 350 tahun; sebagai

sumber daya teknis ekonomi, selama kurang lebih 250 tahun. Bila kita lihat betapa ilmu pengetahuan ini sebenarnya baru saja mengungkapkan kekuatannya, kita terdorong untuk percaya bahwa kita sebenarnya baru menyaksikan tahap awal dari demonstrasi keperkasaaan ilmu pengetahuan dalam mengubah dan mempolakan kehidupan manusia, bahkan kehidupan semua makhluk di bumi. Keperkasaaan itu pasti akan semakin terbukti di Abad-XXI mendatang, yang sudah diprakirakan sebagai abadnya ilmu pengetahuan itu. Maka agar tidak hanya menjadi “penonton” belaka di abad yang sudah diambang pintu , kita pasti harus bisa menguasai dan mengendalikannya. Dalam usaha menguasai pengetahuan ilmiah ini kita seharusnya tidak hanya mempelajari kekuatannya, tetapi sekaligus juga mendalami krisis dan keterbatasan intrinsiknya. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Kant, ilmu pengetahuan tidak mengenal batas asalkan ia sendiri menyadari keterbatasannya.

Kepustakaan

- *Fritjof Capra*, *The Tao of Physics* (New York: Bantam Books, 1984).
- _____, *The Turning Point* (New York: Bantam Books, 1988).
- _____, *Uncommon Wisdom* (New York: Bantam Books, 1989).
- *J.A Wheeler dalam J. Mehra (ed.)*, *The Physicist's Conception of Nature* (D. Reidel, Dordrecht-Holland, 1973).
- *W. Heisenberg*, *Physics and Philosophy* (New York: Harper Torchbooks, 1958).
- *Ilya Prigogine*, *From Being to Becoming* (San Francisco: Freeman, 1980).
- *Ilya Prigogine, Isabelle Stengers*, *Order Out of Chaos: Man's New Dialogue with Nature* (New York: Bantam Books, 1984).
- *Thomas S. Kuhn*, *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: The University of Chicago Press, 1970).
- *Rome Harre*, *Great Scientific Experiments* (Oxford: Oxford University Press, 1983)
- *J.G. Fichte*, *The Science of Knowledge* (London: Cambridge University Press, 1982).
- *Immanuel Kant*, *Critique of Pure Reason* (New York: Anchor Books, 1966).
- *Nigel Henbest, Heather Cooper*, *The Restless Universe* (London: George Philip, 1982).
- *Albert Einstein*, *Relativity, the Special and the General Theory* (New York: Bonanza Books, 1952).
- *A.P French (ed.)* : *Einstein, A Century Volume* (Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1979).
- *Shiv. Visvanathan*, "Atomic Physics: the Career of an Imagination". *Alternatives*, Vol. V, no. 2, 6/1984.

- Leon R. Kass, *M.D., Toward a More Natural Science, Biology and Human Affairs* (New York: The Free Press, 1985).
- Bertrand Russel, *Outline of Philosopy* (London : Unwin Paperbacks, 1979).
- _____, *The Impact of Science on Society* (London: Unwin Paperbacks, 1976).
- Erns Cassirer, *Rousseau, Kant, Goethe* (New York: Harper & Row, 1963).
- Arthur J. Minton, *Philosophy, Paradox and Discovery* (New York: McGraw-Hill Boo Cy., 1976).
- C.P. Snow, *The Two Cultures and the Scientific Revolution* (New York: Cambridge University Press, 1961).
- Daisaku Ikeda, *Buddhism and the Cosmos* (London: MacDonald & Co., 1985).
- Swami Prabhavananda, *Christopher Isherwood, Aldous Huxley, Bhagavad-Gita, the Song of God* (Mylapore: Sri Ramakrishna Math, 1963).
- J. Glenn Gray, *Re-Thinking American Education* (Middletown: Wesleyan University Press, 1984).
- Howard Gardner, *The Mind's New Science* (New York: Basic Books, 1979).
- H.O Peitgen, *P.H. Richter, The Beauty of Fractals, Images of Complex Dynamical Systems* (New York: Springer-Verlag, 1986).
- Erich W. Streissler, *Pitfalls in Econometric Forecasting* (London: The Institut of Economic Affairs, 1970).
- Edward Shils, "Faith, Utility, and Legilimacy of Science", *Deadalus*, summer/1974.
- UNESCO, *Scientific Thought, some Underlying Concepts, Methods and Procedures* (Paris: Mouton/UNESCO, 1972).
- Niels Bohr, *Atomic Physics and Human Knowledge* (New York: John Wiley & Sons, 1958).
- G.F. Chew, "Impasse for the Elementary Particle Concept",

The Great Ideas Today, Chicago III., Encyclopaedia Britannica, 1974.

- David Bohm, *Quantum Theory* (New York: Prentice-Hall, 1951).

- _____, *Wholeness and the Implicate Order* (London: Routledge & Kegan Paul, 1980).

- Mpu Dusun, Kunjarakara Dharmakathana, *edited and translated by A. Teeuw and S.O. Robson*, *Liberation through the Law of the Buddha* (Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal -, Land - en Volkenkunde, Bibliotheca Indonesica, 1981).

- Giriaco Pedrosa, O.P., "Making Sense in Physics-Philosophical Reflections", *Unitas*, Vol. 35-no. 1,3/1962.

- Jean Piaget, *Psychology and Epistemology* (New York: Penguin Books, 1972).

- _____, *Main Trends in Interdisciplinary Research* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1970).

- Descartes, *A Discourse of Method* (London: Everyman's Library, 1981).

- Jerome S. Meyer, *L'ABC de La Physique* (Paris: Marabout Universite, 1965).

- Arthur March, *La Physique Moderne et Ses Théories* (Paris: Gallimard, 1965).

- Jean Fourastie, *Les Conditions de l'Esprit Scientifique* (Paris: Gallimard, 1966).

- Gaston Bachelard, *La Formation de l'Esprit Scientifique* (Paris: J. Vrin, 1980).

- Henri Poincaré, *La Science et l'Hypothèse* (Paris: Flammarion, 1968).

- S. Weil, *Sur la Science* (Paris: Gallimard, 1966).

- P. Scheurer, *Révolutions de la Science et Permanence du Réel* (Paris: Presses Universitaires de France, 1979).

- Roger Caratini, *L'Année de la Science* (Paris: Seghers/Laffont, 1987).

- G. Rosolato, *Essais sur le Symbolique* (Paris: Gallimard, 1969).
- Erns Cassirer, *Individu et Cosmos dans la Philosophie de la Renaissance* (Paris: Editions de Minuit, 1983).
- Roger Dehem, *L'Utopie de l'Economiste* (Paris: Dunod, 1969).
- Henri Laborit, *L'Homme Imaginant* (Paris: Union Generale
- Francaois Chatelet, *La Philosophie* (Paris: Hachette, 1979).
- Prof. Dr. C.A. Van Peursen, *Filosofie van de Wetenschappen* (Leiden: Marianus Nijhoff, 1986).
- Dr. Ir. P.A. Kroes, *Filosofie van de Natuurkunde* (Leiden: Martinus Nijhoff, 1987).
- Dr. G.M.N. Verschuuren, *Filosofie van de Biologische Wetenschappen* (Leiden: Martinus Nijhoff, 1986).
- Dr. R.F. Beerling, *Het Wankelende Westen, Nietzsche en de Critiek op de Europese Cultuur* (Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1950).
- A. Baiquni, *Fisika Modern* (Jakarta : Badan Tenaga Atom Nasional, 1978).
- M.S.A Sastroamidjojo, *Interprestasi Baru dari Citra Wayang dari Sudut Sains dan Teknologi* (Ceramah di Lembaga Javanologi Yogyakarta).
- A.M.W. Pranarka, "Kasunyatan, Sangkan Paran, Kasampurnan", *Buku Peringatan Bapak Soedjono Hoemardani* (Jakarta: CSIS, 1981).
- _____, *Imanensi dan Transcedensi di dalam Alam Pikiran Jawa* (Ceramah di Lembaga Javanologi Yogyakarta, 6/1984).
- Frans Magnis-Suseno SJ, *S. Rekonsusilo, Etika Jawa dalam Tantangan* (Yogyakarta: Kanisius, 1983).
- Frans Magnis-Suseno SJ, *Etika Jawa, Sebuah Analisis Falsafati tentang Kebijakanaksanaan Hidup Jawa* (Jakarta: Gramedia, 1984).
- S. de Jong, *Salah satu Sikap Hidup Orang Jawa* (Yogyakarta:

Kanisius, 1976).

- *P.J. Zoetmulder, Kalangan, Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang (Jakarta: Djambatan, 1983).*

- *Sri Mulyono, Wayang - Asal-Usul, Filsafat dan Masa Depan-nya (Jakarta: Gunung Agung, 1978).*

- *Yasadipura, Serat Dewa Ruci (Toko Buku Pelajar Solo, 1960).*

- *Daoed Joesoef, Plato, Pengetahuan, Ilmu Pengetahuan, Gnosis, Kawruh (Ceramah di Lembaga Javanologi Yogyakarta, 10/ 1987).*

SATU KEBUDAYAAN DI ABAD IPTEK

Oleh: Daoed Joesoef

Bagaimana menceritakan laut kepada katak yang tidak pernah beranjak dari balongnya ? Bagaimana berkata tentang salju kepada bangau negeri tropis yang belum pernah menjauhi kubangannya ? Bagaimana berbicara tentang masa depan dengan orang yang asyik menatap masa lalu ? Bagaimana berbincang mengenai hidup dengan cendekiawan yang senang terpenjara oleh doktrinnya sendiri ?

Manusia di Abad XX, kita di Indonesia tidak terkecuali, berkenalan dengan semakin banyak benda yang punya kekuatan mekanis, yang tidak hanya dapat berjalan tetapi juga terbang, melawan daya tarik bumi memasuki angkasa luar. Di banyak negara, termasuk Indonesia, benda-benda perkasa ini secara teratur dipamerkan. Pameran seperti ini pasti menimbulkan kagum dan pesona pada diri pengunjung. Begitu terkagum dan terpesona sehingga pada saat melihat benda-benda mekanis itu, ada diantara mereka sampai lupa bahwa after all semua benda itu adalah hasil buatan manusia, bukan benda alami, dan pameran itu sendiri dalam dirinya merupakan sinyal, walaupun bukan peringatan, tentang adanya abad baru bagi kehidupan manusia, yaitu abad ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sungguh melegakan pikiran karena tahu betapa banyaknya orang di negeri kita, termasuk pelajar-pelajar tingkat SD, yang menyadari akan apa yang ada dibalik benda-benda yang memukau itu, yaitu teknologi. Namun tidak sebanyak itu kiranya jumlah orang kita yang mengetahui tentang apa yang ada dibalik teknologi itu, yang telah melahirkan teknologi tersebut, yaitu ilmu pengetahuan. Di antara yang mengetahui ini kiranya tidak semuanya menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu punya metode dan kekuatan serta disiplinnya sendiri, betapa ia memiliki makna, tuntutan serta kondisinya sendiri dan betapa ke-gairahan serta vitalitasnya punya arti yang tersendiri pula.

Jadi dinegeri kita, walaupun banyak sekali orang yang tahu bahwa di balik benda-benda berenergi masinal yang mengagumkan itu ada teknologi, tidak sebanyak itu yang tahu bahwa di balik teknologi itu ada ilmu pengetahuan. Lebih sedikit lagi yang kiranya menyadari bahwa yang disebut ilmu pengetahuan itu bukanlah sembarangan koleksi dari teknik-teknik manufaktur ciptaan penghuni laboratorium yang berkacamata tebal dengan jari-jari tangan yang kuning dekil karena nikotin. Dan berdasarkan pengamatan sejak awal tahun 1970-an saya lihat nyaris tidak ada orang yang tahu, yang perduli, bahwa di balik ilmu pengetahuan itu, di sela-sela tumpukan buku di rak, di dalam rumus-rumus dan botol tabung serta pipa percobaan, pada gilirannya terdapat suatu isi, suatu budaya baru. Dan ketidaktahuan, ketidakperdulian ini, sungguh merisaukan, pantas dirisaukan.

Betapa tidak. Ketidaktahuan ini lebih jauh berarti bahwa walaupun orang tahu bahwa tidak ada manusia, atau kelompok manusia, yang tidak berbudaya, orang ini kiranya tidak mau tahu bahwa tidak semua budaya, tidak sembarang budaya, melahirkan ilmu pengetahuan. Sedangkan budaya baru yang saya sebut tadi, budaya yang satu inilah yang melahirkan ilmu pengetahuan yang ada pada gilirannya menciptakan teknologi yang telah membuat abad XXI menjadi abadinya ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka di Abad Iptek ini, yang sebenarnya mau tidak mau sudah kita masuki, budaya baru inilah yang bisa disebut baru budaya dan kelompok manusia atau bangsa yang tidak menghayatinya pasti sulit untuk dapat survive dalam menempuh Abad Iptek yang penuh dengan tantangan, perubahan dan peluang yang serba cepat itu.

Pengetahuan sejarah, sejarah pengetahuan ilmiah sekalipun, tidak terlalu membantu penyadaran keberadaan budaya baru ini. Mempelajari ilmu pengetahuan dalam term produk ternyata juga tidak dapat membantu berbuat demikian. Mungkin sekali pendalaman ilmu pengetahuan dalam term proses dapat, tetapi itu pun memerlukan

waktu serta sikap yang konsisten selama jangka waktu yang bersangkutan dan adanya lebih dahulu ilmu pengetahuan dalam term komunitas yang mantap.* Namun pengetahuan tentang sejarah pengetahuan itu memberikan kita gambaran dari pertumbuhan ilmu pengetahuan sebagai nilai, jadi sebagai (bagian yang tidak terpisahkan dari) kebudayaan, sehingga setiap benda dan peristiwa teknologis menjadi jelas makna dan kedudukannya didalam perkembangan dunia sekarang dan di masa depan. Ia dapat dipakai sebagai jembatan ke ilmu pengetahuan dari sudut kepentingan manusiawi mana pun kita bertolak karena ia menyatakan adanya kesatuan tidak hanya dari sejarah tetapi dari pengetahuan manusia. Bukankah kunci bagi orang awam ke ilmu pengetahuan adalah kesatuan pengetahuan ilmiah ini dengan seni/kiat (kerajinan) yang di manapun, sudah dianggap tidak hanya sebagai unsur yang maha penting dari kebudayaan, bahkan sebagai budaya itu sendiri. Maka si awam ini, *hopefully*, akan memahami ilmu pengetahuan sebagai suatu budaya bila dia berusaha menelusuri perkembangannya di dalam budayanya sendiri.

* Ilmu pengetahuan dalam term produk adalah pengetahuan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya oleh komunitas ilmiah. Jadi dalam dirinya pengetahuan ilmiah terbatas pada kenyataan-kenyataan yang mengandung kemungkinan untuk di sepakati dan terbuka untuk diteliti, diuji ataupun dibantah oleh seseorang.

Ilmu pengetahuan dalam term proses adalah kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan demi penemuan dan pemahaman dunia alami sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana yang kita kehendaki. Metode ilmiah yang khas dipakai dalam proses ini adalah analisis rasionil, obyektif, sejauh mungkin bersifat impersonal dari masalah-masalah yang didasarkan pada percobaan dan daya yang observable.

Ilmu pengetahuan dalam term komunitas adalah lingkungan studi, kerja dan karya yang dihidupi oleh semangat ilmiah dan pergaulan serta tindak-tanduk, perilaku, sikap maupun tutur kata para warganya di lingkungan itu diatur oleh empat ketentuan, yaitu universalisme, komunalisme, disinterestedness dan skeptisisme nalariah

Sejauh yang mengenai kita, celakanya, kebudayaan kita tidak merangkum ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang lahir dari dan dikembangkan oleh seni/kiat (kerajinan) merupakan unsur budaya, tetapi pengetahuan ilmiah tidak dianggap begitu. Bukan karena pengetahuan ilmiah ini disadari sebagai unsur luar yang diperkenalkan melalui sistem pendidikan asing (Belanda) sebab dalam seni/kiat dan pengetahuan klasik kita jelas terlihat kehadiran pengaruh-pengaruh asing (India, Arab, Cina) tetapi karena dirasakan ilmu pengetahuan bukan merupakan budaya. Berhubung dengan itu ilmuwan, per definisi, juga bukan budayawan. Sampai detik ini, walaupun ada sarjana kita ditampilkan di media massa (televisi, surat kabar, majalah, buku) sebagai budayawan, bukan karena berdasarkan cara berpikir, sikap serta karya-karyanya dia dapat di kategorikan sebagai ilmuwan, tetapi karena di samping ini semua dia giat berkarya di bidang kesenian atau bergerak di bidang-bidang “sosial-budaya”. Dengan perkataan lain, dia diakui sebagai budayawan karena dia adalah seniman. Maka seniman/seniwati ketoprak diakui sebagai budayawan, sedangkan ilmuwan tidak. Aksi pemilihan ratu kecantikan, yang pada dasarnya merupakan usaha periklanan belaka walaupun bukan narcissisme terselubung, dielu-elukan sebagai suatu peristiwa budaya, sedangkan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja dan Lomba Karya Ilmiah Remaja, yang pada dasarnya merupakan kegiatan penghayatan nilai-nilai ilmu pengetahuan, ditanggapi hanya sebagai peristiwa persekolahan.

Masih ada saja orang yang menganggap ilmu pengetahuan semakin lama semakin mencekik seni atau paling sedikitnya memadatkannya demi efisiensi sehingga kebudayaan menjadi “modern” tetapi kerdil. Maka itu seni hanya dapat dikembangkan kembali sesuai dengan kodrat alaminya dengan jalan mengeluarkan ilmu pengetahuan dari ruang lingkup tradisional dari kesenian, yaitu kebudayaan. Berhubung seni sudah dianggap umum sebagai unsur kebudayaan par *excellence*, tiada budaya tanpa seni, tudingan orang ini oleh umum

dianggap wajar. Keadaan seperti ini sampai sekarang masih terjadi secara sporadis di Barat. Namun kalau kita renungi lebih dalam, yang dikeluhkan oleh orang atau “pecinta seni” tersebut sebenarnya bukanlah ilmu pengetahuan, tetapi perubahan. Para penuding itu tiba-tiba merasa “asing” di dalam gelombang perubahan yang dituntut oleh zaman.

Anggapan bahwa ilmu pengetahuan merusak kebudayaan kadang-kadang didukung oleh pernyataan historis bahwa seni berkembang hanya bila pengetahuan ilmiah diabaikan. Ternyata jalannya peradaban lama di Timur dan di Barat membantah hal tersebut. Pujangga Omar Khayam dari Persia bukan hanya membuat puisi tetapi juga mengembangkan matematika dan astronomi. Di Yunani, tempat bermula kebudayaan Barat, pada masa keemasannya seni dan ilmu pengetahuan saling menunjang dan bekerjasama lebih erat daripada yang terjadi sekarang di jaman modern. Phytagoras hidup sebelum Aeschylus menciptakan drama Yunani. Socrates mengajarkan penalaran ilmiah pada waktu seni drama tersebut sedang jaya-jayanya! Lalu apakah Socrates ini seniman atau ilmuwan ? Kehadiran tokoh yang sekaligus seniman dan ilmuwan ini membidani kelahiran era modern di jaman Renaissance. Dan yang menjadi tokoh dan lambang dari manusia Renaissance itu dari sejak semula adalah Leonardo da Vinci yang adalah sekaligus pelukis, pematung, matematikawan dan teknikus. Dirinya paling jelas mencerminkan keuniversalan dan kesatuan dari intelek. Di negeri kita pun dahulu tidak dipertanyakan apakah empu atau wali itu ahli sastra atau ahli pengetahuan. Dia disebut pujangga, budayawan, karena ahli sekaligus dalam seni/kiat, pengetahuan (kawruh), orang bijaksana dan dihormati sebagai jauhari tempat bertanya semua hal.

Di Inggris, tempat bermula tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan modern, jaman keemasan susastra adalah justru era dimana pengetahuan ilmiah dan seni maju bahu-membahu. Era ini meliputi waktu pemerintahan Ratu Elizabeth I di paruh kedua Abad

XVI ditandai oleh penemuan-penemuan di bidang-bidang perdagangan, industri dan susastra. Ketika itu para pelayar dan petualang, seperti Sir Walter Raleigh, merupakan Leonardo-Leonardonya Inggris. Lingkungan pergaulan Sir Raleigh tersebut, misalnya, didominasi oleh seorang matematikawan dan seorang astronom, sebab navigasi tergantung pada astronomi yang berkembang seiring dengan pikiran spekulatif baru tentang dunia dan sistem solar. Pelayaran-pelayaran besar ini pada gilirannya mengilhami karya-karya sastra. Kelihatan sekali dalam era ini betapa seni, ilmu pengetahuan dan dunia fisik saling menunjang pemekaran masing-masing. Juga bukan satu kebetulan kalau ketika ini pula diterbitkan tabel pertama dari logaritma.

Enam tahun sesudah Ratu Elizabeth I meninggal timbul era pematangan budaya lainnya di Inggris, yaitu era restorasi susastra yang juga ditandai oleh pembentukan sebuah lembaga yang kemudian ternyata tetap merupakan satu kominiti ilmiah yang paling penting di dunia. Di lembaga inilah enam tahun sesudah didirikan Newton untuk pertama kalinya mengungkapkan pemikiran ilmiahnya yang sangat penting dan menentukan di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, di bidang ilmu alam dan teori gravitasi pada khususnya, dan bukan di ruang Cambridge tempat dia mengajar. Namun keanggotaan lembaga ini tidak hanya terdiri dari ilmuwan, tetapi juga dari seniman, penulis, penjelajah samudera dan benua. Mereka ini sama-sama tertarik pada kepentingan dan keinginan masing-masing, tanpa membuat batas dan jarak apa pun antara perhatian setiap anggota. Perhatian yang aneka ragam itu meliputi hal-hal keilmuan seperti, matematika, fosil, mekanika, botani dan hal-hal keteknikan praktis seperti metalurgi dan statistik kependudukan. Pertemuan yang meresmikan pendirian lembaga ini dibuka dengan sebuah ceramah tentang astronomi oleh seorang arsitek (Christopher Wren). Nama lembaga, "*The Royal Society*", diberikan oleh yang paling bersemangat di antara semua pendirinya (John Evelyn), yang adalah

seorang *diarist*. Bila lembaga ini memerlukan suatu rangkaian kata-kata yang disingkat dan padat namun tetap indah, dibentuklah sebuah panitia yang mencakup salah seorang anggota yang berbakat khusus dalam hal ini, yang adalah seorang penyajak (John Dryden).

Peristiwa yang sama terjadi pula di Perancis. Dalam periode yang sama berdirilah di Paris sebuah lembaga serupa, disebut "*Academic Royale des Sciences*". Walaupun dalam nama lembaga ini disebut secara eksplisit "ilmu pengetahuan", keanggotaannya tidak hanya terdiri dari ilmuwan, seperti Descartes, tetapi meliputi pula orang-orang dari berbagai macam ketrampilan, keahlian dan pengetahuan. Bahkan lebih jauh lagi, di negeri yang raja dan rakyatnya beragama Katolik, lembaga ini tidak segan-segan mengajak seorang ilmuwan asing (Belanda) yang berbeda agama (Protestan) untuk turut memperkuat pendirian dan pekerjaan ilmiahnya sehari-hari. Dan orang yang berkebangsaan asing serta berlainan agama ini (Huygens) menetap di lembaga ini selama tidak kurang dari empat belas tahun.

Ilmu pengetahuan dewasa ini jelas jauh lebih berkembang dan berkemampuan jauh lebih besar dari pada pengetahuan ilmiah di jaman Newton. Sebaliknya seni sastra dewasa ini dinilai tidak semaju seni sastra di masa Dryden, yaitu sastrawan yang sejaman dengan ilmuwan Newton dan sama-sama menjadi anggota dari *the Royal Society*. Namun kenyataan ini bukan berarti bahwa kemajuan ilmiah yang pesat ini terjadi dengan mengorbankan seni. Begitu pula kalau di Indonesia seni dianggap kurang berkembang relatif terhadap ilmu pengetahuan, tidak dengan sendirinya berarti karena di sini untuk seni belum ada "Menteri"-nya sendiri. Sama halnya dengan seni, ilmu pengetahuan pun selalu gelisah. Namun dalam kegelisahan itu ilmu pengetahuan terus menerus berusaha mengatasi gagasan-gagasan lamanya dan untuk itu bersedia mengadakan revolusi-revolusi dalam metode, pendekatan dan penalarannya sendiri. Dalam berbuat demikian ilmu pengetahuan memang bersaing dengan seni dalam merebut otak-otak muda yang cemerlang. Persaingan ini sendiri dalam dirinya

merupakan bukti nyata bahwa seni dan ilmu pengetahuan sama-sama memerlukan kecerdasan manusia bagi perkembangannya masing-masing. Dan di sinilah tampil salah satu dari sedikit penemuan psikologis masa kini yang dapat dipegang, yaitu betapa konfigurasi faktor-faktor kecerdasan yang membedakan antara kepandaian dan kependiran adalah sama pada diri setiap orang, sama pada seniman maupun pada ilmuwan. Kita bisa saja terpisah oleh pendidikan dan pengalaman; kita juga dapat berbeda dalam sikap. Namun di balik semua ini kita sama-sama berpegang pada suatu dasar yang lebih mendalam dari kemampuan bersama.

Salah satu prasarana modern yang paling merusak adalah anggapan bahwa seni dan ilmu pengetahuan adalah dua jenis kepentingan hidup yang berbeda dan tidak cocok satu dengan lainnya. Kita didorong untuk biasa mempertentangkan temperamen artistik dengan temperamen ilmiah. Ada kecenderungan untuk mengidentifikasikan yang pertama dengan pendekatan kreatif/kritis dan yang kedua sebagai pendekatan spekulatif/individualistis. Bahkan adakalanya pandangan agamis dan etis ikut menuding ilmu pengetahuan sebagai materialistis dan tidak spirituil. Beberapa bulan yang lalu seorang penyajak dan dramawan terkenal kita mengatakan pelajar-pelajar sekarang tidak kreatif dibandingkan dengan pelajar-pelajar yang seperiode dengan dia dahulu. Pendapat ini dilontarkan setelah dia melihat majalah dinding SMA tempat dia belajar dahulu lebih banyak memuat analisis-analisis singkat keilmuwan ketimbang sajak dan cerpen. Baginya tidak penting kenyataan bahwa dari sekolahnya ini sekarang pernah ada pemenang lomba penelitian/penulisan ilmiah yang kini secara teratur diselenggarakan oleh berbagai lembaga pemerintah. Dia kiranya juga tidak tahu bahwa berkat kreativitas ilmu pengetahuanlah maka karya-karya seni sekarang dapat lebih luas memasyarakat dan dengan lebih cepat serta lebih murah. Dia tidak menyadari bahwa berkat kekritisian semangat ilmiahlah orang awam dapat mengenal gradasi mutu dari karya-karya artistik.

Sebagian besar dari ilmu pengetahuan memang berurusan dengan materi tetapi hal ini tidak berarti bahwa pengetahuan ilmiah dan ilmuwan yang mengembannya bersifat materialistis. Kalau kita amati penampilan dan pandangan hidup dari banyak ilmuwan, terutama yang diakui besar dalam bidang keilmuannya, secara jujur harus kita akui betapa sederhananya hidup mereka sehari-hari, bahkan adakalanya jauh lebih tidak materialistis ketimbang seniman dan agamawan kondang. Saya kira keliru menganggap ilmu pengetahuan dan ilmuwan adalah individualistis. Yang benar adalah bahwa ilmu pengetahuan dan ilmuwan pada umumnya memiliki individualitas. Hal ini wajar karena ilmu pengetahuan adalah nilai yang membiasakan orang mengembannya untuk selalu tahu (sadar) tentang apa yang dia lakukan dan mandiri dalam penelitian. Terlepas dari kebiasaan ini, kiranya dapat juga dikatakan bahwa karya seni dan seniman besar juga memiliki individualitas.

Dalam masyarakat dimana berlaku sistem pembagian kerja, kiranya dianggap wajar pula adanya spesialisasi fungsi. Kalaupun hal ini sampai terjadi di bidang seni dan ilmu pengetahuan, saya pikir hal tersebut demi kemudahan kerja belaka. Memang hanya sebagai suatu kemudahan kita membedakan fungsi ilmiah dan fungsi artistik. Dengan pertimbangan yang sama pula kita lihat perbedaan dan komplementaritas, antara fungsi pemikiran dan fungsi perasaan. Namun hendaknya kita tetap sadar bahwa nasib tidak membagi makhluk manusia dalam pemikir dan perasa. Kalau dahulu, baik di Barat maupun di Timur, seni dan ilmu pengetahuan bukan merupakan dua nilai yang saling tidak cocok, mengapa kini dibuat berbeda begitu rupa sehingga yang satu, ilmu pengetahuan, harus dikeluarkan dari kebudayaan.

Kebudayaan adalah sistem nilai. Maka bagi ilmu pengetahuan dan seni, sebagai nilai, budaya bukan hanya merupakan wadah tetapi juga sumber bersama: artinya kedua nilai itu sama-sama berawal dari sumber tunggal tersebut. Kesulitan-kesulitan yang sekarang kita

alami dalam memahami perkembangan seni modern bukan tidak penting. Hal ini adalah pertanda tidak adanya suatu bahasa yang sekaligus umum dan luas dalam budaya kita. Demikian pula, kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam memahami gagasan-gagasan dasar dari ilmu pengetahuan modern merupakan pertanda hal yang sama. Bukankah dahulu, di jaman empu dan wali, ilmu pengetahuan dan seni memiliki suatu bahasa bersama. Kalaupun sekarang kedua nilai ini sama-sama membisu justru karena keduanya, baik ilmu pengetahuan maupun seni, kini tidak lagi memiliki bahasa bersama itu. Maka tugas kita bukanlah lalu semakin memisahkan mereka dengan jalan mencampakkan yang satu keluar budaya, tetapi seharusnya menghidupkan bahasa universal yang satu itu, yaitu satu-satunya bahasa yang mampu mempersatukan ilmu pengetahuan dan seni, yang menyatukan ilmuwan, seniman, agamawan dan orang awam dalam suatu pemahaman bersama.

Sejauh kebudayaan secara esensiil adalah sistem nilai, maka tidak ada alasan untuk menganggap ilmu pengetahuan bukan bagian dari budaya karena pengetahuan ilmiah, sama dengan pengetahuan, adalah suatu *nilai*. Di Abad XVI dan XVII memang ada anggapan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah bebas nilai. Anggapan ini mengacaukan pengetahuan ilmiah dengan metode ilmiah yang adalah bebas emosi. Artinya, bila ia diterapkan secara perfek, perlakuannya menjadi begitu ketat hingga tidak mengindahkan nilai-nilai yang mungkin menimbulkan reaksi pro dan kontra. Namun hal ini tidak membuatnya bebas nilai. Ilmu pengetahuan adalah tidak lebih dari penerapan nalar manusia sedapat mungkin dengan cara yang paling logis. Maka itu nalar adalah suatu nilai tempat ia bertumpu. Berhubung yang terlibat itu adalah nalar manusia, maka ilmu pengetahuan juga kukuh bersendi pada kehidupan manusia sebagai suatu nilai dan pada pelaksanaan yang rasional dari kehidupan itu, juga sebagai suatu nilai. Jadi bagaimana mungkin ilmu pengetahuan bebas nilai karena ia sendiri adalah nilai dan bersendikan nilai-nilai.

Tentu masih banyak lagi nilai-nilai lainnya yang diterima dengan wajar sebagai unsur alami kebudayaan, seperti kebaikan, keindahan, berbudi luhur. Namun nilai-nilai tersebut juga ada gemanya dalam ilmu pengetahuan. Sebenarnya lebih banyak lagi nilai yang bergema dalam pengetahuan ilmiah karena pengetahuan ini praktis turut menghayati nilai-nilai dari semua kegiatan manusia. Ia bahkan turut memperkaya khazanah nilai-nilai itu. Dan kalaupun ada pergeseran dalam nilai-nilai manusiawi itu, ia turut berperan kreatif dalam pergeseran tersebut. Sesungguhnya tidak akan ada eksistensi ilmu pengetahuan tanpa adanya penilaian nilai-nilai. Bukanlah nilai-nilai pada dasarnya bersendikan perbuatan menilai. Dan setiap perbuatan menilai dalam dirinya merupakan suatu pembagian dari bidang pengalaman kita dalam apa-apa yang penting dan mana yang tidak. Dengan perkataan lain, di dasar setiap pemikiran manusia terdapat penilaian tentang apa yang serupa dan apa yang tidak serupa. Maka itu nilai-nilai manusiawi berkaitan erat dengan penilaian kita tentang yang serupa dan tidak serupa itu. Bila ilmu pengetahuan mengubah penilaian itu ia mengubah pula nilai-nilai itu. Ilmu pengetahuan membantu kita menciptakan kephahaman dengan jalan memperluas wawasan mengenal apa yang serupa dan apa yang tidak serupa.

Kecenderungan yang terus-menerus dari ilmu pengetahuan untuk memperluas keserupaan yang dicarinya diantara fakta-fakta bukan tidak penting bagi perkembangan sikap kultural manusia. Pendalaman ilmu pengetahuan, ada dikatakan, membina kebiasaan bersikap kritis. Ini benar, tetapi tidak hanya itu. Bila kita menemukan keserupaan yang lebih luas di antara ruang dan waktu atau diantara bakteri, virus dan kristal, kita memperluas tatanan (order) di dalam alam semesta. Dan yang jauh lebih berarti lagi, dengan begitu kita sebenarnya memperluas kesatuannya. Bila kita telusuri kembali perkembangan ilmu pengetahuan, setiapak demi setiapak dengan teliti, kita pasti akan memahami betapa gerakan itu selalu menggapai-gapai

konsep pemersatu. Pada gerakan (ilmu) biologi sejak Ray dan Linnacus, misalnya kita lihat hal itu pada adanya pendaftaran spesies yang serupa, penemuan sel-sel, pembagian, dan fusi seksualnya; elaborasi mekanisme dari pewarisan dan dari seleksi alami; dan dari semua ini distilasi berkesinambungan dari konsep evolusi yang tadinya luas dan beragam. Di bidang (ilmu) kimia hal yang sama kita lihat sejak dirumuskannya hukum Dalton tentang kombinasi dari bobot-bobot yang sama melalui tabel periodik dari unsur-unsur dan perilaku elektrisnya seperti yang dipikirkan oleh Davy dan Faraday hingga ke konsep struktur molekuler dewasa ini. Perjalanan (ilmu) fisika ke arah kesatuan dapat dilihat pada: kristalisasi konsep universal tentang materi, massa dan bobot di dalam revolusi ilmiah: konsep tentang konservasi massa, tentang energi yang berbentuk banyak dalam karya Rumford, Joule dan Clerk Maxwell dan tentang konservasinya; lompatan Planck di tahun 1899 ke sifat yang khas dari energi, identifikasi Einstein tentang massa dan energi dalam satu konsep tunggal yang dalam dirinya merupakan karya yang paling gemilang mengenai pandangan pemersatu.

Kita lihat semua ini menyebabkan penciptaan energi dari massa: pembuatan gambaran tentang ruang angkasa yang semakin mendekat tetapi kiranya juga semakin meluas; dan kini dalam dua-tiga tahun terakhir ini, timbulnya spekulasi bahwa dalam proses ekspansi itu energi gravitasional menghilang secara tidak langsung dan bisa tampil kembali sebagai materi baru. Jadi ilmu pengetahuan adalah suatu proses penciptaan konsep-konsep baru yang mempersatukan pemahaman kita tentang alam dan dunia dan proses tersebut kini menjadi semakin tegas dan semakin luas jangkauannya, jauh lebih semarak daripada keadaannya di puncak revolusi ilmiah dahulu. Dan kesatuan alami inilah, di antara yang bernyawa dan yang tidak, yang dibiasakan untuk digapai oleh pemikiran ilmiah, atau pemikiran budaya bila pengetahuan ilmiah diperlakukan sebagai unsur yang tak terpisahkan dari kebudayaan. Kesatuan alami ini adalah suatu konsepsi yang

jauh lebih dalam daripada asumsi bahwa alam itu seharusnya seragam. Kita berusaha menemukan alam yang satu, suatu kesatuan yang koheren. Hal ini memberikan kepada siapa pun, yang menghayati semangat ilmiah makna dari misi keilmuannya dan suatu kepuasan estetis: setiap penelitian mengandung perasaan sedang menjalin benang-benang dunia menjadi sebuah jaringan yang terpolada dan terpadu.

Einstein telah menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan kepada alam selama tiga abad ketika dia menggabungkan energi dan massa dalam satu persamaan: $E = mc^2$. Ini tentu bukan konsep pemersatu yang sama dengan yang dicari-cari oleh Keats ketika dia menutup "*Ode on a Grecian Urn*" dengan kalimat:

Beauty is truth, truth beauty, that is all
Ye know on earth, and all ye need to know

Namun di sini keserupaan jauh lebih penting dari perbedaannya. Keserupaan itu lebih berguna bagi pemahaman kita bahwa konsep ilmu pengetahuan sama saja dengan konsep-konsep nilai, sama-sama merupakan monumen bagi kepekaan kita tentang adanya kesatuan di dalam alam.

Ilmu pengetahuan sering dipersalahkan anti moral atau paling sedikitnya tanpa moralitas apa pun. Karena itu dalam pikiran orang yang mendalami pengetahuan ilmiah akan berkembang ketidak-perdulian terhadap moralitas yang pada waktunya akan mematikan kemampuan membuat penilaian yang tepat dan melumpuhkan kehendak bersikap baik, bahkan melemahkan kepercayaan religius. Tuduhan seperti ini menurut saya tidak beralasan sama sekali. Betapa tidak. Bukankah yang dicari oleh pengetahuan adalah kebenaran. Sejarah ilmu pengetahuan memang sempat ditaburi oleh kehadiran dari tidak sedikit jumlah ilmuwan yang tercela tingkah lakunya. Tetapi bukankah sejarah kesenian dan keagamaan juga mengalami hal yang sama. Namun semua ilmuwan yang tercela itu jelas tercatat sebagai orang

yang sangat malu berdusta mengenai fakta atau mengenai keinginan ilmiahnya. Semuanya mendasarkan keyakinan ilmiahnya pada suatu kebulatan tekad dan keinginan yang menggebu-gebu untuk menemukan kebenaran tersebut. Tidak ada satu sistem moralitas apa pun yang tidak menilai tinggi kebenaran serta pengetahuan tentang diri sendiri secara sadar dan jujur. Maka itu aneh sekali bila ilmu pengetahuan dikatakan amoral, lebih-lebih bila ucapan itu datang dari orang-orang yang dalam hidupnya sehari-hari menjunjung tinggi kebenaran itu. Hal apa pun yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dan metode serta pendekatan apa pun yang dipakainya dalam pengkajian itu, dalam membuat penilaian akhir ia berpegang hanya pada satu kriteria, yaitu bahwa ia harus menyajikan kebenaran. Kalaupun ada satu sistem perilaku yang mengklaim dirinya lebih fanatik terhadap kebenaran daripada yang dikembangkan oleh Lao-isze, maka pasti sistem itu adalah ilmu pengetahuan.

Saya tonjolkkan di sini kebenaran di antara nilai-nilai manusiawi karena kebenaran ini pada umumnya ada di semua sistem nilai, jadi di semua budaya dan peradaban, dan betul-betul fundamental bagi kebanyakan sistem tersebut. Maka itu *kebenaran* tersebut pasti merupakan suatu *nilai*. Namun bukan berarti bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang *self-evident* dalam ilmu pengetahuan, seperti juga halnya dalam seni, moral atau agama. Dalam semua yang disebut ini kebenaran bersendikan suatu penilaian, suatu perbuatan menilai. Tidak ada satu pun penilaian dapat dilakukan tanpa pengalaman, “sebab tidak ada satupun kebenaran, bahkan tidak kebenaran religius, yang tidak minta didukung oleh fakta. Namun kita tentu tidak bisa mengukur kebenaran dan nilai-nilai manusiawi begitu saja secara faktuil. Kita seharusnya marenung lebih dalam apakah, baik pada ilmu pengetahuan, seni maupun etika, kebenaran tidak jauh lebih luas dari sekedar kecocokan dengan fakta. Renungan ini kiranya sekaligus merupakan penelusuran naluriiah untuk mengetahui apakah ilmu pengetahuan memang memiliki nilai-nilainya sendiri.

Ilmu pengetahuan sebenarnya merupakan suatu bagian, suatu bagian yang karakteristik, dari kegiatan manusia pada umumnya. Maka itu gagasan-gagasan ilmu pengetahuan dalam dirinya berupa common sense, yaitu generalisasi yang kita simpulkan dari pengalaman sehari-hari dan terus-menerus dipakai sebagai pegangan pelaksanaan hidup. Tiga gagasan kreatif, misalnya, yang kemudian menjadi pengertian sentral keilmuan gagasan mengenai tatanan (order), mengenai sebab dan mengenai peluang sebenarnya sudah lama ada sebelum diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Kegiatan alami dari pengetahuan ilmiah untuk melihat kedepan, mengantisipasi, memperkirakan, pada dasarnya juga merupakan keinginan alami dari manusia karena secara naluri makhluk Tuhan yang satu ini tahu bahwa dia akan menjalani sisa hidupnya di masa depan, maka itu merasa perlu mengetahui masa depan itu. Metode ilmiah pun sebenarnya merupakan metode dari semua penyelidikan manusia; bedanya hanyalah bahwa ia adalah eksplisit dan sistematis. Dan perbedaan ini penting sekali, sangat menentukan, lebih-lebih bila mengenai masalah “perni- laian yang tepat” dan “tindakan yang tepat” (correct).

Dalam kegiatan alaminya melihat ke depan itulah terlihat gambaran konseptual ilmu pengetahuan tentang kebenaran, yang di dalam budaya dan peradaban mana pun diperlakukan sebagai nilai yang dijunjung tinggi. Dalam melaksanakan kegiatan alaminya itu ilmu pengetahuan menghubungkan fakta-fakta. Namun jangan mengira bahwa yang dinamakan pengetahuan ilmiah itu semata-mata adalah suatu deskripsi tentang fakta. Ia sama sekali bukan merupakan suatu catatan netral tentang apa-apa yang terjadi dalam ensiklopedi mekanis yang tak berujung, seperti anggapan keliru yang berasal dari Abad XVIII. Anggapan keliru ini melihat ilmuwan sebagai pengamat yang lepas terpisah dari apa yang diamati dan percaya bahwa alam semesta, termasuk dunia, berjalan baik karena diatur oleh asas gravitasi natural dan *human self-interest*. Anggapan demikian ini keliru karena di Abad XVIII itu sendiri ilmu pengetahuan sebenarnya tidak pernah

begitu. Sebab ilmu pengetahuan bukan catatan apa adanya tentang fakta, tetapi suatu pencarian tatanan di dalam fakta-fakta. Dan kebenaran ilmiah bukanlah benar menurut fakta, yang tidak pernah lebih dari aproksimatif, tetapi kebenaran hukum-hukum yang kita lihat (temukan) ada di dalam fakta-fakta. Dan kebenaran jenis ini, harus diakui, sama sulitnya dan sama manusiawinya dengan pengertian kebenaran dalam suatu lukisan yang jelas bukan sebuah foto, atau rasa kebenaran emosional dalam suatu alunan musik.

Jadi kita baru dapat menetapkan kebenaran setelah kita beralih dari fakta ke hukum. Yang penting adalah menemukan, mengenali, adanya hukum di dalam fakta. Hukum itulah yang kita verifikasi: pola, tatanan, struktur dari peristiwa-peristiwa. Itulah sebabnya mengapa pengetahuan ilmiah begitu sarat dengan simbolisme angka dan geometri, yang merupakan ekspresi familier dari hubungan-hubungan struktural. Jadi kita semata-mata mengamati dan memprakirakan fakta. Itulah sebabnya mengapa setiap filosofi yang membangun ilmu pengetahuan hanya dari fakta adalah keliru. Yang kita cari adalah hukum, kemudian disamping memakainya untuk tindakan-tindakan, mengujinya ke arah (pencarian) hukum-hukum baru. Yang penting bukanlah bentuk dari hukum yang bersangkutan. Hukum ilmu pengetahuan, sama dengan hukum-hukum yang kita pakai dalam langkah-langkah pribadi kita, tetap berguna dan benar, terlepas dari apakah ia dikatakan “selalu” berlaku atau hanya “acapkali” berlaku. Yang dipegang adalah pengakuan adanya hukum di dalam fakta-fakta.

Dan di dalam batang tubuh hukum itu sendiri, yang tampil sebagai tanda kebenaran adalah koherensi yang teratur dari keseluruhan unsur-unsur bagian. Semua bagian itu cocok satu sama lain seperti berbagai karakter dalam sebuah novel atau laksana kata-kata di dalam sebuah sajak. Analogi yang terakhir ini hendaknya selalu kita ingat karena ilmu pengetahuan adalah suatu bahasa dan sebagai bahasa, ia menetapkan bagian-bagiannya dengan jalan begitu rupa sehingga bagian-bagian tersebut membentuk suatu arti. Pada setiap

perkataan dalam kalimat ada ketidakpastian definisi namun kalimat itu menetapkan secara konklusif artinya sendiri dan arti dari kata-kata yang membentuknya. Maka kesatuan intern dan koherensi dari ilmu pengetahuan itulah yang memberikannya dan membuatnya satu sistem prediksi yang lebih baik ketimbang bahasa lain yang kurang tertata dan kurang teratur.

Demikianlah, setiap hukum ilmu pengetahuan mempersatukan tebaran fakta-fakta. Namun hukum itu sendiri bukan merupakan agen pemersatu yang terakhir. Setiap hukum hanya merupakan suatu aturan dalam pembuatan prediksi. Pikiran-pikiran besar yang mempersatukan itu adalah simpul-simpul di mana hukum-hukum saling menyilang dan saling mengikat, seperti pikiran bahwa semua materi adalah serupa, atau bahwa ruangan bumi terbentang melampaui bintang-bintang, atau bahwa ada suatu kesinambungan fisik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Umum cenderung menerima simpul-simpul persilangan itu apa adanya dan tidak peduli berapa lama diperlukan untuk membuat konsep-konsep pemersatu itu. Padahal konsep-konsep itulah yang menciptakan kesatuan : konsep tentang materi, tentang ruang, tentang evolusi dan tentang pewarisan. Konsep-konsep itulah yang merupakan sekaligus kaitan-kaitan dan gabungan-gabungan yang menentukan di dalam keseluruhan struktur dari pemahaman kita. Bila hukum-hukum ilmu pengetahuan mempersatukan fakta-fakta, konsep-konsep ilmu pengetahuan menyatukan hukum-hukum itu ke dalam suatu dunia yang tertata yang memegang teguh simpul-simpul kukuh tersebut di dalam jaringan penalaran yang ada.

Apa-apa yang diamati oleh ilmu pengetahuan, apa-apa yang diprediksi oleh ilmu pengetahuan mengandung semua kekurangan yang ada pada fakta. Fakta-fakta memberikan sinyal untuk masa depan tetapi sinyal ini memang tidak pasti dan penafsiran mengenai dengan irrelevansi sebagai latar belakang bisa tidak akurat. Prediksi yang dibuat berdasarkan sinyal itu seharusnya berupa prediksi statistik. Ia tidak membaca masa depan tetapi memprakira-

kannya. Dan perkiraan ini punya makna hanya karena ia dikaitkan dengan estimasinya sendiri tentang ketidakpastian. Jadi, masa depan dapat dikatakan selalu berada sedikit di luar fokus perhatian dan segala sesuatu yang kita prakirakan ada di situ diselimuti sedikit ketidakpastian. Beginilah situasi keberadaan manusia dan situasi keadaan ilmu pengetahuan. Maka seperti yang dikatakan oleh Karl Pearson, pendiri statistik modern, di abad XIX, bahwa kita merenungi fakta-fakta tidak tanpa kekeliruan dan karenanya kebenaran yang kita peroleh bukanlah hal yang dapat kita pikirkan tanpa kesalahan. Namun karena kita tahu apa yang kita lakukan, kita bisa bekerja dengan kebenaran itu tanpa takut-takut. Kita tahu apa yang kita lakukan karena penalaran ilmiah adalah pemandu tindakan. Sebab penalaran ilmiah, bukan pengiring atau kondisi dari kemajuan manusia, tetapi adalah kemajuan itu sendiri.

Jadi bila kebudayaan adalah suatu sistem nilai, dan sejauh pengetahuan memang diterima sebagai bagian alami dari kebudayaan, kiranya tidak masuk di akal bila pengetahuan ilmiah tetap dianggap asing oleh kebudayaan. Di Abad Iptek ini sudah bukan zamannya lagi menganggap pengetahuan ilmiah merupakan santapan nikmat intelektual bagi rohani selapisan khusus masyarakat saja. Ilmu pengetahuan bukan lagi merupakan suatu sensibilitas khusus. Makna nilainya sama luasnya dengan makna literer dari nama awalnya, yaitu pengetahuan. Ungkapan "*specialised mind*", yaitu "*scientistscholar*", suatu sebutan yang baru berusia seratusan tahun. Ilmu pengetahuan dan pengetahuan adalah sebutan yang sepadan asalkan dipakai secara tertib untuk menyatakan suatu keakraban yang tertata, teratur dan sistematis dengan suatu tema perhatian yang dasarnya jelas dan eksplisit bersama-sama dengan suatu pemahaman mengenai hubungannya dengan tema-tema perhatian lainnya. Dengan dimasukkannya ilmu pengetahuan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan mungkin ada kekhawatiran dari pihak pecinta dan pengembangan seni bahwa budaya lalu menjadi suatu "budaya

umum". Menurut saya tidak apa, selama yang dimaksudkan dengan "budaya umum" ini adalah bahwa kini pengetahuan ilmiah sudah dijadikan bagian yang terpenting walaupun bukan salah satu inti, di samping seni dari kebudayaan. Lagi-lagi tidak apa, selama dengan sebutan "kebudayaan umum ini menjadi jelas bahwa kini kebudayaan tidak lagi berupa sekedar ornamen rohani atau suatu training bagi karakter dan budi pekerti tetapi, berkat kehadiran pengetahuan ilmiah, menjadi suatu sistem gagasan mengenai dunia dan kemanusiaan yang seharusnya dimiliki oleh manusia sesuai dengan (tuntutan) jamannya.

Sekarang ini saja sudah diketahui bahwa yang akan kita masuki mulai Abad XXI nanti adalah jaman berkuasanya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Abad mendatang ini disebut pula Abad Iptek. Demi *survival* kita dalam menempuh Abad Iptek ini, yang membuat dunia semakin menyatu seharusnya kita satukan pula budaya kita. Satu budaya yang berintikan ilmu pengetahuan untuk menghadapi perubahan, tantangan dan peluang dunia yang semakin menyatu karena (penerapan) ilmu pengetahuan. Walaupun dikatakan bahwa di Abad Iptek itu makhluk manusia semakin tergantung pada dan ditentukan oleh ilmu pengetahuan karena pengetahuan ilmiah ini mengadakan perubahan-perubahan nilai yang adakalanya sangat fundamental. Perubahan-perubahan ini menjadi tantangan yang mengancam bagi manusia yang tidak mampu menjawabnya secara tepat dan cepat, tetapi pasti merupakan peluang baik bagi siapa yang telah menyiapkan diri secara antisipatif. Ilmu pengetahuan merubah nilai-nilai melalui dua cara. Pertama, ia menginjeksikan gagasan-gagasan baru ke dalam budaya (sistem nilai) yang ada. Kedua, ia mengiring budaya ini ke bawah tekanan-tekanan perubahan teknis sampai dasar budaya ini berubah, walaupun tidak secara menyeluruh paling sedikitnya sebagian besar.

Penemuan teknik percetakan, misalnya, sepiantas lalu kelihatan tidak terlalu mempengaruhi secara langsung isi dari posisi. Namun bila sebuah posisi dapat diulang-ulang membacanya dan oleh semakin

banyak orang, adalah wajar bila perhatian orang bergeser dari ritme persajakan ke makna dan pesan yang dikandung oleh posisi yang bersangkutan. Demikian pula penemuan fotografi membuat pelukis kehilangan minatnya pada keserupaan dan beralih ke pola-pola formal/abstrak. Jadi sensibilitas manusia di ubah oleh pergeseran-pergeseran nilai yang digerakkan oleh ilmu pengetahuan. Di bidang ekonomi, tujuh belas tahun yang lalu telah saya ingatkan, betapa ilmu pengetahuan telah merubah ekonomi industriil menjadi ekonomi jasa dan kemudian merubahnya lagi menjadi ekonomi pengetahuan dan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi ekonomi pengetahuan ini merubah pula ekonomi internasional menjadi ekonomi dunia. Perekonomian menjadi sekaligus semakin padat dan semakin luas, menyatukan semua ekonomi nasional begitu rupa sehingga batas-batas ekonomi tidak hanya menjadi semakin tidak sinkron dengan batas politik ketatanegaraan tetapi juga menjadi semakin kabur. Sekarang proses ini disebut globalisasi dan globalisasi ini lambat tetapi pasti merayap ke semua bidang kehidupan.

Abad Iptek tidak mengurangi jumlah dan frekuensi konflik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat internasional konflik terjadi karena secara esensiil saling keterkaitan bisa berkembang menjadi saling ketergantungan yang asimetris berhubung derajat penguasaan Iptek tidak sama. Di tingkat nasional konflik timbul karena secara esensiil ada perbedaan respons terhadap tantangan dan peluang yang datang dari luar. Orang mengatakan bahwa pertentangan sudah menjadi bagian alami dari kebudayaan/peradaban melalui pola pikir masyarakat manusia yang mengemban kebudayaan/peradaban itu. Pola pikir di masyarakat manapun merupakan hasil ramuan dari unsur-unsur: generalisasi ilmiah, fakta fakta empiris, pengertian-pengertian mitologis dan religius serta gagasan-gagasan politis dan etis. Masing-masing unsur berpotensi untuk menimbulkan perbedaan-perbedaan yang bisa saja menjurus ke arah konflik atau bentrokan keras. Namun satu dari keempat unsur tersebut, dan hanya

satu unsur, yang bersifat konvergen, yaitu generalisasi ilmiah, sedangkan yang tiga lainnya berpembawaan divergen. Sejarah keintelektualan dari kelompok-kelompok manusia, untuk sebagian besar, merupakan cerita konflik dari aspek-aspek yang konvergen dan divergen itu. Sejarah itu juga mengatakan bahwa tidak ada satupun masyarakat dapat *survive* kecuali jika ke dalam pola pikirnya semakin banyak dimasukkan nilai-nilai ilmiah sebagai unsur ramuannya. Maka kelalaian kita memasukkan ilmu pengetahuan ke dalam sistem nilai kita bisa berakibat fatal karena pola pikir masyarakat tidak mengandung nilai konvergen yang begitu penting, yang pembawaan alaminya mempersatu melalui perluasan keserupaan-keserupaan.

Di samping memperlakukan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari budaya kita, kita masih harus mengembangkan dan menguasainya begitu rupa sehingga dapat membantu kita membaca buku kedua dari Tuhan. Buku pertama dari Tuhan meliputi kitab-kitab suci yang diturunkan-Nya melalui Nabi-Nabi yang dipilih-Nya menjadi Rasul, yang membawa dan menyampaikan pesan-pesannya kepada umat manusia di dunia. Buku kedua dari Tuhan adalah alam. Setiap buku Tuhan mempunyai bahasanya sendiri dan terbuka bagi setiap orang untuk dipelajari. Seperti juga mahluk manusia yang lain, kita – manusia Indonesia – tidak dapat hidup tanpa alam dan alam ini mengandung apa saja yang kita perlukan untuk hidup itu. Alam ini indah dan baik bila kita dapat memanfaatkannya dan hidup sesuai dengan keadaan, perubahan dan ritme yang ditawarkannya. Untuk mengetahui semua kemungkinan dan peluang tersebut kita harus dapat menguasai bahasa buku kedua Tuhan ini dan lalu memikirkan penafsiran yang tepat mengenai apa-apa yang kita baca di situ. Dalam salah satu buku pertamaNya, Kitab Suci Al-qur'an, Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pemurah jelas menyatakan bahwa Dia memberikan tanda/sinyal (di alam) supaya manusia berpikir. Bahasa buku kedua dari Tuhan ini adalah ilmu pengetahuan.

Galileo Galilei pernah mengatakan bahwa satu-satunya bahasa alam adalah matematika. Namun perkembangan ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa pengetahuan ilmiah jauh lebih mampu mendeskripsikan, memprakirakan dan menafsirkan alam. Dalam melakukan itu pengetahuan ilmiah ini memang tetap menggunakan matematika terutama untuk mencari pola-pola – setiap jenis keteraturan di dalam alam yang terus berubah – serta perumusan hukum-hukum. Namun metode matematika bukan yang cocok untuk pengembangan setiap jenis ilmu pengetahuan. Di samping ilmu-ilmu kealaman ada berbagai ilmu non-matematis yang juga cukup mampu memahami dan menafsirkan hidup alami. Pasti bukan kebetulan kalau di dalam Kitab Suci Al-Qur'an Tuhan secara eksplisit memerintahkan manusia mempelajari ilmu pengetahuan.

Hasil pemahaman buku kedua Tuhan oleh ilmu pengetahuan ternyata mengingatkan nalar manusia tentang kebenaran ungkapan-ungkapan Ilahiah di dalam buku-buku pertama Tuhan. Ilmu fisika Abad XX mendeskripsikan awal alam semesta dalam term kosmologis yang praktis sama dengan yang tertulis dalam bahasa Alkitab dan bahasa Al-Qur'an. Ruang, waktu dan materi timbul dalam sebuah ledakan besar cahaya yang keseluruhannya baik bagi kehidupan berdasarkan karbon. Ada ungkapan-ungkapan dalam Al-Qur'an yang dahulu merupakan teka-teki kini menjadi jelas bagi pikiran manusia berkat pendalaman dan pengkajian ilmu pengetahuan modern. Arkeologi dan geologi modern menjelaskan pelipatan, pematihan dan pelelukan lapisan bumi yang berkaitan dengan pembentukan gunung dan lembah. Sejumlah yang semakin besar dari ilmuwan kimia dan ilmuwan biologi sepakat bahwa asal-usul hidup bersifat akuatis dan bahwa pada tanaman ada perbedaan dan kaitan seks dan mekanisme kausal dalam pertumbuhannya berhubungan dengan hal seks tersebut. Jadi penemuan-penemuan dari pendalaman buku kedua Tuhan yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan secara mandiri dan terlepas dari buku pertama Tuhan bahkan nalar turut mengatakan dengan mantap

“maha besar Allah dengan segala firmanNya”.

Demikianlah, demi *survival* kita mulai Abad XXI, tahap awal dari suatu jaman yang ditata dan dibentuk oleh ilmu pengetahuan beserta anaknya, teknologi, yang pasti penuh dengan perubahan dan peluang yang menantang secara cepat, kita harus memasukkan ilmu pengetahuan sebagai nilai pemersatu dalam sistem nilai (budaya) kita. Ya, membina satu budaya berintikan ilmu pengetahuan untuk menghadapi jaman ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak ada lagi kebudayaan artistik di satu pihak, kebudayaan ilmiah di lain pihak, tidak ada 27 kebudayaan, yang ada, bukan sejumlah kebudayaan, tetapi 1 budaya dengan penerapan di bidang kehidupan apa pun, termasuk bidang kebudayaan. Dipandang dari sudut masyarakat dan kehidupan sebagai keseluruhan, budaya tetap merupakan sistem nilai, namun dilihat dari sudut manusia individu, berkat kehadiran semangat ilmiah, ia berupa sekaligus pengetahuan, pilihan hidup dan praktek komunikasi, suatu repertoar dari pegangan-pegangan yang menjadi pemandu/nilai afektif bagi kehidupannya di jaman Iptek.

Para pendahulu dan perintis kemerdekaan kita telah menetapkan sikap dan mengambil langkah guna menanggulangi masalah jaman-nya. Generasi kita yang sekarang ini telah menilai tepat sikap dan langkah yang mereka pilih itu dan kita pun telah turut mengenyam, bahkan lebih banyak dapat menikmati hasil ketepatan dan keberanian pilihan tersebut. maka sebagai penghargaan, hormat dan salut kita, kita akui semua itu sebagai suatu kebangkitan nasional. Jaman Iptek kini mengajukan masalahnya sendiri kepada kita. Masalah jaman ini menantang jawaban dari kita dan pada jawaban yang kita bentuk dan pilih itu tergantung pula keadaan hidup dari generasi-generasi penerus mendatang. Merekalah nanti yang akan memberikan penilaian akhir mengenai tepat tidaknya jawaban yang kita ambil sekarang, merekalah, berdasarkan pengalamannya, akan memutuskan apakah jawaban kita itu secara riil benar-benar dapat dikualifikasikan sebagai kebangkitan nasional kedua dan bukan merupakan sekedar

pembungkus yang indah nasional kedua dan bukan merupakan sekedar pembungkus yang indah dari isi yang sama sekali tidak relevan, tidak fungsional dan tidak efektif relatif terhadap masalah yang ingin ditanggulangnya. Saya pikir pembentukan satu budaya yang berintikan ilmu pengetahuan dapat sekali membuat isi ini menjadi sesuai dengan “keindahan” pembungkusnya.

Perlu saya ingatkan bahwa walaupun kita memutuskan untuk menerima bentuk satu budaya, ini baru merupakan satu langkah awal, betapapun pentingnya dan beraninya langkah tersebut. Sesudah itu perlu ada langkah penyusul yang tidak kalah berani untuk menjawab pertanyaan yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana meraih atau membentuk budaya yang satu itu?! Saya bukan ingin berhenti justru pada saat saya harus mulai, karena saya sudah lama memulainya, namun saya serahkan jawaban terhadap pertanyaan terakhir ini sebagai tantangan juga terhadap nalar Anda, terutama bagi mereka yang merasa terpanggil untuk mengabdikan di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam arti yang luas.

KEPUSTAKAAN

Bachelard, Gaston, *La Formation de l'Esprit Scientifique* (Paris: J. Vrin, 1980).

Bronowski, J., *The Common Sense of Science* (Cambridge: Harvard University Press, 1978).

Caratini, Roger, *L'Annee de la Science* (Paris: Seghers/Laffont, 1987).

Fichte, J.G., *The Science of Knowledge* (London Cambridge University Press, 1982).

Fourastic, Jean, *Les Condition de L'Esprit Science* (Paris: Gallimard, 1966).

Gadner, Howard, *The Mind's New Science* (New York: Basic Books, 1979).

Henbest Nigel & Heather Cooper, *The restless Universe* (London: George Hilip, 1982).

Joesoef, Daoed, *Plato, Pengetahuan, Ilmu Pengetahuan, Gnosis, Kawruh*, (Ceramah di Lembaga Javanologi Yogyakarta, 10/1987).

_____, "Knowledge Economy and World Economy", *The Indonesian Quarterly*, Vol. II, No. 2, Jan. 1974.

Kuhn, Thomas, *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: The University of Chicago Press, 1970).

Laborit, Henri, *L'Homme Imaginant* (Paris: Union General d' Editions, 1970)

Minton, Arthur J., *Philosophy, Paradox and Discovery* (New York: McGraw-Hill Book Cy., 1976).

Piaget, Jean, *Main Trends in Interdisciplinary Research* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1970)

Poincare, Henri, *La Science et l'Hypothese* (Paris: Flammarion, 1968).

Prigogine, Ilya, *From Being to Becoming* (San Francisco: Freeman, 1980).

Prigogine, Ilya & Isabelle Stengers, *Order out of Chaos: Man's New Dialogue with Nature* (New York: Bantam Books, 1984).

Russell, Bertrand, *The Impact of Science on Society* (London: Unwin Paperbacks, 1976).

Scheurer, P., *Revolutions de la Science et Permanence du Reel* (Paris: Presses Universitaires de France, 1979).

Shills, Edward, "Faith Utility and Legitimacy of Science" *Deadalus*, (Summer 1974)

Weil, S., *Sur la Science* (Paris: Gallimard, 1966).

PERAN KEBUDAYAAN SEBAGAI PEMERSATU BANGSA

Oleh: Daoed Joesoef

Sebagai anak-anak Bangsa yang bertanggung jawab kita sama-sama khawatir bahwa mosaik Indonesia mulai meretak. Dan retak ini saya lihat bukan lagi sebagai retak yang menunjukkan ukir tetapi di sana-sini sudah menjadi retak yang membawa belah. Menghadapi hal yang merisaukan ini ada pertanyaan apakah kebudayaan dapat mencegah kebelahan tersebut ?. Sebelum menjawab pertanyaan ini saya pikir ada baiknya diajukan lebih dahulu beberapa hal yang selama ini sangat berpotensi menjadi pembelah dari mosaik yang selama ini menjadi kebanggaan bersama.

Hal-hal tersebut adalah, (1) Akibat sampingan dari pembangunan, (2) Pertumbuhan kota-kota, (3) Pola pikir masyarakat, (4) Konsep dan pelaksanaan pembangunan dan (5) Jebakan global dari proses globalisasi.

Bagi masyarakat yang sedang membangun, perkembangannya ditandai oleh keadaan yang tidak stabil secara permanen. Hal ini berhubungan erat dengan akibat-akibat yang, inheren dengan usaha pembangunan itu sendiri, tak terelakkan, dan menjadi semakin menonjol dengan semakin diabaikannya aspek manusiawi dalam rencana dan praktek pembangunan. Akibat-akibat sampingan ini dapat digolongkan ke dalam empat kategori pokok, yaitu (i) kepenyuhan (crowdedness). (ii) perubahan-perubahan dan, (iii) ketidaksetaraan (inequalities).

Gejala kepenyuhan timbul karena ruang (space) ternyata tidak elastik. Terutama di kota-kota besar di mana proses pembangunan itu berjalan dengan pesatnya, gejala kepenyuhan itu dari hari ke hari semakin mencekam kehidupan dan pergaulan sehari-hari. Kepenyuhan seperti ini tidak hanya merusak keseimbangan

individual, tetapi juga merubah tata kehidupan sosial. Kota sebagai tempat hidup menjadi terasa kian menyempit, semakin menyemak, sumpek, public services menjadi terasa semakin menurun, menjengkelkan tanpa tahu kepada siapa harus marah. Sejauh yang mengenai perubahan, atau lebih tepat mutasi, ia merupakan konsekuensi proses pembangunan. Dalam banyak hal ia bahkan merupakan pembangunan itu sendiri, dalam arti perubahan yang menuju ke arah pembaruan. Perubahan tersebut lebih banyak merupakan substitusi daripada pengurangan, lebih banyak merupakan transformasi ketimbang akumulasi. Orang yang tidak dapat cepat mengikuti perubahan menjadi orang asing di tengah-tengah suasana dan arus pembangunan. Demikian rupa hingga mutasi psikologis yang dicetuskan oleh pembangunan dirasakan lebih banyak sebagai kekacauan dan gangguan daripada sebagai kemantapan dan perbaikan hidup. lebih-lebih oleh penduduk asli yang melihat para pendatang yang lebih beruntung dalam perebutan kue pembangunan.

Proses pembangunan yang menyangkut ribuan proyek dan mempertaruhkan dana milyaran rupiah, dalam dirinya merupakan tantangan dan kesempatan yang mengundang respons dan kesanggupan. Yang paling cakap dan mampu melihat jauh ke depan, terberani mengambil resiko, dapat maju lebih dahulu dan lebih banyak dapat menangkap manfaat yang ditawarkan oleh proses pembangunan. Yang lamban bergerak, kurang cerdas dan ragu-ragu, enggan meninggalkan tempat yang sudah dikenal, menjadi tertinggal semakin jauh. Maka timbullah perbedaan-perbedaan dan ketidaksamaan, terutama di bidang pendapatan. Walaupun ketidaksamaan ini banyak sedikitnya berhubungan erat dengan faktor-faktor natural-objektif, jadi tidak dengan sendirinya bertentangan dengan azas keadilan, setiap ketidaksamaan dan perbedaan secara mudah dapat diisyukan sebagai melanggar azas keadilan. Terutama bila jabatan dan pangkat telah disalahgunakan secara licik untuk memperkaya keluarga, kelompok, teman dan dirisendiri.

Pembangunan jelas mempunyai akibat atas pertumbuhan kota. Kita menyaksikan betapa kota-kota tumbuh dan berkembang dengan pesatnya walaupun tidak disengaja dan sama sekali tidak merupakan kejadian yang sangat direncanakan dalam rangka pembangunan. Migrasi secara sektoral tanpa rencana ini membuat kota-kota menjadi pusat-pusat pemukiman yang rentan. Maka terciptalah suatu massa yang terputus dari akar lingkungan sosial-budaya sendiri sehingga mengambang walaupun tidak terombang-ambing. Penduduk kota seperti digiring ke dalam satu suasana immobil. Immobilisme serta, massa yang terputus dari akar tradisionalnya itu setiap waktu dapat berubah menjadi suatu situasi revolusioner, yaitu kenaikan suhu politik yang tinggi, kalau saja ada yang pandai menawarkan sebuah harapan baru yang dikaitkan pada sesuatu ideologi, apa pun namanya, yang lain daripada yang sedang berlaku atau berkuasa.

Situasi revolusioner ini menjadi semakin riil bila dikaitkan dengan pola pikir masyarakat. Pola pikir di semua masyarakat manusia, kita tidak terkecuali, merupakan suatu ramuan dari, (a) generalisasi ilmiah, (b) fakta-fakta empiris dan historis, (c) pengertian-pengertian mitologis dan religius, serta (d) gagasan politis dan etis. Dari keempat unsur ramuan ini hanya satu yang berpotensi konvergen, yaitu generalisasi ilmiah, berhadapan dengan ketiga unsur lainnya yang secara fundamental cenderung divergen. Sedangkan di pola pikir masyarakat kita, unsur konvergen yang satu-satunya itu pun dapat dikatakan masih terlalu lemah untuk dapat diandalkan sebagai pengimbang ketiga faktor divergen lainnya.

Pembangunan nasional kita selama ini dijalankan tidak hanya berdasarkan pembangunan ekonomi tetapi juga menurut ajaran murni dari ilmu ekonomi (ekonomika). yaitu “ekonomi pasar”. Sedangkan dalam prakteknya pasar tidak mencerminkan kebutuhan konsumen tetapi lebih banyak mewakili kehendak produsen yang menghasilkan produk yang paling menguntungkan dari sudut pandangnya sendiri dan kemudian—melalui publisitas, manipulasi dan “conditioning”—

mendesakan sirkulasi produk tersebut. Maka produksi dari objek ekonomi pasar—lebih mengacu pada fungsi simbol, prestise dan differensiasi sosial daripada fungsi kegunaan. Melalui objek tersebut orang-orang yang berada terus menerus mengaktualkan privilese selera dan keinginan mereka. Jika produk sudah merupakan simbol ia juga merupakan suatu godaan. Sedangkan menggoda berarti membelokkan sesuatu atau seseorang dari kebenarannya. Bila demikian produksi tidak punya lagi kriteria kebenaran, kriteria moralitas sosial. Ekonomika murni mendikte ekonomika sosial.

Sejauh yang mengenai jebakan global dari proses globalisasi, dapat saya katakan bahwa globalisasi adalah akibat logis dari sebuah proses panjang, berabad-abad, di dunia Barat. Ilmu pengetahuan yang pada awalnya diperlakukan oleh manusia Eropa sebagai produk sosial yang bersifat intelektual, lama kelamaan berkembang secara alami menjadi bersifat industrial. Perkembangan yang sekarang telah mengglobal ini membariskan semua masyarakat manusia di bawah hukum-hukumnya dan sangat mempengaruhi tingkah laku, selera, estetika dan kepercayaan penduduk dunia. Namun globalisasi ini menjadi jebakan bagi bangsa-bangsa yang baru bangkit dari belenggu penjajahan satu selama ini ragu-ragu mengembangkan budaya yang dihayatinya menjadi budaya keilmuan yang di Barat telah melahirkan peradaban keilmuan. penggerak globalisasi tersebut. Bangsa-bangsa yang terperangkap dalam jebakan ini menjadi bangsa penghutang, walaupun bukan pengemis, di antara bangsa-bangsa, dan terus berhutang, demi menutup hutang-hutang yang lama. Mereka ini bagaikan yang terjebak di dalam bubu, menggelepar-gelepar kebingungan, sadar setiap waktu siap untuk dimangsa, gelisah mencari jalan keluar.

Demikianlah, akibat sampingan pembangunan yang semakin mencekam, pertumbuhan kota-kota yang mirip diktum hukum rimba, pelaksanaan pembangunan yang tetap mengabaikan asas-asas humanisasi ekonomi dan jebakan global yang kian ketat, telah membuat anak-anak Ibu Pertiwi menjadi frustrasi dan mulai saling menuding,

salah menyalahkan. Dalam keadaan begini pola pikir masyarakat yang sangat dikuasai oleh unsur-unsur divergen ternyata tidak membantu menenangkan keadaan, merumuskan kesepakatan sebagai solusi bersama dan akhirnya, dalam kebingungan dan keputusan, ada yang merasa perlu untuk memisahkan diri, berusaha menyelamatkan diri sendiri-sendiri, sambil saling memaki.

Berhadapan dengan pembelah-pembelah mosaik kebangsaan ini, baik pembelah yang berasal dari dalam maupun yang bersumber dari luar negeri, bagaimana kiranya bentuk budaya dan peran kebudayaan sebagai pemersatu Bangsa ?! Pertanyaan ini adalah suatu tantangan yang sudah mengusik saya sejak 30 tahun yang lalu. Tantangan, karena dewasa ini tidak ada satu pun model budaya yang kiranya dapat dijadikan sebagai satu-satunya bahan referensi. Tidak ada satu pun peradaban, yang sudah mati atau yang masih hidup, tidak di masa yang lalu maupun di masa sekarang, yang kiranya dapat memberikan jawaban yang tepat bagi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh manusia kontemporer yang hidup dalam suasana globalisasi.

Selama ini kita selalu menyibukkan diri dengan memikirkan definisi umum dari budaya nasional, relatif abstrak, melalui diskusi mikroskopis atau teleskopis, yang tidak jarang berjalan dengan lebih emosional ketimbang rasional. Marilah kita sekarang, mengkajinya dari sudut anak Ibu Pertiwi perorangan karena, after all, anak-anak inilah yang kita harapkan tidak hanya menjadi pengemban budaya tetapi juga sebagai pengolah budaya nasional di masa transformasi kebudayaan ke arah peradaban melalui proses pembangunan nasional dan perkembangan global.

Nah, dipandang dari sudut manusia Indonesia individual yang sedang hidup dalam keadaan seperti yang baru saya sebut tadi, budaya dan kebudayaan seharusnya diartikan sekaligus sebagai suatu pengetahuan, suatu pilihan hidup (eksistensi) dan suatu praktek komunikasi.

Budaya merupakan suatu pengetahuan dalam arti perbendaharaan dari gagasan (*ideas*) yang diketahui mengenai masa lalu dan masa kini, mengenai apa-apa yang pernah diciptakan dan yang sedang dalam proses penciptaan. Hal ini jelas menunjukkan betapa eratnya hubungan antara budaya dan kebudayaan dengan pendidikan dan informasi.

Budaya sebagai suatu pilihan hidup berhubung penghayatan kebudayaan membantu manusia untuk menilai, untuk meninjau secara tepat sikapnya terhadap dirinya sendiri serta terhadap dunia di luar dirinya, untuk membuat pilihan dengan kebebasan yang semakin mantap. Sebab kebebasan bukan fungsi dari ada tidaknya kesempatan untuk memilih (mengenai apa saja), tetapi ditentukan oleh adanya kesanggupan (kemampuan) orang itu sendiri untuk mengambil keputusan, membuat prioritas dan menetapkan gradasi di antara nilai-nilai yang diketahui dan dihayati.

Budaya sebagai praktek komunikasi berhubung ada kebutuhan manusia untuk mendapat informasi mengenai perkembangan keadaan yang menjadi semakin kompleks dan berhubung pada waktu yang sama ada pula kebutuhan dari anggota masyarakat untuk membagi pengetahuannya kepada anggota lainnya, untuk memberitahukan apa-apa yang dipikirkannya kepada pihak lain. Masyarakat sebagai keseluruhan, demi perkembangannya yang sehat dan teratur, memang memerlukan anggota-anggota yang tidak hanya kreatif, tetapi juga mampu berkomunikasi secara correct, teratur, diajukan dengan jelas dan eksplisit serta tercatat (*recorded*).

Bila diarti dan fungsikan dari sudut perorangan kiranya terlihat betapa kebudayaan sebenarnya dapat diandalkan dan seharusnya bisa memberdayakan manusia (Indonesia) individual. Namun untuk bisa melaksanakan peran yang diharapkan itu, budaya itu sendiri harus lebih dahulu diberdayakan. Bahwa budaya (seharusnya) memberdayakan manusia bukanlah hal baru. Sebab budaya dan kebudayaan adalah yang membuat manusia menjadi manusia. yang membuatnya semakin berbeda dengan makhluk-makhluk lain sesama ciptaan Tuhan

yang ada di bumi ini. Lain halnya dengan peradaban, ia adalah buatan manusia setelah makhluk yang satu ini diberdayakan oleh budaya yang dihayatinya itu. Hal yang baru, terutama bagi kita manusia Indonesia adalah keharusan bagi kita untuk menata isi yang membentuk budaya kita begitu rupa hingga ia menjadi cukup handal untuk memberdayakan kita sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan jaman yang berlaku.

Dalam menata ini, dan menata dengan tekun serta konsisten, harus kita masukkan pengetahuan ilmiah ke dalam khazanah budaya kita menjadikannya dengan sadar dan sengaja sebagai bagian yang integral dengan sistem nilai yang kita hayati. Ilmu pengetahuan adalah budaya karena ia tidak lain adalah penerapan nalar manusia (*human reason*) dengan cara selogis mungkin. Jadi nalar adalah nilai yang mendasari ilmu pengetahuan. Karena yang terlibat itu adalah nalar manusia, ilmu pengetahuan berarti bersendikan kehidupan manusia (*human life*) yang merupakan pula suatu nilai dan bersendikan juga pengaturan yang rasional dari kehidupan tersebut, sedangkan pengaturan ini dalam dirinya adalah juga suatu nilai.

Hidup matinya suatu budaya, jadi juga kebudayaan, memang tergantung pada adanya tidak perkembangan nilai atau nilai-nilai yang membentuk budaya yang bersangkutan. Perkembangan ini dilakukan oleh penghayat atau penganut budaya tersebut. Dengan perkataan lain, pengantut budaya itu, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok, dengan sadar dan sengaja membuat dirinya menjadi pengolah atau pengembang budaya (sistem nilai) yang dihayatinya.

Ilmu pengetahuan jelas dapat membantu memberdayakan manusia individual mengatasi akibat sampingan pembangunan, membantunya turut menikmati hasil pembangunan melalui kemampuan berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Jadi manusia individual terbantu tidak hanya menjadi kaya secara material tetapi juga lebih kaya secara spiritual. Dengan manusia yang seperti ini sebagai penduduknya, kota-kota akan lebih mudah pula menjalankan fungsi

kebudayaan dan fungsi politiknya sebagai akibat yang wajar dari pertumbuhannya. Bangsa Indonesia yang terbentuk oleh manusia-manusia berbudaya keilmuan ini menjadi sangat berpotensi untuk bisa berkarya monumental, yang hasilnya menjadi kebanggaan bersama. Sebab yang namanya bangsa bukan hanya “*le desir d’être ensemble*” sebagaimana dinyatakan oleh filosof Renan di Sorbonne tiga abad yang lalu, tetapi juga, menurut hemat saya, “*c’est un peuple qui monte et devient capable d’une oeuvre commune*”. Pada waktu yang bersamaan manusia-manusia semacam ini sangat bisa diandalkan untuk pada gilirannya, mengolah budaya nasional ke arah peradaban yang kita perlukan untuk mengeluarkan kita dari jebakan global tanpa harus keluar diri globalisasasi itu sendiri.

Sebenarnya sudah lama ada keharusan bagi kita untuk menemukan satu bentuk baru peradaban dimana kebudayaan bangsa dan pembangunan nasional dan globalisasi berada di muara pertemuan tiga arus besar gagasan yang menandai concern dan pikiran kontemporer, yaitu pengertian pembangunan, tuntutan martabat manusia dan dialektika humanisasi cosmopolitan. Bagi kita peradaban ini memang belum ada sebab budaya kita yang seharusnya membantu kita menciptakan ini juga, masih merupakan suatu harapan, belum berupa suatu realitas unanim.

Pemberdayaan manusia Indonesia pemoentuk masyarakat Indonesia oleh budaya yang diberdayakan melalui pengetahuan ilmiah dapat pula kiranya memperkuat satu-satunya unsur konvergen, berhadapan dengan ketiga unsur divergen lain, yang turut membina pola pikir masyarakat. Hal ini penting karena sejarah mengatakan bahwa tidak ada satu pun masyarakat manusia dapat selamat (*survive*), kecuali bila pola pikirnya mengandung banyak unsur-unsur keilmuan berhubung penalaran ilmiah inilah yang sangat memungkinkan konvergensi dari perbedaan-perbedaan yang ada. Lebih-lebih bila diingat betapa di bidang agama dan ideologi politik terdapat kecenderungan divergensi yang sangat kuat. Sejarah intelektual dari setiap kelompok

manusia, untuk sebagian besar, adalah memang sejarah konflik dari aspek-aspek konvergen dan divergen tersebut.

Jadi terhadap pertanyaan apakah kebudayaan dapat berperan sebagai pemersatu Bangsa, jawaban saya adalah positif . Namun untuk ini budaya dan kebudayaan harus diberdayakan dengan memasukkan dan mengembangkan pengetahuan ilmiah sebagai unsur konstitutifnya yang terpenting. Selanjutnya pemberdayaan manusia melalui dan oleh budaya keilmuan ini memerlukan jasa pendidikan. Bila demikian pengkaitan pendidikan pada kebudayaan ini kiranya memerlukan kejelasan mengenai pengertian, sedikitnya sebagai definisi kerja. yang jadi pegangan baik dalam mengembangkan kebudayaan maupun dalam melaksanakan pendidikan yang diperlakukan sebagai bagian dari kebudayaan tersebut. Ya pendidikan adalah bagian dari kebudayaan dan bukan sebaliknya.

Maka kebudayaan, menurut hemat saya, adalah hal-hal atau segala sesuatu yang mempunyai ciri atau sifat budaya, di mana budaya adalah sistem nilai yang dihayati. Jadi budaya nasional adalah sistem nilai yang dihayati oleh suatu Bangsa. Dengan demikian, budaya Indonesia adalah sistem nilai yang dihayati oleh bangsa Indonesia.

Bila kebudayaan dan budaya dipahami seperti yang baru diuraikan tadi, maka pendidikan yang merupakan bagian dari kebudayaan dan budaya seharusnya diartikan sebagai suatu proses belajar-mengajar yang membiasakan para warga masyarakat nasional sedini mungkin untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai terpuji, dikehendaki dan berguna bagi kehidupan dan perkembangan pribadi, masyarakat dan bangsa. Selanjutnya dilakukan pembedaan yang jelas antar nilai final dengan nilai instrumental yang difungsikan demi merealisasi nilai final tersebut. Menyadari perbedaan ini penting karena di satu pihak ia diperlukan dalam menyusun kurikulum dan di lain pihak demi memadu secara lestari apa yang permanen dengan apa yang berubah di alam pendidikan.

Yang permanen adalah diktum pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan, sedangkan yang berubah-ubah adalah unsur-unsur konstitutif dari kebudayaan atau gradasi dari nilai-nilai budaya yang harus diperhitungkan oleh pendidikan karena tuntutan jaman atau kepentingan nasional.

Bila sebutan kebudayaan dilenyapkan begitu saja dari sebutan pendidikan berarti pendidikan tidak mempunyai acuannya lagi. Kalau kenasionalan yang menjadi acuannya tentu bisa dipertanyakan apa kenasionalan itu sebenarnya. Sekarang ini, in spite of globalisasi, bahkan justru karena globalisasi, semua Bangsa menyatakan pendidikannya sebagai pendidikan nasional, demi menjaga identitas nasionalnya masing-masing. Lalu apakah nasionalnya Jepang sama dengan nasionalnya Belanda dan sama pula dengan nasionalnya Indonesia. Pasti tidak sama, pasti berbeda. Yang membuat berbeda itu adalah sistem nilai yang dihayati oleh setiap nasionalitas dan dikembangkan oleh sistem pendidikannya. Sedangkan sistem nilai itu, perdefinisi, adalah budaya. Dan budaya serta kebudayaan inilah yang menjadi acuan dari pelaksanaan pendidikan. Maka itu aneh kalau sebutan kebudayaan dihapus begitu saja dari nama Departemen, sebagai lembaga nasional, yang secara formal bertanggung jawab atas jalannya pendidikan dan perkembangan kebudayaan.

Dalam melaksanakan pendidikan dalam artian yang saya sebut tadi, jelas kehadiran pamong, yaitu guru dan dosen, sangat menentukan. Maka agar para pamong ini dapat menjalankan peran pemberdayaan manusia seperti yang diharapkan, diperlukan suatu penataran khusus di samping pendidikan keahlian yang harus sudah ditempuh secara formal. Penataran khusus ini berupa training pencerahan melalui seperangkat ilmu pengetahuan yang dikaji dan dibahas tidak sebagai disiplin ilmiah tetapi sebagai disiplin budaya. Yang pernah terpikir oleh saya dahulu, guna diterapkan di tahap kedua NKK (1983-1988), perangkat ilmu pengetahuan itu meliputi: matematika, fisika, biologi, sejarah, sosiologi, ekonomika dan filosofi.

Demikianlah, kiranya bisa dipahami kalau saya katakan bahwa budaya dan kebudayaan adalah waktu. Sedangkan kita, manusia perorangan, tidak punya waktu sebanyak dan selama yang diperlukan oleh budaya dan kebudayaan tersebut. Apalagi bila dikaitkan dengan pendidikan sebagai sarana pemberdayaannya dan sekaligus memberdayakan manusia-manusia yang menghayatinya. Maka demi menjamin kelangsungan perkembangan budaya dan jalannya pendidikan itu diperlukan adanya suatu konsep yang jelas fungsional, kondisional dan konsisten.

PERTEMUAN ANTAR BUDAYA DALAM ERA GLOBALISASI

(Fuad Hassan)

Kata ‘globalisasi’ makin lama makin menjadi sajian sehari-hari melalui berbagai pernyataan publik dan liputan media massa; dan kalau semuanya itu kita perhatikan secara seksama, maka akan ternyata betapa kata ‘globalisasi’ itu cenderung dilontarkan tanpa terlalu dihiraukan apa maknanya. Pernyataan seperti “dalam era globalisasi dewasa ini” berarti bahwa kita telah berada dalam era globalisasi; lain lagi halnya kandungan pernyataan “menjelang era globalisasi” yang berarti kita belum berada dalam era tersebut. Kelatahan dalam penggunaan kata ‘globalisasi’ sedemikian itu akhirnya mengesankan kesembarangan arti kata globalisasi, dan makin mengaburkan implikasi dan komplikasi makna yang terkandung di dalamnya.

Globalisasi pada hakikatnya adalah proses yang ditimbulkan oleh sesuatu kegiatan atau prakarsa yang dampaknya berkelanjutan melampaui batas-batas kebangsaan (*nation-hood*) dan kenegaraan (*state-hood*); dan mengingat bahwa jagad kemanusiaan ditandai oleh pluralisme budaya, maka globalisasi sebagai proses juga menggejala sebagai peristiwa yang melanda dunia secara lintas-budaya (*trans-cultural*). Dalam gerak lintas-budaya ini terjadi berbagai pertemuan antar-budaya (*cultural encounters*) yang sekaligus mewujudkan proses saling-pengaruh antar-budaya, dengan kemungkinan satu pihak lebih besar pengaruhnya ketimbang pihak lainnya. Pertemuan antar-budaya memang menggejala sebagai keterbukaan (*exposure*) pihak yang satu terhadap lainnya; namun pengaruh-mempengaruhi dalam pertemuan antar-budaya itu tidak selalu berlangsung sebagai proses dua-arah atau timbal-balik yang berimbang, melainkan boleh jadi juga terjadi sebagai proses imposisi budaya yang satu terhadap

lainnya; yaitu, terpaan budaya yang satu berpengaruh dominan terhadap budaya lainnya.

Apakah yang kita maksudkan dengan ‘budaya’ atau ‘kebudayaan’ itu? Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini banyak cara dapat ditempuh. Kita dapat mencari jawaban berdasarkan etimologi; cara ini mungkin menarik secara akademik namun mungkin terlalu steril untuk diturunkan sebagai medium analisis dalam terapan empirikal. Cara lain ialah memperbandingkan berbagai definisi yang dapat dipandang terkemuka dalam literatur; cara ini akan membutuhkan uraian panjang lebar karena biasanya perlu diperjelas dengan tafsiran konseptual dan kontekstual. Mungkin juga kita lakukan pendekatan komparatif antara suatu teori dengan lainnya; cara ini jelas dapat memperkaya wawasan kita tentang kebudayaan, tapi keunggulan suatu teori berkenaan dengan sesuatu gejala budaya tidak selalu berarti keunggulan teori itu secara menyeluruh; tiap teori bisa saja memiliki keunggulan dalam satu dan lain hal, sehingga konvergensi antar-teori mungkin saja digunakan dalam usaha memahami berbagai manifestasi budaya.

Kalau kita sarikan muatan berbagai definisi yang terkemuka, maka tidak terlalu keliru kiranya kalau kita mengartikan kebudayaan sebagai sehimpunan nilai-nilai yang oleh masyarakat pendukungnya dijadikan acuan bagi perilaku warganya. Nilai-nilai itu juga berpengaruh sebagai kerangka untuk membentuk pandangan hidup yang kemudian relatif menetap dan tampil melalui pilihan warga budaya itu untuk menentukan sikapnya terhadap berbagai gejala dan peristiwa kehidupan. Nilai-nilai itu pada sendirinya baru merupakan acuan dasar yang keberlakuannya disadarkan melalui ikhtiar pendidikan sejak dini, seperti misalnya usaha pengenalan dan penyadaran tentang apa yang ‘baik’, ‘buruk’, ‘dosa’, ‘indah’, dsb dalam tindak-tanduk seseorang. Sebagai sumber acuan, persepsi terhadap nilai-nilai itu masih bersifat umum; batas antara apa yang dinilai sebagai kebajikan (good) atau kejahatan (evil) berlaku dalam garis besar yang memi-

sahkan satu dari lainnya; belum lagi antara keduanya diperbedakan dalam perbandingan ‘seberapa baik’ atau ‘seberapa buruk’ dipandang dari tolokukur tertentu; tolokukur itu baru menjelma melalui norma-norma sebagai pengatur kepantasan perilaku. Norma (*nomos*) adalah tolokukur, yang memungkinkan terjadinya konformisme perilaku dalam sesuatu masyarakat, dan dengan demikian tersedia pula ukuran untuk non-konformisme. Adanya tolokukur normati ini menjadi dasar bagi berkembangnya peradaban (*civilization*) sebagai bagian dari dinamika budaya tertentu.

Dari uraian di atas ini dapat disimpulkan, bahwa kebudayaan adalah kerangka acuan perilaku bagi masyarakat pendukungnya berupa nilai-nilai (kebenaran, keindahan, keadilan, kemanusiaan, kebajikan, dsb), sedangkan peradaban adalah penjabaran nilai-nilai tersebut melalui diwujudkannya norma-norma yang selanjutnya dijadikan tolokukur bagi kepantasan perilaku warga masyarakat ybs. Nilai keadilan diwujudkan melalui hukum dan sistem peradilan; nilai keindahan dijabarkan melalui berbagai norma artistik, nilai kesusilaan dinyatakan melalui berbagai tatakrama, nilai religius diungkapkan melalui berbagai norma agama, dan begitu seterusnya. Singkatnya, penjabaran nilai kebudayaan menjadi norma peradaban dapat dipandang sebagai pengalihan dari sesuatu yang transenden menjadi sesuatu yang immanen. Terjalinnya kesadaran transendensi dan immanensi inilah yang menjadikan dinamika sejarah kemanusiaan sebagai kaleidoskop perkembangan kebudayaan dan peradaban.

Pasang-surutnya kebudayaan sepanjang sejarah kemanusiaan nyata sekali ditentukan oleh sejauhmana kebudayaan itu masih berlanjut sebagai kerangka acuan untuk dijabarkan melalui sesuatu tatanan normatif. Misalnya, kebudayaan Pharaonic yang berlaku dalam masyarakat Mesir kuno surut seiring dengan kian mudarnya kebudayaan itu sebagai sumber acuan untuk penjabaran norma-norma perilaku bagi masyarakat Mesir sekarang. Tapi juga dalam era kontemporer ini suatu kebudayaan sebagai sistem nilai dapat dengan

suatu rekayasa didesak oleh sistem nilai baru, sehingga kebudayaan yang lama kehilangan dayanya sebagai acuan untuk menjabarkan norma-norma perilaku. Perhatikan misalnya “Revolusi Kebudayaan” yang secara berencana dilancarkan di Republik Rakyat Cina pada pertengahan tahun 60an; perubahan serupa pun terjadi tatkala Partai Komunis Rusia berhasil menggulingkan kekaisaran di Rusia dan memperkenalkan nilai-nilai baru sebagai acuan bagi norma perilaku baru yang ideal bagi suatu masyarakat komunis. Perhatikan pula perubahan yang terjadi di Turki, ketika Kemal Attaturk melancarkan gerakan modernisasi (yang diartikan sebagai ‘westernisasi’). Kesemuanya ini sekaligus menunjukkan bahwa kebudayaan adalah suatu pengejawantahan yang hidup selama ada masyarakat pendukungnya; hal ini berlaku baik bagi kebudayaan yang surut oleh perubahan zaman maupun yang kehadirannya dipaksakan untuk mendesak kebudayaan lama.

Dalam sejarah kemanusiaan banyak contoh yang menunjukkan, bahwa timbul-tenggelamnya kebudayaan sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam pertemuan antarbudaya, yaitu sejauh mana satu di antara pihak yang saling bertemu kurang atau tidak lagi memiliki ketahanan budaya (*cultural resilience*). Kebudayaan adalah suatu daya yang sekaligus tersimpan (*latent*) dan nyata (*actual*). Demikianlah kebudayaan mengandung dua daya sekaligus, yaitu sebagai daya yang cenderung melestarikan dan daya yang cenderung berkembang atas kemekarnya sendiri. Antara kedua daya inilah tiap masyarakat pendukung kebudayaan tertentu berada; satu daya mempertahankannya agar lestari dan daya lainnya menariknya untuk maju; satu daya dengan kecenderungan preservatif dan satunya lagi dengan kecenderungan progresif. Dalam kondisi demikian itulah pertemuan antarbudaya sangat berpengaruh atas perimbangan antara kedua daya tersebut. Sampai batas tertentu dari saling-pengaruh yang terjadi itu dapat terpantul seberapa tinggi derajat kesadaran dan tingkat ketahanan budaya masing-masing pihak yang saling bertemu. Tangguh atau rapuh-

nya ketahanan budaya biasanya dilatari oleh menurunnya kesadaran masyarakat yang bersangkutan terhadap kebudayaannya sebagai pengu-kuh jatidirinya. Makin rendah derajat ketahanan budaya masyarakat pendukungnya, makin kuat pula budaya asing yang menerpanya ber-pengaruh dominan terhadap masyarakat itu.

Proses globalisasi yang diakibatkan oleh berbagai prakarsa dan kegiatan pada skala internasional sebagaimana menggejala dewasa ini pun perlu kita cermati sejauhmana signifikan pengaruhnya dalam pertemuan antar-budaya. Dalam kaitan ini pertemuan antar-budaya jangan terutama digambarkan sebagai pertemuan antara dua fihak belaka, melainkan terjadi dengan keterlibatan sejumlah fihak secara segera (*instantaneous*) serta serempak (*simultaneous*). Kesanggupan sesuatu satuan budaya untuk mempertahankan kesejatiannya dalam pertemuan antar-budaya yang demikian majemuknya itu sangat ditentukan oleh tinggi-rendahnya derajat kesadaran budaya dan tangguh-rapuhnya tingkat ketahanan budaya masyarakat pendukungnya. Budaya asing yang berpengaruh dominan terhadap satuan budaya asli bisa membangkitkan kesan sebagai ‘model’ untuk ditiru. Kecenderungan meniru itu dalam kelanjutannya bisa terpantul melalui berkembangnya gayahidup (*lifestyle*) baru yang dianggap superior dibandingkan dengan gayahidup lama. Berkembangnya gayahidup baru itu dapat menimbulkan kondisi sosial yang ditandai oleh heteronomi, yaitu berlakunya berbagai norma acuan perilaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Perubahan gayahidup yang ditiru dari budaya asing bisa berkelanjutan dengan timbulnya gejala keterasingan dari kebudayaan sendiri (*cultural alienation*).

Karena perhatian akan kita pusatkan pada persoalan pertemuan antarbudaya dalam era globalisasi, maka ada baiknya kita bahas dahulu hal-ihwal yang berkenaan dengan globalisasi sebagai proses maupun globalisme sebagai carapandang yang dewasa ini cenderung dianut dalam tata-pergaulan internasional. Sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antarbangsa, yaitu

dimensi ruang (*space*) dan waktu (*time*). Ruang (d.h.i: jarak) makin diperdekat dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala mondial. Seantero jagad seolah-olah tertangkap dalam satu jaringan besar tanpa adanya suatu pusat tunggal. Kendatipun dalam periode Perang Dingin kondisi bipolar seakan-akan membelah-dua dunia ini dengan pengendalian dari dua pusat kekuatan dunia yang saling bertentangan, usainya Perang Dingin tidak menjadikan dunia kita monosentrik. Justru plurisentrisme dan multipolaritas menjadi ciri dunia menjelang akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21. Tidak ada kekuatan tunggal yang mutlak dan sanggup mengabaikan-apalagi mengungguli-kondisi global yang plurisentrik dan multipolar dalam era kontemporer. Dalam kondisi demikian itulah globalisme menjadi carapandang dalam interaksi antar bangsa, dan hal ini pada gilirannya mendorong berlangsungnya proses globalisasi yang terus berkembang atas kemekarannya sendiri.

Dalam perkembangan sedemikian itu dirasakan makin diperlukannya suatu tatanan dunia baru yang perwujudannya memperhatikan plurisentrisme dan multipollaritas sebagai kenyataan global masakini. Tatanan itu tentu menuntut dirancangnya berbagai sistem dan pelem-bagaan yang harus diwujudkan sebagai konsekuensinya. Rancangan demikian itu tentunya harus dapat diterima oleh mayoritas eksponen yang ambil bagian dalam jaringan global yang plurisentrik dan multipolar. Diterimanya suatu tatanan global baru mestinya dapat diandalkan pada tergalangnya Consensus maksimal di antara segenap eksponen yang berperan dalam jaringan itu. Dewasa ini sistem dan pelebagaan termaksud terutama nyata perkembangannya dalam bidang ekonomi dan perdagangan international; globalisasi dalam bidang ini sudah dijangkau oleh sistem dan pelebagaan yang makin dijadikan acuan dalam hubungan international. Dalam bidang ini tampaknya tiada alternatif lain bagi kita kecuali turut berperan di dalamnya, suka-tak-suka; sedang kesiapan untuk ambil lbagian dalam tatanan baru itu merupakan imperatif yang sukar dielakkan, mau-tak-mau.

Dalam naskah ini perhatian kita pusatkan pada penjelmaan globalisme dalam bidang yang jelas berdampak terhadap wawasan budaya kita, yaitu bidang informasi dan komunikasi yang sangat tertunjang oleh pesatnya laju perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dalam bidang inilah terjadi pemadatan dimensi ruang dan waktu (yang disebut Harvey '*time-space compression*'); jarak makin diperdekat dan waktu makin dipersingkat. Dalam bidang informasi, maka terjadilah banjir deras informasi (*information glut*) yang menghujani kita dan nyaris tak lagi terkendali; dan sebagaimana terjadi dengan setiap banjir, maka dalam hal ini pun terbawa limbah yang samasekali tidak berguna; maka betapa pun paradoks al kedengarannya, banjir informasi melalui sistem dan pelembagaan yang didukung oleh teknologi-canggih tidak dengan sendirinya memperkaya wawasan kita, melainkan bisa juga mencemari kita secara mental. Maka tidaklah mengherankan kalau banjir informasi itu akhirnya juga bisa berpengaruh terhadap carapandang maupun gaya hidup kita; dan inilah awal dari suatu proses yang akhirnya bisa bermuara pada perubahan sikap mental dan kultural.

Teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi ini merupakan pendukung utama bagi terselenggaranya pertemuan antarbudaya. Dengan dukungan teknologi modern informasi dalam berbagai bentuk dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan begitu rupa, sehingga dengan mudah dapat mempengaruhi carapandang dan gayahidup kita. Kesegeraan dan keserampakan arus informasi yang dengan derasnya menerpa kita seolah-olah tidak memberikan kesempatan pada kita untuk menyerapnya dengan filter mental dan sikap kritis. Perlu dicatat, bahwa dalam pertemuan antarbudaya mengalirnya arus informasi itu tidak senantiasa terjadi secara dua-arah; dominasi cenderung terjadi dari pihak yang memiliki dukungan teknologi lebih maju terhadap pihak yang lebih terbelakang. Makin canggih dukungan tersebut makin besar pula arus informasi dapat dialirkan dengan jangkauan dan dampak global. Kalau dewasa

ini dianut asas ‘kebebasan arus informasi’ (*free flow of information*), maka yang sesungguhnya terjadi bukanlah ‘pertukaran informasi’ (*exchange of information*) berupa proses dua-arah yang cukup berimbang, melainkan dominasi arus informasi dari pihak yang didukung oleh kesanggupan merentangkan sistem informasi dengan jangkauan global. Dengan jangkauan sedemikian itu, maka pihak yang lebih unggul dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi niscaya lebih berkesanggupan untuk membiasakan pengaruhnya secara global.

Gejala tersebut nyata berpengaruh atas terbentuknya sikap mental dan kultural pada pihak yang terpa (*expose*) oleh pihak yang menerpanya (*impose*) dengan arus informasi. Maka tidak mustahil kemajuan masyarakat yang terpa cenderung diukur secara membandingkan dengan hal-hal yang diperkenalkan melalui informasi dari pihak yang menerpa. Kecenderungan ini adakalanya dianggap sebagai bagian dari upaya ‘modernisasi’, dan diterima dengan alasan ‘mengikuti kecenderungan global’. Sikap yang naif ini antara lain juga ditandai oleh kecenderungan glorifikasi terhadap pihak yang diunggulkan sebagai sumber informasi global dan tampil sebagai penentu kecenderungan (*trend-setter*) dalam pembentukan sikap mental dan kultural serta gaya hidup baru.

Tidak berlebihan kiranya kalau sistem dan pelebagaan informasi dan komunikasi global dianggap sebagai andalan yang efektif dalam dinamika lintas-budaya. Persoalannya ialah sejauhmana sistem dan pelebagaan itu juga berperan secara plurisentris. Tampaknya ada diskrepansi yang mencolok antara plurisentrisisme sebagai kenyataan dunia baru dengan penguasaan sistem dan informasi dan komunikasi global yang nyaris monosentris (dalam arti berpusat di ranah budaya Barat). Sebagai konsekuensinya, maka dalam pertemuan antarbudaya global terjadi dominasi pengaruh budaya Barat terhadap budaya Timur; polarisasi ‘Barat-Timur’ ini adalah kelanjutan dari masa sejarah yang ditandai oleh ‘Barat’ sebagai pangkalan kekuatan kolonial dan ‘Timur’ sebagai sasaran kolonisasi.

Walaupun ada alasan untuk menggunakan polarisasi ‘Barat-Timur’ dalam kaitan dengan dikotomi ‘modern-tradisional’, namun dalam tinjauan yang lebih menyeluruh polarisasi tersebut merupakan simplifikasi yang sangat umum dan cenderung diasosiasikan dengan polarisasi ‘Eropa-Asia’ atau ‘*Occident-Orient*’, atau juga secara lebih umum ‘Barat-NonBarat’. Dalam polarisasi tersebut ‘Barat’ selalu digambarkan sebagai sumber pengaruh yang berdampak dominan terhadap ‘Timur’, apalagi dikaitkan dengan pengertian ‘modernisasi’ dan ‘industrialisasi’. Yang terjadi dalam pertemuan antar-budaya dalam polarisasi demikian itu bukanlah pertukaran pengaruh sebagai proses dua-arah, melainkan lebih berupa apa yang oleh Samuel Huntington dinyatakan sebagai “*the Unidirectional impact of one civilization on others*” yang menggejala melalui polarisasi “*the West and the rest*”.

Dalam penggolongan tersebut jelaslah bahwa ‘Barat’ bagaimanapun dipandang sebagai ranah budaya tersendiri dalam pertemuan antar-budaya global; ‘Barat’ (d.h.l. Eropa) bukan sekedar sebagai pangkalan kekuatan penjelajahan dan penjajahan sebagaimana kenyataannya dalam beberapa abad sebelum usainya abad ke-20, melainkan ‘Barat’ yang sudah diperluas hingga Amerika Utara. khususnya Amerika Serikat sebagai pusat persebaran informasi global. Maka tidak dapat disangkal betapa dominan peran dan pengaruh pusat ini sebagai penyebar informasi global, dan sekaligus bisa memperkenalkan sikap mental dan kultural ‘kontemporer’. Dengan demikian pertemuan antarbudaya secara global bagaimanapun juga diungguli oleh satu pusat dengan kesiapan aktualisasi berbagai potensi yang terkandung dalam sumberdayanya. Kemampuan inilah yang selanjutnya berdampak kuat dalam menumbuhkan carapandang dan gaya-hidup baru yang cenderung ditemukan dan ditiru sebagai model. Perubahan gaya hidup biasanya juga disertai dengan perubahan orientasi pada nilai-nilai budaya, dan bersama itu juga perubahan pada norma-norma perilaku yang semula menjadi acuan konformisme.

Maka dapat digambarkan bahwa salah satu konsekuensi dari terjadinya pertemuan antar-budaya ialah kemungkinan terjadinya perubahan orientasi pada nilai-nilai yang selanjutnya berpengaruh pada terjadinya perubahan norma-norma peradaban sebagai tolokukur perilaku warga masyarakat sebagai satuan budaya. Perubahan orientasi nilai yang berlanjut dengan perubahan norma perilaku itu bisa menjelma dalam wujud pergeseran (*shift*), persengketaan (*conflict*), atau perbenturan (*clash*). Perubahan dalam wujud yang pertama biasanya terjadi karena relatif mudahnya adaptasi atau asimilasi antara nilai dan norma lama dengan yang baru dikenal; yang kedua merupakan wujud yang paling sering menggejala dan biasanya memerlukan masa peralihan sebelum dihadapi dengan sikap positif (*acceptance*) atau negatif (*rejection*). Biasanya wujud yang kedua menunjukkan adanya ambivalensi dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga ada sebagian warga masyarakat yang menerima perubahan yang terjadi pada orientasi nilai dan norma perilaku, tapi ada pula sebagian lainnya yang menolaknya. Dalam keadaan ini bisa terjadi juxtaposisi antara pihak yang menerima dan pihak yang menolak. Lain halnya dengan perubahan yang berwujud perbenturan; dalam hal ini mudah timbul berbagai derajat sikap penentangan (*rejection*), dari yang moderat hingga yang paling ekstrem.

Mungkin dalam mempelajari wujud yang ketiga tersebut itulah Huntington terdorong untuk menulis karyanya yang diramalkan orang "The Clash of Civilization and the Remaking of World Order". Sayang dalam karya tersebut dia tidak menganggap perlu untuk membuat perbedaan antara arti kata kebudayaan (*culture*) dan peradaban (*civilization*); kedua kata itu bahkan digunakan secara saling dipertukarkan (*interchangeable*). Karena peradaban melekat pada sesuatu ranah budaya, maka sulitlah membayangkan akan berkembangnya apa yang disebut '*universal civilization*'. Apalagi kalau universalisasi itu didasarkan pada sesuatu kebudayaan sebagai kerangka acuannya, maka jelas yang demikian itu bersandar pada anggapan yang usang bahwa

perkembangan peradaban terjadi karena keberhasilan kebudayaan yang superior' mempengaruhi dan mengubah yang 'inferior'. Asumsi demikian jelas dilatari praanggapan bahwa '*the West* = superior' dan '*the rest* = inferior'. Pluralisme budaya sebagai pengejawantahan kemanusiaan tidak mungkin diperbandingkan pada skala superior-inferior, dan tidak ada alasan untuk mencanangkan perlunya dikembangkan satu kebudayaan atau peradaban dunia. Kita bisa berbicara tentang nilai-nilai universal, tanpa berarti berlakunya konsekuensi logis akan berkembang suatu kebudayaan tunggal dan peradaban universal. Nilai-nilai universal itu tiada lain adalah penjelmaan transendental dari keanekaan budaya sebagai cirikhas kemanusiaan sebagai satu umat.

Kenyataan bahwa pertemuan antar-budaya dalam era globalisasi dewasa ini cenderung diungguli oleh satu pusat yang sanggup menimbulkan dampak dominan terhadap kebudayaan lain tidak dengan sendirinya akan menghasilkan suatu kebudayaan global dan peradaban universal. Dominasi pengaruh sefihak itu-andaikata pun terjadi-niscaya suatu saat akan disadari sebagai pemangkasan berangsur-angsur terhadap kebudayaan yang diunggulinya. Meningkatnya kesadaran itu akhirnya akan membangkitkan penentangan dari fihak, yang terlanda olehnya, karena dominasi pengaruh itu lambat-laun niscaya dirasakan sebagai reduksi terhadap makna nilai-nilai budaya yang diunggulinya. Kerasnya penentangan itu sangat ditentukan oleh betapa kuatnya reduksi tersebut dihayati oleh satuan budaya yang merasa dilanda oleh pengaruh budaya asing yang dominan itu. Penentangan itu biasanya tampil serentak bersama kesadaran diperlukannya ikhtiar untuk memulihkan orientasi pada nilai-nilai budaya sendiri. Maka betapapun kuatnya sesuatu pusat pengaruh bisa mengungguli ranah budaya lainnya, globalisme budaya dan universalisme peradaban tidak mungkin terwujud. Pluralisme kebudayaan dan peradaban akan tetap menjadi cirikhas kemanusiaan dan setiap pengingkaran terhadap cirikhas tersebut niscaya akan membangkitkan penentangan, apapun caranya dan bagaimanapun pegejawantahannya.

Demikianlah globalisme dalam manifestasinya yang ekstrem akhirnya mungkin justru membangkitkan kembali kesadaran kebudayaan sebagai pengukuh identitas dan integritas kebersamaan dalam eksistensinya sebagai masyarakat dan bangsa. Pertemuan antar-budaya dalam era globalisasi tidak mungkin berakhir dengan hapusnya pluralisme budaya sebagai cirikhas sepanjang sejarah kemanusiaan, betapapun keunggulan pengaruh dari sesuatu lingkungan kebudayaan tertentu menimpa lainnya. Sebab bagaimanapun juga, setiap kebudayaan yang hidup dan masih ada masyarakat pendukungnya pasti memiliki daya preservatif. Daya ini tentu akan bekerja manakala masyarakat tersebut merasakan terjadinya reduksi makna nilai-nilai budayanya sendiri; bekerjanya daya ini sekaligus akan memberikan gambaran mengenai derajat kesadaran dan tingkat ketahanan budaya pada masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Maka menghadapi berbagai peristiwa lintas-budaya dalam era globalisasi dewasa ini makin mendesak perlunya prakarsa dan ikhtiar yang ditujukan pada peningkatan derajat kesadaran dan tingkat ketahanan budaya bangsa.

Dari uraian di atas ini dapat disimpulkan, bahwa globalisme sebagai fenomena kontemporer mustahil akan meniadakan pluralisme kebudayaan dan peradaban. Sebaliknya, dalam perwujudannya yang ekstrem, globalisme justru dapat menjadi pembangkit nasionalisme yang dikukuhkan oleh kesadaran sebagai satuan budaya yang khas. Dalam hubungan ini kiranya akan berlaku juga hukum pendulum, yaitu bahwa tarikan ke arah globalisme yang ekstrem niscaya akan menimbulkan gerak-balik ke arah berlawanan, berupa reaksi yang berwujud nasionalisme (bahkan chauvinisme). Hal ini akan dapat kita saksikan melalui berbagai reaksi penentangan yang cenderung menggejala sebagai akibat dominasi pengaruh budaya asing terhadap lainnya.

Tentu saja dalam pertemuan antar-budaya juga terjadi saling-menerima dan saling-memberi, sehingga dalam pertemuan antar-

budaya mungkin terjadi pula reorientasi baru. Misalnya, dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kegotongroyongan kiranya tidak mudah ditumbuhkan sikap individualistik dan kompetitif. Bayangkan betapa sulitnya untuk mengubah orientasi masyarakat Badui melalui perkenalan dengan nilai-nilai budaya asing, atau merubah kebudayaan yang berkembang di Tibet dengan memperkenalkan masyarakat Tibet pada nilai-nilai budaya Barat yang individualistik dan materialistik. Sebagaimana diberitakan akhir-akhir ini banyak bangsa atau sukubangsa yang meratapi surutnya kebudayaan aslinya karena diungguli oleh kebudayaan asing. Sukubangsa Indian di Amerika kembali berusaha untuk menghidupkan tradisinya yang mulai asing bagi kaum mudanya; masyarakat Chechnya menolak identifikasinya dengan kebangsaan maupun kebudayaan Rusia dan berhasrat untuk mengukuhkan jatidirinya sebagai satuan budaya yang khas; masyarakat Basque di Spanyol pun ingin menegaskan identitasnya sebagai satuan budaya yang khas dengan kebangsaan dan kebudayaan Spanyol; perhatikan pula misalnya meningkatnya kesadaran masyarakat Quebec di Kanada sebagai satuan kebangsaan Perancis dan kebudayaan tersendiri; begitu pula halnya dengan masyarakat Kurdi di Irak dan Turki yang terus-menerus berusaha untuk memperoleh pengakuan bukan sekedar sebagai golongan etnik, melainkan sebagai satuan kebangsaan dengan kebudayaannya yang khas; demikian pula orang Skotlandia yang enggan diidentifikasi dengan kebangsaan Inggris; perbedaan bahasa di Belgia cenderung membelah identifikasi masyarakatnya menjadi dua sesuai dengan berlakunya dua bahasa di Belgia. Masih segar dalam ingatan kita tragedi yang menimpa rakyat Bosnia Herzegovina dan Kosovo oleh gagasan gila berupa *ethnic cleaning* yang dilancarkan golongan etnik Serbia untuk membersihkan wilayah itu dari golongan etnik lain, khususnya yang beragama Islam, a.l. dengan pembantaian dan penguburan masal maupun perkosaan kaum wanitanya. Masih banyak contoh tindakan yang dapat digolongkan sebagai "*crime against*

humanity” terjadi di berbagai belahan dunia; sungguh suatu ironi bahwa semua ini menggejala dalam era peradaban ‘modern’.

Contoh-contoh di atas menunjukkan suatu paradoks dalam kaitannya dengan globalisme sebagai carapandang dalam era kontemporer. Berlangsungnya proses globalisasi dalam hubungan antar-bangsa justru berjalan seiring dengan kebangkitan (kembali) nasionalisme, bahkan etnosentrisme. Kenyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa sekecil-kecilnya suatu masyarakat pendukung budaya tertentu tidak akan begitu saja menyerah pada dominasi kebudayaan asing. Maka merajalelanya globalisme tidak mustahil justru akan menjadi pengantar kebangkitan (kembali) nasionalisme, bahkan mungkin etnosentrisme. Adanya satu bendera sebagai atribut Uni Eropa bukan berarti bahwa bangsa-bangsa Eropa yang tergabung dalam Uni tersebut bersedia mengganti benderanya masing-masing. Berbagai atribut kebangsaan nyatanya masih tetap dipertahankan oleh bangsa-bangsa yang tergabung dalam Uni Eropa; demikian juga orientasi masing-masing bangsa pada kesejarahan dan kebudayaannya yang khas. Berdasarkan perbedaan bahasa pun mereka menghayati identitasnya yang khas sebagai rumpun budaya. Bahkan negeri sekecil Luxembourg pun kini mulai memperkenalkan kembali bahasa ‘Luxembourger’, di samping bahasa Perancis dan Jerman yang selama ini berlaku sebagai bahasa resmi di negeri itu; menarik sekali, bahwa upacara pelantikan Presiden Irlandia beberapa waktu yang lalu tidak dilakukan dalam bahasa Inggris yang selama ini berlaku di Irlandia, melainkan dalam bahasa Irlandia yang jauh berbeda dengan bahasa Inggris.

Kenyataan sebagai bangsa sesama penghuni satu benua tidak mungkin mengingkari pluralisme budaya sebagaimana berlanjut dalam peri kehidupan masyarakat bangsa-bangsa itu. Maka proses globalisasi yang melaju pesat menjelang akhir abad ini bolehjadi justru merupakan *blessing in disguise* bagi mencuatnya kesadaran tentang kenyataannya, bahwa diferensiasi budaya sesungguhnya

merupakan cirikhas umat manusia sebagai konfigurasi peri kehidupan yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Peningkaran terhadap kenyataan tersebut akan selalu membangkitkan usaha penangkalan dan penentangan; penjelmaan kedua usaha itu sekaligus memantulkan tinggi-rendahnya derajat ketahanan bangsa dan budayanya. Demikianlah arus globalisme yang kian meningkat pada suatu saat niscaya akan dirasakan memudahkan nilai-nilai budaya bangsa, dan terpaan globalisme itu akhirnya akan membangkitkan nasionalisme sebagai jawabannya. Mengikuti apa yang diajarkan oleh pakar sejarah Arnold Toynbee, proses sejarah adalah berangkainya sahut-menyahut antara *challenge and response*, maka globalisme sebagai *challenge* niscaya akan menghadapi nasionalisme sebagai *response*. Mustahil globalisme akan berlanjut hingga takluk dan punahnya keanekaragaman budaya dalam kehidupan umat manusia; mustahil globalisme akan berlanjut hingga timbulnya kebudayaan universal yang tunggal.

Susila yang seharusnya meyakini kenyataan tersebut ialah upaya saling kenal dan saling-apresiasi antar-suku dan antar-bangsa, tanpa sesuatu pihak merasa superior dan memandang inferior pihak lainnya. Hubungan antar-budaya tidak bisa direntang pada skala superior-inferior. Setiap manifestasi budaya selalu mengisyaratkan apa saja yang sepanjang sejarah eksistensi masyarakat pendukungnya dianggap sebagai penjelmaan kebaikan (*good*) dan kebajikan (*virtue*). Dalam analisis akhirnya dapat disimpulkan bahwa-dari sudut pandang masyarakat pendukungnya-setiap kebudayaan merupakan transendensi manusia terhadap lingkungan alamiahnya. Setiap tahap dalam perkembangan kebudayaan menunjukkan adanya kontinuitas tertentu dari generasi-ke-generasi dalam masyarakat pendukungnya. Kebudayaan bermakna sebagai kerangka acuan bagi carapandang masyarakat pendukungnya tentang kesejarahannya (*historicity*), yaitu seluruh rentangan masalalu-masakini-masadepan eksistensinya. Perkembangan kebudayaan selalu disertai oleh bekerjanya serentak daya preservatif dan daya progresif; bekerjanya kedua daya itulah yang

menjadikan perkembangan kebudayaan sebagai suatu evolusi kreatif yang setiap tahapnya pada gilirannya merupakan sehimpunan potensi baru bagi aktualisasi selanjutnya. Maka selama sesuatu kebudayaan masih memiliki daya preservatif dan daya progresif serta berlanjutnya perkembangannya sebagai evolusi kreatif, maka selama itu kebudayaan menjadi pijakan bersikap dan berperilaku bagi masyarakat pendukungnya dalam menghadapi berbagai tantangan sepanjang perjalanan sejarahnya.

Daftar Pustaka:

Bull. H. & Watson, A. **“Expansion of the international community”**, Oxford University Press, Oxford, 1984.

Cassirer, E. **“An essay on man; an introduction to a philosophy of human culture”**, New Haven and London, Yale University Press, 1944, renewed 1972. Buku ini memuat uraian yang komprehensif tentang kebudayaan sebagai gejala kemanusiaan.

Clark, I. **“Globalization and Fragmentation”** Oxford University Press Inc., New York, 1977. Dalam buku ini disajikan berbagai pendapat tentang globalisas’ serta terjadinya fragmentasi dalam pola interaksi global.

Harvey, D. **“The condition of post-modernity”**, Blackwell Publ. Inc., Oxford, 1990/repr. 1995. Harvey menjabarkan kodisi kemanusiaan dalam masa pasca-modernisme.

Huntington, S. **“The clash of civilizations and the remaking of world order”** (Simon & Schuster, New York, 1966. Buku ini terkenal sebagai salah satu karya yang meramalkan berbagai kecenderungan global, terutama berkenaan dengan pertemuan antarbudaya Barat-Nonbarat.

Korten, D.C. **“When corporation rule the world”**, co-publication of Kumarian Press Inc., West Hartford, CT. and Berret-Koehler Publishers, San Francisco, CA., 1996. Dalam buku ini David Korten melakukan kritik terhadap trio IMF-World Bank-WTO dan pengaruhnya pada perwujudan *‘global capitalism’*

Korten, D.C. **“The post-corporate world”** (penerbit: s.d.a., 1999); khususnya Part IV/11 *“Culture shift”* dan IV/14 *“Engaging the future”*. Dalam buku ini D.Korten melengkapi pandangannya yang dimuat dalam bukunya yang pertama di atas ini.

Martin, H-P & Schumann, H. **“The Global Trap: Globalization and the assault on prosperity and democracy”** (Zed Books

Ltd, London, 1997). Khususnya bab I tentang *“The 20:80 society”*, hlm 1 s/d 11 dan bab penutup tentang saran pencegahannya *“Ten ways to prevent the 20:80 society”*, hlm 241-243.

Mazrui, A.A. **“Cultural forces in world politics”** (James Currey, London, 1990). Buku ini menggambarkan betapa kebudayaan berpengaruh dalam pola hubungan politik antarbangsa.

Wallerstein, I. **“Geopolitics and Geoculture: Essays on the changing worldsystem”** (Cambridge: Cambridge University Press, 1991). Buku ini bisa melengkapi pandangan tentang A.A. Mazrui tersebut di atas.

PERAN BAHASA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA*

Oleh: Asim Gunarwan
Universitas Indonesia

1. Pengantar

Sesuai dengan tajuk di atas, makalah ini mencoba menjawab pertanyaan apa peran bahasa di dalam upaya mempersatukan bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang dewasa ini sedang dirundung ancaman perpecahan. Mengingat bahwa bahasa-bahasa di Indonesia dapat dibedakan, menurut status masing-masing, menjadi bahasa nasional (yakni bahasa Indonesia), bahasa daerah, dan bahasa asing (terutama bahasa Inggris), pertanyaan di atas dapat diteruskan menjadi: apa peran bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris di dalam mempersatukan bangsa Indonesia? Dapatkah masing-masing memegang peran sebagai pemersatu bangsa? Bahasa mana yang dapat berperan demikian dan yang mana yang tidak? Dengan asumsi bahwa bahasa Indonesia dapat berperan sebagai pemersatu bangsa atas dasar pemikiran bahwa ia, bersama Pancasila dan sejarah bangsa, adalah perekat sosial bangsa ini, apa yang perlu kita lakukan agar Bahasa Indonesia (BI) dapat berperan secara optimal sebagai pemersatu bangsa Indonesia? Apakah bahasa asing (BA) dan bahasa daerah (BD) mempunyai potensi melemahkan persatuan bangsa Indonesia? Inilah tujuan makalah ini: mencoba membahas apa peran bahasa-bahasa di Indonesia di dalam kaitannya dengan persatuan bangsa.

Asumsi dasar yang dipakai di sini ialah bahwa BI adalah komponen nasionalisme Indonesia, sedangkan BA dan BD bukan.

* Makalah disampaikan pada Seminar Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan, Jakarta. 22-23 Februari 2000.

2. Bahasa dan Nasion

Fishman (1972), seperti yang dibahas oleh Fasold (1984:2-7), menggunakan dua istilah untuk menjelaskan peran bahasa di dalam satuan politiko-teritorial yang disebut nasion. Kedua istilah itu ialah *nasionisme* dan *nasionalisme*. Yang pertama itu berkaitan dengan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di dalam arti yang luas. Yang kedua itu mengacu ke perasaan yang tumbuh (dan kemudian menjadi dasar) dari nasionalitas, yakni satuan sosiokultural yang terdiri atas orang-orang sebagai anggota-anggota suatu satuan sosial yang berbeda dengan kelompok-kelompok lain. Nasionalitas itu ada bukan karena skala lokal semata-mata. Pengertian nasionalitas menurut Fishman ini berbeda dengan pengertian suku atau kelompok etnik, yang ia perikan sebagai satuan sosiokultural yang lebih sederhana lebih kecil, lebih partikularistik dan lebih lokalistik daripada pengertian nasionalitas itu.

Peran bahasa di dalam nasionisme berbeda dengan peran bahasa di dalam nasionalisme. Masih menurut Fishman, ada dua bidang yang di dalamnya bahasa memegang peran penting. Kedua bidang ini ialah (1) administrasi pemerintahan umum dan (2) pendidikan. Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan komunikasi didalam dan di antara lembaga-lembaga yang ada serta di antara pemerintah dan rakyat. Tentu saja untuk komunikasi itu diperlukan bahasa, dan sepanjang yang berkaitan dengan keefisienan (dan keefektifan) komunikasi, bahasa apa pun boleh dipakai. Karena tuntutananya bersifat pragmatis, bahasa yang paling tinggi derajat keefisienannya yang patut dipilih sebagai alat komunikasi agar nasion yang bersangkutan berfungsi secara efektif di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam hal ini tidak menjadi masalah apakah bahasa itu berasal dari luar wilayah negara atau apakah ia adalah bahasa setempat.

Pendidikan juga memerlukan bahasa, yakni bahasa pengantar. Di dalam hal ini, sepanjang yang berkaitan dengan keefisienan komu-

nikasi, bahasa apa pun dapat dipakai dan, seperti halnya dengan penyelenggaraan pemerintahan, bahasa yang patut dipilih adalah bahasa dengan derajat keefisienan yang paling tinggi.

Peran bahasa dalam nasionalisme ternyata lebih subtil. Hal ini karena bahasa, seperti juga kebudayaan, agama dan sejarah, merupakan komponen nasionalisme. Masih menurut Fishman, "*language serves a link with 'the glorious past' and with authenticity*" (Fasold, 1984: 3). Bahasa bukanlah sekedar wahana sejarah suatu nasionalitas; ia adalah sejarah itu sendiri. Sepanjang yang menyangkut otentisitas (*authenticity*), yang baik adalah jika suatu nasionalitas mempunyai bahasanya sendiri (bukan bahasa nasionalitas yang lain atau yang "diimpor" dari wilayah lain) sebagai komponen dan simbol nasionalismenya.

Peran lain yang dipunyai bahasa dalam kaitannya dengan nasionalisme adalah apa yang oleh Garvin dan Mathiot (1956) disebut fungsi pemersatu (*unifying*) dan pemisah (*separatist*). Fungsi yang pertama itu mengacu ke perasaan para anggota suatu nasionalitas bahwa mereka disatupadukan serta diidentifikasi dengan orang-orang lain yang menggunakan bahasa yang sama. Fungsi yang kedua itu merujuk ke perasaan para anggota suatu nasionalitas bahwa mereka berbeda dan terpisah dari orang-orang yang berbahasa lain.

Dalam kaitannya dengan BI, tampaknya fungsi yang pertama menurut Gavin dan Mathiot itulah yang perlu dibina agar semua warga, yang berbahasa Indonesia, merasa bahwa mereka adalah anggota satu bangsa yang sama.

3. Persaingan bahasa

Kata *persaingan* dipakai di sini karena tidak ada istilah yang lebih baik di dalam konteks dua bahasa (atau lebih) yang dipersaingkan oleh anggota masyarakat baik untuk dipelajari maupun untuk digunakan.

Di Indonesia, yang multilingual ini, adakah kemungkinan bahasa-bahasa saling bersaing? Singkatnya, adakah persaingan di antara BA (terutama bahasa Inggris, BING) dan bahasa Indonesia (BI) serta di antara bahasa Indonesia (BI) dan bahasa daerah (BD)?

3.1. Persaingan BING-BI?

Diantara BING dan BI pada masa kini secara umum tampaknya tidak ada persaingan untuk dipelajari atau untuk digunakan. BING setakat ini tidak menjadi bahasa Inggris setempat (*local English*). Hal ini berbeda dengan BING di India, Nigeria, Singapura atau di Filipina, yang oleh Moag (1982) dikatakan telah melalui empat fase, yaitu (1) transportasi, (2) indigenisasi, (3) ekspansi dan (4) institusionalisasi. BING memang sudah ditranspor ke Indonesia, tetapi setakat ini belum ada tanda-tanda bahwa ia telah mempribumi, apalagi berekspansi (penggunaannya meluas sampai meliputi berbagai-bagai ranah penggunaan bahasa). BING juga tidak (belum?) mengalami institusionalisasi (yang, jika ya akan ditandai oleh adanya penulis-penulis Indonesia yang menggunakan BING untuk mengungkapkan identitas Indonesia, nilai-nilai sosiokulturalnya, aspirasinya, dan lain-lain). Berdasarkan hal ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa BING tidak menyaingi BI.

Namun, dewasa ini kita sedang berada di dalam era globalisasi, yang menurut Waters (1995: 3) mengacu ke proses sosial “... *in which the constraints of geography on social and cultural arrangements recede and in which people become aware that they are receding.*” Bila proses itu wujud, yang ada adalah masyarakat dunia yang terglobal, yakni “*one community and one culture ... which may be harmoniously or disharmoniously integrated*” (ibid). Masyarakat dunia yang seperti itu ditandai oleh mengaburnya batas-batas negara. Implikasinya: apa pun yang dihasilkan oleh suatu

negara akan diukur semata-mata berdasarkan keunggulan kompetitifnya, bukan negara mana yang menghasilkannya. Implikasi selanjutnya adalah bahwa di dalam masyarakat dunia yang terglobal itu akan timbul persaingan yang keras di antara bangsa-bangsa, jauh lebih keras daripada yang ada sekarang. Yang akan menang bersaing tentunya adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, yakni yang antara lain mempunyai disiplin yang tinggi, etos kerja yang baik, wawasan jauh ke depan dan dalam kaitannya dengan bahasa, yang menguasai suatu bahasa untuk komunikasi yang lebih luas (BKL), yang memungkinkan bangsa anggota ikut berperan serta dalam wacana global secara efektif.

BI dewasa ini belum dapat berfungsi sebagai BKL di dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan menggunakan konsep geolinguistik Mackey (1973), Gunarwan (1999c) “menghitung” kekuatan BING dan BI dan menemukan bahwa BI memang sukar keluar dari wilayah tradisional bahasa Melayu untuk menjadi BKL. Implikasinya, untuk menjadi anggota yang bergengsi dalam masyarakat global, Indonesia masih, dan bahkan lebih-lebih lagi, harus lebih menguasai BING, apalagi jika diingat bahwa untuk mengakses teknologi yang perkembangan sangat pesat itu diperlukan BING. Jadi di sini ada “desakan” agar kita lebih menguasai BING. Inferensinya; di kalangan orang Indonesia timbul persaingan bahasa, yaitu di antara BING dan BI. Apakah BING akan mengancam kedudukan BI di Indonesia, ini akan kita tunggu dan lihat saja.

Tabel 1.
Perbandingan kepada geolinguistik
Antara bahasa Inggris (BING) dan bahasa Indonesia (BI)

No.	Kekuatan Bahasa	Indikator	Hasil Perbandingan
1	Kekuasaan Bahasa	(1) Demografi (2) Dispersi (3) Mobilitas (4) Ekonomi (5) Ideologi (6) Kebudayaan	BING > BI BING > BI BING > BI BING > BI BING = BI (?) BING > BI
2	Daya Tarik Bahasa	(1) D.T. Status (2) D.T. Teritorial (3) D.T. Interlingual	BING > BI BING > BI ?
3	Tekanan Bahasa	(1) Ciri-ciri Perilaku (2) Akulturasi Konsep	BI > BING BI > BING

Sumber : Gunarwan (1999)

Dari tabel di atas dapat ditarik inferensi bahwa, setidaknya secara teoretis, BING berpotensi mengancam kedudukan BI. Penalarannya adalah sebagai berikut. Semakin pentingnya BING di mata orang Indonesia pada umumnya dapat mengurangi loyalitas orang Indonesia kepada BI. Karena nasionalisme kita adalah nasionalisme endoglosik (berdasarkan bahasa yang sudah ada di wilayah Indonesia), menurunnya loyalitas itu (yang dapat berwujud dalam menurunnya hormat atau ikatan sentimental kita kepada BI) dapat menurunkan kadar nasionalisme orang Indonesia. Apalagi, di kalangan orang Indonesia ada kecenderungan bahwa BING dinilai lebih bergengsi

Tabel 2.

Nilai rata-rata penilaian yang diberikan oleh subjek (N=126) atas sebelas ciri penyamar Inggris dan penyamar Indonesia

No.	Ciri-ciri	Nilai Rata-Rata	
		Penyamar Indonesia	Penyamar Inggris
1.	Kepandaian	3.02	3.91
2.	Kebijaksanaan	3.68	4.33
3.	Kejujuran	2.73	3.66
4.	Keterpelajaran	3.14	4.52
5.	Rasa Humor	3.85	3.04
6.	Rasa percaya diri	3.55	3.98
7.	Status (eksos)	2.87	3.76
8.	Keramahan	4.03	3.12
9.	Kepemimpinan	3.26	3.94
10.	Disiplin	2.91	4.22
11.	Rasa Tanggung Jawab	3.41	3.87
RATA-RATA		3.31	3.85

Sumber : Gunarwan (1993)

daripada BI seperti yang ditemukandi dalam penelitian Gunarwan (1993) dengan menggunakan teknik samaran berbanding (*matched guise technique*), seperti yang terlihat di dalam Tabel 2 ini.

Jadi, yang dapat diinferensikan dari uraian di atas adalah bahwa ada kemungkinan persaingan antara BING dan BI di dalam milenium yang baru ini. Di dalam persaingan ini tampaknya BI cenderung kalah. Namun, hal ini tampaknya tidak akan berpengaruh pada fungsi formal BI sebagai bahasa kenegaraan. Yang akan terpengaruh tampaknya adalah fungsi BI sebagai lambang nasionalisme Indonesia karena dari adanya petunjuk bahwa BING cenderung dinilai lebih tinggi

daripada BI itu dapat diinferensikan bahwa salah satu butir Sumpah Pemuda, yakni “menjunjung bahasa persatuan” menjadi kurang wujud: junjungannya tidak terlalu tinggi.

3.2. *Persaingan BI-BD?*

Bahwa BI pada dasarnya adalah bahasa Melayu adalah kenyataan. Fase-fase yang ditempuh oleh bahasa Melayu (BM) menjadi bahasa kedua setempat kiranya dapat dianalogikan dengan postulat Moag di atas. Mula-mula BM ditransportasikan ke daerah-daerah di Nusantara ini. Kemudian BM mengalami indigenisasi, seperti yang dapat kita inferensikan dari adanya Bahasa Melayu Manado, Bahasa Melayu Ambon, dan sebagainya. BM mengalami fase ekspansi ketika ia tidak lagi hanya digunakan di ranah niaga, tetapi juga di ranah-ranah yang lain seperti ranah agama dan pendidikan. Fase puncak yang dialami oleh BM adalah institusionalisasi ketika putra-putri daerah mulai menulis roman-roman di dalam BM alih-alih BD. Ketika itulah benih-benih “persaingan” di antara BM dan BD dapat diasumsikan mulai tumbuh (Gunarwan, 1999b).

Persaingan linguistik itu menjadi lebih keras ketika BM diberi nama politis bahasa Indonesia (BI) dan kemudian ditasbihkan sebagai bahasa negara Republik Indonesia (1945), yang konsekuensinya adalah bahwa bahasa pengantar pendidikan adalah BI. BI menjadi lebih dominan di atas BD: BI adalah bahasa resmi kenegaraan, sedangkan BD paling-paling hanyalah bahasa resmi kedaerahan. Apalagi BI kemudian menjadi bahasa media, baik yang elektronik maupun yang cetak.

Kalau boleh dipakai kata *terdesak*, dewasa ini ada fenomena yang menunjukkan bahwa banyak BD terdesak oleh BI dan mulai tergeser. Di antaranya adalah bahasa Lampung (BL), seperti yang diteliti oleh Gunarwan (1994).

Menurut Edwards (1985: 71-72) ada tanda-tanda bahwa suatu bahasa sedang bergeser. Di antaranya adalah: pertama, bahasa itu

kehilangan basis wilayahnya dan jumlah penuturnya makin kecil; kedua, bahasa yang “mengancam” semakin mendesak bahasa itu (ini juga terlihat di dalam kasus Lampung: BI terus mendesak ranah-ranah penggunaan BL, terutama karena tingginya derajat multi-etnisitas provinsi Lampung): ketiga, bahasa yang sedang bergeser itu lebih banyak digunakan di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan.

Pada ketiga tanda-tanda itu dapat ditambahkan tanda-tanda yang lain. Salah satunya adalah semakin banyaknya kasus campur kode (*code mixing*), bukan alih kode (*code switching*), yang menyiratkan makna-makna sosial yang justru menunjukkan adanya bilingualisme yang relatif stabil (Gunarwan, 1999a). Gejala campur kode itu berbeda dari gejala alih kode karena yang pertama itu mengisyaratkan adanya ketidakamanan berbahasa (*language insecurity*) di kalangan penuturnya. Kalau hal ini terjadi di kalangan penutur bahasa yang relatif kecil, hal itu mudah difahami. Namun, perihal campur kode yang menunjukkan adanya ketidakamanan berbahasa itu juga dijumpai di kalangan penutur bahasa Jawa yang jumlah penuturnya termasuk yang terbesar itu, seperti yang ditemukan Gunarwan (1996a,b).

Adanya dua bahasa di dalam suatu masyarakat memang dapat menimbulkan persaingan, yakni persaingan, seperti yang disinggung di atas, dalam hal bahasa mana yang akan dipelajari atau digunakan oleh anggota-anggota masyarakat itu. Yang ideal adalah bilamana di dalam persaingan itu tidak ada yang kalah atau tidak ada yang menang di dalam arti bahwa kedua bahasa itu dipakai di semua ranah, tanpa membedakan ranah tinggi (misalnya ranah agama, pendidikan atau pekerjaan) dari ranah rendah (misalnya keluarga, persahabatan). Namun, yang ideal itu biasanya tidak ada. Yang nyata adalah bahwa di dalam suatu persaingan seringkali ada yang kalah dan ada yang menang. Di dalam persaingan antara BI dan BD tampaknya yang cenderung kalah adalah BD. Hal ini tampak jika kita bandingkan kekuatan BI dengan kekuatan BD dengan menggunakan konsep

Mackey di atas, yang ringkasannya dituangkan ke dalam Tabel 3 ini.

Tabel 3.

Perbandingan kekuatan geolinguistik antara BI dan BD

No.	Kekuatan Bahasa	Indikator	Hasil Perbandingan
1	Kekuasaan Bahasa	(1) Demografi (2) Dispersi (3) Mobilitas (4) Ekonomi (5) Ideologi (6) Kebudayaan	BI > BD BI > BD BI > BD ? BI = BD(?) BI > BD
2	Daya Tarik Bahasa	(1) D.T. Status (2) D.T. Teritorial (3) D.T. Interlingual	BI > BD BI > BD BI > BD
3	Tekanan Bahasa	(1).Ciri-ciri Perilaku (2) Akulturasi Konsep	BI > BD BI > BD (?)

Sumber: Gunarwan (1999b)

4. Kebocoran Diglosia

Adanya dua bahasa di dalam suatu masyarakat tidak harus menyebabkan persaingan. Artinya, kedua-dua bahasa itu dapat dipakai dengan “bebas”: pemilihan bahasa yang satu alih-alih bahasa yang lain untuk suatu peristiwa tutur bersifat manasuka. Namun, situasi itu (yang di dalam kepustakaan sosiolinguistik atau sosiologi bahasa disebut bilingualisme tanpa diglosia) tidak dapat dipertahankan

selama-lamanya. Lambat atau cepat, bahasa yang satu menjadi lebih disukai untuk peristiwa-peristiwa tutur yang di- asosiasikan dengan hal-hal yang “tinggi” (T) (misalnya agama, pendidikan) dan bahasa yang lain lebih banyak digunakan dalam peristiwa-peristiwa tutur yang diasosiasikan dengan hal-hal yang “rendah” (R) (misalnya rumah tangga, persahabatan). Jika pembagian tugas ini berlangsung terus, lama-lama terciptalah apa yang oleh Ferguson (1959) disebut diglosia. Situasi yang demikian itu disebut bilingualisme plus diglosia (artinya ada dua bahasa di dalam suatu masyarakat dan kedua bahasa itu berbagi fungsi, yang satu T dan yang lain R), dan sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa bahasa yang satu telah “kalah” bersaing dengan bahasa yang lebih dominan itu dan terdesak ke ranah rumah. Terdesaknya bahasa yang satu ke ranah rumah ini tidak otomatis berarti bahwa bahasa itu akan punah. Situasi diglosik itu dapat bertahan lama, yakni selama pembagian tugas antara bahasa dengan fungsi R dan bahasa dengan fungsi T dilakukan secara taat asas.

Soalnya menjadi lain jika kompartementalisasi (pembagian tugas) itu menjadi kendor, yakni jika untuk ranah rumah, yakni benteng pemertahan bahasa yang “kalah” itu, yang dahulunya dipakai bahasa dengan fungsi R, sekarang mulai dipakai bahasa dengan fungsi T juga. Jika hal ini terjadi, situasi diglosik tersebut dikatakan mengalami kebocoran (*diglossia leakage*) dan ini mengisyaratkan bahwa bahasa yang bersangkutan mengalami keterpurukan yang berlanjut, yang kalau dibiarkan terus akan menyebabkan kematian bahasa itu. Menarik untuk diketahui apakah kebocoran diglosia itu sudah terjadi pada masyarakat-masyarakat BD di Indonesia. Di dalam hal ini Gunarwan (1994) menemukan bahwa bahasa Lampung (BL) sudah mengalaminya karena desakan BI, seperti yang dapat kita inferensikan dari Tabel 4 ini.

Tabel 4.

Skala implikasional pemilihan bahasa Indonesia
atau bahasa Lampung di ranah rumah menurut kelompok umur
responden survei (N=233)

<i>No.</i>	<i>Kelompok Umum</i>	<i>N</i>	<i>Nilai Rata-rata Pemilihan</i>
1.	> 60	9	1,00
2.	51 - 60	18	1,00
3.	41 - 50	27	1,21
4.	31 - 40	64	2,02
5.	21 - 30	84	2,39
6.	< 20	34	3,43

Sumber: Gunarwan (1994)

(1= selalu/hampir selalu BL; 2 = BL > BI ; 3 = BL = BI ;

4 = BI > BL ; 5 = selalu/hampir selalu BI)

Skalabilitas = 100 %

Seperti yang terlihat, di dalam keluarga-keluarga Lampung yang diamati kebocoran diglosia terjadi pada orang-orang Lampung pada kelompok umur 41 - 50 (nilai rata-rata pemilihan = 1,21), yang berimplikasi bahwa BI sudah mulai dipakai di ranah rumah. Yang memprihatinkan adalah bahwa semakin rendah kelompok umur keluarga Lampung semakin tinggi nilai rata-rata pemilihan bahasanya. Hal ini mengisyaratkan bahwa semakin muda keluarga Lampung, semakin sering BI digunakan alih-alih BL. Selanjutnya hal ini mengisyaratkan bahwa kebocoran diglosia menjadi makin besar. Kalau dibiarkan, kebocoran akan semakin besar, dan jika dibiarkan tanpa usaha menambal kebocoran itu, BL dapat punah dalam perkiraan waktu 75 – 100 tahun lagi.

Perkiraan (kasar) itu dibuat oleh Gunarwan (1994) berdasarkan temuan yang disajikan dalam Tabel 4 di atas. Dengan asumsi bahwa bilangan-bilangan di dalam tabel itu akurat, anak-anak yang pada waktu penelitian itu dilakukan berumur 10 tahun (yakni nilai tengah dari kelompok umur 20 tahun) atau lebih muda akan menjadi orang tua (suami-istri) dalam satu generasi (25 tahun) lagi. Artinya mereka menjadi orang Lampung dalam kelompok umur 31 - 40 tahun. Untuk keperluan praktis, misalkan nilai pemilihan bahasa untuk kelompok umur ini tetap 3,43 (seperti yang ditemukan pada waktu penelitian) dan perbedaan nilai kelompok umur < 20 dan kelompok umur 31 - 40 tahun tetap 1,41, yakni 3,43 dikurangi 2,02. Maka 25 tahun lagi nilai rata-rata pemilihan bahasa kelompok < 20 tahun sekarang ini menjadi 4,84, yakni 3,43 ditambah 1,41. Di dalam waktu satu generasi berikutnya, kelompok umur dengan nilai 4,84 itu menjadi kelompok umur 31 - 40 tahun yang menjadi ayah-ibu, anak-anak Lampung. Nilai 4,84 itu menunjukkan bahwa bahasa yang dipakai di ranah rumah hampir selalu BI. Yang dapat kita bayangkan adalah bahwa orang-orang tua ini, 50 tahun lagi, mengalami apa yang di dalam bahasa Inggris disebut *language insecurity* (ketidakamanan berbahasa) dalam menggunakan BL. Akibatnya, mereka mungkin sekali tidak mewariskan BL kepada anak-anak mereka. Jika perhitungan kasar ini dapat dipercaya, hal ini berarti bahwa anak-anak Lampung 50 tahun lagi tidak dapat ber-BL walaupun mungkin mereka masih menguasainya secara pasif. Kalau anak-anak ini menjadi ayah-ibu satu generasi kemudian, yakni $\pm$ 75 tahun lagi, mereka akan selalu menggunakan BI di rumah, dan tidak mengajarkan BL kepada anak-anak mereka. Pada saat itulah BL mengalami kematian. Dengan tenggang waktu 25 tahun lagi, dapat diproyeksikan (secara kasar) bahwa BL dapat punah dalam waktu 75 - 100 tahun lagi *jika tidak ada usaha untuk menangkal kematian itu*.

Mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi. Namun, sekiranya hal itu terjadi, penyebab utamanya adalah bahwa orang tua tidak mewariskan BL kepada anak-anak mereka. Menurut istilah Fishman

(1993), penyebab itu adalah tidak adanya *intergenerational mother tongue continuity* (kesinambungan bahasa ibu antargenerasi). Implikasinya: bahasa tidak akan punah selama ia diwariskan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya.

Gejala tergesernya BD karena desakan BI juga dijumpai, seperti yang disinggung di atas, pada bahasa Jawa, bahasa kelompok etnik yang jumlah penuturnya paling besar di Indonesia. Gejala yang sama juga dijumpai pada bahasa Bali (BB). Di dalam hal ini, ada pakar linguistik dari Bali yang mengatakan bahwa BB tidak akan bergeser karena BB terkait dengan budaya Bali. Namun, pendapat ini perlu didukung oleh hasil penelitian yang andal. Soalnya, ada petunjuk yang mengisyaratkan bahwa BI sudah merasuk ke ranah penggunaan BB, seperti yang dapat diinferensi dari apa yang dikatakan oleh Wilasa (1999:1) “..... ini terbukti banyak anak muda desa, terlebih di kota, merasa kehilangan gengsi jika berdialog dengan teman dengan bahasa Bali,” Lagipula, keterkaitan suatu bahasa dengan kebudayaan (dalam arti seni dll) tidak dapat menjamin bahwa ia tidak akan tergeser. Masalahnya menjadi lain jika bahasa itu terkait dengan kebudayaan dalam arti yang mengacu ke perilaku hidup sehari-hari. Perilaku seni (dan juga perilaku bahasa yang dipakai di dalam mantra) bukanlah perilaku komunikasi sehari-hari: penggunaan bahasa di dalam peristiwa tutur yang khusus seperti itu tidak akan menjamin pelestarian bahasa; yang dapat menjamin adalah penggunaan bahasa itu di dalam peristiwa komunikasi sehari-hari yang sebenarnya.

5. Dinamika BI-BD-BING

Bahasa, bersama-sama dengan kebudayaan, agama dan sejarah, merupakan perekat sosial yang dapat mempersatukan suatu bangsa. Tepatnya, keempat unsur itu menentukan kadar nasionalisme yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan. Makin tinggi nasionalisme

suatu bangsa, makin kukuhlah persatuan mereka. Yang perlu dicatat adalah bahasa tidak harus merupakan komponen nasionalisme itu. Smith (1971), seperti yang dikutip oleh Edwards (1985:11), mengatakan bahwa di Afrika nasionalisme (yang muncul dalam bentuk identitas nasional) orang dikaitkan dengan bahasa dan bahwa di negara-negara seperti Yunani, Myanmar dan Pakistan, agamalah yang menjadi unsur pendefinisian diri yang kuat.

Bagaimanapun, di Indonesia tampaknya nasionalisme didefinisikan dengan menggunakan bahasa sebagai salah satu komponennya. Mungkin karena penekanan pada otentisitas serta keterkaitan dengan masa lampau yang gemilang (baca: kerajaan Sriwijaya), bahasa yang dipilih sebagai komponen nasionalisme Indonesia itu ialah bahasa Indonesia, yang pada dasarnya adalah bahasa Melayu, yang berasal dari bumi Indonesia sendiri.

Sebagai komponen nasionalisme Indonesia, BI mempunyai peran yang penting di dalam mempersatukan semua golongan dan atau kelompok etnis yang ada di Indonesia. Implikasinya adalah bahwa untuk memperkuat persatuan Indonesia, kita harus memperkuat BI di dalam arti terus membina dan mengembangkannya.

BING di Indonesia tidak berperan sebagai pemersatu bangsa. Mungkin hal ini karena bahasa ini tidak berasal dari bumi Indonesia, dan karenanya tidak dapat memenuhi tuntutan otentisitas. Artinya, BING tidak dapat menjadi lambang kepribadian Indonesia. Malah sebaliknya, seperti yang disinggung di atas, BING dapat menurunkan keterkaitan sentimental orang Indonesia dan implikasinya menurunkan kadar nasionalisme Indonesia.

Ada petunjuk bahwa BD juga tidak dapat berperan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. BD berfungsi sebagai bahasa intrasuku, bukan bahasa antarsuku. Ini bermakna bahwa pada tingkat daerah BD mempunyai fungsi pemersatu para anggota suku dan sekaligus ia menjadi pemisah suku itu dari suku-suku yang lain, yang menggunakan BD-BD yang lain. Dari sudut pandang persatuan Indonesia,

dapat kita katakan bahwa sebenarnya keberadaan BD justru bertolak belakang dengan keberadaan BI, yang berfungsi sebagai bahasa antargolongan dan antarsuku dan karenanya dapat disebut sebagai bahasa pemersatu. Tepatlah apa yang dilakukan oleh para pemuda yang berwawasan jauh ke depan, yang berkongres pada 1928, yang menyebut BI sebagai bahasa persatuan.

Jika kita berpandangan eradikasionis, yakni pandangan bahwa yang menghalangi tujuan itu perlu dibasmi atau, setidaknya, dibiarkan hilang, kecenderungan tergesernya BD-BD seperti yang disinggung di atas sebaiknya dibiarkan saja. Ada keuntungan yang dapat kita peroleh dari punahnya BD-BD: fungsi separatis (pemisah) BD menjadi hilang, dan bangsa Indonesia menjadi tidak terkotak-kotak oleh BD-BD. Implikasinya: persatuan bangsa menjadi lebih kuat.

Argumentasi yang mendukung keuntungan punahnya BD-BD dapat dibuat dengan memanfaatkan apa yang di dalam sosiologi bahasa atau antropologi disebut hipotesis Whorf atau, lengkapnya, hipotesis Sapir-Whorf. Ada dua versi hipotesis ini, yaitu versi kuat dan versi lemah. Versi kuat (yang sering disebut pandangan determinisme) mengatakan bahwa bahasa membentuk pikiran dalam arti bahwa bahasa yang berbeda-beda membentuk cara berpikir yang berbeda-beda pula. Banyak pakar berpendapat bahwa pandangan ini terlalu kuat dan karenanya mereka tidak menerimanya. Yang sekarang banyak berterima adalah versi lemah hipotesis tersebut, yang sering disebut pandangan relativisme, yang mengatakan bahwa bahasa *cenderung mempengaruhi* pikiran dalam arti *world view* penggunaannya. Artinya, bahasa yang berbeda cenderung mempengaruhi cara berpikir yang berbeda-beda pula. Segi positif pupusnya BD-BD adalah bahwa semua orang Indonesia akan bertutur di dalam BI. Dengan asumsi bahwa versi lemah hipotesis Whorf di atas memang benar, orang-orang Indonesia dengan demikian akan mempunyai *World view* yang sedikit-banyaknya sama. Pada gilirannya, kesamaan pandangan dunia akan memberikan sumbangan yang positif kepada

persatuan Indonesia: persatuan bangsa akan menjadi lebih kuat.

Masalahnya adalah bahwa BD perlu dilestarikan atas dasar dua alasan. Pertama, pelestarian BD adalah amanat konstitusi. Kedua, BD adalah pengembangan kebudayaan daerah (KD), yang implikasinya adalah bahwa pupusnya BD akan menyebabkan punahnya KD. Hilangnya KD akan menyebabkan Indonesia “miskin budaya”. Implikasinya adalah bahwa moto “Bhinneka Tunggal Ika” akan perlu diubah.

Disinggung di atas bahwa BING berpotensi menurunkan kadar nasionalisme di kalangan orang Indonesia. Keterkaitan pada bahasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keterkaitan instrumental (*instrumental attachment*) dan keterkaitan sentimental (*sentimental attachment*). Dilihat dari tujuan belajar bahasa, kedua keterkaitan ini sejajar dengan tujuan instrumental (yaitu tujuan belajar suatu bahasa agar ia dapat digunakan sebagai alat semata-mata) dan tujuan integratif (yaitu tujuan belajar suatu bahasa agar bahasa itu memungkinkan si pemelajar berintegrasi dengan masyarakat bahasa yang bersangkutan). Mengingat bahwa BING berpotensi menurunkan kadar nasionalisme Indonesia (karena BING dapat melemahkan keterkaitan sentimental orang Indonesia), perlu dijaga bahwa pengajaran BING di Indonesia (di sekolah) dibatasi pada tujuan instrumental saja. Tujuan pengajaran BING hendaklah dibatasi pada penguasaan bahasa ini sebagai sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, terutama demi peningkatan daya saing manusia Indonesia, sejalan dengan tuntutan globalisasi. Hendaklah dihindari pengajaran BING yang akan membuat orang Indonesia menjadi anggota masyarakat Anglosakson, betapa pun besarnya maslahat yang akan diperoleh.

6. Beberapa Implikasi

Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari uraian di atas. Beberapa hal itu berkaitan dengan (1) bahasa sebagai perekat persatuan bangsa Indonesia; (2) pengajaran BING; dan (3) pelestarian BD.

6.1. Bahasa sebagai Perekat Persatuan

Tidak semua bahasa yang ada di Indonesia berperan sebagai pemersatu bangsa. BING dan BD justru berpotensi melemahkan persatuan bangsa, seperti yang disebutkan di atas. Yang dapat berperan sebagai perekat persatuan bangsa adalah BI. Hal ini karena BI, di samping Pancasila dan kesamaan sejarah (perasaan senasib sepenanggungan atau solidaritas) adalah pemersatu bangsa kita.

Implikasi bahwa BI berperan sebagai pemersatu bangsa adalah bahwa bahasa nasional kita ini harus terus dipelihara dalam arti bahwa pembinaan (yang sarasannya adalah pengguna BI) dan pengembangan BI (yang sarasannya adalah sandi BI) terus dilakukan. Pada sisi pembinaan, di samping peningkatan mutu penggunaan BI oleh orang Indonesia, perlu diperhatikan juga sikap terhadap dan rasa cinta orang Indonesia kepada BI.

Sandi BI harus terus dikembangkan agar BI sejajar dengan bahasa-bahasa modern, yang bercirikan kemudahan serta presisi pengungkapan makna.

Pembinaan BI harus terus dilakukan, satu hal karena pada umumnya mutu penggunaan BI oleh orang Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Masalah rendahnya mutu penggunaan BI, baik yang berkaitan dengan kekurangtahuan pengguna mengenai hasil-hasil pengembangan BI maupun yang berkaitan dengan rendahnya disiplin berbahasa mereka, tampaknya juga bukan karena kendala BING. Pemecahannya memerlukan waktu dan kesabaran. Satu cara adalah melalui gerakan meningkatkan mutu dan disiplin berbahasa. Sasaran yang paling baik adalah lembaga pendidikan dari SD sampai Perguruan Tinggi dan implikasinya adalah: (1) penyuluhan BI (termasuk pemasaran hasil-hasil perencanaan BI) lebih ditingkatkan sehingga mencapai guru-guru dan dosen-dosen dan (2) disiplin berbahasa dikampanyekan di kalangan guru dan dosen, kalau perlu melalui gerakan yang di

Britania dinamakan *Language Across the Curriculum*. Inti gerakan bahasa melintasi kurikulum yang diusulkan ini adalah bahwa pengajaran bahasa (di dalam hal ini BI) bukanlah tanggung jawab guru (dan dosen) BI saja, melainkan juga tanggung jawab *semua guru* (dan dosen). Karena itulah penyuluhan BI harus sampai kepada mereka. Lebih baik jika sasaran ini diperluas sehingga menjangkau para penulis buku ajar.

Sasaran yang juga baik adalah para wartawan dan penulis serta penyunting artikel berita media cetak dan media elektronik. Implikasinya adalah penyuluhan BI dan kampanye disiplin menggunakan BI harus lebih ditingkatkan di antara mereka. Mereka pun perlu diimbau agar berlapang dada untuk menerima dan mempraktikkan apa yang disuluhkan dan dikampanyekan.

Masalah sikap bahasa dan rasa cinta kepada BI lebih sukar dipecahkan. Satu cara adalah dengan menanamkan sejak dini sikap yang baik terhadap BI dan rasa menghargai BI, misalnya dimulai di TK dan di SD. Pelajaran BI di sekolah-sekolah (SD, SMP dan SMU) hendaklah tidak mementingkan ranah kognitif semata-mata: ranah afektif pun perlu diberi porsi. Ini juga berlaku bagi pengajaran kesusastraan Indonesia. Apresiasi sastra harus dibiasakan sejak anak-anak di SD agar mereka dapat mulai merasakan dan menikmati keindahan BI. Hanya dari orang-orang yang dapat merasakan dan menikmati keindahan BI-lah dapat lebih banyak diharapkan sikap yang baik terhadap BI dan rasa cinta kepada BI. Yang harus dijaga adalah jangan sampai anak-anak kita membagi cintanya kepada BA, apalagi sampai mereka mencintai BA lebih mendalam daripada mencintai BI.

Tentu saja rasa cinta kepada BI itu tidak dapat diharapkan tumbuh dari apresiasi sastra Indonesia saja. Dengan menanamkan rasa nasionalisme kepada anak-anak kita pun dapat secara tidak langsung, menanamkan dan memupuk rasa cinta mereka kepada BI. Rasa nasionalisme yang kuat akan wujud di dalam bentuk sikap

yang positif terhadap BI, rasa cinta yang mendalam kepada BI, dan rasa keterkaitan sentimental yang erat dengan BI. Di dalam bentuknya yang sangat kuat, rasa nasionalisme itu dapat wujud di dalam pendirian bersedia mati demi membela BI. Masalahnya adalah di mana dan bagaimana rasa nasionalisme itu ditanam dan dipupuk. Melalui pelajaran sejarahnya? Pertanyaan ini perlu dijawab oleh pakar-pakar pendidikan.

Yang rupanya mempunyai potensi menjadi kendala penanaman sikap positif dan rasa cinta kepada BI adalah BING. Asumsi ini didasarkan kepada argumentasi di atas, yang menunjukkan bahwa bahasa ini cenderung dinilai lebih tinggi daripada BI. Hal ini rupanya ada kaitannya dengan kecenderungan yang kuat di antara orang Indonesia pada umumnya bahwa yang dari “sana” itu dinilai lebih daripada yang dari “sini”, apakah itu film, musik, tari-tarian, mode pakaian, mode rambut dan bahkan makanan. Yang harus kita cegah adalah, seperti yang disinggung di atas, jangan sampai anak-anak kita lebih menghargai BING daripada BI. Pada kadar yang rendah penjunjungan BING yang lebih tinggi daripada BI itu sebenarnya mengingkari Sumpah Pemuda. Pada kadar yang lebih tinggi, hal itu akan menimbulkan sikap keinggris-inggrisan atau keamerika-amerikaaan yang jika menebal akan melunturkan warna BI sebagai lambang kepribadian bangsa. Lunturnya warna BI sebagai lambang kepribadian bangsa dapat mengubah warna kebudayaan Indonesia, dan akhirnya kebudayaan nasional pun dapat terjelus. Pada kadar yang lebih tinggi lagi, penjunjungan BING yang lebih tinggi daripada BI dapat mengurangi rasa kebangsaan kita. Jika diingat bahwa BI adalah alat pemersatu bangsa dan merupakan perekat kebangsaan, berkurangnya penghargaan kepada BI dapat berimplikasi sangat jauh, yaitu merosotnya rasa nasionalisme. Mudah-mudahan hal ini hanyalah perhitungan teoretis belaka. Walaupun demikian perlu diusahakan agar pengajaran BING di Indonesia dibatasi pada tujuan instrumental saja, jangan sampai lebih daripada itu.

6.2. *Pengajaran BING*

Sehubungan dengan apa yang dikatakan di atas, agaknya cukup relevan jika singgung di sini ketentuan baru bahwa BING *boleh* diajarkan di SD sebagai mata pelajaran tambahan. Pada waktu ini sudah banyak SD yang mengajarkan BING. Mengingat bahwa bahasa ini bahasa bergengsi, tidaklah mengherankan jika akan ada lebih banyak lagi SD yang mengajarkannya.

Rupanya ide untuk mengajarkan BING di SD itu didasarkan antara lain kepada asumsi bahwa anak-anak yang masih muda lebih reseptif belajar bahasa (karena mereka masih di bawah usia kritis). Benarkah asumsi itu? Ini masih belum terbukti secara meyakinkan. Satu pendapat adalah bahwa anak-anak memang pandai di dalam pemerolehan bahasa, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka juga pandai di dalam pembelajaran bahasa.

Di dalam makalah ini, posisi yang diambil adalah *tidak* menentang ketentuan tersebut. Yang menjadi soal adalah apakah kita benar-benar sudah siap di dalam pengadaan guru, bahan pengajaran dan alat-alat belajar-mengajar yang lain, terutama di dalam kaitannya dengan jumlah murid per kelas yang rata-rata besar. Bagaimana pun, pelaksanaan pengajaran BING itu mempunyai dua kemungkinan, yaitu gagal atau berhasil.

Jika pengajaran BING di SD gagal, akibatnya jelas tidak baik karena usaha-usaha perbaikan akan lebih sukar di sekolah berikutnya, ibarat usaha meluruskan benang yang sudah kusut. Di samping itu, secara psikologis, kegagalan itu akan memberikan anak-anak di usia formatif itu pengalaman gagal terlalu dini. Ini pun jelas tidak baik karena kegagalan dini itu dapat menyebabkan kegagalan-kegagalan lain. Kegagalan itu juga dapat membuat anak membenci BING. Ini sebenarnya menguntungkan pembinaan BI, tetapi di dalam konteks yang lebih luas, rasa benci anak-anak kepada BING itu berarti mengalahkan maksud dan tujuan pengajaran BING itu sendiri.

Jika pengajaran BING berhasil, akibatnya adalah anak-anak menyenangi BING. Karena ada kecenderungan bahwa yang dari "sana" itu dinilai lebih baik, mungkin sekali akibatnya adalah anak-anak yang masih sangat muda itu "jatuh cinta" kepada BING dan kurang mencintai BI. Implikasinya adalah seperti yang diuraikan di atas : dapat ringan dan dapat berat. Karena itu, pelaksanaan ketentuan bahwa BING *boleh* diajarkan di SD itu hendaklah dilakukan dengan sangat berhati-hati.

Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia, mungkin pelajaran BING di SMP dan SMU-lah yang perlu dibenahi agar efektif. Di dalam hal ini perlu diteliti mengapa pengajaran BING di sekolah belum membuahkan hasil yang diharapkan. Pembinaan harus didasarkan pada hasil-hasil penelitian itu.

6.3. Pelestarian BD

Dengan alasan seperti yang disebutkan di muka, BD-BD memang perlu dilestarikan. Artinya, pergeseran BD-BD itu perlu dibalikkan. Ini, tentu saja bukan pekerjaan yang mudah dan lagipula biayanya tinggi.

Dasawarsa terakhir abad yang lalu ditandai oleh adanya teori baru di dalam ilmu perencanaan status bahasa. Teori itu ialah teori pembalikan pergeseran bahasa (*reversing language shift*), yang dikemukakan oleh Fishman di dalam dua tulisannya, yaitu "What is reversing language shift (RLS) and how can it succeed?" (1990) dan "Reversing language shift: Successes, failures, doubts, and dilemmas" (1993). Arti penting teori itu ialah bahwa pembalikan arah pergeseran suatu bahasa, secara teoritis *dapat* dilakukan, hanya saja pelaksanaannya dapat berhasil dan dapat gagal. Inti pelaksanaan itu ialah meningkatkan kondisi-kondisi sosiolinguistik suatu bahasa yang mengalami keseimbangan negatif pengguna dan penggunaan bahasa itu.

Dari uraian-uraian di atas dapat diinferensikan bahwa BD-BD kita di dalam abad-abad yang akan datang mengalami pergeseran yang lebih cepat. Sasaran usaha pembalikan pergeseran menurut teori baru ini ialah kesinambungan bahasa ibu antargenerasi (*intergenerational mother tongue continuity*) tersebut. Penalarannya: bahasa ibu tidak akan pupus selama ia diwariskan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Sebaliknya, jika orang-orang tua tidak mewariskan bahasa ibu (atau bahasa daerah) kepada anak-anaknya, dalam arti bahwa orang tua menggunakan bahasa lain alih-alih bahasa ibu mereka, hal ini adalah penyebab utama akan terjadinya pergeseran bahasa. Jika hal itu meluas sehingga transmisi antargenerasi bahasa ibu tidak berlangsung di banyak keluarga, cepat atau lambat bahasa ibu itu menuju kematiannya.

Masalahnya, dewasa ini tampaknya banyak keluarga muda, terutama di kota-kota besar, misalnya di Malang, yang menggunakan BI, alih-alih BD, kepada anak-anak mereka apa pun tujuan dan alasannya. Dilihat dengan kaca mata nasional, hal itu baik. Namun, dilihat dari kaca mata daerah yang berbingkai pelestarian BD, hal itu jelas merugikan: pewarisan BD menjadi terkendala dan yang terjadi adalah dislokasi antargenerasi BD.

Tergantung pada keparahan kondisi-kondisi bahasa yang sedang terpuruk, Fishman (1993:71) membagi usaha-usaha pembalikan pergeseran bahasa menjadi delapan babak. Kondisi yang terburuk adalah yang ditandai dengan (hampir) tidak dipakainya bahasa yang bersangkutan di dalam pergaulan etnis sehari-hari. Di dalam hal ini, usaha pembalikan bahasa diawali dari yang paling sukar, yaitu merekonstruksi bahasa itu serta mengusahakan agar orang-orang dewasa, yang nenek-moyangnya dahulu menggunakan bahasa itu, belajar (dalam arti memperoleh) bahasa tersebut (sebagai bahasa kedua). Usaha yang paling mudah adalah bila kondisinya sudah memungkinkan bahasa yang sudah direkayasa untuk dihidupkan kembali itu dapat dipakai di dalam ranah-ranah

pendidikan, pekerjaan, media masa, dan pemerintahan pada tingkat tinggi dan nasional.

Tampaknya, BD dewasa ini memang sedang mengalami kemerosotan, baik dalam hal sandinya maupun dalam hal penggunaannya. Ini bermakna bahwa kedudukan dan fungsi BD di abad-abad yang akan datang menjadi goyah. Walaupun demikian, tampaknya goyahnya kedudukan BD itu sekarang belum terlalu parah, setidaknya-tidaknya jika diukur berdasarkan babak-babak pembalikan pergeseran bahasa seperti yang dibuat Fishman. Yang jelas, BD kecuali di kota besar yang multietnis seperti Jakarta, masih digunakan secara cukup luas oleh putra daerah, dan hal ini harus segera kita jadikan titik tolak pelestarian BD jika kita memang secara serius menganggap hal itu sebagai tantangan. Artinya, kita tidak boleh menunggu sampai BD benar-benar terpuruk.

Tertakluk kepada hasil penelitian yang canggih, kiranya dapat kita katakan bahwa BD dan BI dewasa ini telah membentuk apa yang di dalam sociolinguistik atau sosiologi bahasa disebut diglosia, seperti yang disinggung di atas. Istilah ini merujuk ke situasi kebahasaan yang relatif stabil, yang di dalamnya terdapat dua bahasa (atau dua varian bahasa) yang berbagi fungsi, yang satu berfungsi Tinggi (T) dan yang lain berfungsi Rendah (R). Di dalam diglosia BD-BI itu yang memegang fungsi T adalah BI dan yang memegang fungsi R adalah BD.

Yang hendak dikatakan di sini ialah bahwa memang sudah sepatutnya konstalasi kebahasaan kita seperti yang tergambarkan di dalam bilingualisme plus diglosia tersebut di atas. Tidak mungkin dan tidak boleh, BD di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memegang fungsi T dan sebaliknya BI memegang fungsi R. Di dalam rangka pelestarian BD, yang dapat kita usahakan adalah agar diglosia BD-BI itu tetap stabil, tidak bocor. Diglosia dikatakan bocor jika dan bila bahasa untuk fungsi T dipakai di dalam ranah-ranah yang biasanya dipakai bahasa untuk fungsi R.

Seperti yang disinggung sebelumnya, kebocoran diglosia itu sekarang sudah ada: keluarga-keluarga muda daerah di daerah mulai dan bahkan sudah menggunakan BI di rumah, antara orang tua dan anak. Berdasarkan hal ini, usaha pelestarian BD hendaklah dilakukan dengan cara menambal kebocoran diglosia itu. Kongkretnya, hendaklah dilakukan kampanye “Pakailah BD di Rumah.” Mengajarkan BD di sekolah saja tidak menjamin terhindarnya dislokasi antargenerasi BD, seperti yang terjadi di Irlandia ketika negara itu mengusahakan pelestarian bahasanya.

Mengatakan selalu lebih mudah daripada melaksanakan. Jika kampanye itu dilaksanakan, orang daerah dapat dituduh anasional dan membangkit-bangkitkan primordialisme daerah. Namun, yang penting adalah cara berkampanyenya. Hendaknya diusahakan agar tidak ada kelompok yang tersinggung dengan kampanye itu. Saya justru berpendapat bahwa perlu ada gerakan sosial kebahasaan untuk melestarikan BD. Agar putra daerah tidak dituduh macam-macam, gerakan itu hendaknya disebut “Gerakan Pelestarian BD.”

Usul kongkret: hendaknya gerakan sosial itu dimotori oleh Dewan Bahasa Daerah, yang “dititipkan” di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa atau langsung di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kemungkinan yang lain adalah membentuk semacam Majelis Pelestarian BD di daerah kelak bila otonomi daerah sudah benar-benar operasional. Tugas Dewan atau Majelis itu adalah memikirkan secara konseptual dan terpadu serta melaksanakan pelestarian BD-BD yang dipelihara oleh para penuturnya. Anggota-anggotanya adalah pakar-pakar yang memiliki BD-BD tertentu, yang menguasai prinsip-prinsip perencanaan status bahasa, termasuk teori pembalikan pergeseran bahasa. Mereka perlu menimba pengalaman dari organisasi-organisasi pembalikan pergeseran bahasa di luar negeri. Mereka itulah yang diserahi menyusun dan melaksanakan rencana pelestarian BD. Rencana yang baik adalah rencana yang memuat visi, cetak biru, agenda serta rencana tindakan (*action plan*) yang baik, sistematis

dan jelas. Rencana yang baik adalah juga yang mempunyai program pelaksanaan dan evaluasi, termasuk pemantauan berkala.

Barangkali dapat diproyeksikan di sini bahwa fungsi dan peran BD di dalam abad-abad yang akan datang tampaknya akan goyah. Jika BI terus mendesak BD, ada kemungkinan BD sebagai lambang identitas daerah tidak lagi berlaku. Demikian pula, jika BI mendesak terus BD, BD sebagai alat perhubungan intrakelompok digantikan oleh BI. Mungkin BD sekarang memang berfungsi sebagai lambang kebanggaan daerah—jika memang ada yang dibanggakan. Namun, karena orang daerah kelak akan lebih merasa pertama sekali sebagai orang Indonesia, dan baru kemudian merasa sebagai orang daerah, kebanggaan itu berubah menjadi kebanggaan nasional.

Mengenai fungsi BD sebagai sumber galian istilah baru BI, hal ini perlu dipertanyakan. Bahkan sekarang, yang tampaknya mengemban peran itu ialah bahasa-bahasa mayor, tertentu saja. Bahasa minor praktis tidak dipakai sebagai “bahasa sumber.”

7. Penutup

Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik beberapa inferensi sebagai berikut:

- (1) Yang memegang peran penting dalam upaya mempersatukan bangsa adalah BI. Hal ini dimungkinkan karena BI adalah komponen yang penting dari nasionalisme Indonesia. Dengan meningkatkan efisiensi serta presisi BI (melalui perencanaan korpus BI), BI dapat menjadi bahasa yang benar-benar modern yang dapat berfungsi sebagai pencerdas bangsa dan yang memenuhi syarat-syarat bahasa untuk keperluan nasionalisme.
- (2) Bahasa asing (termasuk BING, tentunya) tidak dapat berperan sebagai pemersatu bangsa. Hal ini karena ia tidak dapat memenuhi tuntutan otentisitas, yakni tuntutan bahwa bahasa

kebangsaan Indonesia haruslah yang berasal dari bumi Indonesia agar benar-benar dapat melambangkan kepribadian serta kebudayaan Indonesia. Dari uraian di atas dapat diinferensi bahwa BA, terutama BING, cenderung melemahkan persatuan Indonesia karena bahasa itu berpotensi mengurangi loyalitas orang Indonesia kepada BI.

- (3) BD juga tidak dapat berperan sebagai pemersatu bangsa karena fungsi BD adalah pemersatu para anggota kelompok etnis saja dan cenderung “memisahkan” kelompok etnis yang bersangkutan dari warga Indonesia yang lain. Dengan kata lain, BD tidak dapat melambangkan nasionalisme Indonesia dan implikasinya ia tidak dapat menjadi komponen nasionalisme Indonesia. Namun, BD harus dilestarikan karena ia mempunyai peranan penting di dalam mempertahankan kebudayaan daerah. Cara melestarikan BD: menjaga agar diglosia tidak bocor.

Jika dikatakan bahwa bahasa yang mempunyai potensi untuk mempersatukan bangsa Indonesia adalah BI, pertanyaan yang timbul adalah bagaimana kita dapat mengoptimalkan perannya. Ini adalah soal strategi. Mengingat bahwa yang dapat mengganggu peran BI itu adalah BING dan BD, sesuatu harus dilakukan dengan hati-hati terhadapnya.

Untuk BING, yang dapat kita kontrol adalah pengajarannya di sekolah. Satu hal yang perlu dipertanyakan adalah perlukah mengajarkan BING di tingkat SD atau bahkan di TK? Apakah maslahatnya lebih besar dari biayanya, terutama biaya sosiokultural alih-alih biaya moneter? Barangkali akan lebih baik jika kita membenahi pengajaran BING di tingkat SMP dan SMU agar hasilnya sesuai dengan harapan di dalam konteks globalisasi.

Untuk pelestarian BD, strategi yang dapat kita ambil adalah membuat gerakan atau kampanye berbahasa daerah agar tidak terjadi ketidaksinambungan BD antargenerasi. Mengajarkan BD di sekolah

tidaklah cukup untuk melestarikannya, seperti yang dicontohkan oleh ketidakberhasilan upaya bahasa Gaelik di Irlandia.

Tiba gilirannya kita menyinggung kebudayaan. Ada banyak definisi kebudayaan. Salah satunya, yang pada umumnya berterima di kalangan antropolog dan ilmuwan sosial, adalah yang menjelaskan bahwa kebudayaan meliputi antara lain: sopan-santun, kebiasaan, kepercayaan, aturan, nilai, cara berperilaku yang berterima, bahasa. Mengembangkan kebudayaan dengan demikian berarti membina anak-anak Indonesia agar mematuhi norma-norma kebudayaan Indonesia sebagai cara hidup orang Indonesia. Karena bahasa adalah komponen penting kebudayaan, membina dan mengembangkan BI secara tidak langsung berarti membina dan mengembangkan kebudayaan Indonesia. Strategi yang baik kiranya adalah dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara terencana, terutama melalui pendidikan. Barangkali di Indonesia perlu dibuat perencanaan kebudayaan (*cultural planning*) berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan bahasa dan perencanaan sosial.

Sebagai penutup, barangkali dapat kita katakan bahwa masalah kecenderungan keretakan bangsa dewasa ini tidak dapat segera dipecahkan dengan menonjolkan peran BI sebagai pemersatu bangsa, betapapun ampuhnya perekat bangsa ini. BI sebagai pengikat persatuan bangsa berguna untuk menjaga persatuan itu. Masalah yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang adalah masalah politis dan karenanya tidak dapat diselesaikan secara linguistik.

Rujukan

- Edwards, John. 1985. *Language, Society and Identity*. Oxford: Basil Blackwell
- Fasold, Ralph. 1984. *The sociolinguistics of Society*. Oxford: Basil Blackwell
- Ferguson, Charles. Diglossia. *Word*. 15 : 325-40
- Fishman, Joshua A. 1993. Reversing language shift : Successes, failures, doubts and dilemmas. Dalam E H Jahr [ed]. *Language Conflict and Language Planning*. Berlin: Mouton de Gruyter. 69-81
- Fishman, Joshua A. 1990. What is reversing language shift (RLS) and how can it succeed? *Journal of Multilingual and Multicultural Development*. Vol 11, No, 1 & 2, 5-36
- Fishman, Joshua A. 1972. *Language and Nationalism*. Rowley, MA: Newbury House
- Garvin, Paul dan Mathiot. 1956/1968. The urbanization of the Guarani language. Dalam Fishman 1968. *Reading in the Sociology of Language*. The Hague : Mouton. 365-74
- Gunarwan, Asim. 1999b. Kedudukan dan tantangan bahasa daerah di dalam abad yang akan datang. Makalah pada Kongres Linguistik Nasional, Jakarta 28-31 Juli
- Gunarwan, Asim. 1999a. Some social meanings of code-switching among Javanese Indonesian bilinguals. Makalah pada Simposium Internasional Kedua mengenai Bilingualisme. Newcastle upon Tyne, UK. 12-17 April
- Gunarwan, Asim. 1999c. Globalisation and the teaching of English in Indonesia. Makalah pada Seminar Internasional RELC. Singapura, 19-21 April
- Gunarwan, Asim. 1996a. Tindak tutur mengkritik dengan parameter umur di kalangan penutur jati bahasa Jawa: Implikasinya pada pembinaan bahasa. Makalah pada Kongres II Bahasa Jawa, Batu, Malang, 23-29 Oktober

- Gunarwan, Asim. 1996b. The speech act of criticizing among native speakers of Javanese. Makalah pada Pertemuan Internasional V, the Southeast Asian Linguistics Society. Eugene, Oregon, 3-5 Mei
- Gunarwan, Asim. 1994. The encroachment of Indonesian upon the home domain of the Lampung language use: A study of the possibility of a minor-language shift. Makalah pada Konferensi Internasional VII Linguistik Austronesia. Leiden, 22-27 Agustus
- Gunarwan, Asim. 1993. Bahasa asing sebagai kendala pembinaan bahasa Indonesia. Makalah pada Kongres VI Bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober – 2 November
- Mackey, William F. 1973. *Three concepts for Geolinguistics*. CIRB Publication. Quebec: Centre International de recherches sur le bilinguisme
- Moag, Rodney. 1982. English as a foreign, second, native and basal language : a new taxonomy of English-using societies. Dalam J B Pride [ed]. *New Englishes*. Rowley, MA: Newbury House. 11-50
- Water, Malcolm, 1995. *Globalization*. London dan New York : Routledge
- Wilasa, Desak, 1999. Bahasa Bali Lumpuh Terlindas Zaman? *Harian NUSA*, 17 Oktober. 11

PERAN BAHASA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA

Oleh:

Prof . Dr. Fuad Abdul Hamied

Universitas Pendidikan Indonesia

Makalah disajikan pada Seminar Strategi Pembinaan
dan Pengembangan Kebudayaan

Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdiknas
22-23 Februari 2000

Tema: Merekatkan Kembali Bangsa Yang Retak

Pada tahun 1991 terbit instruksi Mendagri No. 20 tentang pemasyarakatan bahasa Indonesia dengan pertimbangan pertama bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memperoleh kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan kuat. Dalam hiruk-pikuk masyarakat multilingual seperti Indonesia yang ditandai dengan hidupnya lebih dari 650 bahasa daerah dan di antaranya lebih dari 150 bahasa daerah dipakai oleh penutur di atas 10.000, fungsi dan posisi bahasa Indonesia secara sosio-politis menjadi sangat strategis. Hal ini secara konstitusional didukung pula oleh pasal 36 UUD 1945 yang berbunyi “Bahasa negara ialah bahasa Indonesia.”

Kondisi multilingual atau jamak-bahasa pada bangsa Indonesia merupakan anugerah kekayaan budaya yang sekaligus merupakan tantangan yang memerlukan pemahaman tersendiri. Untuk secara tepat memahami peran bahasa dalam konteks multilingualisme, perlu ada kesepakatan perbedaan yang jelas tentang berbagai konsep misalnya antara nasionalisme dan nasionisme (Fasold 1984). Nasionalisme merujuk pada rasa yang berkembang dari dan mendukung pada nasionalitas; sedangkan nasionisme merujuk pada permasalahan pemerintahan yang lebih pragmatik.

Peran bahasa dalam nasionisme tampak lebih jelas dibandingkan dengan dalam nasionalisme. Terdapat dua ranah yang cukup luas yang didalamnya bahasa menjadi masalah bagi nasionisme: pemerintahan dan pendidikan. Asas kepraktisan dan kehematan sering menjadi pertimbangan untuk memilih medium komunikasi dalam konteks nasionisme ini. Tatkala asas ini menjadi berlebih, berbagai kerisauan muncul karena adanya penanda-penanda disintegrasi antar pengguna bahasa yang berbeda. Peran bahasa dalam nasionalisme lebih musykil. Bersama-sama dengan budaya, agama, dan sejarah, bahasa merupakan satu komponen nasionalisme. Bahasa itu merupakan perekat seseorang atau sekelompok orang dengan masa-jayanya dan juga dengan keotentikannya. Yang terakhir ini yaitu keotentikan bertemali dengan pengembangan bahasa ibu yang secara nasional merata. Keotentikan menurut Fishman (1972) merupakan salah satu fokus disamping unifikasi dan modernisasi yang menandai manifestasi nasionalisme modern. Dalam masyarakat multilingual, keotentikan atau *authenticity* merupakan kekuatan tatkala anggota masyarakatnya penikmat keragaman, dan merupakan malapetaka tatkala keragaman dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan sejenak. Akhir-akhir ini, banyak kajian linguistik terapan yang melihat dampak sosial, ekonomis dan politis dari pembelajaran dan pemerolehan bahasa yang antara lain melahirkan sentuhan terhadap 'power and inequality in language education' (Tollefson 1995) yang dapat dibahas lebih lanjut dalam konteks kesatuan dan persatuan bangsa kita.

Bangsa Indonesia memperoleh banyak anugerah dari Allah SWT selain cobaan-cobaan yang sangat menggigit seperti yang dirasakan dewasa ini. Salah satu anugerah yang menonjol bagi bangsa kita ialah disepakati dan digunakannya bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bahasa nasional, posisi bahasa Indonesia telah diikrarkan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, dan sebagai bahasa negara, posisinya diatur sesuai

dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebangsaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat komunikasi budaya antar daerah. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan pemerintahan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan kemasyarakatan, pemerintahan dan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, (4) bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi (Anas 1993).

Fungsi dan posisi sebuah bahasa dalam satu masyarakat ditentukan oleh masyarakat pemakai bahasa itu sesuai dengan berbagai kenyataan kontekstual pada masyarakat tersebut. Fishman (1972) menampilkan tiga tipe putusan fungsi dan posisi satu bahasa dalam sebuah masyarakat. Putusan tipe pertama muncul sebagai akibat dari konsensus bahwa tidak terdapat peninggalan yang menaungi masyarakat secara menyatu atau nuansa politik masa lalu yang bisa dimanfaatkan yang dapat berfungsi integratif pada tataran nasional. Putusan tipe kedua berdasarkan keutuhan sosiokultural yang telah lama mantap dan bukan tidak jarang berdasarkan batas politis yang agak mantap juga. Terdapat semacam konsensus yang luas dan tidak hanya terbatas pada kelompok elit tentang adanya tradisi utama yang tunggal yang melahirkan hukum, kepercayaan, sastra, kepahlawanan identitas yang sesuai bagi identifikasi nasional. Sedangkan tipe ketiga ditandai oleh kemajemukan yang unsur-unsurnya bersaing satu sama lain. Keberadaan beraneka tradisi yang saling bertentangan menciptakan tensi internal yang terus menerus dan mendorong keterpecah belahan nasional.

Telah dikemukakan di bagian awal tulisan ini bahwa peran bahasa dalam suatu bangsa terkait dengan nasionalisme dan nasionisme-yang pertama merujuk pada perasaan yang bermuara dari dan sekaligus menunjang nasionalitas, sedangkan yang kedua berkaitan dengan permasalahan pragmatik dalam pemerintahan. Dalam konteks nasionalisme bahasa berperan beraneka. Para sosiolinguis menyebutnya antara lain peran ‘contrastive self-identification’ atau ‘unifying and separatist functions.’ Secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa peran ini merujuk ke perasaan anggota masyarakat suatu bangsa bahwa mereka menyatu dan teridentifikasi dengan anggota yang lainnya yang bertutur bahasa yang sama.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multilingual. Dengan mudah kita dapat mengatakan bahwa bangsa yang multilingual akan menghadapi masalah yang kemungkinannya lebih besar ketimbang yang monolingual. Pada tataran praktis, kesukaran komunikasi dalam suatu negara dapat berfungsi sebagai kendala bagi perdagangan dan industri dan bisa mengganggu secara sosial. Ringkasnya, kondisi multilingual dapat menggoda kekokohan nasionalisme. Fasold (1990) dalam menangani permasalahan ini menyarankan dua alternatif: pengembangan bahasa nasional, atau pengembangan nasionalisme yang berakar pada aspek di luar bahasa.

Tatkala ditarik ke lingkup dunia pendidikan, pertarungan antara nasionalisme dan nasionisme ini memunculkan permasalahan tersendiri. Dari satu sisi strategi terbaik dalam hal bahasa bagi pendidikan ialah pemakaian bahasa daerah atau bahasa etnis. Dalam kenyataan, bahasa daerah itu memang bahasa yang telah dikuasai oleh anak-anak pada umumnya sehingga pengajaran di sekolah dapat segera dimulai dengan tanpa harus menunggu siswa mampu berbahasa pengantar yang akan digunakan oleh gurunya. Akan tetapi dari sisi lain, strategi ini sangat berbahaya bagi pengembangan nasionalisme. Tatkala anak-anak memperoleh pendidikannya dalam bahasa daerah, bahasa daerah akan memperoleh posisi yang penting

yang pada saat yang sama dapat melahirkan 'nasionalisme' yang kontransional.

Tatkala kita berbicara tentang peran bahasa sebagai pemersatu bangsa, dalam konteks Indonesia kita tidak bisa mengesampingkan bahasa daerah yang jumlahnya secara nasional di atas 650 buah itu. Pembicaraan tentang bahasa Indonesia dan bahasa daerah merupakan pembicaraan yang sangat konstitusional. Acuan konstitusional kita adalah UUD 1945 Bab XV, Pasal 36 yang berbunyi, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia", dan penjelasannya yang menegaskan bahwa "di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup". Amanat pada Penjelasan UUD 1945 itu pun dijabarkan di dalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah, misalnya di dalam UU No. 2 Tahun 1989, Bab XI, Pasal 41 yang berbunyi, "bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia" dan untuk bahasa daerah tertuang di dalam Pasal 42, Ayat (1) yang berbunyi, "bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu". Di dalam PP No. 30 Tahun 1990, Bab III, Pasal 7, Ayat (1) disebutkan pula bahwa "pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar" sedangkan Ayat (2) berbunyi, "bahasa daerah dapat digunakan sebagai pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan".

Seorang sosiolinguist yang bernama Trudgill (1981) mengemukakan sebuah eksperimen yang dilakukan di Amerika Serikat tentang pengidentifikasian tuturan penutur kulit hitam dan putih yang telah direkam terlebih dahulu. Pengidentifikasi ternyata salah dalam

menentukan apakah penutur itu kulit putih atau kulit hitam, karena penutur kulit putihnya telah hidup sepanjang hayatnya di lingkungan orang kulit hitam, sedangkan penutur kulit hitamnya telah dibesarkan dalam lingkungan yang jarang bersentuhan dengan kulit hitam lainnya. Trudgill melihat ada sekurang-kurangnya dua hal penting dari kenyataan tersebut-pertama, kedua ragam itu sedemikian rupa berbeda sehingga mudah diidentifikasi; dan kedua, perbedaan pada kedua kelompok tuturan tersebut sepenuhnya merupakan hasil dari tingkah laku yang dapat dipelajari. Tidak ada landasan rasial atau fisiologis yang bisa secara otomatis membedakan ragam tuturan seseorang atau sekelompok orang.

Munculnya beraneka ragam bahasa dalam satu masyarakat bahasa melahirkan perlunya kebijakan bahasa atau sering disebut juga politik bahasa. Kebijakan bahasa itu dapat ditampilkan secara eksplisit dan dapat pula dikembangkan secara implisit saja. Apapun bentuk kebijakan bahasa itu, tujuannya pasti ada. Dalam hal ini, McKay dan Hornberger (1996) mengamati adanya dua karakteristik tujuan kebijakan bahasa itu: (1) tujuan yang bertemali dengan bahasa, dan (2) tujuan yang termotivasi secara politis dan ekonomis. Dalam hal tujuan yang bertemali dengan bahasa, tiga jenis kebijakan dapat diidentifikasi: (1) kebijakan alih bahasa, (2) kebijakan pembinaan bahasa, dan (3) kebijakan pengajayaan bahasa. Secara mudah dapatlah dikatakan bahwa kebijakan bahasa itu akan ditentukan antara lain oleh cara pandang terhadap keanekaan bahasa. Sebagaimana sering dikemukakan dalam diskusi sosiolinguistik, keanekaan bahasa itu dapat dilihat sebagai masalah, hak azasi, dan atau sumber daya.

Tujuan kebijakan bahasa yang bersifat politis adalah tujuan yang mengupayakan pemanfaatan pemakaian bahasa bagi peningkatan pembentukan bangsa. Kebijakan bahasa, khususnya perencanaan bahasa, biasa dilakukan bukan saja sebagai alat pemecahan masalah komunikasi di dalam hiruk-pikuk keanekaan bahasa, tetapi juga sebagai alat yang mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam konteks Indonesia dapatlah dikatakan bahwa keanekaan bahasa ini merupakan mozaik yang dihiasi dengan adanya ratusan bahasa daerah itu. Bila salah satu bahasa itu disingkirkan maka mozaik yang indah itu akan pudar kilauannya.

Kebijakan bahasa dapat bertujuan dengan motivasi ekonomis seperti tujuan komunikasi dan pemasaran dalam perdagangan internasional. Berbagai kasus pada berbagai negara lain dapat kita amati dengan saksama. Orang Australia misalnya telah berupaya mempromosikan pengertian bahasa asing untuk memperbaiki komunikasi dengan teman usahanya yang bertutur bahasa Cina, Indonesia, Jepang dan Korea. Di Quebec promosi bahasa Perancis bertemali dengan perubahan kebijakan bahasa dan diperkirakan menghabiskan dana 100 juta dolar Kanada setiap tahunnya. Di Jerman seseorang tidak bisa menjadi direktur cabang sebuah bank tanpa diterima oleh Kantor Federal Supervisi Usaha Perbankan di Berlin. Meskipun ujiannya berfokus pada isi ketimbang pada bahasa, ujian tersebut memaksa pelamar untuk mahir dalam bahasa Jerman.

Masih ada pertalian dengan tataran ekonomis, pada tahun 50-an muncul teori berpengaruh yang menghubungkan antara bahasa dengan keberhasilan pendidikan (ujung-ujungnya bertemali dengan sukses secara ekonomis) dengan membedakan *restricted code* dari *elaborated code*. Ragam *elaborated* dianggap mempunyai kompleksitas sintaktik yang lebih besar. Ragam ini menjadikan makna lebih eksplisit. Makna terletak pada teks, bukan pada konteks. Ragam ini diyakini terperoleh melalui sosialisasi ke dalam lingkungan dan struktur keluarga. Kegagalan anak-anak sekolah kelas pekerja dinyatakan dalam hubungannya dengan ketunaan akses terhadap ragam *elaborated* tadi.

Banyak pihak yang berpendapat bahwa teori ini berimplikasikan perlunya pengajaran *elaborated code* terhadap kelompok yang tidak beruntung, jika mereka diharapkan berhasil dalam kehidupannya. Teori ini kemudian dikenal dengan sebutan teori defisit.

Di Amerika Serikat pendidikan kompensatoris dicanangkan untuk memberikan pengalaman pengganti bagi anak-anak tak beruntung dan memberikan pajanan bagi mereka terhadap budaya kelas menengah. Linguis yang menyerang teori defisit berargumentasi bahwa kelompok yang berbeda itu mempunyai cara yang berbeda dalam menggunakan bahasanya, dan bahwa tidak ada bahasa yang defisit (Romaine 1994). Ragam non-baku secara struktural sama rumitnya dan juga taat asas seperti halnya ragam baku. Begitu juga ragam non-baku mampu menyatakan argumentasi logis sebagaimana ragam baku. Akan tetapi, kemasukakalan hampir selalu dikaitkan dengan bahasa kelas menengah hanya karena anak-anak kelas menengah berhasil dalam persekolahannya.

Dalam masyarakat yang multilingual, berbagai bentuk tingkah laku berbahasa bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan, bisa juga menjadi provokator yang dapat menceraiberaikan masyarakat tersebut. Persoalan kecil tetapi musykil dalam kehidupan berbangsa dan berbahasa bersinggungan dengan hipotesis stereotipe seperti yang diketengahkan oleh Williams (1970). Hipotesis ini menyatakan bahwa "one's evaluational reactions to speech are a stereotyped or generalized version of his attitudes toward the users of that speech" (p. 381). Dalam bahasa yang sederhana hipotesis ini menunjukkan bahwa kita mengaitkan jenis, tuturan dengan jenis orang. Jenis tuturan itu bisa berbentuk bahasa itu sendiri atau dialek dan ragamnya. Penyetereotipean ini berpengaruh terhadap tingkah penutur dan penyimak dalam suatu perbincangan-bagaimana masing-masingnya mempersepsi pesan yang lainnya, apa harapan yang bisa dipegang dari yang lainnya, dan lain sebagainya. Gejala berbahasa ini ujung-ujungnya akan berdampak pada pembinaan struktur sosial.

Berbagai permasalahan kebahasaan yang dibahas di atas menggambarkan kompleksitas kebahasaan dalam konteks bangsa Indonesia yang berkehendak rekat dan kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa. Kondisi yang multilingual memusykilkan pengokohan nasio-

nalisme bangsa kita. Semangat tampil beda dan berkebebasan yang cenderung melampaui takaran menjadi kontraproduktif terhadap pembinaan bahasa nasional. Tambahan pula terbitnya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah bila tidak ditakar dan ditalar secara sepatutnya dapat pula menjadi faktor penyulit bagi pemantapan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang membina persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikianlah, bahasa itu adalah sistem simbol yang arbitrer yang diterima dengan konsensus oleh penuturnya. Penerimaan ini adalah simbol kebersamaan penutur bahasa yang sama. Bahasa adalah alat komunikasi dan interaksi antara para penuturnya. Kepemilikan alat ini memberi identitas bersama kepada pemakai bahasa tersebut sehingga memperkokoh keutuhan para pemakai bahasa tersebut. Cara meresepsi dan memproduksi bahasa merupakan penanda spesifik bagi individu atau kelompok bahasa tersebut sehingga untuk hidupnya sikap saling memahami di antara anggota masyarakat terutama masyarakat yang multilingual diperlukan pemahaman bersama akan adanya perbedaan berbahasa. Sekali lagi bahasa itu adalah alat, dan baik buruknya sebuah alat banyak ditentukan oleh pengguna alat tersebut. Apakah bahasa akan menjadi alat pemersatu atau pemecah-belah bangsa ini ditentukan sebagian besarnya oleh kita sendiri sebagai pemanfaat bahasa itu.

Daftar Bacaan

- Anas, A. 1993. *Peran Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa*. Pokok-Pokok Pengarahan Menko Kesra pada Kongres Bahasa Indonesia VI. Jakarta, 28 Oktober - 2 November 1993.
- Dirjen Sospol Depdagri. 1992. *Instruksi Menti Dalam Negri* Nomor 20 Tahun 1991 tentang Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam Rangka Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

- Fasold, P. 1984,1990. *The Sociolinguistics of Society*. Cambridge, Mass.: Basil Blackwell, Inc.
- Fishman, J.A. (ed.). 1972 *Language in Sociocultural Change*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Mahsun. 1999. *Bahasa Daerah sebagai Sarana Peningkatan Pemanfaatan Kondisi Kebhinekaan dalam Ketunggalikaan Masyarakat Indonesia: ke Arah Pemikiran dalam Mereposisi Fungsi Bahasa Daerah*. Makalah Seminar Politik Bahasa, Cisarua, Bogor, 9-11 November 1999.
- McKay, S.L. & Hornberger, N.H. (eds.). 1996. *Sociolinguistics and Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pateda, M. 1993. *Masa Depan Bahasa Daerah dalam Kaitannya dengan Pembinaan Bahasa Indonesia*. Makalah Kongres bahasa Indonesia VI. Jakarta, 28 Oktober - 2 November 1993.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (tanpa tahun penerbitan). *Bahasa Daerah di Indonesia*.
- Romaine, S. 1994. *Language in Society, An Introduction to Sociolinguistics*. Oxford: Oxford University Press.
- Tarno. 1988. *Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Daerah-Daerah Pinggiran*. Makalah Kongres Bahasa Indonesia V, Jakarta, 28 Oktober - 2 November 1988.
- Tollefson, J.W. (ed.) 1995. *Power in Equality in Language Education*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Trudgill, P. 1974, 1981. *Sociolinguistics: An Introduction*. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books Ltd.
- UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Williams, F. (ed.). 1970. *Language and Proverty: Perspectives on a Theme*. Chicago: Markham Publishing Company.

MENGALAMI SEJARAH

Oleh: Kuntowijoyo

Pengantar

Dalam menghadapi disintegrasi bangsa, sewajarliah kalau orang menengok pada peranan sejarah sebagai salah satu harapan untuk melawan kecenderungan itu. Lebih tegas lagi: peranan pengajaran sejarah. Mengapa demikian? Sebab, *accepted history* kita mengatakan bahwa setidaknya ada empat hal yang dapat menjadi perekat bangsa. Keempatnya ialah satunya jaringan perdagangan di masa lampau, satunya penggunaan bahasa yang sejak 1928 kita sebut sebagai Bahasa Indonesia, satunya imperium Hindia-Belanda sesudah ada *Pax-Neerlandica*, dan satunya pengalaman bersama sebagai bangsa Indonesia sejak 1945.

Karena gejala disintegrasi itu maka nampak bahwa pengajaran sejarah nasional telah gagal dalam membentuk generasi baru yang *sadar sejarah* atau *peka sejarah*. Tidak ada angka resmi, tetapi dapat diperkirakan bahwa pendukung separatisme di Aceh, Riau, Makasar, dan Papua kebanyakan adalah generasi muda, di bawah 30 tahunan. Generasi muda yang tidak mempunyai kesadaran sejarah (*history consciousness*) atau kepekaan sejarah (*sense of history*) itu pastilah disebabkan oleh pengajaran sejarah yang salah. Memang meskipun tidak melulu kesalahan pengajaran sejarah harus diakui bahwa ada yang salah dalam pengajaran sejarah nasional di sekolah-sekolah kita. Karenanya, makalah setrospektif ini akan menekankan pengajaran sejarah sebagai sebuah *proses* berbeda dengan cara lama yang menekankan *hasil*, dengan maksud ada tindak lanjut berupa kebijakan dan tindakan baru sehubungan dengan pengajaran sejarah itu.

Pengajaran sejarah hanya bertanggungjawab pada prosesnya, tidak pada kelanjutan hasilnya. Ada banyak faktor lain yang mempe-

ngaruhi kesadaran dan kepekaan sejarah di luar kelas, pasca sekolah, di dalam masyarakat. Di antaranya ialah akumulasi pengalaman dan pengalaman traumatis dari masyarakat. Untuk Aceh, misalnya, akumulasi pengalaman masyarakat ialah pembagian keuangan dan kekuasaan yang tidak adil antara Pusat dengan Daerah praktis sejak 1950-an, padahal sumbangan Aceh kepada RI baik materiil maupun non-materiil tak terhitung jumlahnya. Pengalaman traumatis waktu DOM dan pelanggaran HAM yang luar biasa telah terjadi di sana. Pengalaman-pengalaman itu ternyata sangat besar pengaruhnya terutama pada generasi mudanya. Kiranya, dengan beberapa perbedaan, akumulasi pengalaman yang mengecewakan dan trauma sejarah itu terjadi juga di daerah-daerah lain dengan gejala separatisme.

Maka kita berpendapat bahwa pengajaran sejarah sebagai proseslah yang dapat diotak-atik (*manipulable*), sementara hasilnya terserah pada perkembangan selanjutnya. Dengan kata lain, kita dapat memperbaharui pengajaran sejarah agar supaya lebih efektif. Demikianlah, makalah ini berusaha ke arah pembaharuan itu. Sebagai konsep yang akan menjadi payung umum usaha-usaha kita ialah konsep tentang *mengalami sejarah*, kata kerja aktif ini dipakai untuk menekankan bahwa pengajaran sejarah adalah *proses*. Jadi bukannya pengalaman sejarah, kesadaran sejarah, atau kepekaan sejarah yang merujuk kepada *hasil* sebagaimana kita kerjakan selama ini.

Mengalami Sejarah

Orientasi dari GBPP Kurikulum 1994 maupun Suplemen GBPP 1999 untuk SD/MI, SLTP/MTs, dan SMU/MA ialah pada PB (Pokok Bahasan) alias pada materi pengajaran. Penghilangan, perubahan dan penambahan terjadi pada materi. Pengajaran sejarah di sekolah berupa pemberian sejumlah pengetahuan sejarah dengan menghafal peristiwa, tokoh, satuan-satuan sejarah (kerajaan, negara, lembaga), dan perkembangan serta perubahan (masyarakat, isme-isme, iptek).

Memang, tanpa pengetahuan yang memadai tentang materi pelajar akan gagal masuk ke jenjang berikutnya. Penguasaan materi yang baik di tingkat bawah berarti sukses di tingkat atas. Muara pengajaran sejarah ialah persiapan masuk UMPTN. Lebih-lebih untuk masuk ke Jurusan Sejarah (menjadi sarjana sejarah) penguasaan materi sejarah siap-saji sangat menentukan.

Namun, kiranya orientasi pada materi itu perlu diubah. Orientasi pada materi berarti orientasi pada hasil. Pengajaran sejarah perlu diubah dari orientasi pada *hasil* ke orientasi pada *proses*. Perubahan konseptual ini sifatnya mendasar, dan akan mempengaruhi komponen-komponen pengajaran lainnya, baik secara konseptual, implikatif, maupun praktis. Perubahan konseptual akan berupa *memanusiawikan pengajaran*, perubahan implikatif akan berupa *penjenjangan pengajaran* dan *integrated curriculum*, dan perubahan praktis akan berupa perubahan dalam *instrumentasi pengajaran*.

Kalau semula pengajaran sejarah dianggap berhasil bila pelajar *mengetahui*, *hapal*, *ingat* fakta sejarah, kemudian di masa depan pengajaran sejarah akan dianggap berhasil bila pelajar *mengalami* fakta sejarah. Karenanya, perubahan orientasi ini memerlukan peran aktif dari pengajar maupun pelajar. Pengajar (buku, instrumen) dituntut untuk dapat *menghadirkan* fakta sejarah di depan pelajar seolah-olah fakta sejarah itu hadir di depan mata. Sebaliknya, pelajar dituntut untuk dapat *menghayati* (*envile*), *hidup dalam* fakta atau menyatu rasa (empati) dengan fakta sejarah.

(1) *Memanusiawikan Pengajaran*. Kita sudah banyak tahu tentang *humanistic education*, *affective education*, dan *humanizing the classroom*. Pokok dari pendidikan yang manusiawi ialah digantikannya *task-centered education* oleh *person-centered education*. Selama ini sistem pendidikan dasar dan menengah kita menganut *task-centered education*. Ebtanas, UMPTN, tes betul/salah, dan evaluasi *multiple choice* adalah tanda-tanda dari pendidikan yang berpusat pada tugas.

Tugas kita di masa depan ialah mengubah sistem pendidikan itu. Perubahan sistem pendidikan itu akan berpengaruh langsung kepada cara mengajar, termasuk pengajaran sejarah. Dalam hal pengajaran sejarah, kita akan memilih *model pengembangan moral* yang akan kita sesuaikan dengan penjenjangan sekolah-sekolah kita sebagaimana dituturkan sesudah ini. Perkembangan moral itu ialah *moral individual*, *moral kolektif*, dan *moral universal*.

Moral individual. Untuk pelajar SD yang masih dalam taraf mencontoh seorang idola, pengenalan terhadap individu yang patut menjadi model sangat tepat untuk jenjang sangat awal ini. Dalam tahapan ini pelajar sedang asyik dengan *diri-sendiri*, mempunyai egosentrisme. Setiap tuturan sejarah adalah sebuah model dari kepribadian/sifat/tindakan individual yang dapat dicontoh oleh pelajar. Tokoh pahlawan adalah model dari *amar makruf, nahi munkar*, dan kesanggupan untuk menderita. Perintis kemerdekaan dapat menjadi contoh tentang kegigihan, keuletan, ketekunan, kesabaran, dan optimisme. Dari sejarah perang sejarah dapat mencontoh tentang keberanian, pengorbanan, dan keikhlasan. Dari sejarah ekonomi dapat ditampilkan seorang pengusaha untuk contoh tentang hidup hemat, usaha keras, dan kedermawaan. Demikian pula tokoh-tokoh kebudayaan, seni, sastra, ilmu, dan pendidikan. Kiranya, terlalu banyaknya tokoh-tokoh politik (raja, pahlawan nasional perintis kemerdekaan) diperkenalkan untuk jenjang ini dan selanjutnya, menyebabkan pelajar mempunyai gambaran seolah-olah yang disebut tokoh mestilah tokoh politik. Karenanya, tidak bisa disalahkan kalau di kemudian hari mereka hanya punya *political mindedness* lebih dari lainnya.

Moral kolektif. Diharapkan dalam usia SLTP para pelajar sudah mempunyai persepsi tentang satuan-satuan (organisasi,

masyarakat, negara, hukum, agama, jaringan perdagangan) *di luar dirinya*. Simpati, peran pasif, dan peran aktif ke dalam satuan-satuan kolektif, seperti berbagai macam gerakan (buruh, tani, pemuda) dapat dimulai setelah pelajar keluar dari SLTP. Pengajaran sejarah dengan penekanan pada nasionalisme dan patriotisme (atau sebaliknya kebencian terhadap kolonialisme dan imperialisme) akan efektif di jenjang ini.

Moral Universal. Pengajaran sejarah tentang prinsip-prinsip abstrak, seperti keadilan, HAM, persamaan derajat, kemerdekaan, cita-cita kemajuan, demokrasi, dan pluralisme akan dengan baik dipahami untuk pelajar SMU. Politisasi pengajaran sejarah oleh penguasa akan dapat digagalkan oleh semangat pluralisme. Sebaliknya, cara berpikir yang rasional dapat tumbuh. Misalnya, pengajaran sejarah tentang Revolusi Industri di Eropa (kemudahan dan dialokasi sosial) akan membuat pelajar bertanya-tanya tentang industrialisasi dan akibat-akibatnya di Indonesia.

- (2) *Perjenjangan Pengajaran*. Selama ini tidak ada perjenjangan pengajaran sejarah, yang ada hanya sebuah rentang. Masing-masing jenis sekolah (SD, SLTP, SMU) merupakan rentang dari mudah ke sukar. Dengan kata lain, antara jenis yang satu dengan lainnya tidak ada perbedaan kategoris. Keadaan ini harus diubah. Kita menginginkan penjenjangan dengan perbedaan kategoris antar jenjang. Untuk itulah tahapan kognitif dapat kita pakai sebagai cara penjenjangan itu. Di sini kita memberanikan diri untuk memodifikasi pemikiran Piaget tentang *cognitive stages* dan menyesuaikannya dengan penjenjangan sekolah-sekolah kita SD (umur 6-12 tahun), SLTP (umur 12-15 tahun), dan SMU (umur 15-18 tahun).

Untuk pelajar SD yang masih dalam tingkat *concrete operational stage* yang diperlukan ialah pengenalan tokoh, peris-

tiwa, benda-benda lain yang konkrit, yang kasat mata. Dalam tahap inilah pengenalan tentang *the what* harus dimulai. Tujuan pengenalan itu ialah *mencintai*, persis seperti kata pepatah, “Tak kenal maka tak sayang”. Tahap inilah yang dalam buku saya *Pengantar Ilmu Sejarah* disebut sebagai tahap *estetis*.

Untuk pelajar SLTP yang dalam tahap *first formal/abstract operational stage* yang diperlukan ialah pengenalan secara deskriptif kronologis (*the how*) mengenai lembaga-lembaga (ekonomi, sosial, politik, budaya, iptek) yang tidak terlalu abstrak. Tujuannya ialah *mengetahui* perkembangannya. Tingkatan inilah yang saya sebut dengan tahap *etis*. Perhitungannya ialah kalau seseorang sudah mengikuti wajib belajar sembilan tahun dia akan sanggup mengetahui lembaga-lembaga, seperti ormas, partai, LSM, dan negara. Seseorang yang telah melampaui tahap *etis* (tamat SLTP) diharapkan dapat berpartisipasi dalam masyarakat, negara, dan solidaritas sosial dengan cara sehat.

Untuk pelajar SMU yang dalam tahap *first formal/abstract operational stage* diperlukan pemahaman tentang kausalitas sejarah (*the why*) dan bermacam interpretasi tentang fakta sejarah. Tingkatan inilah yang disebut tahap *kritis*, sebab dengan kritis pelajar memahami fakta sejarah. Pelajar yang telah tamat dari SMU diharapkan dapat hidup secara demokratis, mengapresiasi pluralisme, toleran terhadap perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, serta dapat membedakan sejarah dari mitos.

- (3) *Integrated Curriculum*. Pengajar sejarah biasanya mengeluhkan kurangnya jam pengajaran, padahal materi sejarah begitu luas. Jam mengajar resmi itu bisa diramalkan akan semakin berkurang, mengingat begitu banyaknya “titipan” yang semuanya sangat penting. “Titipan” mengenai kesadaran lingkungan hidup, misalnya, rasanya sekarang menjadi permasalahan yang terlalu

penting untuk ditinggalkan: danau mongering, sungai tercemar, industri berlimbah, hutan dibabat, terumbu karang menipis, hutan mangrove habis, abrasi pantai, polusi udara, menipisnya ozone, hasil laut berkurang, dan sebagainya. Pengajaran sejarah akan semakin berkurang waktunya, jika semua “titipan” itu dikabulkan. Sejarah yang membicarakan masa lalu tidak akan pernah menjadi prioritas, sebab kita menghadapi masa kini dan menuju ke masa depan. (Masih terngiang-ngiang di telinga Presiden Gus Dur bilang “Historis? Prekk!” Semoga itu hanya gaya, dan bukan substansi). Pengajaran sejarah harus “tahu diri”, dan tidak menuntut terlalu banyak dari jam sekolah. Sebenarnya, kekurangan waktu bisa diatasi dengan adanya *integrated curriculum*.

Khusus mengenai pengajaran sejarah kiranya sejarah bisa dititipkan di mana saja, termasuk ke dalam ilmu-ilmu alam dan matematika bila sejarah ilmu akan dibicarakan. Akan tetapi, lebih khusus lagi pengajaran sejarah nasional dapat diintegrasikan ke dalam ilmu-ilmu sosial, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Seorang Pengajar Bahasa Indonesia dari semua jenjang dapat mengintegrasikan dengan mudah pengajaran sejarah dengan mata ajaran yang diampu. Yang diperlukan ialah koordinasi. Dengan cara ini keluhan mengenai terbatasnya waktu dapat diatasi. Kita dapat membayangkan bahwa untuk SD biografi seorang tokoh sejarah, pelayaran orang Bugis, dan kisah-kisah perang yang diajarkan melalui pengajaran Bahasa Indonesia akan lebih fun dan sekaligus bermanfaat daripada pengajaran Bahasa Indonesia dengan tokoh anonim, seperti Si Badu, Si Maryam, dan Si Udin.

- (4) *Instrumentasi Pengajaran*. Sekarang ini pengajaran sejarah terlalu tergantung kepada text-book dan kemampuan guru membawakannya secara lisan yang sangat terbatas jamnya. Instrumen-instrumen pengajaran itu perlu dilengkapi meskipun kita sangat

sadar akan terbatasnya anggaran pendidikan. Secara ideal kita dapat menambahkan instrumen-instrumen *in-door* dan *out-door* menjadi media pengajaran, seperti buku-buku bacaan, novel sejarah, poster, slide, tape, film, diorama, boneka, permainan simulasi, kunjungan ke museum, dan kunjungan ke tokoh sejarah. Dengan penambahan instrumen pengajaran ini tentu gairah belajar meningkat, sementara keluhan dari pihak guru tentang kurangnya jam mengajar tidak perlu terjadi.

Penutup

- (1) Konsep “mengalami sejarah” itu kedengarannya sangat bagus. Akan tetapi, ia masih meninggalkan pertanyaan tentang evaluasi. Bagaimana “mengalami” dapat dievaluasi? Karenanya, hanya dengan bantuan ahli pendidikan, para guru, sejarawan-pendidik, dan para sejarawan lain, konsep ini akan bisa berjalan. Kita menginginkan adanya PPG Sejarah, di mana konsep ini dapat disosialisasikan.
- (2) Nanti kalau otonomi daerah sudah benar-benar berlaku, dan pendidikan dasar dan menengah diserahkan ke daerah, nasib pengajaran sejarah tentu berbeda dengan usulan kita.

Jakarta, 23 Februari 2000

Catatan : Karena isteri saya, Susilaningih, terlibat dalam pemikiran awal makalah ini, maka sepanjang masalah psikologi dan pendidikan dia punya “hak bicara” supaya diskusi kita hari ini berjalan dengan lancar.

PERANAN SEJARAH DALAM INTEGRASI BANGSA*

Oleh: Azyumardi Azra**

“... liberal democracy as a system of government had emerged throughout the world over the past few years, as it conquered rival ideologies like hereditary monarchy, fascism, and most recently communism. More than that...liberal democracy, may constitute the “end point of mankind’s ideological evolution”, and the “final form of human government”, and as such constituted the “end of history” (Fukuyama 1992:xi)

Meminjam kerangka dan argumen sentral Fukuyama di atas, Indonesia sejak tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, agaknya juga telah sampai ke “akhir sejarah”. Karena, dengan tumbangnya kekuasaan “fasisme” Soeharto, Indonesia pada akhirnya memasuki masa “demokrasi liberal”, dan diklaim sementara pihak sebagai telah menjadi “demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tetapi, masih menjadi pertanyaan besar, apakah demokrasi liberal yang kini sudah diadopsi merupakan “bentuk final pemerintahan manusia” di Indonesia, karena Indonesia, harus diakui, masih harus menempuh masa transisi sangat sulit, yang belum tentu bisa berhasil ditempuh dengan baik.

Lagi pula, demokrasi liberal yang sedang ditempuh Indonesia dalam masa transisi sekarang bukanlah tanpa kelemahan; meski Fukuyama menyatakan, bahwa bentuk-bentuk pemerintahan yang

* Makalah disampaikan pada Seminar Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan, Dikbud-Depdiknas, Jakarta 22-23 Februari 2000.

** Guru besar sejarah pada Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

lain ditandai kelemahan-kelemahan mendasar dan bahkan *irrationalities*, yang pada gilirannya membawa kepada keruntuhan mereka.

Tetapi, terlepas dari perdebatan teoritis seputar gagasan Fukuyama, jelas bahwa kebangkitan demokrasi liberal di Indonesia agaknya bukan hanya dapat menjadi *milestone* dalam perjalanan historis negara-bangsa Indonesia-jika demokrasi liberal yang diusahakan sekarang berhasil—tetapi juga, ironisnya, telah mendorong terjadinya kemerosotan integrasi bangsa. Bahkan, ancaman disintegrasi nasional, persisnya disintegrasi politik dan disintegrasi sosial terlihat sangat riil. Ancaman disintegrasi politik bisa dilihat dengan meningkatnya aspirasi separatisme di kalangan sebagian masyarakat di daerah tertentu, seperti Aceh, Papua Barat, dan bahkan Riau, untuk bebas dan merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat yang sama disintegrasi sosial terlihat dengan meningkatnya konflik dan kekerasan di antara kelompok-kelompok etnis dan agama di beberapa tempat di Indonesia, seperti di Kalimantan Barat, Ambon (Maluku secara keseluruhan). Apakah ancaman kedua bentuk disintegrasi ini merupakan konsekuensi dan *social cost* yang harus dibayar dalam mencapai demokrasi?

Lebih jauh lagi, euforia politik dan kebangkitan demokrasi liberal juga mendorong terjadinya *reassessment* kritis tentang peranan dan fungsi sejarah bangsa selama tiga dasawarsa terakhir. Terdapat kritik yang cukup tajam dari masyarakat, termasuk dari Mendikbud Juwono Sudarsono, bahwa sejarah Indonesia pada masa Orde Baru telah dijadikan sebagai alat untuk memperkuat status quo rejim Soeharto. Untuk kepentingan dan kelanggengan kekuasaannya, sejarah direkayasa untuk mengagungkan Soeharto. Sejarah dengan demikian, menjadi medium politik untuk glorifikasi Soeharto dalam sejarah Indonesia kontemporer.

Pada saat kebangkitan demokrasi liberal, ancaman atau bahaya disintegrasi politik dan sosial, dan kritisisme terhadap *use and abuse* sejarah, ironisnya sejarah kembali dituntut peranannya sebagai “pe-

mersatu” dan “integrasi” bangsa. Dari sudut akademis, barangkali sah muncul pertanyaan; apakah sejarah harus selalu dibebani tugas-tugas—apalagi yang berkenaan dengan politik—yang pada gilirannya membuat sejarah kembali mengulangi “kesalahan sejarah”, sebagaimana pernah dilakukan rejim Soeharto. Di tengah euforia kebebasan, masih patutkah berbicara tentang peranan sejarah sebagai “pemersatu bangsa?”

Politik: *Use dan Abuse Sejarah*

Bagi negara bangsa (nation-state) Indonesia yang baru terbentuk seusai Perang Dunia II, persatuan dan kesatuan atau integrasi nasional (*national integration*) merupakan salah satu agenda pokok untuk mempertahankan kemerdekaan dan kelanjutan eksistensi negara yang masih lemah. Seperti dikemukakan Pye (1960:150-1), masalah pokok dalam integrasi nasional di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia adalah mempersatukan dan mengintegrasikan ke dalam komunitas nasional berbagai unsur masyarakat dengan budaya dan orientasi politik yang berbeda.

Sayangnya *integrating force* yang dimiliki Indonesia yang baru merdeka itu juga relatif terbatas. Negara-bangsa Indonesia itu sendiri tentu saja merupakan salah satu faktor yang sangat potensial menjadi pemersatu terkuat. Tetapi, potensi ini belum mampu diaktualisasikan dalam waktu yang relatif singkat setelah kemerdekaan. Bahkan, sebaliknya negara-bangsa juga mengalami masalah-masalah yang muncul dari konflik ideologis tentang dasar negara, perebutan kekuasaan dan pengaruh di antara berbagai kelompok politik, dan masih lemahnya birokrasi negara.

▪ Dalam konteks geo-politik, negara-bangsa Indonesia juga belum terintegrasi sepenuhnya. Penjajahan Belanda, dari segi ini, bisa disebut sebagai *blessing in disguise*; karena berkat kolonialisme Belanda, wilayah “Benua Maritim” di Nusantara ini menyatu menjadi

entitas politik yang disebut Indonesia. Tetapi, dekolonisasi atau, sebaliknya integrasi geo-politik Indonesia belum terwujud sepenuhnya, hingga penyerahan “kembali” Irian Barat—Irian Jaya, kini Papua Barat— ke dalam kekuasaan Republik Indonesia pada tahun 1963. Dengan demikian, slogan geo-politik Indonesia, yang mencakup wilayah sejak dari “Sabang hingga Merauke” baru benar-benar aktual setelah penyerahan Irian Barat ke pangkuan Indonesia.

Pada segi lain, budaya nasional—budaya Indonesia-juga berada pada awal pembentukan. Pengalaman warganegara dalam kebudayaan Indonesia masih sangat terbatas. Bahkan sampai tercapainya kemerdekaan kesadaran tentang kebudayaan nasional itu, agaknya baru dimiliki kalangan elit politik dan intelektual. Pengalaman “menjadi Indonesia” sampai akhir 1970-an sulit menyebar secara intens karena hambatan-hambatan transportasi, komunikasi dan bahkan karena keterbelakangan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan sejarawan senior Sartono Kartodirdjo (1982:247), integrasi nasional juga berarti integrasi kultural, yang merupakan paduan dari kontinuitas warisan kultural berbagai masyarakat di Indonesia dengan kultur baru yang merupakan milik seluruh bangsa.

Intensitas pengalaman menjadi Indonesia tertolong dengan penggunaan bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional. Meluasnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sangat membantu integrasi nasional. Karena, ketiadaan bahasa nasional akan mendorong terjadinya konflik kebahasaan, yang pada gilirannya bisa menimbulkan konflik politik berkepanjangan sebagaimana terjadi di sejumlah negara lain yang gagal mencapai kesepakatan tentang bahasa nasional.

Memandang kelemahan-kelemahan dalam berbagai *integrating factors* tadi, tidak heran, sebagaimana dikemukakan Pye (1960:151), bahwa basis integrasi nasional di Asia Tenggara termasuk di Indonesia-adalah kepribadian dan pandangan tokoh-tokoh yang dominan dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam sejumlah kasus, daya tarik pemimpin itu pada intinya bersumber dari kharisma, seperti

jelas terlihat dalam dari Presiden Pertama RI Soekarno.

Sekali lagi meminjam kerangka Prof. Soekarno yang kharismatik dalam rangka mengembangkan integrasi nasional—yang dalam ungkapan Soekarno sendiri disebut “*nation and character building*”—merasa perlu untuk mengkonsentrasikan dan memberikan tekanan khusus dalam pidato-pidatonya yang oratorik itu pada masalah integrasi nasional. Dan sebaliknya, menghindarkan diri dari membicarakan secara terbuka masalah-masalah yang dapat memecahbelah rakyat. Soekarno merasa perlu mengarahkan perhatian warganegara kepada hal yang membedakan negara mereka dengan negara lain daripada perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam negeri sendiri.

Dominannya tokoh sentral dalam kepemimpinan politik dengan segera memberikan peluang besar kepada tokoh yang bersangkutan untuk menggunakan sejarah untuk kepentingannya sendiri dan status quo. Dan sering kali tindakan *abuse* dan manipulasi sejarah ini dilakukan atas nama integrasi nasional, stabilitas nasional dan sebagainya.

Penggunaan dan penyalahgunaan (*use and abuse*) sejarah untuk kepentingan politik personal dan pemeliharaan status quo inilah dilakukan rejim Soeharto. Di sini sejarah telah digunakan sebagai “ideologi”, bukan lagi sebagai “*moral lesson*”, khususnya dalam konteks integrasi nasional. Sejarah, dalam istilah Taufik Abdullah telah menjadi ajang perebutan hegemoni barangkali karena adanya diktum “Siapa yang menguasai kekinian akan menguasai masa lalu, dan siapa yang menguasai masa lalu akan menguasai masa depan” (Abdullah 1999:1). Dalam nada yang sama Asvi Narman Adam berargumen sejarah menjadi ajang pertarungan karena mengontrol masa lalu merupakan bagian dan menguasai masa kini. Pengendalian sejarah pada masa Soeharto dilakukan dengan dua cara, pertama, mereduksi peranan Soekarno, dan kedua; sebaliknya membesarkan peranan Soeharto, seperti “peran sentral” Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949; peran krusialnya dalam kegagalan

Kudeta PKI 30 September 1963 dan penerbitan Super Semar 1966 dan lain-lain (Adam 1999:3-5).

Kontroversi dan gugatan terhadap peran Soeharto dalam sejarah Indonesia agaknya memang sulit dielakkan. Apalagi, seperti argumen Taufik Abdullah, sejarah sebagai gambaran masa lalu yang dianggap penting dan signifikan adalah milik masyarakat, bukan milik apalagi monopoli sejarawan dan penguasa. Karena itu, gugatan yang muncul apakah dari kalangan sejarawan atau masyarakat terhadap periode tertentu dalam sejarah adalah hal yang wajar saja. Bahkan dilihat dari perspektif sejarah sebagai “*academic literature*” merupakan kewajaran jika tidak keniscayaan.

Sumber kontroversi sejarah, tentu saja bukan hanya terletak pada penggunaan atau penyalahgunaan sejarah untuk politik seperti dikemukakan di atas. Tetapi kontroversi bisa muncul disebabkan persoalan memadai atau tidaknya sumber-sumber dan jenis atau corak sumber-sumber sejarah yang tersedia; pendekatan dalam penafsiran; motif-motif, kecenderungan intelektual dan pandangan dunia penulis sejarah, dan sebagainya (ef. Gonggong 1999).

Sejarah dan Integrasi Nasional

Terlepas dari kontroversi dalam episode-episode tertentu dalam sejarah seperti dikemukakan di atas, sejarah tentu saja dapat berfungsi sebagai salah satu faktor integrasi, bahkan lebih jauh lagi nasionalisme dan pembentukan *nation-state* itu sendiri. Kenyataan ini menjadi lebih krusial lagi bagi negara-bangsa Indonesia yang multi-etnis, budaya, dan agama. Di sini pengalaman dan kenangan bersama (*collective memory*) berbagai komunitas di Nusantara sejak masa Majapahit, Sriwijaya, kerajaan-kerajaan Islam sampai masa penjajahan Belanda dan Jepang merupakan pengikat solidaritas yang sangat penting; rasa senasib sepenanggungan dalam kurun sejarah yang panjang, melintasi berbagai perbedaan sosio-kultural yang ada.

Rujukan kepada sejarah dapat mengatasi nestapa yang dihadapi bersama hari ini; untuk secara bersama-sama mencapai kejayaan sejarah di masa depan. Sebagaimana disimpulkan Tibi (1981:121) sejarah merupakan kesadaran nasional dari bangsa itu sendiri untuk mewujudkan masa depan lebih baik.

Masalahnya sekarang untuk konteks Indonesia, masih adalah *sense of common destiny* itu? Jangankan *sense of common destiny*, wacana tentang *common destiny* saja nyaris absen dalam riuh rendah diskursus publik tentang politik Indonesia dewasa ini. Dengan demikian bisa pula diasumsikan, bahwa “nasionalisme” Indonesia berada pada titik terendah karena berbagai *integrating factors* yang ada justru juga mengalami proses.

Meski demikian, pembicaraan tentang peranan sejarah, setidaknya secara teoritis, sebagai salah satu faktor pemersatu bangsa, bukan tidak ada manfaatnya. Pembicaraan tentang masalah ini barangkali, setidaknya-tidaknya dapat menyegarkan kembali tentang potensi sejarah sebagai *integrating factor* dalam negara-bangsa Indonesia.

Sejarah pada dasarnya bisa menjadi sangat berguna untuk membentuk nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Filusuf sejarah Morris R (1947:276ff) berargumen, bahwa mempelajari dan memahami sejarah mungkin tidak dapat menyelesaikan berbagai masalah etis yang dihadapi individu dan masyarakat, tetapi sejarah merupakan prasyarat yang diperlukan untuk memahami masalah tersebut secara lebih baik. Dari segi ini, sejarah memberikan kesempatan kepada manusia untuk memiliki pengetahuan tentang dirinya tentang masalah-masalah yang dihadapinya; pemahaman tentang semua ini sangat penting bagi pembentukan nilai-nilai, dan sekaligus untuk menumbuhkan rasa identitas (*sense of identity*) baik pada tingkat individual-personal maupun komunal-nasional.

Pengetahuan sejarah juga dapat merangsang imajinasi kreatif dan, dengan demikian, memperkaya perspektif individu dengan membuatnya sadar tentang eksistensi orang lain. Di sana sejarah dapat

menghindari individu dari perspektif yang berpusat pada dirinya sendiri (*self-centeredness*) dan sebaliknya, mengembangkan perspektif yang lebih sosial. Pada gilirannya, semua ini dapat membuat individu menjadi warganegara yang lebih sensitif dan sekaligus partisipan aktif dalam masyarakat.

Pada tahap ini, sejarah dapat berfungsi sebagai “pendidikan kewargaan” (*civic education*), yang dapat diberikan melalui lembaga-lembaga pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan kewargaan ini harus dipastikan berbeda dengan Pendidikan Moral Pancasila atau matapelajaran-matapelajaran lain, yang pada masa Orde Baru lebih merupakan indoktrinasi daripada pencerahan, penanaman nilai-nilai etis, dan pembentukan karakter. Hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila sebagai *common ideological ground* bisa dan sepatutnya tercakup dalam pendidikan kewargaan, tetapi dengan pendekatan yang tidak indoktrine dan karena itu, lebih dialogis.

Lebih dari itu, pendidikan kewargaan—dengan menggunakan pengalaman sejarah-semesterinya berorientasi pada rejuvenasi kembali kepada kesadaran tentang *common destiny* yang dikemukakan tadi; memukap rasa senasib sepenanggungan yang mendorong pertumbuhan solidaritas dan pada gilirannya kesetiaan kepada negara-bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia cukup kaya dengan peristiwa-peristiwa dan figur-figur historis yang menjadi sumber inspirasi bagi pembentukan rasa *common destiny*.

Penyajian cita-cita luhur yang implisit dalam berbagai peristiwa sejarah dan diekspresikan tokoh-tokoh historis agaknya merupakan fungsi edukatif terpenting sejarah—*history as moral lesson*. Untuk mencapai tujuan edukatif ini lebih daripada mengajarkan kebijaksanaan politik (*political wisdom*), sejarah hendaklah ditulis dan dibaca dengan semangat intelektual (*intellectual passion*).

Selanjutnya, pendidikan kewargaan—sekali lagi dengan menggunakan pengalaman sejarah—hendaknya juga diorientasikan pada

pertumbuhan dan pengembangan arah dan karakter baru negara-bangsa yang tengah kita rekonstruksi dan reformasi. Keberhasilan dalam mencapai tujuan ini banyak terkait dengan pendidikan melalui—pendidikan kewargaan—untuk memberikan perspektif kepada peserta didik tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik (*good citizenship*) dalam sebuah demokrasi. Dalam kaitan ini, maka subyek-subyek tentang sistem dan perilaku politik demokrasi hendaknya mendapat perhatian khusus. Penulisan sejarah secara interpretif seyogyanya pula dilakukan ke arah ini, tanpa harus memanipulasi data historis dan melakukan indoktrinasi terhadap anak didik justru pendidikan kewargaan dengan memanfaatkan sejarah semaksimal mungkin mesti tetap memberikan ruang bagi munculnya “*creative imagination*” peserta didik.

Bibliografi

- Abdullah, Taufik. 1999 “Perdebatan Sejarah dan Tragedi 1965”. Makalah Seminar Pra-Kipnas Masyarakat Sejarawan Indonesia, Puspipstek Serpong” 8 September 1999.
- Adam, Asvi Warman. 1999, “Kontrol Sejarah Semasa Pemerintahan Soeharto”, Makalah Seminar Pra-Kipnas Masyarakat Sejarawan Indonesia, Puspipstek Serpong, 8 September 1999
- Burns, Timothy (ed) *After History? Francis Fukuyama and His Critics* London: Rowman & Littlefield Publishers
- Cohen, Morris R. 1947. *The Meaning of Human History*, LaSalle, III Open Court
- Fukuyama, Francis, 1992. *The End of History and The Last Man*, New York The Free Press.
- Gilbert, F & SR. Graurbaurd (eds) 1972 *Historical Studies Today*, New York: WW Norton.

- Gonggong Anhar 1999, "Kontroversi dan Dinamika Sejarah Indonesia: Dari Dasar Negara, Serangan Umum sampai G30S/PKI. Makalah Seminar Pra-Kipnas Masyarakat Sejarawan Indonesia, Puspiptek Serpong, 8 September 1999.
- Kartodirdjo, Sartono, 1982. "Pelajaran Sejarah dalam Pendidikan Civics", dalam bukunya, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*, Jakarta: Gramedia.
- Pye, Lucian W. 1960 "The Politics of Southeast Asia" dalam GA Almond & JS Coleman (eds.), *The Politics of Developing Areas*, Princeton. Princeton University Press.
- Tibi, Bassam, 1981. *Arab Nationalism: A Critical Enquire*, New York: St. Martin Press.
- Vaughn, Stephen (ed.) 1985, *The Vital Past Writings on the Uses of History*, Athens : University of Georgia Press.

SEMINAR STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

PENGANTAR DISKUSI

PENINGKATAN APRESIASI BUDAYA BANGSA MELALUI KELUARGA

Sardjono Jatiman.

Peningkatan apresiasi budaya bangsa melalui keluarga tentu saja berangkat dari asumsi bahwa para orang tua dalam masing-masing keluarga cukup memiliki apresiasi terhadap budaya bangsa, sehingga mereka diharapkan dapat menjadi saluran untuk menjadikan anak-anak mereka juga memiliki apresiasi terhadap budaya bangsanya.

Anak adalah produk budaya jaman; demikian sering dinyatakan didalam berbagai kesempatan membahas tentang anak dan permasalahan perkembangan anak, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Pertanyaanya adalah : Siapa yang menentukan budaya suatu jaman yang menjadikan anak bagian dari budaya tersebut. Jawabnya secara sederhana adalah Orang tua atau orang dewasa yang hidup pada jaman dimana anak-anak dilahirkan dan dibesarkan.

Berangkat dari pernyataan tersebut maka di Indonesia kita mengenal anak-anak yang dibesarkan pada masa penjajahan, masa perang kemerdekaan, masa awal kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan anak-anak sekarang yang dilahirkan dan dibesarkan pada masa reformasi. Tentu saja pentahapan tersebut merupakan pentahapan yang kasar dan sederhana. Terdapat banyak anak yang dibesarkan dan dididik dalam dua tahapan atau lebih, dan ada pula yang dibesarkan antar satu tahapan dengan tahapan lainnya.

Disamping tahapan tersebut, suasana dimana anak-anak dibe-
sarkan juga berbeda beda. Banyak anak-anak yang lahir dan dibe-
sarkan dalam suasana yang tenteram dan relatif makmur, dan banyak
pula anak yang dilahirkan dan dibe-
sarkan dalam suasana perubahan
serta keadaan yang tidak menentu seperti situasi sekarang ini.

Perspektif pembahasan tentang anak umumnya selalu berangkat
dari situasi masa kini, dan berdasarkan situasi masa kini tersebut
diprediksi berbagai permasalahan menghadapi masa depannya. Pem-
bahasan semacam ini tentu saja tidak salah, akan tetapi sering pre-
diksinya sangat bersifat hipotetis dan berangkat dari ukuran serta
keinginan mereka yang pada waktu ini menjadi orang tua.

Para Orang Tua selalu ingin generasi selanjutnya sebagai gene-
rasi penerus sesuai dengan yang dikehendaknya. Secara tidak
disadari orang tua telah menjadi generasi yang bersifat otoritarian
terhadap generasi anak anak mereka. Pengertian atau konsep pembi-
naan merupakan bentuk halus dari otoritarianisme orang tua terhadap
anak-anak mereka.

Setiap generasi selalu menginginkan generasi selanjutnya
mengacu kepada dirinya. Harapan ini hanya cocok dalam masyarakat
dimana sebagian besar unsur kebudayaan merupakan tradisi yang
memiliki akar kuat di masyarakat dan perubahan di masyarakat relatif
sedikit dan berjalan sangat lambat. Pada saat ini harapan semacam
itu agak sulit dimengerti oleh generasi anak-anak atau generasi muda,
karena tantangan yang dihadapi generasi selanjutnya tidak sama
dengan tantangan generasi sebelumnya.

Akibat dari titik tolak ini maka anak tetap menjadi objek orang
tua, meskipun dalam slogan selalu dinyatakan anak adalah subjek.

Dalam mengembangkan anak barangkali kita perlu juga mela-
kukan kajian historis terhadap perkembangan anak disetiap generasi.
Dalam kajian ini mungkin perlu juga diungkapkan bagaimana gene-
rasi orang tua pada saat itu memandang generasi anak-anak mereka,
dan kegalauan mereka terhadap sikap dan prilaku generasi anak-

anak mereka yang sekarang ini juga galau terhadap anak-anak mereka. Anak-anak yang dahulu digalaukan oleh orang tua mereka ternyata saat ini telah mampu menjadi generasi yang dapat menghadapi tantangan jaman.

Sebagai ilustrasi mungkin dapat kita gunakan pengalaman bagaimana orang tua generasi dari yang sakarang ini menjadi orang tua. Mereka dapat mengkaji bagaimana dahulu menerima sosialisasi dari orang tuanya.

Ada tahap dimana anak-anak dalam keluarga menerima hampir semua hal yang disosialisasikan oleh orang tuanya; ada tahap dimana anak mulai melakukan penilaian dan ada tahap dimana anak menentang sebagian atau keseluruhan sosialisasi yang diberikan oleh orang tua.

Proses dan petahapan ini sangat dipengaruhi berbagai faktor yang ada baik didalam keluarga maupun diluar keluarga.

Mengharapkan anak-anak memiliki apresiasi terhadap kebudayaan tidak cukup dengan maksud baik dan kemauan serta kemampuan, akan tetapi memerlukan juga sikap empathy terhadap anak-anak dan dunianya. Lebih dari itu dalam pengembangan anak sudah tiba saatnya untuk tidak menggunakan pendidikan baik dilingkungan keluarga maupun diluar keluarga sebagai alat rekayasa sosial.

Empathy terhadap dunia anak-anak pada saat ini nampaknya tidak banyak dimiliki oleh orang tua. Karena tiadanya empathy ini maka banyak anak yang kemudian nampak seperti tidak patuh atau memberontak terhadap orang tua. Hal ini nampak mereka lalu menciptakan *counter culture*.

Di dalam upaya menjadikan keluarga sebagai wadah dimana apresiasi budaya dapat dikembangkan mungkin perlu dikaji kembali berbagai titik tolak dan paradigma yang digunakan dalam interaksi didalam keluarga antara ayah, ibu dan anak-anak.

Mungkin perlu dikaji kembali konsep yang selama ini sering disampaikan oleh para pemimpin bangsa dan orang tua bahwa anak

adalah generasi penerus. Saya berpendapat bahwa anak adalah generasi pembaharu yang berangkat dari sejarah masa lalu. Apresiasi mereka terhadap kebudayaan yang hidup dimasyarakatnya adalah dengan kritis sehingga dapat mengembangkan kebudayaan yang ada menjadi lebih maju.

BUDAYA BANGSA DALAM SOSIALISASI KELUARGA

Imam B. Prasodjo

Dosen FISIP-UI

1. Hampir tak ada satupun negara di dunia pada saat ini yang hidup dengan budaya homogen. Menurut perkiraan terbaru, dari 184 negara merdeka kini memiliki lebih dari 600 bahasa kelompok, dan 5000 kelompok etnik (lihat Laczko 1994; Gurr 1993; Neilsson 1985). Hanya Iceland dan Korea yang sering dijadikan contoh sebagai negara yang relatif secara budaya homogen. Akibat semakin heterogennya masyarakat dalam suatu negara, pertanyaan tentang bagaimana suatu kehidupan dapat dilangsungkan (*what make society possible?*) muncul ke permukaan. Kelompok minoritas dan mayoritas mengalami ketegangan dengan munculnya berbagai persoalan baru seperti masalah hak-hak bahasa lokal/*language rights*, otonomi regional, perwakilan politik, kurikulum pendidikan, dan bahkan mengenai simbol-simbol nasional. Sementara para ahli sosial masih terus bergelut untuk mencari solusi dari permasalahan yang muncul, saat ini tumbuh kesadaran baru bahwa kesadaran nasional (*national self-consciousness*), yakni rasa kesamaan asal-usul (*shared common origin*), status, lokasi, dan aspirasi, bersifat fluktuatif, terkadang dapat menguat ataupun melemah. Tumbuh dan menguatnya identitas lokal maupun identitas baru dalam masyarakat semakin menyadarkan kita bahwa kesatuan kehidupan masyarakat yang heterogen membutuhkan perekat baru, yang bisa jadi perekat yang bukan tercipta akibat dari proses penyeragaman.
2. Di saat berbagai komunitas lokal mengalami proses penyadaran akan pentingnya identitas kulturalnya dan menuntut pengakuan/

penghargaan yang wajar dalam ‘budaya nasional,’ menciptakan situasi yang disebut sebagai tantangan multiculturalisme (the challenge of multiculturalism). Hingga saat ini berbagai cara telah dikenal bagaimana kultur lokal diintegrasikan dalam komunitas politik nasional, yakni dari penaklukan dan penjajahan budaya lokal hingga pada upaya asimilasi total sehingga kultur minoritas melebur ke dalam “ arus utama” budaya yang berkembang. Dalam situasi ini, pertanyaan yang muncul adalah “budaya bangsa” seperti apakah yang harus dibangun dan diapresiasi sehingga secara fungsional dapat berperan sebagai perekat baru dalam kehidupan berbangsa/ bermasyarakat.

3. Di tengah upaya pencarian formula untuk mendapatkan perekat sosial baru dalam menghadapi kehidupan masyarakat yang semakin plural, gagasan multicultural citizenship, sebagaimana dikemukakan oleh Will Kymlicka, mulai tumbuh, yakni gagasan yang mengedepankan pentingnya diberikan dan dilindungi tiga macam hak: a) special group representation rights, b) self government rights, c) polyethnic rights. Dengan ditumbuhkannya tiga hak ini, integrasi bangsa diharapkan akan tumbuh kuat akibat masing-masing kelompok identitas diberi peluang untuk ikut ambil bagian dalam “memperkaya” corak kehidupan nasional dalam masyarakat lebih luas.
4. Proses sosialisasi dalam keluarga memiliki peran penting bagaimana gagasan multi-cultural citizenship dapat tumbuh berkembang. Interaksi dalam keluarga harus menjadi pintu gerbang bagi setiap anak untuk mengenal dan menghargai tidak saja identitas kelompoknya, namun juga identitas kelompok lain. Sosialisasi budaya dari orang tua terhadap anak-anaknya semakin dituntut untuk berperan sebagai wadah pengenalan keragaman budaya yang dimiliki bangsa, sehingga tiap anggota keluarga

muncul kesadaran adanya “komunitas simbolik yang plural” yang menyatu dalam dirinya sebagai identitas bangsanya.

Kerangka Dasar Pemikiran

- 1. Tindakan seorang anak dalam menanggapi suatu situasi tergantung pada bagaimana anak tersebut memberikan “arti” kepada situasi tersebut.** Seorang anak yang baru saja bertengkar dengan adiknya dapat merasa ketakutan sehingga tidak datang saat dipanggil ibunya. “Rasa takut” itu terjadi karena “panggilan ibunya” itu diartikan sebagai tanda bahwa ibunya akan memarahinya. Sebaliknya, kita tidak akan merasa takut datang bila ia menafsirkan bahwa panggilan ibunya itu bukan suatu ancaman.
- 2. Makna dari hal-hal tersebut diperoleh seseorang dari interaksi sosial dengan orang lain.** Seorang anak akan membangun “dunianya” dengan berhubungan dengan orang tua, kakak-adik, kakek-nenek, pengasuh atau keluarga yang lebih luas lagi. Melalui interaksi dengan individu-individu ini, lambat-laun si anak ini akan mulai memahami berbagai “tanda/symbol” yang disepakati bersama (*shared meanings*) dalam lingkungan masyarakatnya. Saat ibunya menempatkan telunjuk di mulut, si anak dapat belajar bahwa tindakan itu adalah tanda yang bermakna “larangan berbicara keras-keras.” Saat orang memelototkan mata, si anak lambat laun dapat memahami bahwa tindakan yang dilakukan orang lain itu berarti “marah” atau “terkejut.” Lebih jauh, iapun mulai mengenal konsep-konsep dasar. Si anak mulai memahami apa yang harus dilakukan saat ibunya berkata “duduk,” “berdiri,” “minum” dan lain-lain. Melalui interaksi, seorang anak belajar memahami bagaimana “memberi makna” terhadap suatu situasi. Melalui interaksi, seorang anak mengenal

“simbol” yang menggambarkan suatu “realitas” tertentu. Semakin banyak berinteraksi, semakin banyak pula si anak itu mengenal simbol-simbol atau semakin pandai anak itu memberi makna terhadap berbagai situasi yang dilihat atau dihadapinya.

3. **Makna-makna yang muncul dari interaksi tersebut, kemudian dibentuk atau dimodifikasi melalui proses interpretasi.** Seorang anak yang memiliki banyak pengalaman berinteraksi, akan mempunyai kemampuan menginterpretasi situasi dengan lebih luas. Seorang anak yang sering membaca buku, akan mempunyai kemampuan menulis yang lebih baik dari anak yang kurang banyak membaca buku.

BACAAN ANAK

1. **Melalui buku, seorang anak semakin luas mengenali konsep-konsep atau simbol-simbol yang berlaku di masyarakat.** Anak diperkenalkan pada berbagai konsep dari yang bersifat kongkrit dan dapat dilihat sehari-hari, sampai pada konsep yang abstrak. Bahkan lebih jauh, melalui buku, seorang anak tidak hanya berkenalan dengan “dunia luar” yang terekam melalui gambar-gambar (contoh: gambar tempat bersejarah), namun dapat juga mengenal secara lebih jelas dengan membaca keterangan-keterangan dalam buku tersebut. Dengan kata lain, buku dapat berfungsi sebagai media yang memperkenalkan keadaan dunia sosial secara “snap shot,” ataupun lebih jauh dapat memperkenalkan pula “story” - yaitu suatu perjalanan suatu peristiwa sejarah.

Dalam pengenalan konsep ini, seorang penulis atau ilustrator buku perlu mempunyai pemahaman tentang karakter dari masing-masing kelompok umur. Jenis tulisan, jenis kertas, jenis ilustrasi dan jenis cerita disesuaikan dengan kelompok umur

anak, karena tiap kelompok umur biasanya memiliki kemampuan interpretasi berbeda. Buku untuk anak-anak yang belum masuk playgroup akan berbeda dengan buku untuk anak TK, SD, atau remaja. Buku untuk anak yang belum masuk playgroup, biasanya mempunyai lembar buku yang tebal dengan warna-warna cemerlang dan biasanya hanya berisi gambar-gambar dengan satu obyek. Buku untuk anak TK, walaupun sebagian besar masih berisi gambar-gambar, tetapi sudah mulai terdapat tulisan. Gambar-gambar akan semakin berkurang dan tulisan semakin banyak sesuai dengan tingkat umur pembaca. Demikian pula, ukuran tulisan juga berbeda-beda berdasarkan umur atau tingkat kemampuan bersimbolisasi. Ukuran tulisan biasanya dimulai dengan huruf-huruf ber-font besar. Semakin tinggi kemampuan anak mengenal simbol-simbol (yakni dalam bentuk huruf-huruf), semakin mudah si anak mengenali simbol/huruf dalam buku.

2. **Bacaan atau buku merupakan salah satu sarana untuk mengajarkan bagaimana “memberikan makna” terhadap peranan-peranan yang terdapat dalam masyarakat.** Misalnya tentang peran ibu dan bapak dalam keluarga, peran dokter, peran arsitektur dan juga peran-peran baru yang ada di masyarakat.
3. **Buku merupakan pembuka wawasan seorang anak.** Semakin banyak kompilasi simbol yang dikenalnya, semakin kaya pula “realitas sosial” yang difahaminya. Dengan membaca buku, anak akan diperkenalkan dengan budaya lain yang tidak pernah mereka kenal, anak akan diperkenalkan dengan jenis-jenis hewan yang tidak pernah mereka lihat dan lain-lain.
4. **Dengan buku, daya imajinasi anak akan berkembang.** Misalnya pada saat istirahat, seorang anak bermain sambil memainkan peran seperti yang di dalam buku yang baru saja diceritakan oleh gurunya. Dengan kayanya perbendaharaan kata dan imajinasi, si anak akan lebih kreatif dan artikulatif.

Sumber Bacaan:

Blumer, Herbert, 1969. Symbolic Interactionism: Perspective and Method. Berkeley: University of California Press.

Huck, Charlotte A, Susan Hepler and Janet Hickman. Children's Literature in the Elementary School. Philadelphia: Harcourt Brace College Publishers.

KREATIVITAS UNTUK PERSATUAN

(Peran Kreativitas Sebagai Pemersatu Bangsa)

Oleh: Putu Wijaya

(INTRO: Saya berbicara sebagai orang lapangan yang sehari-hari bergulat dengan teater, penulisan fiksi dan lakon-lakon kacang di televisi. Tidak untuk menyodorkan sebuah kebenaran, karena saya tidak percaya saya mampu menangkap kebenaran tersebut. Ini hanya sebuah gangguan terhadap saudara-saudara dalam seminar ini, dalam memikirkan tentang persatuan yang kini sedang diguncang oleh semangat perpecahan. Mudah-mudahan tulisan ini memberikan inspirasi.)

Konsep persatuan sudah terjungkir balik di dalam praktek, sehingga ide persatuan menjadi kotor. Persatuan di masa lalu lebih merupakan proses pengingkaran perbedaan, yang akhirnya menciptakan erosi pada satuan-satuan budaya yang memiliki jati diri sendiri-sendiri. Akibatnya adalah kepedihan yang menuntut pembayaran yang mahal.

Sebagai buntutnya, ide persatuan terasa sebagai semacam kolonialisme terhadap kemerdekaan, orisinalitas dan eksistensi historis setiap “satuan budaya”. Akhirnya persatuan berubah kelamin menjadi alat penindasan, dengan panji-panji nasionalnya, persatuan dianggap sudah menggorok satuan-satuan budaya yang beraneka ragam untuk memunculkan satu identitas baru yang salahnya cenderung merupakan perpanjangan dari satuan budaya yang memegang posisi utama. Tiba-tiba di luar perkiraan, semua orang ingin berperang dengan persatuan. Ingin menembak mati ide “bandit persatuan”.

Konsep nasional juga bernasib sama. Bagaimana pun luhurnya ketika diciptakan, mimpi para pahlawan Sumpah Pemuda tersebut, terkontaminasi oleh dominasi satu satuan budaya atau satu golongan kepentingan, yang sudah meminta korban dan pengorbanan dari satuan-satuan yang lain. Masalahnya bukan lagi kebenaran idenya, karena pengertian kolegialnya sudah diwarnai oleh nuansa-nuansa gelap di dalam praktek. Ditambah oleh sikap yang kaku dalam memburu kebenaran ilmiah dari para ilmuwan yang seringkali tidak mempertimbangkan konteks, menyebabkan nasionalisme tampil sebagai penjahat.

Kesatuan pun menjadi momok. Ada paradoks dalam nasionalisme sebagai ide dan nasionalisme yang hidup di dalam praktek, sehingga memerlukan keberanian untuk sementara menghentikan kerancuan itu dengan membekukan istilahnya. Namun yang muncul adalah patriotisme ilmuwan untuk mengingatkan kembali pengertian asli dari ide nasionalisme tanpa memperdulikan apa yang sudah terjadi di dalam perjalanannya secara konkrit. Sehingga terjadilah ketegangan antara pikiran waras dan pikiran faktual yang memuncak jadi pertentangan. Waktu itu kekuasaan menjadi alat pengaman. Banyak orang mengaku bungkam bukan karena sepaham tetapi ketakutan.

Ketika kebebasan berbicara dan berpendapat dikibarkan, ketika demokrasi dipestakan, ketika jatidiri masing-masing kembali memperoleh ruang, tak terelakkan lagi lahir bibit-bibit disintegrasi. Setiap satuan budaya memerlukan ruang bernafas dan bergerak yang lebih otonom. Mereka percaya bahwa seluruh penderitaan selama ini adalah karena ide bersatu dalam persamaan-persamaan yang telah menyiksa perbedaan mereka yang kodrati. Mereka percaya apabila diberikan kesempatan mandiri, mereka akan berkembang dengan dahsyat dalam perbedaan-perbedaannya yang sudah terberantas. Kemerdekaan dikibarkan menjadi adalah segala-galanya. Termasuk merdeka dari persatuan.

Padahal ketika setiap satuan budaya beramai-ramai terpanggil untuk mandiri, sebenarnya sedang terjadi berbagai variasi suara yang saling menunjang untuk menciptakan sebuah simphoni. Dengan kehendak yang sama secara serentak untuk diberikan kesempatan menempuh jalan sendiri yang lain dari yang sudah digariskan, sebenarnya sudah terjadi pemberontakan kepada masa lalu yang sama. Penentangan kepada kezaliman. Pendobran kepada pembunuhan-pembunuhan spiritual. Keinginan untuk hidup, bertindak dan menyuarakan keyakinan yang lain yang lebih cocok.

Sebenarnya yang terjadi bukan perpecahan, tetapi kesamaan gerakan yang berserak. Tetapi karena itu terjadi serentak, ia membuat panik. Padahal kepanikan itu sendiri sebenarnya sebuah peristiwa dahsyat untuk benar-benar memusnahkan segala kekangan masa lalu yang begitu dahsyat. Tak mungkin untuk membebaskan diri dari cara berpikir yang sudah puluhan tahun dibina dan dicekokkan, tanpa tindakan yang dahsyat. Disintegrasi dari titik pikir ini adalah: terapi yang tepat dan kita butuhkan pada saat ini untuk cuci darah.

Saya akan ditembak oleh pejuang-pejuang yang sudah gugur di dalam revolusi kalau berhenti di sini. Saya akan dilabrak dan didemo karena saya sepertinya telah mendukung apa yang selama ini dinobatkan sebagai musuh persatuan. Sementara saya sendiri sedang ditunjuk sebagai salah satu pembicara untuk mempropagandakan persatuan dan kesatuan dalam seminar ini. Tetapi saya juga akan menembak siapa pun kalau menghentikan saya sekarang. Karena ucapan tersebut tidak berhenti di situ. Titik dan alenia bukanlah akhir dari sebuah ucapan, tetapi saat jedah untuk menarik nafas dan menyemburkan pengertian berikutnya yang lebih dahsyat. Sayangnya di situ terlalu sering banyak orang berhenti, di situ banyak orang mati, sementara pengertian itu masih terus hidup dan berubah tanpa sepengetahuan orang yang menyimaknya.

Seluruh fenomena kehidupan, seluruh proses apa pun, tidak bisa dinilai seakan-akan dia sudah berhenti berproses. Bahkan Karl

Marx, Adam Smith atau Darwin, kalau masih hidup sekarang, barangkali sudah akan mengoreksi teori-teorinya sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Bertand Russel ketika masih hidup. Karenanya yang paling tepat adalah memberikan tafsiran kembali kepada seluruh wacana bahkan juga penafsiran itu sendiri, di masa yang lalu. Sebab ternyata seluruh persoalan kita masih terus berkembang dan hidup walaupun sudah kita simpulkan. Untuk menghadapi itu, kita dituntut untuk menemukan interpretasi yang senantiasa memberikan darah segar, walhasil sebuah interpretasi yang kreatif.

Saya memberi tekanan keras kepada “yang kreatif” untuk mengatakan bahwa yang diperlukan bukan hanya interpretasi tetapi kreativitas. Kita, seluruh aspek tindakan kita, termasuk negara serta bangsa sebagai satuan terbesar dari hasil keberkomplotan kita di dalam masyarakat, memerlukan satu kreativitas menyingkapi, sehingga seluruh aspeknya tersingkap. Dengan kreativitas, antara lain apa yang kita namakan disintegrasi, bukan lagi hanya menjadi disintegrasi, tetapi seluruh aspek historis yang secara historis akan menjadi bagian dari dialektika, yang mengalirkan kita ke arah sasaran yang lebih tepat, di millenium ketiga ini.

Dengan interpretasi yang kreatif seluruh keguncangan, termasuk ekonomi yang terpuruk, korupsi yang membudaya, politik yang tidak bermoral, kehausan pada kekuasaan-uang-kenikmatan-syahwat-perang dan termasuk segala bentuk disintegrasi, tiba-tiba menjadi sebuah therapi untuk melabrak kedahsyatan tatanan masa lalu, yang sudah direkayasa oleh raksasa-raksasa, yang tidak mungkin dihancurkan tanpa tindakan yang sama dahsyat dan gilanya.

Sudah terlalu banyak yang terkontaminasi dan salah format selama ini. Bahkan termasuk para intelektual kita yang seharusnya menjadi perangkat lunak yang mengantarkan kita dan menjaga kita untuk tetap pada rel yang benar. Kita sudah jadi kotor bersama-sama karena sejarah ini terlalu hitam. Tak seorang pun di antara kita berhak untuk mengatakan ia sudah tidak ikut bertanggungjawab,

sementara ia adalah bagian dari sejarah. Kita memerlukan seorang pahlawan yang baru dan itu adalah kita semua. Kita bersama-sama harus menjadi pahlawan suka atau pun tidak suka, untuk mendaurlang segala kesalah-kaprahan ini.

Tetapi untuk mendaurlang segala sesuatu yang sudah terlalu ringsek dalam waktu yang cepat, tidak hanya diperlukan seorang presiden yang hebat, jajaran menteri yang tanggap, para PhD dari kampus-kampus legendaris di mancanegara, sistem yang ideal, dukungan seluruh rakyat yang serentak atau doping ekonomi dari semacam IMF atau “dermawan-dermawan” mancanegara yang lain. Juga diperlukan kreativitas dalam penghayatan, untuk menerima segala kenyataan yang ada ini sebagai sesuatu yang masih layak diperjuangkan. Sebagai sesuatu yang bukan saja masih mengandung harapan, tetapi juga memiliki kans besar untuk mencapai “break even”.

Memerlukan kreativitas untuk mengerti, mengapa setelah setengah abad merdeka, kita belum tumbuh bulu serta gigi dan masih saja baru mulai belajar melangkah. Memerlukan interpretasi yang kreatif, mengapa seluruh pengorbanan yang sudah terjadi adalah bagian dari proses pematangan yang tidak kita ketahui masih berapa lagi panjangnya. Penghayatan yang kreatif akan bisa menghayati segala perbedaan yang ada, bukan sebagai bencana, tetapi sebagai satu karunia yang justru menunjukkan kelebihan, bukan kekurangan. Karena setiap perbedaan adalah kelengkapan, setiap halangan selalu menyimpan janji, asal saja kita dapat melaluinya dengan baik. Bahkan kegagalan pun adalah awal dari keberhasilan di masa yang akan datang, apabila kita menerimanya secara kreatif.

Budaya Timur antara lain, sudah mengajarkan kita filsafat “Untung” lewat pelawak “Gepeng” dari Srimulat. Dari “ajaran Gepeng” itu, kita seakan-akan adalah bangsa bodoh yang tidak mengerti matematika dan hukum ekonomi, karena masih saja berteriak untung, dalam setiap kemalangan. Tetapi kalau disimak dengan kreatif, kebodohan itu mengandung kesadaran spiritual yang mencoba meny-

kapi fakta secara filosofis. “Kebodohan” filsafat untung cap Gepeng merupakan sosialisasi dari pemahaman kehidupan untuk menerima fakta dan realita sebagai sesuatu yang konkrit dan sekaligus mengga-saknya dengan sebuah “jab”, sehingga di atas seluruh kegagalan tersebut, ternyata masih ada yang lain yang masih bisa dimanfaatkan untuk hidup bergerak dan berupaya. Ucapan almarhum Gepeng menjadi ajaran rohani yang penting untuk bisa survive. Benar kata Gepeng, dalam segala hal, tetap saja untung bagi mereka yang sudah berhasil mengatasi kesulitannya.

Dalam pengertian untungnya Gepeng, sikap “nrimo” bukan tanda kebodohan dan kemelempeman, tetapi dinamika yang positif, berbaur dengan religiositas yang diungkapkan secara sangat rendah hati dan sederhana, sehingga tidak menakutkan. Karena di dalam cara “Gepeng” menyikapi persoalan, ada unsur mensyukuri segala karuniaNya. Termasuk mensyukuri segala nestapa yang diberikanNya, karena itu dipercayakan kepada kita, yang tidak mungkin terpilih kalau tidak dianggapNya punya potensi sanggup. Tiba-tiba filsafat sepele Gepeng itu - yang tak pernah dilirik oleh kampus mana pun untuk dijadikan disertasi - menjadi kreativitas yang menggosok kemalangan-kemalangan hidup bersinar-sinar cemerlang menjadi keberuntungan yang menakjubkan.

Kreativitas melalui contoh di atas, mungkin terasa sebagai akal-akalan. Tetapi memang benar, kenapa mesti ingkar. Apa bedanya kiat dengan akal bulus, apa bedanya akal dengan tipu-daya? Kejahatan kadangkala juga bisa nampak sebagai kebajikan tergantung darimana melihat dan mengupasnya. Kita punya seabrek contoh dan anekdot dari sejarah untuk itu. Begitu banyak kemustahilan menjadi tidak mustahil karena dijungkir oleh kreativitas dalam menyingkapi.

Ketika kebesaran Columbus sebagai penemu benua Amerika disangsikan, ia cukup mematahkannya dengan sebuah telur. Apa artinya sebutir telur bagi orang lain, tetapi di tangan jiwa yang kreatif, telur menjadi sebuah makna yang besar. Hannibal mengecoh tentara

Romawi yang mengepungnya di sebuah bukit dengan memasang obor di kepala gerombolan sapi liar. Apa artinya obor buat kita, tetapi di tangan Hannibal ia menjadi sebuah sejarah kemenangan. Antonius berbicara kepada rakyat Romawi di depan mayat Julius Caesar sebagai seorang penghiba yang bertanya-tanya, tetapi kemudian pertanyaannya berubah menjadi kekuatan dahsyat yang mengobarkan pembontakan sehingga konspirasi yang mendalangi kematian Caesar, tumbang. Di tangan kita pertanyaan barangkali hanya menjadi alat untuk menyusun sebuah kuis di layar kaca, tetapi di tangan kreatif pertanyaan menjadi senjata nuklir. Petinju Sugar Ray Leonardo, kalah segala-galanya sebelum bertanding melawan petinju legendari Amerika Latin yang sangat macho (saya lupa namanya) tetapi dengan tak-tik yang jitu, menyingkapinya sebagai “wanita”, Leonardo memenangkan pertandingan dan tercatat dalam sejarah tinju yang menakjubkan. Mahatma Gandhi menghentikan perang saudara di India dengan cara mogok makan. Dengan tanpa senjata, orang besar abad ke-20 itu sudah menghentikan darah bertumpahan, hanya dengan sebuah tindakan “mengemis” kreatif yang dahsyat.

Dengan contoh-contoh tersebut, jelas bahwa kreativitas adalah daya dan upaya dari akal budi untuk menciptakan sesuatu yang lain, baru serta berguna dari berbagai hal - baca: kemalangan - yang ada. Kreativitas tidak berarti hanya menciptakan tetapi juga berarti kemampuan menerima apa yang ada dengan begitu rupa, sehingga apa yang ada itu hidup seluruh nuansanya dengan bergemerlapan. Kreativitas juga adalah ketepatan untuk memilih nuansa-nuansa itu sendiri secara akurat, sehingga tercipta sesuatu yang baru, segar dan membudayakan. Dengan kreativitas sesuatu yang kadaluarsa menjadi baru, sesuatu yang menghambat menjadi memacu, kekurangan-kekurangan menjadi kelebihan. Dengan kreativitas, jalan yang buntu berubah menjadi peluang yang sangat kaya. Dan seluruh kebobrokan pun secara menakjubkan berubah menjadi keunggulan. Kreativitas bagaikan ilmu sihir.

Kreativitas adalah karunia kepada manusia dan peradabannya untuk berkelit dalam keadaan yang terjepit secara tak masuk akal dan mengubah dirinya di dalam sekejap dari bahaya-bahaya kemusnahan dan permusnahan. Kreativitas tak terbatas oleh ruang, waktu dan hukum-hukum matematika serta pengembaraan ilmu phisika. Ia seperti sebuah sulapan yang membawa peradaban ke dalam perubahan-perubahan yang serentak dan tak tergantung oleh kekuasaan politik, ekonomi dan teknologi. Ia seperti ilmu gaib di dalam kehidupan dan hati nurani manusia, yang bisa dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang baik - dan dengan menyesal harus diucapkan juga - maupun tujuan yang buruk.

Kita bicara tentang kreativitas dalam hubungannya dengan persatuan bangsa yang sedang mengalami keretakan dan ancaman kehancuran dari cita-citanya untuk bersatu. Kita dapat mengerti betapa dengan mudah lewat kreativitas, kita bisa memandang interpretasi cita-cita persatuan tersebut, sebagai sesuatu yang keliru dan tidak mewakili masa kini. Karenanya adalah sah untuk melawan “cita-cita yang sesat itu” dan memerdekakan diri.

Tetapi dengan kreativitas, kemudian kita pun dengan bebas pula dapat mengatakan bahwa setelah bebas, kita memerlukan kawan-kawan dekat yang mengerti, seperasaan dan sepenanggungan dalam perjalanan panjang peradaban ini. Dan karenanya tidak salah kalau kita merangkul tetangga dan sahabat-sahabat dekat yang mengerti bahasa dan sejarah kita, untuk berjalan bersama-sama dan saling tolong menolong. Untuk menjadi satu satuan dalam bekerja.

Demikianlah tanpa label persatuan dan atribut nasional, akan terjadi sebuah persekongkolan praktis, yang pada hakekatnya adalah penyatuan dari berbagai unsur yang berbeda dan bertolak belakang maupun yang sama, untuk maju bersama menyongsong masa depan. Bukan hanya untuk sama-sama bergembira dan memestakan kebebasan, keadilan, kebenaran, kemanusiaan dan demokrasi tetapi juga untuk mengerang, merintih, menangis bersama-sama. Berkomplot

dalam mengalami penderitaan, mimpi buruk, kheos, dan berbagai rongrongan serta apa yang kini menjadi persoalan yang menakutkan: disintegrasi-yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di berbagai wilayah dunia.

Kita telah bersatu ketika beramai-ramai menginginkan perceraian. Kita sudah bersatu ketika sama-sama tidak mempercayai lagi slogan nasionalisme, kepentingan bangsa dan negara, termasuk keadilan, kebenaran dan demokrasi versi rezim lama. Kita telah bersatu ketika kita sama-sama memikirkan sebuah cara lain yang lebih cocok untuk kita, dalam mengakhiri kesengsaraan yang sudah puluhan tahun melanda. Kita sudah bersatu tanpa kita sadari. Persatuan dan nasionalisme adalah pengertian spiritual yang abstrak yang menjadi sangat salah ketika kita mencoba memvisualkannya atau mementaskannya menjadi sebuah simbol.

Cara menyingkapi yang bisa menyulap segala-galanya adalah salah satu daya dari kreativitas. Kreativitas seperti mesin maha raksasa untuk menjungkir-balikkan pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman. Jangankan hanya apa yang disebut disintegrasi, apa pun dimungkinkan oleh kreativitas, selama ia benar-benar kreativitas. Selama mesin raksasa itu tetap memiliki iman. Karena selama beriman, dia akan selalu terkontrol oleh moralitas yang dipercayai positif. Karenanya kreativitas merupakan senjata terakhir dan sekaligus pamungkas dalam menghadapi jalan buntu. Termasuk kegagalan persatuan.

Dengan cara berpikir yang kreatif persatuan bukanlah tanda ketaklukan tetapi sebaliknya. Persatuan adalah keberkomplotan yang tercipta dalam air bah kemerdekaan dan kebebasan. Nasionalisme adalah panggilan jiwa untuk berdiri dalam satu panji-panji yang bernama Bangsa dan Tanah Air dengan segala macam perbedaan, kekurangan dan kelebihan masing-masing, serta kegembiraan untuk mengenyam seluruh konsekuensinya. Di dalam persatuan tidak ada peluluhan yang dipaksakan apalagi penjajahan. Karena persatuan

justru memberikan ruang bagi yang berbeda, karena perbedaannya itu akan memberikan keistimewaan, orijinalitas dan kelengkapan.

Kesenian, sebagai salah satu wadah yang paling lentur dari kedahsyatan kreativitas, adalah anak kandung kreativitas. Seni dengan seluruh asetnya, dengan sendirinya juga memiliki potensi yang besar untuk memainkan peranannya dalam mengembalikan esensi dari persatuan yang telah terkontaminasi. Seni yang kreatif - saya membedakannya dengan seni pengulangan yang merupakan kerajinan - dapat memainkan peran yang luar biasa luas dan efektif, untuk mengembalikan persatuan sebagai satu institusi yang luhur, yang tidak bertentangan dengan ide kebebasan dan kemanusiaan, karena yang dibina oleh seni adalah elemen-elemen spiritual. Dengan satu syarat: kesempatan, tekad serta pengupayaan yang total serta ajeg. Tidak sebagaimana yang terjadi selama 30 tahunan terakhir ini, di mana kesenian (baca kreativitas) terposisikan sebagai sesuatu yang tak berguna, karena sang primadona adalah: politik, ekonomi dan teknologi.

Lihatlah, mengapa begitu banyak tayangan cap Srimulat di TV di zaman kheos ini? Hampir di setiap pemancar televisi kita melihat tokoh-tokoh Srimulat melawak. Tak salah kalau dikatakan bahwa di zaman yang berguncang ini, tatkala ekonomi, politik mencapai kekalutan yang membuat bukan hanya rakyat, tetapi juga para professor dan doktor berdiri bulu kuduknya, masih ada yang bisa meyakinkan semua orang untuk tetap bertahan dan mempercayai kehidupan. Mereka menatap ke layar kaca melihat para pelawak Srimulat dengan segala macam bentuk tayangannya, menjadi doktor dan professor tanpa diploma, melepaskan mereka dari segala masalahnya.

Menurut pemahaman saya, Srimulat adalah sebuah interpretasi terhadap kegelapan - hormat saya kepada baik almarhum Teguh Srimulat maupun anggota Srimulat yang masih aktif kini - yang mungkin tidak disadari sendiri oleh Srimulat dan massa penonton.

Srimulat adalah sebuah kiat, sebuah terapi untuk mematahkan ketegangan dan menekuknya menjadi ketawa dan ternyata berguna. Srimulat menebarkan rasa sejuk dan menghasilkan rezeki justru ketika uang sulit sekali ditangkap. Interpretasi Srimulat walau dalam skala kecil, menurut pemahaman saya, secara politis dan ekonomis jauh lebih konkrit dari berbagai teori para pakar politik dan ekonomi, tentang bagaimana membina ketenangan dan meningkatkan produktivitas. Karena kreativitas Srimulat tidak berhenti pada pertanyaan-pertanyaan tetapi memberikan jawaban, walaupun pelaksanaannya adalah masyarakat sendiri.

Hal yang sejenis sudah dilakukan secara rutin di dalam kehidupan tradisi di dalam kehidupan kesenian di Bali, misalnya. Di sana pertunjukan teater bukan hanya teater, tetapi juga adalah sebuah terapi sosial. Pada masa-masa epidemi, ada semacam bentuk teater yang wajib digelar untuk menyeimbangkan disharmoni itu menjadi harmoni. Ini bukan mistik, tetapi juga bisa diterangkan secara logika. Kegiatan kreatif itu mencoba menghantam permasalahan dari jiwa masyarakatnya. Ia menyebarkan tanda awas kepada masyarakat bahwa epidemi sedang merebak, keberhati-hatian harus ditingkatkan. Kalau epidemi berhasil diredam, tentu bukan karena teater itu memiliki kekuatan gaib, tetapi karena masyarakat menjadi berhati-hati. Tetapi darimana munculnya ide ini, kalau bukan dari kreativitas itu sendiri. Jadi di dalam apa yang kita sebut sebagai kreativitas ada embrio dasar: kecerdasan dan kelihaian. Walhasil kreativitas adalah kecerdasan dan kelihaian memecahkan persoalan.

Yang agak sama, tetapi keras perbedaannya adalah ketika wayang dan janggan di Bali dipergunakan untuk kampanye politik tertentu dan sosialisasi keluarga berencana. Indoktrinasi sudah disusupkan ke dalam kesenian, sehingga kualitas kesenian menjadi encer, kadang-kadang sama sekali hancur. Dalam paham realisme sosial, itu merupakan sebuah kiat. Tetapi yang saya maksud dengan kreativitas sebagai senjata sakti dalam kesenian, sedikit berbeda. Di dalam

tatanan pikir saya, kesenian tidak dipakai sebagai alat. Kesenian tetap otonom, tetapi memberikan penyadaran kepada masyarakat terhadap sebuah alat yang bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk menyempurnakan kehidupannya.

Membina persatuan bukan sesuatu yang mudah. Mengembalikan persatuan yang sudah retak lebih sulit lagi. Kecerdasan saja tidak cukup. Amat sangat diperlukan juga kelihaian agar kecerdasan itu tidak mubazir. Menempuh jalan formal yang dibenarkan oleh ilmu, yang mulai dengan teori penyusunan konsep, perencanaan yang subtil dan akurat dan akhirnya proses yang bertahap-tahap, sebagaimana yang diajarkan oleh rasionalisasi Barat dalam ilmu manajemen, hanya mungkin kalau keadaan normal dengan persyaratan-persyaratan standar. Dalam kegawatan yang sudah kita alami sejak akhir tahun 1997, keadaannya serba darurat - bahkan banyak yang menggadaikannya sebagai hidup di dalam hukum rimba - diperlukan kecerdasan dan kelihaian. Seminar ini pun, kalau hanya mengandalkan kecerdasan, akan merupakan sebuah dagelan. Mustahil bisa mengubah apa-apa dalam beberapa hari, malah bisa-bisa hanya menambah teori yang makin menyesatkan. Apabila jiwa yang melaksanakannya tidak kreatif, seluruh teori itu hanya akan menjadi obat paten yang salah diagnose.

Kita memerlukan cara berfikir yang kreatif, karena kesesatan pun bila dimanfaatkan bukan sesuatu yang tidak berguna. Karena justru setelah sesat, kita baru bisa melihat lebih jernih, bagaimana atau kebenaran apa sebenarnya yang kita uber-uber selama ini. di dalam kegelapan, seperti dewasa ini misalnya, justru semakin muncul wujud persatuan macam apa sebenarnya yang hendak kita kejar. Tanpa mengetahui seluk-beluk sasaran secara akurat, bagaimana mungkin kita menangkap. Dengan kata lain: barangkali selama setengah abad merdeka ini, karena tidak mengetahui secara tepat, karena masing-masing memiliki gambaran yang berbeda tentang persatuan, kita selalu menubruk ruang kosong dan gagal membinanya.

Atau kita sesungguhnya sudah melewatinya dengan tanpa kita sadari? Bisa jadi. Kalau itu benar, masalah kita kini sebenarnya bukan lagi persatuan, tetapi perbedaan persepsi tentang berbagai nuansa persatuan itu. Kita bukan sedang mengetuk pintu sebuah rumah penginapan, tetapi hampir hendak menutup pintu rumah di mana kita sudah memutuskan untuk tinggal. Jangan-jangan masalahnya sepele meskipun amat berbahaya. Karena dengan bahasa yang sama, istilah yang sama, kita masing-masing telah memaknainya dengan wujud yang lain.

Ketika menonton pertunjukan Swara Mahardhika dari Guruh Soekarno Putra yang pertama kali di Balai Sidang Senayan, saya pulang dengan sebuah pertanyaan yang pedih. Tanpa mengurangi hormat saya kepada kreativitas Guruh, saya dihujat pertanyaan: apakah Indonesia yang ada di kepala Guruh, berbeda dengan Indonesia yang ada di kepala saya? Ketika melihat museum sejarah New York, saya bertemu dengan seorang Indonesia yang juga baru pulang dari perlawatan yang sama. Dia bercerita panjang lebar dengan sangat bangga, karena melihat Indonesia begitu banyak dipajang dalam museum itu. Saya kembali merasa bingung, apakah Indonesia di kepala kawan itu sama dengan Indonesia di kepala saya? Ketika melihat missi-missi kebudayaan Indonesia yang dikirim ke luar negeri serta melihat kenyataan yang ada di dalam rata-rata ekspresi kesenian Indonesia yang ada di tanah air, saya juga bertanya, apa konsep Indonesia di otak pejabat berbeda dengan konsep Indonesia di otak saya?

Walhasil, berbicara tentang persatuan, saya juga tidak bisa tidak, akan terus menerus bertanya, bagaimana sebenarnya konsep persatuan dan Indonesia yang ada di kepala kita masing-masing? Apakah kita punya mimpi yang berbeda? Pertanyaan itu barangkali tidak akan pernah benar-benar terjawab, karena ia sudah sempurna sebagai pertanyaan. Yang jelas, saya tidak takut kalau jawabannya adalah bahwa: konsep persatuan dan Indonesia di kepala 200 juta orang

Indonesia, baik dia pejabat, teknokrat, politikus, pedagang, buruh, tani, nelayan, tentara, para ulama dan seniman dan sebagainya, ternyata masing-masing bertentangan.

Karena percaya kepada kreativitas, saya yakin, segala penyesuaian kembali tentang perbedaan itu, di samping membawa bencana dan ketegangan, semuanya adalah dinamika yang justru akan melengkapi, memperkaya, membelajarkan, merangsang untuk senantiasa berupaya memahami secara waspada. Karenanya, sesuai dengan logika kreatif yang secara bertele-tele dan susah-payah saya betangkan di atas, disintegrasi memiliki potensi: menyatukan. Tergantung kecerdasan dan kelihaian menyikapinya. Tergantung dari kreativitas kita. Inilah resiko kalau benar kita sudah bertekad menerima Bhineka Tunggal Ika. Sekaranglah saat yang tepat dan kritis untuk menghayati dan meneruskannya, bukannya menghentikan apalagi meninggalkannya.

Astya Puri 2, 13 Pebruari 00

PERAN KREATIVITAS SEBAGAI PEMERSATU BANGSA

Oleh: Slamet Sukirnantanto

Masalah kreativitas sudah lama menjadi tumpuan perhatian para seniman dan budayawan. Namun, sesungguhnya kreativitas juga menjadi daya hidup dan watak para ilmuwan, cendekiawan dan tokoh masyarakat.

Bagi seniman dan budayawan pengertian kreativitas berkaitan dengan daya kemampuan menciptakan karya seni dan budaya. Dalam kesenian kreativitas adalah kemampuan seseorang secara kreatif menciptakan karya seni: sastra, lukisan/seni rupa, musik, teater, tari, cinema; baik yang tradisional maupun yang modern. Dalam lapangan budaya, kreativitas adalah kemampuan seseorang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menciptakan adat-istiadat baru: simbol-simbol sosial, tata cara hidup dan lingkungan alam, mitos-mitos pada zamannya.

Bagi para ilmuwan, kreativitas dapat ditilik dari karya penemuannya seperti: listrik, telegraf, mesin uap, kapal terbang, obat-obatan, konstruksi jalan, konstruksi jembatan, konstruksi bendungan dan banyak lagi. Dalam lapangan kaum cendekiawan, kreativitas berarti munculnya daya hidup untuk menciptakan dan memperbaharui secara terus menerus tentang pemikiran-pemikiran: filosofis, sosiologis, psikologi, lapangan politik, dan lain-lain. Adapun bagi tokoh masyarakat, kreativitas adalah kemampuan memperbaharui kehidupan, peradaban, susila - melalui proses yang panjang. Manusia unggul itu pada akhirnya dapat membawa keluar dari kemerdekaan, kemerdekaan hidup bermasyarakat dan bangsa; melalui pergulatan kreatif dan perjuangan yang gigih.

Menurut **Erich Formm**, kreativitas mempunyai dua kaitan: kaitan dengan **bakat** dan kaitan dengan **sikap**. Dengan sikap yang

dimaksud adalah bahwa kreativitas adalah kondisi kejiwaan untuk menjadi sadar dan memberikan tanggapan tentang sesuatu (ikhwāl). Dengan kata lain, dari sudut bakat, kreativitas adalah kemampuan untuk membawa pengalaman kreatif pada bidang material (karya), untuk menciptakan sesuatu yang diungkapkan pada kanvas, pada gerak, pada huruf, dan sebagainya. Dari sudut sikap, kreativitas adalah untuk menjadi sadar dan memberi tanggapan. Dalam artikel *Ilmu Kedokteran dan masalah Etis Manusia Modern* (Erich Fromm) dinyatakan : “ *Kemampuan untuk menyadari akan kenyataan mengenai seseorang, mengenai sebatang pohon, mengenai apapun, dan menanggapi kenyataan tersebut, merupakan inti daripada kreativitas*”.

Dari dua pengertian ini, kreativitas mempunyai peran besar bagi pergaulan manusia, masyarakat dan bangsa. Kreativitas mempunyai nilai-nilai universal; apabila karya seni, karya budaya dan ketinggian pemikiran dan kesadaran manusia, dari satu bangsa dapat menjadi acuan bangsa lain. Menjadi milik dan warisan manusia sejagat. Dari penemuan yang lahir dari kreativitas itu, manusia saling belajar menyelami, yang pada akhirnya membuahkan pemahaman dan pengertian satu sama lain, dan selanjutnya bermuara pada terbentuknya masyarakat dunia (masyarakat global).

Demikianlah makna dari penemuan secara kreatif dari kalangan ilmuwan yang manfaatnya sangat terasa bagi kemanusiaan. Seperti penemuan: listrik, telepon, telegraf, mobil, kapal terbang, kereta api dan lain-lain, sekaliannya ini dapat mempersatukan dan mengikat pergaulan, kesadaran lahirnya penciptaan yang dapat bermanfaat bagi sesamanya di dunia.

Ditingkat tataran nasional, negara bangsa—karya seni dan budaya, dan hasil tanggapan kreatif para cendekiawan serta tokoh unggul anak bangsa Indonesia selama ini, dapat menyatukan dan membangunkan kesadaran rasa bersatu antara kita sesama bangsa Indonesia. Kita tidak lagi melihat karya seni, karya budaya dan buah perjuangan itu milik suku tertentu, tetapi harus kita pahami sebagai

milik bersama. Buah karya itu adalah bagian dari hasil bersama, dan dibangun atas nama sesama bangsa. Bahkan karya dan pemikiran masa lalu, sebelum terbentuknya bangsa ini, adalah bagian dari milik dan kekayaan bangsa.

Sejarah bangsa Indonesia, sejarah kemasyarakatan dan sejarah kebudayaan—sejak kita menyadari sebagai satu bangsa; kreativitas itu telah menjadi bagian dari proses membangun bangsa (nation-building). Proses tanpa berhenti, hanya dinamikanya yang sering terganggu.

Bangsa ini telah dibangun melalui daya kreatif anak bangsa, lewat karya seni, karya budaya dan tindak perjuangan para tokoh unggul yang lahir dari kemampuan untuk sadar dan menanggapi tantangan zamannya.

Jakarta, 17 Februari 2000

Bio Data

Slamet Sukirnantio, lahir tanggal 3 Maret 1941 di Solo, Jawa Tengah. Dikenal sebagai seorang penyair (sastrawan). Bersama sastrawan Mochtar Lubis menandatangani Deklarasi berdirinya *Majlis Sastrawan Nusantara*, tahun 1994, di Bandar Sri Begawan Brunai Darussalam.

Tahun 1990-1998 Anggota Dewan Kesenian Jakarta, 1993-1998 menjadi Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta.

Tahun 1990-1995 menjadi Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Majelis Kebudayaan PP Muhammadiyah. Salah seorang penandatangan berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tahun 1964 di Surakarta, pengurus DPP IMM, 1964-1971. Tahun

1966 salah seorang Ketua Presidium KAMI Pusat. Tahun 1967-1971 menjadi Anggota DPRGR/MPRS mewakili golongan mahasiswa.

Penyusun teks Deklarasi Pemuda Indonesia tahun 1973, pengurus DPP KNPI tahun 1978-1983. Tahun 1978-1984 menjadi Anggota Badan Sensor Film Departemen Penerangan RI.

Sejak tahun 60-an, telah menulis puisi dan menulis artikel serta ulasan tentang : seni tari, seni rupa, teater, sastra dan budaya, kemasayarakatan, kemahasiswaan dan kepemudaan. Tulisannya tersebar diberbagai media: *Sinar Harapan*, *Pedoman*, *Indonesia Raya*, *Angkatan Bersenjata*, *Pelita*, *Suara Rakyat* dan majalah sastra *Horison*, *Budaya Jaya*, *Pustaka dan Budaya* dll. Karyanya juga dimuat di berbagai majalah sastra di Malaysia.

Kumpulan puisi : *Kidung Putih* (1967), *Jaket Kuning* (1967), *Catatan Suasana* (1982), *Luka Bunga* (1992). Menjadi Editor buku, *Pertemuan Teater 80*, 1980. Bersama pelukis Mustika menerbitkan: *Seni Rupa Indonesia Modern Dalam Kritik dan Esei* (1997). Salah seorang Editor *Mimbar Penyair Abad 21* (PB 1996), salah seorang editor *Antologi Puisi Indonesia* (1997). Karya puisi dan esainya banyak dimuat diberbagai antologi, seperti dalam Kraz, *Sumber Pilihan Sejarah Kesusastraan Indonesia Abad 20*, 2000. Banyak diundang untuk membaca puisi dan pertemuan sastra/budaya dalam forum di dalam dan luar negeri.+++

PERAN KREATIVITAS SEBAGAI PEMERSATU BANGSA

Diajukan pada
**Seminar Strategi Pembinaan
dan Pengembangan
Kebudayaan**, diselenggarakan
oleh Direktorat Jenderal
Kebudayaan **Departemen
Pendidikan Nasional**,
di Jakarta 22-23 Februari 2000

Oleh : Slamet Sukirnantono

/II/

Gejala disintegrasi bangsa, tampaknya tak kunjung reda. Janji bahwa keadaan segera pulih, ternyata sebatas—janji sekedar pernyataan politik untuk menyenangkan banyak kalangan. Gejala keretakan bangsa yang benihnya sudah lama terpendam, dengan leluasa bermunculan ditengah aura kebebasan sekarang ini. Sesuatu yang mencemaskan dan mengkhawatirkan kita semua—kita memasuki suasana getir dan memilukan.

Krisis moneter yang berlangsung sejak tahun 1997, mempunyai dampak yang luas. Dampak krisis moneter adalah krisis ekonomi yang berkepanjangan. Tidak ayal lagi bahwa krisis ekonomi, menjadikan ibu dari kelahiran krisis politik, krisis sosial dan krisis kebudayaan. Dalam lapangan kebudayaan, krisis ini meliputi krisis kepercayaan, krisis nilai-nilai dalam pergaulan bermasyarakat dan berbangsa; krisis moral dan mental—yang pada akhirnya mencapai puncaknya menjadi: **Krisis Manusia Indonesia**.⁽¹⁾

Kita memang berada dalam situasi yang rawan. Indonesia berada pada masa transisi: kita dihadapkan pada kenyataan memasuki

periode “Kesulitan-kesulitan dalam zaman peralihan”. Kerumitan di bidang penanganan penegakan hukum dan keadilan, penataan kelembagaan, pembangunan politik. Kegoncangan di bidang ketertiban dan keamanan, penataan pusat dan daerah dan banyak lagi. Siapapun akan merasa cemas tentang ini semua.

Banyak ikhwal yang dipandang baik dari warisan masa lalu, rasanya ingin segera dicampakkan. Orang ingin meruntuhkan semua bangunan masa lalu tanpa mempersiapkan rancangan bangun yang baru di masa sekarang dan untuk masa mendatang. Orang tidak mengatasi perubahan dengan daya kreatif, tetapi hanya dengan inspi-ratif dan kadang brutal. Orang tidak meletakkan dasar strategis untuk memacu perubahan dalam upaya keluar dari masa transisi, tetapi segala sesuatu dilaksanakan dengan gradual dan terasa tergopoh-gopoh.

/II/

Memang benar bahwa dewasa ini semboyan”**Menjalin Persatuan dan Kesatuan**”, terasa hanya tinggal semboyan yang kosong. Ada sesuatu yang hilang diantara kita. Ada sesuatu yang lepas dari genggam tangan kita. Kita heran dan terperangah membaca kenyataan yang dihadapan pada kita sekarang ini. Terasa benar daya nalar dan daya pikir-akal sehat terabaikan; dan mengakibatkan menjadikan peradaban, derajat dan harkat manusia Indonesia teraniaya. Sedangkan derajat dan harkat manusia inilah yang menjadi tumpuan harapan dan cita-cita luhur Sutan Syahrir ketika berjuang dan ketika meletakkan dasar cita-cita berdirinya **Partai Sosialis Indonesia**. Cita-cita itulah yang juga akan ditegakkan Moh. Hatta, Tan Malaka, Dr. Cipta Mangunkusumo, Goenawan Mangunkusumo, Surjadi Surjaningrat (Ki Hajar Dewantara), Soetomo, Soekarno dan para penjetus

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.—Moh. Yamin, Bander Djohan serta banyak tokoh pemuda saat itu.

Kepercayaan terhadap harkat dan derajat manusia itulah, sesungguhnya yang saya kira, menjadi harapan bagi terwujudnya negara-negara bangsa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Persatuan dan Kesatuan itu memuat makna terwujudnya bangunan susila pergaulan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, asal keturunan dan daerah tinggal di bumi tanah air ini; menciptakan iklim dan upaya menjunjung harkat dan martabat manusia sesama orang Indonesia. Dan itu juga harus tercermin pada sikap para tokoh dan pemandu bangsa, para pelaksana lembaga negara, lembaga masyarakat—melalui perwujudan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, keamanan dan kebudayaan. Hanya Sudjatmoko penerus perjuangan dan pemikiran Sutan Syahrir, secara kreatif dan cerdas mengembangkan dan memperdalam pentingnya meletakkan dasar dan tujuan akhir dari : mencapai derajat dan harkat manusia. Penghargaan pada nilai manusia sebagai warga bangsa Indonesia. Hal ini dikemukakan dalam banyak karya-karya tulisnya diberbagai kesempatan, dari waktu ke waktu sejak Sutan Syahrir tiada. Sudjatmoko adalah pembawa obor estafet memperjuangkan cita-cita luhur itu. Pendirian itu nampak jelas pada karyanya terakhir sebelum wafat; yaitu kumpulan ceramahnya di Jepang tahun 1980 yang kemudian dibukukan dengan judul *Pembangunan dan Kebebasan*.⁽²⁾

Dengan kata lain pembangunan, seharusnya dimulai sejak awal—dahulu, ketika semua elemen anak bangsa, menyatakan diri sebagai satu bangsa, meskipun mereka mempunyai potensi untuk berbeda. **Nation-building** yang pernah dirintis itu, tiba-tiba hanyut ke mana tidak tahu ujung pangkalnya. Kondisi bangsa dihadapkan pada banyak suku dan banyak pernyataan-budaya itu berada dalam satu dataran meja yang panjang, pada saat yang sama, pada hari-jam-dan detik yang sama—mempunyai keanekaragaman kondisi hidup dan budaya: ada yang masih hidup terbelakang dalam suasana

zaman batu, pertanian rendah, feodal, kaum menengah (borjuis kota) dan masyarakat teknologi yang gejalanya maju. Mereka ini hidup pada dasar tataran hukum nasional yang sama, nilai-nilai pergaulan bangsa yang sama, dan tindak perlakuan yang sama melalui proses loncatan budaya.⁽³⁾ Dari kenyataan kondisi ini ada unsur baiknya dan sekaligus ada unsur keburukannya.

Unsur keburukan itu kita rasakan pada gejala keretakan yang membawa kita pada puncak krisis sekarang ini. kesewenang-wenangan orang pusat terhadap daerah mengenai banyak pelaksanaan hubungan ekonomi, politik, sosial, keamanan-dirasakan oleh banyak pihak sangat pincang, sangat tidak adil dan kadang timbul kesan terasa masa bodoh. Kita, bangsa Indonesia tidak mampu belajar bagaimana tuan penjajah kita, Belanda selama ratusan tahun itu, telah mengembangkan ilmu **Indologi**, yaitu pengetahuan tentang wilayah-wilayah Indonesia, mendalami budaya, kondisi sosial, ekonomi, ciri-ciri khusus satu suku bangsa. Pengenalan bagi para amtenar untuk bertugas di Hindia Belanda.

Upaya Nation-Building yang pernah menjadi program pokok, dari waktu ke waktu dirasakan tidak terurus dan terabaikan. Para pamong kita, birokrat kita, para petugas keamanan Polri dan Tentara tidak dibekali Indologi itu. P4 yang pernah menjadi program pokok itu, bukan Indologi, di sana hanya siasat politik untuk menggenggam Indonesia secara kukuh. Dewasa ini, semacam Indologi itulah yang mungkin kita butuhkan. Baik bagi aparat, birokrat dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

/III/

Setelah kita mengamati panggung kehidupan berbangsa kita dewasa ini, timbul pertanyaan mendasar, sejauh mana kreativitas berperan sebagai pemersatu bangsa. Dan bagaimana realisasinya?

Menurut **Erich Formm**, kreativitas mempunyai dua kaitan: kaitan dengan **bakat** dan kaitan dengan **sikap**. Dengan sikap, yang dimaksud adalah bahwa kreativitas adalah kondisi kejiwaan untuk menjadi *sadar* dan memberi *tanggapan* tentang segala ikhwal. Dengan kata lain, dari sudut bakat, kreativitas adalah kemampuan untuk membawa pengalaman kreatif pada bidang kebendaan (karya)- untuk menciptakan sesuatu yang diungkapkan pada bidang kanvas, dan juga gerak (tari), pada huruf (sastera), benda (patung), bunyi (musik) dan sebagainya. Dalam *esei Ilmu Kedokteran Masalah Etis Manusia Modern*, Erich Formm menyatakan bahwa : *Kemampuan untuk menyadari akan kenyataan mengenai seseorang, mengenai sebatang pohon, mengenal apapun, dan menanggapi kenyataan tersebut, merupakan inti daripada kreativitas.*⁽⁴⁾

Sastrawan **Budi Darmo** menyatakan bahwa kreativitas bersifat pribadi, subjektif dan personal; kreatifitas hanya dimiliki oleh orang-orang yang persepsinya tinggi, khas dan tidak dimiliki orang lain. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pandangan seseorang yang kreatif berbeda dengan pandangan orang lain. Bahkan dalam beberapa hal, mungkin pandangan orang kreatif dapat berlawanan dengan pandangan umum. Pandangan yang berbeda dengan sendirinya juga membawa aspirasi yang berbeda.⁽⁵⁾ Dalam kesempatan lain Budi darmo menyatakan : *Kreativitas bukanlah kerja merenung tanpa menghasilkan sesuatu.*⁽⁶⁾

Masalah kreativitas sesungguhnya sudah lama menjadi tumpuan perhatian para seniman dan budayawan. Namun, kreativitas juga menjadi kekuatan dan daya hidup dan watak para ilmuwan, cendekiawan dan tokoh masyarakat (bangsa). Bagi seniman dan budayawan berkaitan dengan daya cipta karya seni dan budaya. Dalam seni, kreativitas adalah kemampuan seseorang berkarya seni, seperti disebut di atas. Sedangkan lapangan budaya, kreativitas adalah kemampuan seseorang, secara sendiri atau bersama-sama menciptakan adat istiadat baru: simbol-simbol sosial, tata cara hidup

dan pergaulan, memberikan makna pada alam, membangun mitos-mitos zamannya.

Bagi ilmuwan, kreativitas adalah penciptaan dan penemuan baru atas dasar penelitian dan perenungan menciptakan ikhwal baru di bidangnya masing-masing disiplin ilmu: listrik, telegraf, mesin uap, kapal terbang, radio, TV, komputer, obat-obatan, penemuan jenis penyakit, konstruksi jembatan, konstruksi jalan raya, konstruksi bendungan dan banyak lagi. Bagi cendekiawan, kreativitas berarti munculnya pemikiran dan sikap baru dalam bidang filosofi, sosiologi, psikologi, lapangan politik dan lain-lain. Pendirian ini mengandung nilai kejuangan untuk menyelamatkan kemanusiaan. Bagi tokoh masyarakat (pemimpin dan pemuka), kreativitas adalah kemampuan memperbaharui pandangan dan sikap hidup, peradaban, susila-melalui proses yang panjang. Dan tokoh itu dengan pergulatan dan perjuangannya yang tanpa henti, pada akhirnya mampu berhasil mengajak lingkungannya, kaumnya atau bangsanya keluar dari kesulitan, kemandekan, kemacetan.

Dari dua pengertian dan makna yang dikemukakan Erich Formm di atas, dapat disimpulkan bahwa daya hidup kreatif yang menghasilkan karya dan ketajaman tanggapan mempunyai peran besar bagi pergaulan manusia, masyarakat dan bangsa. Yang utama kita menyadari bahwa kreativitas dan hasil karya yang kreatif mempunyai nilai-nilai universal.; apalagi untuk karya seni, karya budaya, ketinggian pemikiran dan kesadaran manusia. Dari kreativitas suatu bangsa dapat menjadi acuan dan perbendaharaan bangsa lain. Buah dari kreativitas seseorang atau suatu bangsa juga menjadi milik dan warisan manusia. Dari penemuan yang lahir dari kreativitas itu, manusia dapat saling belajar dan saling menyelami, yang pada akhirnya membuahkan pemahaman dan pengertian satu sama lain, dan itulah yang menjadikan tumbuhnya masyarakat global, seperti yang kita kenal sekarang.

Dalam sejarah sastra, tercatat karya puisi Moh. Hatta, karya puisi dan drama Moh. Yamin, karya puisi Rustam Effendi dan lain-lain. Semua kegiatan kreatif dalam seni dan budaya bermuara pada kebangkitan peristiwa besar, lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang menurut Sutardji Calzoum Bahri termasuk puisi.⁽⁷⁾ Moh. Yamin sebagai cendekiawan dan tokoh muda, meskipun putra Minang, telah mendalami dan menggali kebesaran Kerajaan Majapahit, yang dianggap Nusantara III, dan disusul drama-dramanya tentang Erlangga dan karya sejarah riwayat Gajah Mada. Yamin melalui kreativitas intelektual dan kreativitas sastra telah mampu berperan merintis langkah pemersatu bangsa. Di tahun 60-an, saya dan generasi saya telah dituntun menjadi sadar tentang adanya suku dan adat istiadat sub budaya Minang yang sedang mengadakan perubahan sosial budaya lewat karya-karya novel **Pujangga Baru**. Mulai dari *Siti Nurbaya*, *Salah Asuhan*, *Salah Pilih*, *Hulu Balang Raja*, *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, *Sengsara Membawa Nikmat* dll. Generasi saya yang sedang tumbuh, yang datang dari sub kultur Jawa, mendapat pandangan maju mengenal Minang dengan lebih baik, dan ini kelak-bekal dalam memasuki arena pergaulan negara bangsa.

Disamping kita sebagai anak bangsa, menghargai dan memelihara karya seni dan budaya lama; penciptaan seni dan budaya terus diupayakan hingga sekarang. Disemua lapangan seni secara kreatif diciptakan oleh seniman dan budayawan. Mereka terus bekerja tanpa henti untuk menghasilkan karyanya. Karya-karya seni dan budaya itulah pernyataan kreatif yang diusahakan dan dihasilkan atas nama anak bangsa, karya bangsa Indonesia bukan karya anak daerah tertentu. Mulai dari karya Moh. Yamin, Amir Hamzah, Chairil Anwar, Buya Hamka, Abdul Muis, Sitor Situmorang, Mochtar Lubis, Pramudya Ananta Toer sampai pada Rendra, Ajip Rosidi, Arifin C Noer, Putu Wijaya, Danarto, Sutardji dan banyak lagi di bidang sastra;

karya-karya Sudjojono, Affandi, Rusli, Zaini, Sudjono Kerton, Hendra, Srihadi dan lain-lain di bidang seni lukis. Ismail Marzuki, L. Manik di bidang musik. Wisnu Wardana, Sardono, Retno Maruti, Farida, Churiah Adam dan lain-lain di bidang tari. Mereka adalah tenaga-tenaga kreatif anak bangsa yang bekerja untuk kemajuan budaya dan peradaban Indonesia. Merekalah bagian elemen pengikat persatuan dan kesatuan. Karya-karya seni mereka adalah milik kita sebagai bangsa yang bersatu dan berdaulat. Kita tidak pernah mempertanyakan Affandi orang mana, Sutardji orang mana, Sitor orang mana. Tetapi mereka semua adalah para seniman dan budayawan Indonesia.

Banyak pengalaman yang menunjukkan bahwa melalui karya seni dan budaya ini dapat membangun saling pengertian, saling menghargai dan memperkuat persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Contoh kecil yang ingin saya ketengahkan di sini: selama delapan tahun sejak tahun 1978, berturut-turut dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda, Bakom PKB DKI Jakarta, menyelenggarakan **Lomba Puisi dan Folk Song**, yang diikuti pelajar SLTP-SLTA (SMU), PT dan Umum. Pesertanya “Pri” dan “non Pri” secara mem-baur. Materi lomba puisi adalah karya puisi dari para sastrawan Indonesia yang terkemuka; sedangkan materi lagu adalah lagu rakyat (lagu daerah) dari semua daerah di Indonesia, pilihan lagu ini setiap tahun berganti-ganti. Dari pengalaman yang kami peroleh adalah rasa menyatu para peserta, dan tidak ada perselisihan atau pertengkaran (tawuran) meskipun yang juara kebetulan dari pelajar atau mahasiswa yang kebetulan dari “keturunan”. Lomba semacam ini diselenggarakan dengan profesional, berkwalitas dari sudut kesenian dan biaya yang mahal. Peserta lomba puisi pernah mencapai jumlah 1845 peserta pria dan wanita. Musik diikuti oleh 300 peserta. Meskipun hanya peserta dari wilayah Jakarta saja. Acara semacam ini sengaja dirancang dengan keyakinan bahwa kreativitas seni dapat berperan sebagai pemersatu bangsa. Dan pernah terjadi—bukan

sekedar angan-angan. Berhentinya acara ini menjelang tahun 90-an karena ketiadaan dana. Sebab kami berpendirian bahwa apabila biaya festival hanya kecil dan seadanya, penyelenggara memilih tidak mengadakan lomba. Karena didorong menjaga kualitas dan menjaga kesungguhan dari apa yang kita inginkan.

Pengalaman yang lain, yaitu ketika KNPI dibawah pimpinan Akbar Tanjung. Dalam membantu upaya pemerintah untuk lebih mempercepat pengintegrasian Timor-Timur menjadi bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia; kami mengusulkan pendekatan seni-budaya dan olah raga. Kami percaya pada waktu itu, kalau kita galakkan pengenalan pada karya seni dan budaya bangsa Indonesia kepada generasi muda Timor Timur, lambat laun akan terjadi pemahaman dan pendekatan, keakraban dalam memasuki dan menyatu diri dalam tubuh bangsa Indonesia. Demikian pula kebudayaan dan seni mereka harus diperkenalkan lebih dekat kepada bangsa, melalui misi pengenalan ke propinsi lain dan demikian pula sebaliknya, sehingga terjadi **inter cultural communication**. Nampaknya pendekatan ini diam-diam tidak ditanggapi. Kelihatannya pemerintah (militer), lebih memilih pendekatan keamanan—pendekatan militer. Dan apa hasilnya: **bubar!**

Saya percaya bahwa melalui pendekatan pengenalan seni budaya dan karya sosial lainnya yang kreatif, dilaksanakan terus menerus, serta saling memberi penghargaan yang pantas lewat sayembara, lomba, pertemuan, khususnya untuk generasi muda sangat perlu dan kami sarankan. Almarhum OE (Oesman Effendi) wafat tahun 80-an salah seorang pelukis terkemuka Indonesia, peletak dasar kegiatan seni di awal lahirnya Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki (TIM), pernah melontarkan gagasan kepada saya tentang perlunya membangun **Pusat Kebudayaan Semasyarakat**. Komunitas budaya ini untuk kalangan pemuda dalam membangun jati diri dan memberikan tanggapan pada derasny arus budaya asing dan budaya sendiri yang sedang mencari bentuk. Komunitas ini semacam

komunitas (pusat) kesehatan yang dikenal dengan PUSKESMAS yang didirikan di setiap Kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam lembaga ini diadakan pertemuan, perbincangan dan pusat semua kegiatan seni, ketrampilan, di bidang seni, kerajinan dan lain-lain. Dari kegiatan ini diadakan jalinan satu sama lain di tingkat kecamatan setempat, kabupaten, propinsi dan nasional. Terjadi inter cultural communication, dengan harapan lebih membawa keutuhan hidup berbangsa. Dan inilah mungkin dapat menjadi pertimbangan upaya menunjukkan: *Peran Kreativitas Sebagai Pemersatu Bangsa*.

Kreativitas selalu dimungkin ada, kalau didukung suasana kebebasan. Meskipun dalam situasi penindasan pun seniman dan budayawan dapat melahirkan karya besar. Namun, tujuan pokok para seniman adalah terciptanya kebebasan. Dengan kebebasan itulah akan mendorong kemungkinan lahirnya masyarakat terbuka. Masyarakat yang lebih dewasa dan bijak. Sebagai sarana pemersatu bangsa, kreativitas tidak mampu menyumbangkan apa-apa terhadap persatuan bangsa. Apabila tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan lain yang nyata dan terarah. Ada ikhwal lain yang dapat menunjang terwujudnya persatuan bangsa yaitu: ada sesuatu yang menjanjikan pada kita semua anak bangsa dimanapun berada, bahwa ada sesuatu yang bisa diharapkan dengan persatuan dan kesatuan itu. Adanya gambaran bahwa dengan persatuan bangsa itulah harkat dan martabat kemanusiaan kita terpelihara dan diperjuangkan. Kalau dalam hati setiap orang Indonesia merasa berat berpisah, karena banyak pertimbang akal sehat dan kaitan sejarah yang dirasakan bersama, sesungguhnya kita berhasil keluar dari kesulitan dan kemelut kita dewasa ini. Dan dari masa lalu kita mendapat pelajaran berharga bahwa kreativitas dapat berperan sebagai pemersatu bangsa. +++

Jakarta, 19 Februari 2000

Catatan Kaki :

- (1) Slamet Sukirnantanto, *Krisis Moneter dan Proses Kebudayaan*, ceramah dalam Pekan Seni Mahasiswa Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2 Mei 1998.
- (2) Sudjatmoko, *Pembangunan dan Kebebasan*, LP3ES, Jakarta, 1984.
- (3) Slamet Sukirnantanto, *Sastra Melayu Alaf Baru: Strategi dan Komitmen Bersama*, makalah diajukan pada Seminar Kesusastraan II Mastera, 23-24 Nopember 1999, di Bandar Seri Begawan Brunai Darussalam.
- (4) Erich Formm, *Ambisi Manusia Masa Kini*, tanpa nama penerbit, tempat dan tahun. Penerjemah Hendra Setiawan.
- (5) Dr. Budi Darma, MA, *Sejumlah Esei Sastra*, PT Karya Unipress, Jakarta, 1984.
- (6) ———, *Solikui : Kumpulan Esei Sastra*, PT Gramedia, Jakarta, 1983.
- (7) Sutardji Calzoum Bachri, Ceramah Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, Desember 1999.

PENINGKATAN APRESIASI BUDAYA BANGSA MELALUI MASYARAKAT

Oleh:

Prof. Dr. Bambang Pranowo, MA

- Culture : “..... the creative capacity of human kind, the propensity of human groups and individuals to differ from one another”. It’s focus is variety, mutability, change rather from the perennials of human life.
- Ingat sinyalemen “Budaya Korupsi” oleh Bung Hatta!
- Pengertian “Kebudayaan” sebagai kata benda masih lebih dominan di tengah masyarakat dibandingkan dengan “Kebudayaan” sebagai kata kerja.
(Lihat bangunan dari berbagai propinsi di TMII)
- Selama ± 30 th kita “dipaksa” hidup dalam budaya bisu dan ketergantungan kepada “STATE” yang mengabaikan PLURALITAS.
- Kasus MAN II BIMA : rumah laba-laba di meja Kepala Madrasah, Gedung yang bocor.
- The environment become increasingly a man-made environment as the presurre of natural phenomena relatively declined.
- The individual was no longer considered as a passive recipient of a God given world.
- KEBUDAYAAN : “..... kapasitas kreatif manusia sebagai kelompok maupun individu dalam interaksinya dengan lingkungan”.
- Millenium ke III ditandai terutama dengan makin meningkatnya tuntutan “competence” and “competition”.
- “Gods in the global village”:
 1. Internal diversity
 2. Structural diversification

3. Cultural pluralism
4. Scientific criticism

Kemajuan (PROGRESS) memerlukan “RATIONAL SPIRIT” & “MATERIAL SUBSTANCE”

- Perlu sekali KESALEHAN AKTUAL bukan KESALEHAN RITUAL semata.
- Irama kehidupan yang semakin cepat mempengaruhi konsep/ dikaji kita sebagai kebudayaan.
- Kita perlu merenungkan gejala kebudayaan sebagai suatu usaha untuk mencapai suatu policy yang lebih baik.
- Pengertian tentang kebudayaan yang terus berproses mengisyaratkan bahwa kita dapat mengarahkan proses itu.
- I. KANT : salah satu ciri khas kebudayaan terdapat dalam kemampuan manusia untuk mengajar dirinya sendiri.
- 13 Manusia selalu dalam ketegangan antara yang IMANEN (serba terkurung) dari Transenden (yang mengatasi, di luar sesuatu).
- Manusia tidak dihanyutkan oleh proses alam tetapi berusaha mempengaruhi dan mengarahkan proses tersebut → Sehingga kita dikepung dalam lingkungan yang serba man-made.
- Keragaman/pluralitas harus diterima bukan hanya sebagai kenyataan, tetapi juga sebagai keharusan.

Karena itu kita harus mengembangkan SENSE of Plurality.

14 Budaya Mithis → Ontologis → Fungsional

• Religiousness :

- | | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 1. Belief | - | Kesalehan aktual |
| 2. Knowledge | - | Substansiasi |
| 3. Practice | - | Kemajemukan
(sense of plurality) |
| 4. Behaviour | - | Achievement oriented |
| 5. Consequence | - | Kemandirian |

Drs. Endro Sumardjo

5 Budaya Indonesia :

1. Budaya Heroik
2. Budaya Musyawarah untuk Mufakat
3. Budaya Saling Asih, Asah dan Asuh
4. Budaya Gotong Royong/Kebersamaan
5. Budaya Membangun Bangsa sebagai Pengaruh dari Tatanan Global

DISKUSI

1. **Ny. Ikrom**

- Apa kebudayaan?
Seperangkat nilai yang terekspresikan dalam berbagai aspek kehidupan.
- Kuis-kuis di TVRI: bisa tentang ilmu pengetahuan & teknologi.
- Identifikasi agama agar diperbaiki dengan Budi Pekerti yang praktis: Hubungan dengan orang tua, tetangga dan lain-lain.
- Masyarakat perlu diberi dorongan (antara lain melalui TV untuk achievement).

2. **Prof. Bandem**

- Di Bali tumbuh museum di mana-mana dan berorientasi pasar.

3. **Prof. Edi**

- Nada khutbah yang sejuk apakah dikembangkan di masyarakat.

4. **Ki Supriyoko**

Kelemahan penelitian kuantitatif

- Kebiasaan masyarakat banyak juga yang negatif: kotor, jorok, semrawut
- Bagaimana caranya agar dapat diimplementasikan —→ menuju.
- Penelitian F.T. IAIN : Banyaknya kriminalitas dan banyaknya masjid
- Apakah ada resep untuk mewujudkan Kesalehan Aktual.

5. **Ny. Mutia**

- Pentingnya memelihara kreasi tradisional !
- Pentingnya mengembangkan budaya kreatif
- Strategi untuk mengembangkan kebersamaan dengan:
 - Humanis
 - Cinta ilmu
 - Etika hubungan dengan umat lain
- Kasus di NTT: orang Islam diminta menyembelih ayam oleh pemilik rumah.

6. **Prof. Haryati**

- Harus bicara dengan semua agama
- Orientasi berwujud kualitas beragama

PENINGKATAN APRESIASI BUDAYA BANGSA MELALUI MASYARAKAT

Oleh: Drs. Endro Sumarjo

I. PENDAHULUAN

Budaya suatu bangsa akan menentukan eksistensi bangsa tersebut dimasa kini dan masa yang akan datang. Bangsa Indonesia secara historis memiliki latar belakang budaya yang beraneka ragam. Hal itu mudah dipahami karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis, agama, bahasa, dan latar belakang sosial yang berbeda-beda. Namun ternyata telah melahirkan kesamaan falsafah, kesamaan tekad yang mewujudkan dalam perjuangan kemerdekaan dengan semangat heroiknya untuk mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terbebas dari cengkraman penjajah selama tiga setengah abad. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan bukti sejarah adanya kemauan yang kuat dari Pemuda Indonesia sebagai salah satu komponen bangsa yang secara tegas menyatakan kebulatan tekad dan komitmen Satu Tanah Air, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Ada dua hal yang perlu dihayati dari Sumpah Pemuda ini yaitu, pertama kehendak untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah sebagai negara-bangsa yang merdeka. Kedua, adanya kesadaran kolektif untuk membina persatuan dan kesatuan dalam keragaman daerah, suku bangsa, dan bahasa.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar negara Pancasila didalamnya memuat semangat persatuan Indonesia dalam interaksi kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Saat ini bangsa Indonesia sedang dilanda berbagai terpaan dan cobaan yang datang baik dari dalam maupun dari

luar yang sangat mengkhawatirkan bagi keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Sungguh sangat penting bagi seluruh komponen bangsa dan komponen masyarakat untuk mencerahkan kembali kesadaran bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam atmosfir kemajemukan etnis, bahasa, dan budaya yang dapat membawa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berbudaya, maju dan sejahtera, serta tetap eksis dan survive di dalam percaturan kehidupan global.

Budaya bangsa yang telah berhasil mengangkat martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu terus dilestarikan dan ditumbuh kembangkan sesuai dengan tuntutan jaman tanpa harus kehilangan identitas diri. Kita sadar bahwa budaya bangsa Indonesia yang beragam itu dengan segala bentuk perkembangannya senantiasa hidup dalam dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk memposisikan masyarakat sebagai pelaku, dan sekaligus dijadikan wahana untuk meningkatkan apresiasi seluruh warga bangsa terhadap budaya bangsanya sendiri. Sementara itu kita dituntut untuk mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai-nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa dimasa depan (*GBHN 1999- 2004*).

Memenuhi permintaan panitia seminar strategi pembinaan dan pengembangan kebudayaan, maka dalam makalah dengan judul peningkatan Apresiasi Budaya Bangsa melalui Masyarakat akan dikemukakan beberapa pandangan tentang; masyarakat sebagai basis pelestarian dan pengembangan budaya, strategi dan implementasi peningkatan apresiasi budaya melalui masyarakat. Pandangan terhadap dua hal tersebut bukan atas hasil penelitian, atau kajian ilmiah, tetapi didasarkan atas pengalaman empirik dalam ruang lingkup pelaksanaan program pendidikan luar sekolah di masyarakat yang lebih banyak melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

II. MASYARAKAT SEBAGAI BASIS PELESTARIAN KEBUDAYAAN

GBHN 1999-2004 telah mengamanatkan untuk melaksanakan pembangunan di bidang kebudayaan. GBHN telah menetapkan arah kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan yaitu *"Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa."*

Dalam konteks pengembangan dan pembinaan kebudayaan seperti amanat GBHN tersebut, masyarakat mendapat perhatian, karena kehidupan masyarakat merupakan inti dari kehidupan bangsa. Kehidupan bermasyarakat sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa. Tidak dapat disangkal bahwa pelaku kehidupan bermasyarakat adalah masyarakat itu sendiri dengan berbagai unsur atau komponen yang ada didalamnya. Maka dalam perspektif pengembangan budaya, mutlak memerlukan berkembangnya apresiasi setiap individu terhadap budaya itu sendiri. Masyarakat sebagai suatu komunitas individu, perlu mendapat ruang dan peran yang memadai sebagai pelestari budaya bangsa.

Pakar antropologi modern, *Edward B. Taylor* mengemukakan bahwa budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (*Tilaar, HAR, 1999, 39*). Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa masyarakat memegang peranan penting bagi dimilikinya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kaidah-kaidah moral, norma-norma hukum, adat istiadat, kemampuan dan kebiasaan hidup sehari-hari setiap individu yang berada di lingkungan masyarakat. Tidak berlebihan apabila

masyarakat dijadikan sebagai tempat penyemaian nilai-nilai budaya bangsa. Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu memerankan dirinya sebagai pengembang budaya yang sangat diperlukan dalam proses pembudayaan masyarakat dalam pembangunan bangsa.

Seorang pakar ekonomi pembangunan Prof. DR. Mubyarto, mengatakan bahwa paradigma pembangunan dewasa ini mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berarti pembangunan yang bertumpu pada kemampuan masyarakat. Pendapat beliau ini dapat dipakai sebagai rujukan bahwa di dalam melakukan upaya pemberdayaan termasuk melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa, seyogyanya bertumpu pada kemampuan masyarakat. Dalam memasuki masa depan pada kehidupan global, pemberdayaan masyarakat di bidang kebudayaan perlu diarahkan untuk memberi kekuatan pada masyarakat agar dapat melakukan berbagai upaya atau kegiatan yang mendukung proses pembudayaan. Proses pembudayaan perlu mendapat dukungan penuh dari masyarakat, karena proses pembudayaan itu pada hakekatnya merupakan suatu proses dimana dikembangkan dan diinternalisasikan nilai-nilai budaya dalam suatu masyarakat sebagai bagian integral dari proses transformasi masyarakat (Djojonegoro, Wardiman 1998,31)

Berbagai upaya pembangunan termasuk di bidang kebudayaan mengandung amanah untuk mentransformasikan masyarakat. Kita mendambakan masyarakat yang beradab, mempunyai sopan santun dan kebaikan budi pekerti, dan telah maju tingkat kehidupan lahir batinnya. (Juwono dan Wahyudi 1999.120). Mengentaskan masyarakat dari kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan di berbagai sendi kehidupan termasuk di bidang budaya perlu terus menerus dilakukan secara berkesinambungan. Masih begitu banyak saudara-saudara kita sebangsa yang hidup terasing dan primitif. Sementara itu ada sebagian masyarakat yang larut pada budaya individualistis, hedonisme dan atribut-atribut budaya lainnya yang

teraktualisasikan dalam pola pikir, sikap, dan pola tindak yang lepas dari nilai-nilai kultural *saling asuh, saling asih, dan saling asah* dalam semangat kebangsaan.

Pada dimensi pelestarian budaya bangsa, seperti gotong royong, kekerabatan, kepahlawanan, patriotisme, berbagai budaya daerah yang sarat dengan nilai-nilai moral, agama, dan seni perlu melibatkan peran serta masyarakat. Demikian halnya pada dimensi pengembangan budaya seperti: tata krama, norma-norma kehidupan, toleransi bermasyarakat, disiplin, kerja keras, keteraturan dan ketertiban, berkompetisi yang sehat, dan bermasyarakat yang harmonis perlu dilakukan bersama-sama dengan masyarakat.

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menjadikan masyarakat sebagai tumpuan atau sebagai basis dalam pelestarian dan pengembangan budaya bangsa. Pertama, hampir disetiap lapisan dan kelompok masyarakat, terdapat tokoh masyarakat yang dijadikan panutan oleh seluruh warga masyarakat. Melalui tokoh masyarakat inilah upaya pelestarian dan pengembangan budaya bangsa dapat dilakukan. Kedua, hampir disetiap masyarakat ditinjau dari segi geografis dan etnis, memiliki budaya lokal yang dapat dijadikan media untuk mengembangkan apresiasi masyarakat terhadap budaya bangsa. Ketiga, dalam lingkungan kehidupan masyarakat terdapat institusi/kelembagaan, organisasi, dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program pelestarian dan pengembangan budaya. Keempat, di masyarakat itu juga para budayawan, seniman berdomisili. Mereka dapat diperankan sebagai dinamisator atau inspirator untuk menggerakkan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa.

Masyarakat memang memiliki kekuatan potensial untuk bergerak maju. Pengalaman telah membuktikan begitu besar keswadayaan dan keswadanaan yang diberikan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan baik di desa maupun di kota. Berangkat dari pengalaman itu, maka kita perlu bersikap arif untuk menempatkan

masyarakat pada posisi yang sentral dalam pelestarian dan pengembangan budaya bangsa. Peran pemerintah adalah sebagai fasilitator yang siap memberikan dukungan pada masyarakat dalam hal penyediaan tenaga ahli, fasilitas dan pembiayaan. Kemitraan antara masyarakat dan pemerintah perlu diperkuat dan diperluas.

III. STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PENINGKATAN APRESIASI BUDAYA MELALUI MASYARAKAT

Dalam mengimplementasikan program peningkatan apresiasi budaya melalui masyarakat perlu memperhatikan kegiatan-kegiatan yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat. Sering kali kita menyaksikan berbagai pagelaran, pertunjukan, pameran, pementasan seni musik, busana, tarian, seni kriya, lukisan, pahat, anyaman, bahkan rumah adat sebagai hasil daya cipta dan karya yang bernilai tinggi. Kegiatan-kegiatan semacam itu dilaksanakan oleh masyarakat di tingkat daerah dan tingkat nasional yang bisa disaksikan oleh banyak pengunjung dari berbagai kalangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu begitu banyak tokoh-tokoh budayawan-seniman, organisasi kemasyarakatan mementaskan, mempromosikan karya-karya seni dan budaya di luar negeri baik dengan maupun tanpa kontribusi yang memadai dari pemerintah. Sebagai contoh Him-punan Ahli Rias Penganten Indonesia (HARPI Melati) salah satu Organisasi Mitra Ditjen Diklusepora dari kalangan Kursus Diklusemas menyelenggarakan peragaan Tata Rias Pengantin Daerah dari mulai Rias Rambut, Rias Wajah, Busana dan Upacara adat pada forum Asia Pasifik Bridal Summit di Tokyo, Seoul, Beijing yang selalu mendapat sambutan, kekaguman dan penghargaan dari organisasi Ahli Rias Pengantin se Asia Pasifik. Upaya seperti ini menjadi kebanggaan masyarakat perias pengantin. Rasa bangga itulah yang dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya bangsanya.

Contoh lain yang dapat kami kemukakan disini adalah Him-punan Ahli Kecantikan Tiara Kusuma, juga organisasi mitra kami dari kursus kecantikan, setiap tahun mengadakan lomba penataan sanggul daerah dan rias wajah bernuansa budaya lokal dan alam, selalu mendapat respon yang sangat besar dari masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan budaya bangsanya. Tanpa itu sangat sulit melestarikan sanggul-sanggul daerah, tata rias pengantin daerah yang sempat terlupakan. Berkat kegiatan seperti itu, sekarang terus berkembang. Upaya-upaya yang kreatif itu dilakukan oleh masyarakat.

Contoh-contoh di atas menunjukkan ada gambaran yang semakin jelas bahwa masyarakat telah banyak berbuat untuk melestarikan dan mengembangkan budaya sekaligus meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya bangsa. Dari contoh-contoh itu pula dapat diidentifikasi strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya bangsa. Ada beberapa strategi yang dapat dijadikan sebagai pilihan:

1. Strategi Mendinamisasi Pembelajaran

Strategi ini diwujudkan dengan cara terus-menerus meningkatkan pembelajaran masyarakat dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat di dalam lingkungan masyarakat. Artinya masyarakat diberikan kesempatan yang luas untuk bisa belajar, mengikuti kegiatan pendidikan, kegiatan latihan dan bimbingan berbagai keterampilan yang berhubungan dengan kesenian/kebudayaan, atau berbagai keterampilan yang dapat dimuati oleh informasi, wawasan, tentang nilai-nilai seni/budaya. Kegiatan pembelajaran dimaksud dapat dilakukan pada institusi pendidikan luar sekolah seperti di Kelompok Belajar, Kursus, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan dan Kegiatan Belajar (BPKB), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

2. Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan digunakan dengan cara memberikan berbagai rangsangan, dorongan, bantuan agar masyarakat dapat melakukan sesuatu yang bermakna bagi kehidupannya untuk saat ini dan masa yang akan datang. Dalam melakukan pemberdayaan itu, ada beberapa pendekatan yang perlu mendapat perhatian yaitu; 1) Kebutuhan, perlu diyakini bahwa masyarakat juga memiliki kebutuhan yang bersifat khas, masyarakat juga butuh dihargai, diayomi dan diperankan secara terhormat, 2) Kondisi lokal, kondisi lingkungan, nilai-nilai, adat-istiadat, kepercayaan, norma, agama pada tingkat lokal masyarakat perlu dijadikan dasar pijakan, 3) Sumber daya, sumber daya alam, infrastruktur kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia yang ada di tingkat lokal perlu dijadikan perhatian dan pertimbangan dalam merencanakan, melaksanakan setiap upaya pelestarian budaya dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya bangsa. Faktor Sumber Daya Manusia harus mendapat perhatian khusus baik dari segi tingkat pendidikan, sosial ekonomi, dan aspek-aspek lain yang melekat pada keadaan diri mereka. 4) Rasa Percaya Diri dan Kemandirian, rasa percaya diri dan kemandirian masyarakat harus dibangkitkan. Sifat keragu-raguan, minder, takut melakukan sesuatu, merasa tidak aman, merasa terkungkung harus dibebaskan dari masyarakat. Yakinkan bahwa mereka itu eksis karena mereka mampu melakukan sesuatu dengan kemampuannya sendiri. Kemandirian dapat dimunculkan dengan rasa percaya diri.

3. Strategi Kemitraan

Pada tahapan awal, perlu diwujudkan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya, bangsa, dan yang bernuansa kebudayaan dimana apresiasi masyarakat dapat

ditingkatkan. Pada tahapan selanjutnya adalah memperluas dan memperkuat jaringan kemitraan yang sinergik antara sesama komponen masyarakat dan pemerintah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional untuk mempromosikan dan melaksanakan kegiatan peningkatan apresiasi serta pelestarian dan pengembangan budaya bangsa.

Hal penting yang perlu disiasati dan disikapi bersama secara bijak adalah pada tahapan implementasi peningkatan apresiasi budaya, dimana masyarakat diposisikan sebagai pelakunya. Disini akan dikemukakan contoh-contoh konkrit dari pengalaman jajaran Ditjen Diklusepora dalam meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap penguasaan pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan kemajuan jaman sehingga mereka gemar belajar dan saling membelajarkan. Kami melihat bahwa di dalam lingkungan masyarakat sendiri telah ada kegiatan, lembaga, organisasi yang dapat mendinamisasi pelaksanaan program pembelajaran masyarakat. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengimplementasikan program atau kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi warga bangsa terhadap budayanya sendiri. Kegiatan tersebut antara lain; 1) mengadakan lomba, 2) menyelenggarakan pameran, 3) menyelenggarakan pementasan, 4) menyelenggarakan seminar, simposium, lokakarya, 5) karya wisata budaya, 6) muhibah seni dan budaya ke manca negara, 7) pengembangan kelompok-kelompok belajar dibidang kesenian dan kebudayaan, 8) penyelenggaraan kursus dibidang kesenian/kebudayaan, 9) melaksanakan kegiatan magang pada pelaku dan pengembangan produk seni/budaya, 10) pengembangan dan pelembagaan sanggar-sanggar dibidang kesenian dan kebudayaan.

Saat ini begitu banyak lembaga dan organisasi yang ada di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau fasilitas untuk menyelenggarakan program yang berkaitan dengan usaha peningkatan dan pengembangan budaya bangsa. Lembaga dan

organisasi itu antara lain; Lembaga Kursus, LKMD, PKK, Karang Taruna, Organisasi Mitra Diklusemas (HIPKI, HISPPI, Tiara Kusuma, HARPI Melati, PAKSI, IPBI Kartini, IPBI, IKABOGA), SKB, BPKB, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3), Kelompok Belajar Paket A, dan Paket B, Kelompok Belajar Olah Raga, Kelompok Belajar Usaha, dan berbagai paguyuban yang ada di masyarakat.

Implementasi program peningkatan apresiasi serta pelestarian dan pengembangan budaya bangsa dengan memanfaatkan berbagai kegiatan, lembaga, organisasi yang ada di masyarakat perlu mendapat injeksi dan dukungan sebagai kontribusi nyata dari pemerintah. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah; 1) pelatihan/penataran bagi para tokoh, pimpinan organisasi pimpinan lembaga untuk memberikan pembekalan wawasan dalam melaksanakan program pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, 2) penyediaan berbagai informasi seperti buku, modul, risalah yang berkaitan dengan kebudayaan sebagai bahan belajar, 3) bantuan teknis dan anggaran yang mendukung usaha-usaha masyarakat, 4) mengembangkan kegiatan promosi budaya di tingkat lokal, nasional dan internasional.

IV. KESIMPULAN

Pelestarian budaya bangsa merupakan suatu upaya yang perlu dilakukan secara sistemik dan sistimatis dalam rangka menanamkan rasa mencintai terhadap budaya bangsanya sendiri. Dalam pelaksanaan usaha-usaha pelestarian budaya bangsa perlu dilakukan secara kritis dan objektif agar dapat dipilih dan dipilah nilai-nilai budaya bangsa yang positif, yang dapat mempertebal jiwa kebangsaan, jiwa kejuangan, semangat persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai budaya yang dapat memperkuat jati diri bangsa serta dapat menyesuaikan dengan budaya modern yang memperkuat eksistensi bangsa di era global perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Pengembangan kebudayaan yang dapat mentransformasikan masyarakat dari tradisi yang statis, dan ketertinggalan di bidang kebudayaan agar menjadi maju, modern dan berperadaban perlu terus dilakukan sehingga seluruh warga bangsa menjadi bangsa yang berbudaya. Dalam kontek itu, masyarakat sudah seharusnya diposisikan sebagai pelakunya.

Perlu dilakukan langkah-langkah strategis dengan implemen-
tasinya yang akomodatif untuk meningkatkan apresiasi seluruh warga
bangsa terhadap budaya bangsanya sendiri. Masyarakat dengan selu-
ruh komponen, kelembagaan organisasi dan kegiatan yang telah ada
perlu didayagunakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan
apresiasi sekaligus melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa
Indonesia.

PERANAN WARISAN BUDAYA SEBAGAI PEREKAT KERUKUNAN BANGSA

Oleh:
I Wayan Ardika

Abstrak

Manusia mempunyai karakter yang unik, yakni kesadarannya terhadap masa lalu. Hal ini tidak dimiliki oleh makhluk lain. Masa lalu sering dianggap sebagai akar atau identitas budaya; ibarat sebatang pohon, masa lalu adalah *akar* dan pohon itu tidak akan tumbuh dengan subur tanpanya.

Warisan budaya memiliki cakupan yang sangat luas terdiri atas warisan budaya yang dapat diraba (*tangible*), dan tidak teraba (*intangible*). Warisan budaya yang dapat diraba (*tangible*) adalah berbagai benda hasil karya manusia baik yang dapat dipindahkan maupun tidak dapat dipindahkan termasuk benda cagar budaya (BCB), sedangkan yang tidak dapat diraba (*intangible*) dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu yang tertangkap dengan panca indera selain indera peraba, dan yang bersifat abstrak.

Dalam perspektif sejarah, bangsa Indonesia mempunyai warisan budaya yang sangat panjang, meliputi budaya Austronesia, Hindu/Budha, Islam dan Eropa. Elemen budaya Austronesia telah merambah seluruh wilayah Nusantara sekitar 4000-3500 tahun yang lalu. Faktor lingkungan, agama (sentuhan budaya Hindu, Budha, Islam dan Nasrani /Eropa) dan rentangan waktu yang sangat lama telah menyebabkan terjadinya perbedaan kebudayaan di kalangan pendukung budaya Austronesia di kepulauan Indonesia. Namun demikian, masih ada ciri-ciri umum budaya Austronesia yang dapat dijumpai di Indonesia adalah: persamaan bahasa, pemujaan leluhur, kebiasaan menentukan senioritas (*birth order*) dalam kekerabatan, penggunaan perahu bercadik, tradisi seni yang muncul dari zaman pra-sejarah hingga kini.

Pemahaman tentang warisan budaya masa lalu yang bersumber dari elemen budaya Austronesia, Hindu, Budha, Islam dan Eropa, baik yang *tangible* maupun *intangible* sangat penting sebagai perekat kerukunan bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal.

Pendahuluan

Manusia sebagai keturunan dari *Homo Sapien* mempunyai karakter yang unik yakni kesadarannya terhadap masa lalu. Kesadaran tentang masa lalu tidak pernah ditemui pada makhluk lain, kecuali manusia. Penelitian pada berbagai suku bangsa menunjukkan adanya persamaan persepsi bahwa masa lalu dianggap sebagai akar (*root*) atau identitas budaya. Ibarat sebatang pohon, masa lalu adalah akar dan pohon itu tidak akan tumbuh dengan subur tanpanya (Cleere 1985: 5; Layton 1994:2-3).

Warisan adalah peninggalan atau sesuatu yang diwariskan dari generasi yang satu kepada generasi yang lain. Warisan budaya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu yang bersifat kebendaan dan dapat diraba (*tangible*), maupun yang tidak dapat diraba (*intangible*) (Edi Sedyawati 1997:177). Benda warisan budaya yang dapat diraba (*tangible*) adalah berbagai benda hasil karya manusia baik yang dapat dipindahkan maupun tidak dapat dipindahkan termasuk benda cagar budaya (BCB). Warisan budaya yang tidak dapat diraba (*intangible*) dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu yang tertangkap dengan panca indera selain indera peraba, dan yang bersifat abstrak. Warisan budaya yang dapat ditangkap oleh panca indera di luar perabaan misalnya melalui pendengaran (seni musik, sastra lisan dan pembacaan sastra), melalui penciuman (wewangian), melalui indera penglihatan (seni pertunjukkan, musik, teater, tari dan pakaian adat), dan yang dapat dicicipi seperti masakan. Warisan budaya yang bersifat abstrak di antaranya adalah konsep-konsep budaya dan nilai budaya.

Bahasa dan sistem ilmu pengetahuan termasuk ke dalam konsep yang khas bagi suatu konsep budaya.

Berdasarkan pemaparan di atas, konsep warisan budaya cakupannya sangat luas baik yang *tangible* maupun *intangible*. Dilihat dari perspektif sejarah, bangsa Indonesia memiliki warisan budaya yang sangat panjang dan beragam yaitu budaya Austronesia, Hindu, Budha, Islam, dan Eropa (Nasrani).

Budaya Austronesia telah tersebar di seluruh kepulauan Nusantara sekitar 4000 -3500 tahun yang lalu. Sebelum abad 15, pendukung budaya Austronesia mendiami hampir separuh dari dunia ini yakni dari pulau Madagaskar di sebelah barat sampai ke pulau Paskah di timur, dan pulau Formosa di utara hingga Selandia Baru di selatan (Bellwood *et.al.* 1996). Faktor geografis dan perbedaan lingkungan hidup serta pengaruh empat agama besar yaitu Hindu, Budha, Islam dan Kristen telah menyebabkan terjadinya perbedaan kebudayaan antara masyarakat yang mendiami pulau/daerah yang satu dengan pulau/daerah yang lain di Indonesia. Namun demikian, masih ada ciri-ciri umum budaya Austronesia yang dapat dijumpai di Indonesia antara lain: persamaan bahasa, pemujaan leluhur, kebiasaan menentukan senioritas (birth order) dalam kekerabatan, penggunaan perahu bercadik, tradisi seni yang muncul dari zaman pra sejarah hingga kini (Bellwood *et.al.* 1996; Ardika 1999: 15). Pemahaman tentang elemen-elemen budaya Austronesia ini sangat penting dilakukan karena merupakan landasan atau fondasi dari kebudayaan masyarakat Indonesia/Nusantara. Kesamaan warisan budaya dan masa lalu akan menumbuhkan rasa kekeluargaan dan persatuan, yang pada gilirannya akan dapat menjadi perekat kerukunan bangsa.

Kedatangan budaya Hindu, Budha, Islam dan Kristen (Eropa) di Indonesia telah meninggalkan warisan budaya baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Sejumlah benda cagar budaya seperti candi (Hindu/Budha), mesjid, gereja ataupun bangunan dari masa kolonial merupakan warisan dari masa lalu. Di samping warisan budaya fisik,

ide, gagasan, konsep dan nilai budaya dari empat agama besar tersebut memberi andil yang besar dalam terbentuknya kebudayaan nasional Indonesia. Makalah ini akan lebih terfokus pada pemaparan warisan budaya *tangible* atau fisik.

Nilai dan Makna Warisan Budaya

Warisan budaya yang bersifat *tangible* mempunyai berbagai nilai dan makna, sesuai dengan konteksnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa nilai dan makna warisan budaya masa lalu mungkin saja berbeda dengan persepsi masyarakat masa kini. Secara umum nilai dan makna warisan budaya dapat dipilah-pilah menjadi empat macam yakni asosiasi/simbolik, informasi, estetika dan ekonomi (Lipe 1984).

Benda warisan budaya dikatakan bersifat asosiatif karena benda tersebut merupakan bukti nyata yang dapat menghubungkan kita dengan masa lalu. Hanya melalui benda warisan budaya kita dapat mengadakan hubungan langsung (*direct access*) dengan masa lalu (Lipe 1984:4; Ardika 1995:5). Benda warisan budaya dapat dikatakan sebagai media atau simbol yang dapat membantu ingatan kita tentang masa lalu. Namun perlu disadari bahwa berbagai aspek masa lalu tidak seluruhnya terekam pada benda warisan budaya tersebut.

Nilai dan makna asosiasi dari benda warisan budaya tampaknya sangat relevan dengan makalah ini yaitu sebagai perekat kerukunan budaya bangsa. Warisan budaya masa lalu dapat menumbuhkan ingatan dan kesadaran bahwa leluhur kita sama dan memiliki kebudayaan yang dapat dibanggakan, dan sekaligus merupakan identitas budaya bangsa. Kesadaran tentang warisan budaya sebagai identitas bangsa mulai muncul pada masa pasca Perang Dunia II di beberapa negara bekas koloni seperti India, Zimbabwe (Rhodesia), Meksiko dan termasuk Indonesia. Negara-negara tersebut menggunakan

warisan budaya masyarakat lokal/asli sebagai jati diri atau identitas budaya bangsa bersangkutan, dan bukan warisan budaya dari pemerintah kolonial (Renfrew dan Bahn 1991). Dalam konteks ini, benda warisan budaya yang menjadi koleksi museum pun bagi masyarakat tertentu dapat membangkitkan kebanggaan dan kepercayaan tentang identitas atau jati diri mereka (Mulvaney 1985). Fenomena inilah tampaknya perlu ditumbuhkembangkan dan dihayati bersama dalam konteks kerukunan bangsa kita bahwa warisan budaya mempunyai nilai yang signifikan sebagai perekat kesatuan bangsa.

Di samping nilai dan makna assosiasi, warisan budaya juga mempunyai nilai informatif tentang masa lalu. Informasi tersebut dapat berupa keterangan mengenai masa pembuatan warisan budaya bersangkutan, fungsi, teknologi, keindahan dan bahkan pandangan atau alam pikiran individu atau masyarakat pembuatnya. Tugas para ahli (arkeologi/sejarah) bukan semata-mata untuk menggali dan mengkaji warisan budaya masa lalu, tetapi yang lebih penting adalah menyebarkan informasi tentang warisan budaya tersebut kepada masyarakat. Pemanfaatan media massa dalam menginformasikan warisan budaya masih sangat terbatas di negara kita sehingga pemahaman masyarakat tentang masa lalu belum optimal, akibatnya apresiasi dan upaya pelestarian warisan budaya tersebut menjadi sangat kurang.

Warisan budaya juga memiliki nilai dan makna keindahan atau estetika. Benda warisan budaya memiliki keindahan dalam bentuk, jenis dan teknik pengerjaannya sehingga menimbulkan daya tarik tersendiri. Keindahan dari suatu benda warisan budaya akan dapat menimbulkan rasa bangga dan kagum bagi generasi berikutnya. Persamaan bentuk maupun pola hias yang dimiliki oleh suatu benda warisan budaya dapat kiranya digunakan sebagai tali perekat untuk memelihara kerukunan masyarakat pemiliknya.

Nilai estetika dari suatu warisan budaya dapat dinikmati pada masa kini tanpa melihat konteksnya di masa lampau. Hal ini tidak

menutup kemungkinan bahwa nilai estetika masyarakat masa kini akan berbeda dengan nilai estetika masyarakat di masa lalu.

Keindahan yang dimiliki oleh warisan budaya tertentu sering menjadi faktor pengrusakan atau pencurian warisan budaya bersangkutan. Bila hal ini terjadi maka nilai informatif, asosiatif/symbolik dari warisan budaya bersangkutan tidak akan dapat diketahui atau diinterpretasikan.

Warisan budaya juga memiliki nilai ekonomis. Dikatakan demikian, karena sering benda warisan budaya tertentu mempunyai daya tarik bagi wisatawan, yang pada akhirnya akan dapat mendatangkan devisa. Pemanfaatan warisan budaya sebagai objek dan daya tarik wisata akan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Perlu dicatat bahwa di Indonesia sekitar 327 buah bangunan purbakala dimanfaatkan sebagai objek dan daya tarik wisata (Untoro Drajat 1995).

Upaya Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Warisan Budaya

Para ahli, pemerintah dan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pemahaman dan pelestarian warisan budaya. Ahli sejarah dan arkeologi mempunyai kemampuan untuk menjelaskan nilai dan makna warisan budaya kepada pemerintah dan masyarakat. Di pihak lain, pemerintah mempunyai kekuatan dan kewenangan untuk mengatur dan mengkoordinasikan komponen lainnya, sedangkan masyarakat sebagai penerima informasi juga mempunyai kekuatan ekonomi dan pendanaan dalam upaya pelestarian tinggalan masa lalu (MacLeod 1977).

Dalam konteks kerukunan bangsa, informasi tentang masa lalu perlu diungkap oleh para ahli dan selanjutnya disebarluaskan kepada masyarakat melalui media massa seperti TV, radio, film, surat kabar, buku, brosur, pameran ataupun seminar. Penyebaran informasi tentang

warisan budaya masa lalu perlu lebih ditingkatkan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Hal ini sangat penting karena pemahaman pemerintah maupun masyarakat tentang kebudayaan masa lalu akan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengenali asal-usul dan jati diri mereka, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Dalam hubungan ini, media massa memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap masa lalu.

Daftar Pustaka

- Ardika, I Wayan. 1995. Nilai dan makna tinggalan arkeologi sebagai sumberdaya budaya. Makalah disampaikan pada *Diskusi Imiah Arkeologi*. Denpasar, 1995.
- Ardika, I Wayan. 1999. 'Kebudayaan dan Persebaran Penutur Bahasa Austronesia'. *Linguistika*. Th. V, No. 10; pp: 13-17.
- Cleere, H. 1984. *Approaches to the archaeological heritage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cleere, H. 1989. *Archaeological heritage management in the modern world*. London: Unwin Hyman.
- Edi Sedyawati. 1997. Konsep dan Strategi Pelestarian Warisan Budaya. Makalah disampaikan pada *International Workshop on Balinese Cultural Heritage*. Denpasar, 29 Juli 1997.
- Layton, R. 1994. *Who Needs the Past. Indigenous values and Archaeology*. London and New York: Routledge.
- Lipe, W.D. 1984. 'Value and meaning in cultural resources'. Dalam Cleere, H.(ed)., 1984. *Approaches to the archaeological heritage*. pp: 1-11. Cambridge: Cambridge University Press.

MacLeod, D. 1977. 'Peddle or Perish: Archaeological marketing from concept to product delivery'. Dalam Schiffer, M.B. and Gumerman G.J. (eds)., 1977. *Concervation Archaeology*. pp: 63-78. New York: Academic Press.

Mayer-Oakes, William, J. 1989. 'Science, service and stewardship-a basis for the ideal archaeology of the future'. pp: 52-58. Dalam Cleere, H. (ed)., 1989. *Archaeological heritage management in the modern world*. London: Unwin Hyman.

McBryde, I. (ed)., 1985. *Who Owns the Past ?* pp: 86-98. Melbourne : Oxford University Press.

Mulvaney, J. 1985. 'A Question on Value: Museums and Cultural Property'. Dalam Renfrew, C. and Bahn, P. 1991. *Archaeology Theories, Methods and Practice*. London: Thames and Hudson.

PERAN WARISAN BUDAYA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA

Oleh: Dr. Mukhlis Paeni

Warisan adalah sesuatu yang harus di jaga dan di perjuangkan. Warisan lahir dari satu peristiwa serah terima, yang melibatkan pemberi dan penerima waris. Jika yang dimaksud di sini warisan budaya, maka proses transmisi menjadi sangat penting, karena melalui transmisi terjadi pengalihan atau pewarisan nilai-nilai budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Pertanyaan yang muncul; adalah: siapa pemberi waris, apa yang di wariskan dan siapa penerima waris. Dalam tatanan kehidupan kenegaraan kita, salah satu warisan utama yang paling berharga yang diwariskan kepada kita oleh para leluhur, adalah, keragaman yang kita jadikan sebagai dasar kehidupan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Pada tatanan kehidupan kenegaraan yang baru, negara kesatuan RI yang lahir setelah proklamasi 17 Agustus 1945, menjadi wadah penyimpanan warisan ini telah di pindahkan dari sebuah raga lokal yang Ethnosentris sifatnya ke sebuah wadah yang lebih besar ke dalam raga Nasional. Dalam wadah yang baru itu ia memerlukan pemeliharaan yang sesuai dengan konteksnya yang aktual, suatu bentuk Negara Kesatuan dalam simbol ikatan Nasional. Dalam ikatan itulah para ahli-ahli waris melangsungkan hidupnya sehari-hari. Pemeliharaan warisan budaya itu tidak lagi melalui ritual dalam tata cara tradisional melainkan melalui Pendidikan.

Pendidikan diperlukan untuk memberi kesadaran baru bagi sejumlah orang atau sejumlah suku untuk memahami eksistensinya menjadi suatu bangsa. Tanpa pendidikan tak mungkin seorang dapat mengerti sesama warganya dan meluaskan ikatan kesatuannya

melampaui batas desa, sementara mereka tidak saling mengerti dan saling mengenal. Mereka tidak dapat berkomunikasi dengan penduduk desa sekitarnya bila ia sendiri, demikian juga tetangga-tetangga desanya tidak memiliki pengertian sedikitpun apa arti hidup sebagai suatu bangsa¹. Jika Pemahaman ini digunakan untuk mengamati fenomena yang terjadi di Ambon, Halmahera, Mataram, Sambas, Batam, Ketapang dll, tampak dengan jelas bahwa berbagai pranata sebagai wahana yang senantiasa menjadi motor dinamika masyarakat sebenarnya tidak bergerak lagi, sendi-sendi institusi “Tradisional” kita sudah kropos², atau sudah tidak berfungsi, karena itulah pranata tersebut tidak mampu lagi melakukan transmisi atas nilai-nilai budaya dalam masyarakatnya. Kejadian ini menunjukkan juga kegagalan institusi Pendidikan Nasional kita, dalam mengemban tugas utamanya menciptakan manusia berbudaya, karena sesungguhnya pendidikan adalah wahana dari proses transmisi kebudayaan. Banyak orang menjadi heran dan tercengang, bagaimana mungkin antara satu suku yang sesungguhnya bersaudara saling membunuh, bukanlah selama ini mereka hidup rukun dan damai. Jika kita mau dengan jujur mengamati salah satu penyebabnya, adalah karena institusi tradisional yang menjaga kelangsungan hidup tradisi kerukunan itu tidak ada lagi dalam dunia realitas masyarakat, ia hanya ditemukan dalam drama pariwisata, dengan sebutan Upacara Adat yang sering kali tidak di mengerti lagi oleh masyarakatnya. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai acara “budaya” dilakukan dengan maksud untuk merukunkan kembali kelompok-kelompok masyarakat yang bertikai. Acara semacam ini tidak terlalu bisa diharapkan, menyelesaikan masalah karena tak lebih dari sebuah ritual baru yang tidak melembaga dalam masyarakat, karena peran acara tersebut sebagai sebuah institusi tidak dapat mengganti lembaga lama yang sudah kropos itu. Karena itu berbagai kejadian dalam kehidupan masyarakat akan selalu berulang, dan berulang lagi selama pendidikan diabaikan. Yang saya maksud dengan pendidikan disini bukanlah pendidikan

yang hanya sekedar memberi ijazah-ijazah dengan berbagai gelar akademis yang hebat seperti yang sedang menjamur dewasa ini, kita semua sangat prihatin atas keadaan ini, karena hal ini adalah malapetaka dalam dunia pendidikan kita. Kita semua menyaksikan dalam waktu singkat begitu banyaknya orang yang memperoleh gelar-gelar akademis dengan begitu mudah melalui wisuda sarjana dari lembaga pendidikan yang tidak jelas ujungpangkalnya. Malapetaka ini adalah wabah yang mematikan pendidikan nasional kita. Pada dimensi yang lain pendidikan berperan juga dalam menciptakan pengelola Negara yang diperankan oleh para Aparatur Negara. Dalam kelangsungan hidup sebuah negara “Bangsa” seperti Indonesia yang terdiri diatas ke “Bhinnekaan”, penanganan sebuah Negara semacam ini memerlukan penanganan yang profesional dari aparat pemerintah dalam menjalankan birokrasi, semua ini memerlukan pendidikan.

Bagi suatu negara Bangsa yang multi Etnik sifatnya (seperti Indonesia) sangat diperlukan adanya suatu mekanisme yang dapat menyalurkan gagasan-gagasan seorang pemimpin bangsa yang kebijakan-kebijakannya dapat menembus wilayah yang luas, melebihi jangkauan suaranya. Mekanisme ini hanya dapat berjalan baik jika ia dikelola oleh orang-orang berpendidikan. Namun demikian menyadari arti pentingnya pendidikan saja belumlah cukup. Karena yang terutama sesungguhnya bagi suatu bangsa ia harus terus belajar dan senantiasa mengaktualisasikan dirinya secara tanggap, hanya dengan sikap seperti itu suatu negara dan masyarakat berbudaya bisa tercapai secara efektif.

Para petani yang menjadi warga desa harus lebih produktif, para pengusaha yang banyak berdiam di kota-kota, harus lebih memacu usaha-usaha dari perusahaan-perusahaannya dan senantiasa mempelajari bidang-bidang usaha yang baru, yang selalu aktual dengan kebutuhan pasar/masyarakat konsumennya. Para pegawai negeri harus selalu meningkatkan diri agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan cepat dan teratur dan profesional semua ini memerlukan pendidikan³.

Dengan demikian pendidikan sesungguhnya berperan multi fungsi. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk peningkatan ekonomi dan manajemen pemerintah. Lebih dari itu pendidikan menghasilkan sistem intelektual, seperti kesusastraan, seni, hukum, ilmu pengetahuan dll. Melalui pendidikan para pemuda belajar bagaimana memberi bentuk baru pada sistem-sistem intelektual dimasyarakatnya. Dalam setiap masyarakat, melalui pendidikan disekolah-sekolah akan lahir orang-orang pilihan yang kelak akan menjadi bagian dari elitnya, merekalah yang kemudian menjadi tokoh-tokoh masyarakat dalam berbagai bidang, merekalah yang menjadi medium bagi kelangsungan hidup sebuah peradaban, inilah sesungguhnya bahagian yang paling hakiki dari sebuah pewarisan nilai-nilai budaya dalam suatu bangsa. Pewarisan nilai yang dimaksud bukanlah berarti secara harfiah pewarisan wujudnya, tetapi pewarisan jiwanya, spiritualitasnya. Jiwa inilah yang secara aktual selalu menemukan bentuk-bentuknya yang baru yang sesuai dengan format dari era yang paling mutakhir. Karena itu nilai-nilai budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi kemudiannya harus selalu melalui reaktualisasi, dan reaktualisasi hanyalah mungkin dilakukan melalui medium manusia berpendidikan. Mungkin kita akan bertanya: Apakah pendidikan yang berlangsung dinegeri kita sudah menciptakan manusia terdidik. Apakah arah pendidikan, bersama instrumen dalam penyelenggaraan pendidikan kita sudah di rancang untuk menciptakan manusia “modern” manusia yang menggunakan fikirannya secara bebas dan kreatif. Banyak orang menduga bahwa arah pendidikan kita yang ada selama ini tak lebih dari sebuah mesin yang dirancang untuk menghasilkan generasi yang patuh. Jenis pendidikan semacam ini pastilah tidak akan mampu menciptakan tatanan kehidupan baru, atau mengaktualisasikan nilai-nilai tradisionalnya.

Di Era Kebangkitan Nasional, generasi muda terdidik Indonesia bangkit, merekalah yang melalui penalarannya menyadari realitas keberadaan bangsanya. Ketika itulah sesungguhnya sebuah

perubahan mulai dicanangkan. Gagasan-gagasan merekalah, yang kemudian menjadi dasar bagi suatu kehidupan baru. Pemikiran ini mengantar kita memasuki awal kemerdekaan, pada saat itu bangsa Indonesia sesungguhnya sudah mulai melangkah ke satu tatanan kehidupan dengan lahirnya suatu Bangsa Baru ke pergaulan Internasional. Ketika itulah beberapa banyak tatanan tradisional di Era Pra Kolonial dan Era Kolonial mulai kita tinggalkan.

Ketika itulah kita seharusnya telah merancang secara utuh format pendidikan kita untuk menjadi mediator bagi terjadinya perubahan-perubahan baru di Indonesia, karena pada hakikatnya pendidikan adalah medium bagi terciptanya sebuah tatanan Budaya Baru bagi manusia Indonesia Baru. Kita sangat menyadari begitu banyak institusi tradisional yang tidak sesuai lagi dalam tatanan kehidupan Indonesia Baru Pasca kemerdekaan. Lembaga-lembaga pendidikan/sekolah-sekolah seharusnya memegang peranan penting sejak itu karena sekolah-sekolah/lembaga-lembaga pendidikanlah yang menciptakan manusia (modern) sebagai pendukung kebudayaan masyarakatnya, kebudayaan yang di maksudkan disini, adalah dalam arti yang luas. Lembaga-lembaga pendidikan/sekolah-sekolah berperan penting memberi bekal penalaran kepada masyarakat agar dapat menilai mana-mana dari tradisinya yang berhenti karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, mana-mana yang berlanjut dan mana-mana yang berubah bentuk. Tanpa pendidikan seleksi tidak mungkin terjadi, tanpa pendidikan warisan nilai-nilai itu tak dapat diaktualkan, karena itu amat sederhana dapat dikatakan warisan nilai-nilai budaya suatu bangsa hanya dapat di jaga dan diwariskan melalui pendidikan. Tidak dapat disangkal lagi bahwa pendidikan adalah satu alat yang dapat menjaga kelestarian Budaya. Melalui pendidikan suatu bangsa akan mampu mengaktualkan nilai budaya bangsanya, karena kebudayaan adalah satu dinamika hidup suatu bangsa, kebudayaan harus selalu aktual dalam kehidupan masyarakat pendukungnya.

Jika kita membuka lembaran sejarah Negeri kita akan terlihat dengan jelas suatu realitas bahwa lembaga pendidikan dalam arti yang sempit “sekolah” adalah satu-satunya institusi yang tetap hidup disemua era, sekalipun terjadi pergantian kekuasaan. Kita juga tidak dapat menutup mata betapa lembaga pendidikan digunakannya juga secara praktis sebagai institusi untuk menciptakan manusia dengan pola pemikiran dan tingkah laku, seperti yang diinginkan oleh penguasa. Kita dapat menyaksikan betapa banyak lembaga-lembaga sosial-kemasyarakatan satu demi satu tidak berfungsi. Sementara lembaga pendidikan/sekolah satu-satunya lembaga yang tidak pernah mati karena itu pewarisan nilai-nilai budaya hanya memungkinkan dapat dilakukan melalui pendidikan. Melalui sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan formal anak didik juga memperoleh cakrawala pandang dan pengetahuan yang abadi sifatnya, seperti kemampuan menghayati karya-karya seni, musik dan dialektika dalam perdebatan dalam berbeda pendapat, karena hanya orang yang berpendidikanlah yang mampu dan tanggap menghadapi kritik, atau opini yang berbeda secara demokratis, secara obyektif. Yang dimaksud disini ialah bahwa hanya orang yang berpendidikanlah yang memiliki kesadaran akan keragaman sikap dan opini disekitarnya, dan tidak menutup dirinya sendiri, dengan menerima realitas bahwa orang lain mempunyai pendapat yang berbeda dengan dirinya. Orang berpendidikan dapat menerima pendapat yang berbeda-beda tanpa perlu secara tegas menolaknya hanya karena khawatir kalau-kalau pendapat-pendapat itu akan menghancurkan pandangannya.

Kita telah memiliki pengalaman sejarah yang baik sejak Era Orde Lama di masa-masa akhir kekuasaan Soekarno, hingga ke masa kekuasaan Orde Baru, selama 32 tahun lamanya, bagaimana keragaman pandangan ini ditekan sampai ke bawah permukaan kehidupan kenegaraan kita, sekalipun konsep kebhinnekaan itu kita fahami bersama. Dewasa ini kita diperhadapkan lagi dengan munculnya UU No.22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang akan di

berlakukannya secara “utuh”, pada bulan Mei 2001. UU ini akan memberlakukan apa yang disebut otonomi daerah. Banyak harapan yang digantungkan pada UU tersebut. Terbayang dibenak banyak orang masalah yang menyangkut keleluasaan bagi daerah mengatur dan menyelenggarakan banyak hal bagi dirinya. Pembangunan daerahnya, bagi hasil dalam takaran yang berimbang antara pusat dan daerah, kekuasaan penuh dalam mengatur penyelenggaraan administrasi pemerintah, rekrutment dalam berokrasinya dan banyak lagi. UU. No.22 tahun 1999 ini pada dasarnya mengekalkan adanya suatu realitas kebhinnekaan itu.

Dari kaca mata “ilmu pemerintahan”, tampak di atas permukaan, UU No 22 tahun 1999 sudah dianggap sebagai hasil yang maksimum, dan dapat diandalkan dalam meredam tingginya suhu politik lokal yang muncul dimana-mana dengan tuntutan pemisahan diri dari ikatan Negara Kesatuan RI.

Kalaulah seandainya pelaksanaan UU itu betul-betul sudah terwujud, kita harus siap dengan sebuah masalah baru yang amat mencemaskan bagi kelangsungan hidup Negara dan Bangsa kita, masalah kebudayaan. Sekalipun hal ini amat memprihatinkan namun hal ini belum pernah dibicarakan secara serius oleh cerdik pandai dan para cendekiawan kita yang sering kita lihat rebutan bertutur sejak Era reformasi diluncurkan. Apa yang saya maksudkan disini adalah runtuhnya tatanan budaya kita sejak lima puluh tahun terakhir. Bisakah anda membayangkan suatu pemandangan yang amat tragis melihat anak bangsa ini menangis reruntuhan budayanya di celah-celah UU No.22 tahun 1999. Ketika itulah orang mulai mencari dan berusaha menemukan jati dirinya, identitasnya, sejarah, adat istiadat, dan kebudayaan daerahnya. Mengapa mereka mencari. Tampaknya hal ini menjadi suatu kebutuhan yang amat mendasar bagi sebuah daerah otonomi, karena predikat otonomi tidak hanya diatas perhitungan statistik bahwa suatu daerah memiliki penduduk yang besar, yang secara kuantitatif sebagai SDM yang andal, atau karena

daerah itu memiliki sumber daya alam yang kaya. Sebagai penopang ekonominya. Tetapi suatu daerah otonomi membutuhkan simbol atau pralambang bagi jati diri wilayahnya. Suatu realitas bahwa ada daerah otonomi yang tidak memiliki kesulitan dalam pencarian, karena sifat masyarakatnya yang “Monoethnik” atau karena ia secara terus menerus masih terikat oleh simbol tradisionalnya. D.I. Yogyakarta atau propinsi Bali misalnya. Tetapi bandingkan dengan Sulawesi Selatan misalnya yang daerah tingkat II nya, sebanyak 23 Kabupaten. Semua daerah tingkat II itu berasal dari kerajaan-kerajaan lokal, di era prakolonial. Bentuk ini kemudian berubah menjadi daerah-daerah Onderafdeeling, yang kemudian disatukan dalam ikatan Affdeeling, sebagai persekutuan kerajaan-kerajaan lokal dalam tatanan kekuasaan Hindia Belanda. Saya ingin mengemukakan bahwa menyatukan daerah-daerah yang memiliki karakteristik yang dianut secara fanatik oleh pendukungnya bukanlah masalah yang mudah. Jika pemerintahan akan dijalankan dengan baik dan terkendali, birokrat dalam Birokrasinya tidak hanya profesional, tapi juga harus terkendali. Pada tahap ini muncullah masalah suku (Ethnis), dapat dibayangkan bahwa daerah-daerah kabupaten yang secara etnis di huni oleh orang-orang Bugis akan diisi oleh Birokrat yang terdiri atas orang-orang Bugis demikian juga daerah Makasar, Mandar dan Toraja, di Sulawesi Selatan. Hal yang sama akan terjadi di tempat lain. Di Sumatra Utara misalnya, antara orang-orang Melayu dan orang-orang Batak dan seterusnya demikian juga di Kalimantan, dan di tempat-tempat lain. Jika otonomi akan dijalankan di Tingkat I persoalannya lain lagi, misalnya di D.I.Aceh. Mungkin masalah agama tidak dipertentangkan, tetapi masalah sosial budaya yang menyangkut masalah Mayoritas dan Minoritas dalam penyelenggaraan kekuasaan dan administrasi pemerintahan, tidak dapat di hindari. Sekalipun hal ini bukan masalah yang baru di Aceh. Semua orang tahu bahwa sudah sejak lama orang-orang Aceh Pidie dan Aceh Besar mendominasi berbagai sektor D.I Aceh. Tidak hanya dalam peran pemerintahan

dan sektor ekonomi daerah, tetapi dan juga diperguruan tinggi. Hal semacam ini sudah menjadi pemandangan sehari-hari, tetapi masalah ini tidak pernah dimunculkan kepermukaan sebagai suatu yang serius karena hal ini berhasil diredam oleh Mitos Kesatuan Negara Republik Indonesia, sebagai sebuah Negara Bangsa. Karena itu tidak banyak orang yang mau mempersoalkannya sebagai sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Akan tetapi tampaknya dalam waktu yang tidak lama lagi masalah ini akan muncul kepermukaan karena selogan yang menutupinya mengalami degradasi yang amat deras. Pada saat inilah kebudayaan menjadi sebuah topik permasalahan yang amat serius. Orang-orang Gayo di dataran tinggi Aceh Tengah mengukuhkan keberadaannya sebagai minoritas, orang-orang Alas di pedalaman Aceh Tenggara lebih tersisihkan, dan banyak lagi.

Jika kita mencermati permasalahan ini secara lebih mendalam, sesungguhnya persoalan semacam ini tidak perlu terjadi karena, ketika kita memasuki dunia kehidupan Baru Negara Republik Indonesia, masalah Ethnis tidak lagi menjadi sekat Politik dalam sebuah Negara kesatuan Republik Indonesia. Persoalannya sekarang apakah dalam jiwa masyarakat Indonesia sekarang secara konseptual ide persatuan itu masih ada dalam memori kolektifnya jika tidak ada lagi, tentu ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, atau ada yang salah dalam proses transisi nilai-nilai budaya kita. Bertolak dari UU No.22 tahun 1999, dalam waktu yang tidak lama lagi akan terbentuk daerah-daerah otonomi diseluruh Indonesia format baru tersebut tidak hanya merubah tatanan kenegaraan kita, tetapi lebih dari itu format daerah otonomi akan berdampak jauh terhadap kehidupan kebudayaan, dengan terjadinya kristalisasi dalam Kebhinekaan. Ketika itu kita akan dihadapkan pada suatu permasalahan yang amat serius tidak hanya untuk dibicarakan tetapi dihadapi. Yakni bagaimanakah wujud dari Kebudayaan Nasional kita, dalam format ketatanegaraan yang bertopang pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 itu. Bagaimanakah nasib istilah puncak-puncak kebudayaan daerah seperti yang

disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai inti dari kebudayaan nasional. Sekalipun telah kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya formula puncak-puncak itu telah gagal dalam mewujudkan apa yang disebut dengan kebudayaan nasional. Kegagalan ini sesungguhnya ibarat suatu kecelakaan beruntun, karena kegagalan itu terkait dengan rangkaian kegagalan kita dalam memberi arah pada sistem pendidikan nasional yang dianut selama ini.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Undang-Undang tersebut dikeluarkan dalam rangka memantapkan ketahanan nasional serta mewujudkan masyarakat yang berakar pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional yang sifat Bhineka Tunggal Ika dan berdasarkan Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ketentuan umum UU tersebut dijelaskan bahwa: Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia.

Akan tetapi jika kita mau mengamati secara teliti pasal demi pasal dari UU tersebut demikian juga Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan sebagai penjelasan bagi pelaksanaan UU itu, kita tidak menemukan satu pasalpun yang menyinggung atau membicarakan, apalagi mengatur bagaimana yang dimaksud dengan pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan nasional itu. Sesungguhnya kegagalan dalam merumuskan arah pendidikan nasional kita sudah tampak dengan jelas dari awal, karena itu sejak awal sebenarnya kita telah menyadari bahwa pendidikan nasional kita telah tercabut dari akar kebudayaannya⁴, atau dengan kata lain bahwa pendidikan nasional kita sama sekali berdiri tanpa akar. Namun anehnya, sekalipun kita telah mengganti berulang-ulang kurikulum kita, kita ternyata belum mampu menciptakan manusia terdidik yang berbudaya, dalam arti manusia yang betul-betul menyadari tanggung jawabnya sebagai warga negara. Masih segar dalam ingatan kita, ketika kita menyaksikan dalam kisah sejarah satu persatu daerah-daerah dari berbagai pusat kekuasaan lokal dari sabang-merauke menyatakan diri

bergabung dalam ikatan negara kesatuan RI. Ketika itu mereka telah mengorbankan segala-galanya, kemudian mereka menggantungkan harapan, impian, kepercayaannya bahwa Negara Kesatuan RI. Kita pun menyaksikan dalam sejarah bagaimana daerah-daerah itu kemudian merasa tidak puas dan kemudian terjadi pergolakan-pergolakan daerah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Pergolakan itu adalah luapan rasa kekecewaan karena harapan-harapan mereka tidak terpenuhi. Ketika batas kesabaran itu sampai kepuncaknya terjadilah kerusuhan dan keonaran dimana-mana. Tampak suatu pemandangan yang amat mengerikan, terjadi aksi penjarahan dimana-mana, pembunuhan masal, perkelahian antar warga. Teriakan dengan caci maki yang sulit dipercaya bahwa cacian itu keluar dari mulut suatu bangsa yang berbudaya, tawuran antar pelajar, perkelahian antar suku dan agama dan banyak lagi. Kemudian disebut bahwa semua itu dipicu oleh profokator, makhluk yang belum pernah dikenal jenis spesiesnya oleh penegak hukum di negeri kita. Namun dari dimensi kebudayaan biang dari seluruh kerusuhan itu adalah buah dari kegagalan kita merumuskan secara jelas arah pendidikan nasional kita. Karena kegagalan itu kita tidak mampu menciptakan manusia berbudaya sebagai pendukung kebudayaan nasional kita.

Ketika terjadi perdebatan dalam permusyawaratan perguruan Indonesia di Solo Tahun 1935 yang kemudian dikenal dengan polemik kebudayaan. Sutan Takdir Alisyahbana menginginkan agar kebudayaan Indonesia berorientasi ke masa depan, kebudayaan yang bertopang oleh Iptek yang secara khusus berasal dari Barat, karena itu kebudayaan Indonesia harus dinamis. Pada kongres kebudayaan 1991 Sutan Takdir Alisyahbana tetap konsisten pada pendapatnya 65 tahun yang lalu, dengan menegaskan kembali bahwa pengembangan kebudayaan nasional Indonesia tidak berkesinambungan dengan pengembangan kebudayaan pada periode sebelumnya. Dipihak lain Sanusi Pane mewakili kutub yang berlawanan yang lebih menekankan pada budaya Timur yang ditopang oleh unsur

kerohanian, proses gotong royong dan sikap tradisional yang abadi dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia⁵.

Polemik kebudayaan tahun 1935 itu tampaknya hanya relevan didiskusikan dalam wacana intelektual, karena hingga saat ini kita tidak pernah mengambil sikap yang tegas, kontinyu dan bersungguh-sungguh untuk merumuskan, menjelmakan apalagi menjalankan satu diantara dua pendapat itu sebagai pilihan yang tepat. Karena itu makalah ini tidak bermaksud mengulangi kembali polemik itu, karena format ketatanegaraan yang akan menjadi ladang persemaian kebudayaan kita dimasa depan sudah berubah. Daerah-daerah otonomi tidak lama lagi akan berdiri memperjelas eksistensi keberadaannya, dengan menghidupkan kembali simbol tradisionalnya yang semula kita kenal dengan kebudayaan daerah sekalipun hal ini bukan sesuatu yang mudah. Tampaknya sebagai suatu bangsa kita akan menghadapi suatu persoalan yang amat besar ialah bagaimana merumuskan kembali wajah kebudayaan nasional kita. Hal ini terjadi karena sesungguhnya perlambang yang selama ini diikuti sebagai identitas kebudayaan nasional kita secara perlahan-lahan mengalami degradasi yang deras.

Jakarta. 21 Februari 2000

Mukhlis

CATATAN KAKI

1. C. Arnold Anderson, Modernisasi Pendidikan Dalam Modernisasi Dinamika Pembangunan, edd. Myron Weiner, p16.
2. M. Junus Melalatoa, Kajian Ethnografi dan Pengembangan di Indonesia, dalam Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia, edd. Masinambouw, Yayasan Obor p.103, 1997.
3. C. Arnold Anderson, Ibid p.17.
4. H.A.R. Tilaar, Prof. Dr. Pendidikan Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional, PT. Remaja Rosda Karya, 1999. P.10.
5. Ibid, p.98.

LIITERATUR

Godement Francois.

1997 *The New Asian Renaissance*, London and New York.

Jurnal Seni Pertunjukan Indonesia.

1999 *Keragaman Dan Silang Budaya*, Indonesia

Kaplan David dan A. Manners.

1999 *Teori Budaya*, Yogyakarta

Wikan Unni.

1990. *Managing Turbulent Hearts*, The University of Chicago Press.

Lerner Daniel.

1983 *Memudarnya Masyarakat Tradisional*, Gadjah Mada University Press.

Soemardjan Selo, Prof, Dr.

1988 *Masyarakat Dan Kebudayaan*, Jakarta.

Masinambow. E.K.M.

1997 *Koentjaraningrat Dan Antropologi Di Indonesia*, Jakarta.

PENINGKATAN APRESIASI BUDAYA SEBAGAI PEREKAT PERSATUAN BANGSA DAN KESATUAN NEGARA MELALUI PROSES PENDIDIKAN

Oleh: Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed

PENDAHULUAN

Dalam membahas relevansi kebudayaan dan pendidikan, ada tiga hal yang mendorong untuk mengemukakan urgensi masalah ini.

1. Abad 21 dinyatakan sebagai abad informasi. Artinya informasi akan memegang peranan penting di dalam mengubah pandangan manusia terhadap seluruh aspek kehidupan. Apabila kita berbicara mengenai informasi maka kita berbicara mengenai kemampuan kognisi manusia. Di dalam menelaah mengenai peranan kognitif di dalam kehidupan manusia adalah sangat menarik apa yang diterbitkan oleh Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1999 *The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences* (MITECS). Di dalam ensiklopedi tersebut untuk pertama kali dirangkum seluruh pengetahuan yang berkembang hingga saat ini mengenai kognitif. Di dalam ensiklopedi tersebut yang mengupas mengenai masalah kebudayaan, antara lain diungkap teori Lev Vygotsky, seorang pakar Rusia yang mengemukakan mengenai perkembangan kognitif dari aspek ekologi, sosial dan budaya.¹ Betapa besar pentingnya kebudayaan di dalam perkembangan kognisi manusia berarti pula betapa besar peranan kebudayaan di dalam memasuki masyarakat digital abad 21.

¹. MITECS, hal. cxxii.

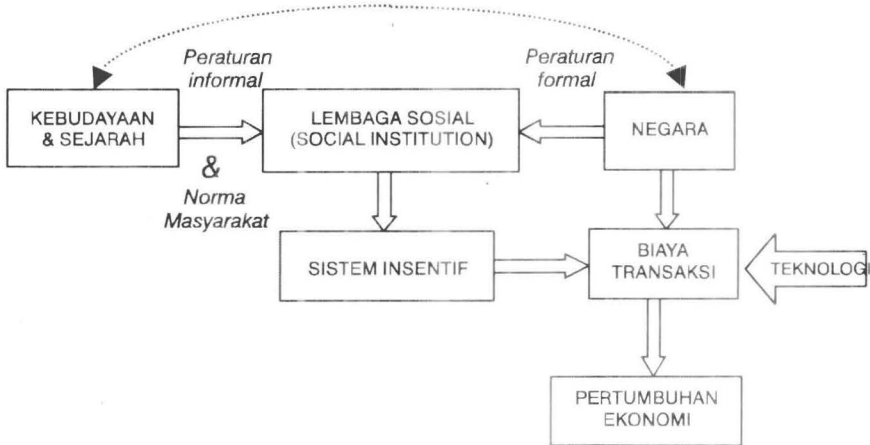
2. Sebelum terpuruknya naga Asia dalam bulan Juni 1997, di dalam *World Development Report 1997* dijelaskan mengenai proses privatisasi dan pentingnya meninjau kembali peranan negara (state) di dalam pertumbuhan ekonomi. Di dalam laporan tersebut dikemukakan ada dua kekuatan besar yang nanti akan menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ialah kebudayaan dan sejarah yang berisi peraturan-peraturan informal dan nilai-nilai, yang kedua ialah negara yang mengatur kehidupan bersama di dalam suatu masyarakat.² Kedua lembaga tersebut akan menentukan struktur kelembagaan yang ada di dalam suatu masyarakat dan negara. Struktur kelembagaan tersebut akan menghasilkan struktur insentif yang memungkinkan perkembangan lembaga, sedangkan negara akan menentukan hubungan-hubungan yang menumbuhkan kemampuan ekonomi dibantu oleh iptek. Apa yang diramalkan oleh Bank Dunia pada waktu itu telah banyak dibicarakan khususnya mengenai peranan negara yang perlu dibatasi dalam rangka untuk melahirkan suatu masyarakat madani (civil society). Namun demikian ketika negara-negara macan Asia tersebut terpuruk ekonominya, faktor kebudayaan dan sejarah ternyata belum banyak digali. Gerakan reformasi yang menyusul krisis tahun 1997 tersebut bukan hanya melahirkan gerakan demokrasi tetapi seharusnya juga melahirkan kebutuhan untuk meninjau kembali peranan budaya di dalam melahirkan struktur kelembagaan dalam kehidupan masyarakat baru yang lebih demokratis dan berbudaya.³

² *World Development Report 1997, The State in a Changing World*, hal. 30.

³ Krisis ekonomi yang melanda Indonesia mempertanyakan kembali efektivitas strategi pendidikan nasional era Orde Baru. Fuad Hassan mengatakan "Human resource development should consider all aspects of human creativity, since the existence of a nation does not depend on the state of affairs of its economy. Fuad Hassan, Cultural Dimension and Human Development (1992), hal. 32.

Gambar 1

**PERANAN KEBUDAYAAN, LEMBAGA SOSIAL DAN NEGARA,
DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI**



(Adaptasi dari: *World Development Report 1997*, hal. 30)

3. Masalah ketiga yang mengusik penulis mengemukakan hubungan erat antara kebudayaan dan pendidikan dalam rangka membangun masyarakat madani Indonesia, ialah perubahan dan restrukturisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Meskipun penjelasan resmi Pemerintah mengenai perubahan nama departemen tersebut belum dikeluarkan, namun masyarakat bertanya-tanya di mana peranan kebudayaan di dalam proses pendidikan nasional. Hal ini perlu oleh karena sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 departemen ini terus-menerus mempertahankan label Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengangkat masalah peranan kebudayaan dalam proses pendidikan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia baru. Dalam masalah ini kita renungkan kembali tesis Samuel P. Huntington⁴ serta Francis Fukuyama⁵ yang dikemukakan keduanya sesudah perang dingin serta menghadapi arus globalisasi patut kita renungkan kembali karena keduanya menonjolkan makna kebudayaan dalam keseluruhan kehidupan manusia. Kedua tokoh politik kebudayaan tersebut mengemukakan mengenai bentuk-bentuk kehidupan politik, yang menurut Fukuyama demokrasi liberal, akan mendominasi kehidupan bangsa-bangsa sesudah rontoknya faham komunisme. Huntington antara lain mempertanyakan mengenai kebenaran nilai-nilai Barat sebagai nilai-nilai universal, serta persoalan mengenai perlunya identitas bangsa di dalam perwujudan pusat-pusat budaya dunia yang akan mendominasi peradaban umat manusia dalam abad 21.

1. KEBUDAYAAN DALAM PENDIDIKAN NASIONAL

Kebudayaan di dalam pendidikan nasional bukanlah merupakan hal yang baru. Bahkan pendidikan nasional di dalam bentuknya yang *archaic* adalah kegiatan kebudayaan. Ketika pendidikan nasional belum berbentuk suatu sistem atau ketika pendidikan untuk bangsa Indonesia belum eksis dan hanya ada pendidikan model kolonial pada masa penjajahan, pendidikan dalam arti yang luas tetap ada di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam bentuk kegiatan kebudayaan.⁶

⁴ Lihat: Samuel P. Huntington, **The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order** (1996).

⁵ Lihat: Francis Fukuyama, **The End of History and the Last Man**, (1992).

⁶ Sartono Kartodirdjo, **Sejarah Pergerakan Nasional**, Bab IV, Tradisi dan Modernisasi, hal. 99-119.

a. Dari Kebangkitan Nasional hingga Orde Baru

Apabila kita simak perkembangan kebudayaan nasional yang secara terarah dimulai dengan gerakan Budi Utomo yang pada hakekatnya merupakan gerakan kebudayaan atau revival dari budaya bumi putra dalam menentang pendidikan kolonial yang segregatis/non-demokratis, dan mengasingkan budaya “Timur” dan supremasi budaya Barat.

Ketika gerakan kesadaran nasional mulai terjerat oleh peraturan-peraturan pemerintah kolonial, maka gerakan nasional berubah atau diselingkan dengan gerakan nasional yang merupakan taktik melepaskan diri dari jerat-jerat politik. Kelahiran Taman Siswa merupakan bentuk dari *escape mechanism* gerakan kemerdekaan, yang didasarkan kepada kebudayaan Jawa. Tidak mengherankan pula apabila gerakan nasional pada saat itu selalu mencantumkan sebagai salah satu programnya ialah mendirikan sekolah-sekolah nasional. Sekolah-sekolah swasta yang muncul ataupun bentuk-bentuk pendidikan asli seperti pesantren dan madrasah tetap hidup di jaman kolonial tersebut.

Pada masa revolusi kemerdekaan, *the founding fathers* kita di dalam BPUPKI dan PPKI (28 Mei 1945 / 22 Agustus 1945) telah merumuskan dengan jelas tempat kebudayaan nasional di dalam pendidikan nasional antara sebagai berikut: (a) Pendidikan nasional bersendi kepada nilai-nilai agama dan kebudayaan bangsa menuju kepada keselamatan dan kebahagiaan. (b) Kebudayaan bangsa tumbuh dan berkembang sebagai hasil usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya.⁷

Kedua butir-butir tersebut di atas tampak dengan jelas di dalam UUD 1945 baik di dalam Pembukaan, Batang Tubuh, maupun di dalam Penjelasannya. Rumusan tersebut menunjukkan suatu

⁷ Lihat tulisan A. Malik Fadjar, “Kembalikan Pendidikan Nasional ke Basisnya,” **KOMPAS**, 15 November 1999.

perspektif komprehensif dan integral pendidikan dalam tumpuan kebudayaan baik kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional.

b. Pendekatan Parsial

Di dalam sejarah perkembangan pendidikan nasional lahir berbagai pendekatan sesuai dengan perubahan politik di tanah air. Hal ini dapat kita lihat di dalam perkembangan sebagai berikut: (a) Pada masa Orde Lama ketika pendidikan merupakan bagian dari gerakan politik untuk menggalang kekuatan rakyat antara lain di dalam perang dingin dan perang untuk mewujudkan integritas negara, pendidikan telah dijadikan alat politik baik dalam arti yang negatif maupun yang positif. Di dalam kerangka ini antara lain telah dilahirkan konsep Pancawardhana yang berarti lima program pendidikan untuk mencapai tujuan politik pada waktu itu. Prinsip Pancawardhana dilihat dari segi politik dapat dibenarkan namun demikian pandangan tersebut tentunya bersifat parsial. Pendidikan bukan sekadar mencapai suatu ambisi atau tujuan politik tertentu tetapi jauh melampaui tujuan-tujuan sementara yang ditentukan oleh politik. Pada masa Orde Baru sudah mulai tampak kemunduruan pendidikan nasional yang tidak lagi diarahkan kepada perkembangan pribadi yang mandiri dan kritis tetapi mulai tunduk kepada proses indoktrinasi. (b) Pada masa Orde Baru telah lahir berbagai konsep pendidikan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan politik pada waktu itu. Kesalahan yang terjadi pada masa Orde Lama kembali terulang pada masa Orde Baru yaitu pendekatan parsial dari pendidikan nasional.⁸ Kita masih teringat kepada program NKK/BKK dalam rangka mendudukkan peranan pendidikan tinggi dalam fungsi yang sewajarnya sebagai pusat pendidikan dan bukan sebagai tempat melaksanakan politik praktis. Meskipun yang dimaksudkan oleh Daoed Joesoef sebagai

⁸ Mengenai pandangan parsial pendidikan, lihat Ignas Kleden, **Pendidikan Tinggi di Indonesia: Logika, Politik dan Kebudayaan**, Jakarta 6 September 1999.

Menteri P dan K pada waktu itu bahwa NKK/BKK bukan mengisolasi pendidikan tinggi dari kebudayaan, tetapi tanggapan masyarakat pada waktu itu, dan mungkin sampai sekarang, seakan-akan prinsip NKK/BKK mengisolasi kehidupan kampus dari kehidupan yang nyata. Sebenarnya prinsip NKK/BKK harus dilihat kembali di dalam kedudukannya untuk membangun kebudayaan yang didasarkan kepada penalaran dan kemajuan teknologi.⁹ Konsep teknostruktur dari kebudayaan yang akan dibangun yang telah dikemukakan oleh Daoed Joesoef tidak sempat diwujudkan secara keseluruhan dan konsisten. Sesuai dengan tendensi pada waktu itu ganti menteri ganti kebijakan, maka era Daoed Joesoef diganti dengan menonjolkan humaniora. Meskipun seakan-akan tampak program humaniora merupakan suatu gerakan kebudayaan yang lebih lengkap, tetapi konsep ini juga mengulangi kesalahan pandangan parsial yaitu hanya mementingkan ilmu-ilmu sosial. Pada akhir rentoknya Orde Baru kita mengenal prinsip “link and match” yang telah mereduksi pendidikan nasional sebagai tempat persiapan tenaga kerja. Meskipun interpretasi ini kemudian diperbaiki dengan mendudukan prinsip ini di dalam keseluruhan pengembangan manusia Indonesia seutuhnya, tetapi telah terlanjur ditanggapi masyarakat sebagai pendidikan nasional untuk keperluan tenaga kerja semata-mata.¹⁰

Pandangan-pandangan parsial tersebut di atas tentulah tidak memenuhi amanat UUD 1945 yang menghendaki pencerdasan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas bukanlah bangsa yang buta politik, juga bukan buta ilmu-ilmu sosial, ataupun mendudukan pendidikan di atas menara gading. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat mengembangkan dirinya dan masyarakat dengan memperhitungkan

⁹ **KOMPAS**, 23 Januari 2000, “Lebih Jauh dengan Daoed Joesoef,” Simak pula: **Nalar dan Naluri. 70 Tahun Daoed Joesoef** (CSIS, 1996).

¹⁰ Wardiman Djojonegoro, **Education and Culture** (1998), hal. 227-241, “The Meaning of Link and Match.”

kekuatan-kekuatan eksternal yang dapat membantu ataupun yang dapat menghancurkan kehidupan masyarakat dan bangsa,

2. KEBUDAYAAN DALAM PARADIGMA BARU PENDIDIKAN NASIONAL

Dalam era reformasi kita bertekad untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru yaitu masyarakat yang demokratis. Masyarakat yang demokratis terdiri dari para anggotanya yang cerdas. Manusia yang cerdas bukan hanya semata-mata memiliki kecerdasan intelektual tetapi berbagai kecerdasan seperti kecerdasan emosional dan kecerdasan etika serta estetika.¹¹ Dengan singkat anggota masyarakat yang cerdas yang menjadi pilar-pilar dari masyarakat Indonesia baru adalah manusia yang terdidik dan berbudaya (*educated and civilized human being*).¹² Apabila hanya suatu aspek saja dari pribadi manusia Indonesia yang berkembang maka hasilnya seperti yang kita peroleh pada masa-masa yang lalu sebelum reformasi. Hasil yang telah kita capai merupakan kegagalan paradigma lama pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional telah menghasilkan manusia-manusia parsial dalam perkembangan kepribadiannya, manusia yang mudah dibangkitkan amarahnya, yang tidak toleran dan kurang bertanggung jawab terhadap kehidupan sesamanya. Kehidupan yang bercorak KKN pada masa yang lalu menunjukkan kualitas manusia yang tidak berbudaya. Kerusuhan, gejaia-gejala disintegrasi bangsa yang kita lihat akhir-akhir ini menunjukkan kekurangan komitmen terhadap kehidupan Indonesia yang bersatu. Manusia Indonesia seakan-akan

¹¹ **Multiple Intelligences** (Gardner, 1993) dan **The Disciplined Mind** (Gardner, 1999).

¹² Masalah hubungan pendidikan dan kebudayaan, lihat H.A.R. Tilaar, **Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia**, 1999. Lihat juga tulisan Mudji Sutrisno: "Gugat Pikiran Driyarkara," KOMPAS, 5 Februari 2000.

kehilangan pegangan yang mengikat dalam kehidupan bersama membentuk suatu masyarakat Indonesia yang tenteram-adil. Ketiadaan unsur pengikat ter sebut merupakan suatu hal yang perlu dipertanyakan. Unsur pengikat tidak lain daripada kebudayaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Paradigma baru reformasi pendidikan nasional haruslah didasarkan kepada:

- (a) Kebudayaan Indonesia yang bhinneka dan merupakan suatu totalitas milik bangsa Indonesia.
- (b) Kebhinnekaan budaya nusantara yang menuntut eksistensi, artinya menuntut pemeliharaan dan komitmen untuk menyumbang sebagai sumbangan unsur-unsur budaya lokal bagi terwujudnya budaya nasional.

Paradigma baru reformasi pendidikan nasional yang berdasarkan kebudayaan dengan demikian memerlukan redefinisi mengenai visi, misi dan program pendidikan nasional yang kemudian perlu dijabarkan di dalam berbagai program lembaga kehidupan bermasyarakat termasuk lembaga pendidikan.

a. Fungsi Lembaga-lembaga Pendidikan

Lembaga-lembaga pendidikan merupakan pranata sosial dari suatu masyarakat yang berbudaya. Dengan demikian fungsi lembaga tersebut tidak lain ialah memelihara, mengembangkan, dan mewujudkan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat pemiliknya.

Lembaga-lembaga pendidikan yaitu keluarga, lembaga-lembaga pendidikan formal dan non-formal, yang diselenggarakan oleh masyarakat semuanya merupakan pranata sosial yang menjadi tumpuan kesinambungan hidup bersama yang diikat oleh nilai-nilai kebudayaan. Tanpa nilai-nilai kebudayaan maka pada hakikatnya lembaga-lembaga pendidikan tersebut tidak mempunyai hak hidup. Dalam era Orde Baru pendidikan formal maupun non-formal segera sistematis mulai terasingkan dari kebudayaan, baik kebudayaan lokal maupun

kebudayaan nasional. Pengamatan ini mungkin agak aneh karena bukankah kita telah banyak berusaha antara lain mensosialisasikan doktrin-doktrin negara, pengembangan bahasa nasional (bahasa Indonesia). Namun demikian berbagai usaha tersebut dalam gejolak sosial akhir-akhir ini ternyata tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai perekat persatuan nasional. Hal tersebut seperti yang telah diuraikan disebabkan antara lain karena perspektif yang parsial dari kebudayaan di dalam proses pendidikan nasional. Dengan demikian fungsi pendidikan nasional sudah tidak sesuai dengan amat Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fungsi lembaga-lembaga pendidikan tidak lain ialah mentransformasikan nilai-nilai budaya. Proses transformasi nilai-nilai budaya mempunyai dua prinsip. Prinsip pertama ialah pengakuan adanya kenyataan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Eksistensi kebudayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia adalah keragamannya. Kedua, nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang bhinneka perlu dipilah-pilah untuk memilih nilai-nilai yang luhur yang perlu dipertahankan serta meninggalkan nilai-nilai yang tidak berfungsi lagi dalam menghadapi perubahan.¹³ Dengan demikian transformasi budaya mengasumsikan adanya fungsi-fungsi imanen dan transenden. Fungsi imanen yaitu memelihara nilai-nilai luhur di dalam kebudayaan, sedangkan fungsi transenden yaitu memilah-milah nilai-nilai yang ada untuk disesuaikan dengan perkembangan jaman dan tuntutan perubahan kehidupan masyarakat modern (GBHN 1999, TAP MPR/IV/1999). Telah jelas kiranya betapa peranan kebudayaan dalam usaha kita membangun masyarakat Indonesia baru. Kekayaan budaya nusantara merupakan yang demokratis yang mengakui adanya keragaman budaya sebagai kekayaan landasan yang sangat kuat untuk membina suatu masyarakat nilai-nilai luhur dalam

¹³ Lihat: Agus R. Sarjono (editor), **Pembebasan Budaya-Budaya Kita** (1999).

kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Menggambarkan adanya pendidikan tanpa kebudayaan berarti menegaskan keberadaan kebudayaan dan proses pendidikan itu sendiri. Kebudayaan tidak dapat eksis tanpa pendidikan, begitu pula pendidikan menjadi kosong tanpa keberadaan kebudayaan yang merupakan isi dari proses pendidikan itu sendiri. Pendidikan tanpa kebudayaan akan menghasilkan robot-robot tanpa arah dan bukan mustahil menghasilkan manusia-manusia yang tidak berbudaya atau menumbuhkan manusia-manusia dan masyarakat yang tidak beradab.

Perubahan paradigma pendidikan nasional yang berdasarkan kebudayaan menuntut struktur pendidikan nasional yang tidak sentralistik karena berdasarkan kepada kenyataan kebudayaan nusantara yang bhinneka. Bentuk dan struktur pendidikan yang lahir dari dan untuk masyarakat (community-based education) merupakan suatu tuntutan. Sistem pendidikan yang demikian juga sejalan dengan jiwa desentralisasi dan otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan reformasi.¹⁴

b. Departemen Kebudayaan dan Pendidikan Nasional

Di tengah gelombang reformasi dewasa ini masyarakat dibingkai dengan adanya Departemen Pendidikan Nasional, yang telah memangkas unsur kebudayaan dari eksistensi pendidikan. Mungkin maksud dari pemangkasan kebudayaan dari proses pendidikan ialah bahwa perkembangan kebudayaan tidak perlu dicampurkan oleh birokrasi. Namun demikian hakikat pendidikan dan kebudayaan menunjukkan keterikatan yang erat antara keduanya. Selain dari adanya kenyataan kebhinnekaan kebudayaan nusantara, demikian pula kita telah mempunyai komitmen untuk membangun kebudayaan nasional sebagai milik persatuan bangsa Indonesia.

¹⁴ UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Bab IV: Kewenangan Daerah.

Negara kita baru merupakan suatu *ethnic-state* daripada suatu *nation-state*.¹⁵ Oleh sebab itu kebudayaan nasional perlu dibina dan dikembangkan. Diperlukan suatu usaha ekstra atau intervensi untuk mewujudkan kebudayaan nasional.¹⁶ Dengan demikian pendidikan nasional mempunyai suatu misi yang tidak dapat dilaksanakan pada tingkat regional dan lokal yaitu berperan sebagai transformator budaya dalam membina dan mengembangkan kebudayaan nasional berdasarkan keanekaragaman kebudayaan nusantara. Tugas tersebut merupakan tugas dari pemerintah nasional. Sejalan dengan tingkat pendidikan rakyat, maka campur tangan pemerintah nasional dalam pembinaan kebudayaan nasional akan semakin berkurang dan dipercayakan secara berangsur-angsur kepada kemampuan masyarakat sendiri.

Dengan demikian terdapat sekurang-kurangnya tiga alternatif kelembagaan pemerintah pusat di dalam pengembangan kebudayaan nasional.

1. Departemen Pendidikan Nasional
2. Departemen Kebudayaan dan Pendidikan Nasional
3. Departemen Pengajaran Nasional/Departemen Persekolah Nasional

Marilah kita cermati ketiga alternatif tersebut. Di dalam konsep **Departemen Pendidikan Nasional** dengan jelas menunjukkan tidak perlu adanya peranan kebudayaan di dalam proses pendidikan. Asumsi ini tentunya kita tolak secara konseptual dan secara praktis. Secara konseptual telah kita lihat tidak mungkin proses pendidikan

¹⁵ Lihat Rangkuman diskusi 11, "Menuju Sumber Daya Manusia Berkualitas dalam Memasuki Milenium III," LPM-IPB, 22 Januari 2000.

¹⁶ Edi Sedyawati mengatakan "Bahwa ke-Indonesiaan itu perlu dibentuk dengan sengaja apabila kita memang berniat membuat negara Indonesia" KOMPAS, 3 Februari 2000, "Perkembangan Tradisi dalam Perspektif Sejarah."

dialienasikan dari kebudayaan. Kecuali apabila kita memang menghendaki hilangnya kebudayaan atau hilangnya jiwa dari suatu bangsa. Selain daripada itu Sumpah Pemuda 1928 menuntut kepada kita suatu komitmen untuk membangun kebudayaan nasional yaitu satu bangsa yang bersatu, satu bangsa yang memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, dan satu bangsa yang bertanah air satu di atas kenyataan kebudayaan nasional yang merupakan perekat dari integrasi bangsa. Bangsa yang beranekaragam memerlukan sarana perekat. Sarana perekat itu tidak lain dari kebudayaan yang berwujud kesatuan tekad masyarakat untuk bersatu, satu bahasa nasional, apresiasi terhadap keanekaragaman kekayaan budaya nusantara, kebanggaan (atau malu) merasa sebagai bangsa Indonesia¹⁷ dalam keberagamannya.

Departemen Kebudayaan dan Pendidikan Nasional. Nama ini mungkin lebih tepat karena menunjukkan kaitan yang sangat erat antara pendidikan nasional dan kebudayaan nasional. Selain daripada itu nama ini menunjukkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang didasarkan kepada kebudayaan nasional dan mempunyai visi untuk mengembangkan kebudayaan nasional dalam rangka untuk membina negara kesatuan Indonesia. ***Departemen Pengajaran Nasional/Departemen Persekolahan Nasional.*** Rumusan ini mungkin ada kebenarannya kalau memang tugas birokrasi pemerintah hanya sekadar untuk mengatur pendidikan formal atau pengajaran di sekolah-sekolah saja. Atau lebih tepat ***Departemen Persekolah Nasional.*** Pendidikan berarti sekolah (schooling). Fungsi ini memang dikenal pada masa kolonial dengan adanya ***Department van Onderwijs en Eeredienst***, tanpa kebudayaan. Memang politik kolonial ialah tidak mencampuri kebudayaan rakyat oleh karena disitulah terletak kekuatan rakyat Indonesia untuk menentang kekuasaan kolonial. Kebudayaan dibiarkan tumbuh dengan sendirinya dan cukup menjadi obyek penelitian para sarjana kolonial. Bukankah program studi

¹⁷ Taufiq Ismail, **Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia**, hal. 19-22.

Indologi di Universitas Leiden yang berada di Belanda merupakan khasanah penelitian kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia yang difungsikan untuk melatih calon-calon penguasa Belanda untuk lebih mengetahui budaya lokal sehingga kaum *inlander* mudah dikendalikan dan dijajah?

c. Kebudayaan Nasional dan Kebudayaan Lokal

Masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam kenyataannya suatu masyarakat yang bhinneka. Nilai-nilai budaya yang konkrit adalah nilai-nilai yang terdapat dalam kebudayaan lokal. Oleh sebab itu pengakuan terhadap kebudayaan lokal berarti pengakuan terhadap nilai-nilai yang mendasari tingkah laku dan tindakan manusia Indonesia. Pengakuan terhadap kebhinnekaan tersebut berarti suatu langkah ke arah pemberdayaan rakyat. Bukankah pengakuan terhadap nilai-nilai lokal memberikan kepada seseorang identitasnya. Selanjutnya identitas seseorang di dalam budaya lokal perlu diperluas horisonnya pada dimensi nasional bahkan global. Oleh sebab itu pendidikan yang berbasiskan masyarakat (community-based education) merupakan konsekuensi dari konsep integrasi antara pendidikan dan kebudayaan. Pengembangan kebudayaan nasional bukanlah berarti melindas kebudayaan lokal. Justru kebudayaan lokal merupakan dasar dari pengembangan kebudayaan nasional. Pendekatan horisontal di dalam kebudayaan nasional akan lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan transendental. Kehancuran kekuasaan Orde Baru memberikan pelajaran pada kita bahwa pendekatan transendental dalam pengembangan kebudayaan dan pendidikan nasional akan mengalami kegagalan. Pendekatan horisontal menuntut komunikasi yang intens serta pengembangan sikap toleransi yang tinggi dan komitmen terhadap persatuan bangsa. Di sinilah terletak fungsi pendidikan nasional untuk memupuk dan mengembangkan sikap toleransi yang tinggi dari bangsa Indonesia. Toleransi yang

tinggi tidak lain akan lahir dari apresiasi terhadap adanya kebhinnekaan budaya nusantara serta adanya komunikasi yang intens antara pribadi-pribadi masyarakat Indonesia yang beragam. Selanjutnya toleransi yang tinggi akan lahir dari komitmen setiap orang Indonesia terhadap persatuan bangsa dan kesatuan negara Indonesia sebagai perwujudan dari sumpah Pemuda 1928.¹⁸ Komitmen tersebut di atas hanya dapat lahir dari usaha yang nyata melalui pendidikan nasional yang mengakui adanya kebudayaan lokal.

3. KEBUDAYAAN SEBAGAI PEREKAT PERSATUAN BANGSA DAN KESATUAN NEGARA

Krisis yang dihadapi oleh masyarakat dan negara Indonesia dewasa ini antara lain yang mengkhawatirkan ialah suatu gejala ke arah disintegrasi bangsa. Dengan demikian muncul pertanyaan apakah masih ada unsur-unsur perekat bagi persatuan bangsa dan kesatuan negara Indonesia? Di dalam hal ini dapat kita eksplor berbagai pandangan para ahli mengenai fungsi kebudayaan sebagai sarana perekat kehidupan masyarakat. Adalah sangat menarik pekerjaan pionir dari seorang ahli psikologi Rusia Lev Vygotsky (1896-1934) yang mengemukakan pandangannya tentang hubungan antara kognisi dan ekologi.¹⁹ Munculnya psikologi ekologis (Ecological Psychology) berdasarkan pemikiran rintisan Vygotsky. Menurut Vygotsky kognisi bersifat sosial dan mental. Artinya kegiatan kognitif manusia hanya bisa terjadi di dalam lingkungan sosial dan budaya. Selanjutnya kegiatan kognitif bersifat mental yang hanya dapat distimulasi oleh lingkungan. Dengan kata lain antara kognisi dan lingkungan budaya

¹⁸ Soekarno, **Warisilah Api Sumpah Pemuda**, Kumpulan pidato Bung Karno di hadapan pemuda 1961-1964.

¹⁹ MITECS, **op.cit.** hal. 878-879.

merupakan suatu kesatuan. Pemikiran inilah yang pada akhir-akhir ini dikenal sebagai *situated cognition and learning* serta *situatedness/embeddedness* (C.J. Gibson). Di dalam kaitan ini telah dianalisis bagaimana peranan individu di dalam hubungan antara kognisi dalam lingkungan sosial-budaya. Di dalam konsep ini individu tetap mempunyai peranan yang menentukan. Di dalam eksperimen-eksperimen *human computer interaction* membuktikan bahwa individu mempunyai peranan penting di dalam *human navigation*. Penelitian akhir-akhir ini mengenai perkembangan kognisi serta kemajuan komputer menunjukkan bahwa pengembangan kognisi yang distimulasi oleh lingkungan sosial dan budaya merupakan suatu proses. Hal ini berarti bahwa di dalam pengembangan kognisi diperlukan apresiasi budaya. Apresiasi budaya bukan sesuatu yang lahir dengan sendirinya tetapi merupakan suatu proses antara individu dengan kebudayaannya atau di dalam proses belajar. Apresiasi budaya adalah merupakan suatu proses belajar.

a. Pendidikan Kebudayaan untuk Persatuan Bangsa

Pendidikan kebudayaan, juga dalam hal pendidikan yang berdasarkan kebudayaan berarti bahwa kebudayaan bukan hanya dipelajari tetapi terlebih diapresiasi. Hubungan antara kognisi dengan lingkungan berarti bahwa perkembangan kognisi juga aspek-aspek lainnya dari kepribadian manusia seperti berbagai jenis inteligensi hanya dapat berkembang di dalam interaksi dengan lingkungan atau kebudayaannya. Dengan interaksi tersebut maka individu-individu dapat berhubungan satu dengan yang lain sehingga dapat tumbuh dan berkembang rasa persatuan. Tanpa pengenalan satu dengan yang lain akan muncul saling curiga dan bukan tidak mungkin ke arah perpecahan. Pengalaman lahirnya negara Singapura menunjukkan bagaimana unsur kebudayaan dijadikan sebagai alat perekat bagi warga Singapura yang mempunyai kelompok-kelompok etnis dengan budaya dan bahasanya masing-masing.

Unsur-unsur kebudayaan beragam tersebut telah melahirkan suatu politik bahasa di Singapura²⁰ dengan mengadopsi bahasa Inggris sebagai bahasa persatuan dengan mengembangkan bahasa-bahasa etnis dari masing-masing kelompok bangsa. Dengan demikian terjadilah suatu persatuan bangsa yang kaya dengan nuansa-nuansa budaya dari masing-masing unsur etnis. Kebanggaan sebagai suatu bangsa muncul dari keanekaragaman budaya etnis tetapi juga dapat disatukan demi untuk mencapai tujuan bersama.

Pentingnya budaya lokal termasuk bahasa daerah di dalam teori Vygotsky yang berkembang dalam Ecological Psychology menunjukkan bahwa unsur-unsur lokal merupakan fondasi dari perkembangan kognitif manusia. Di dalam kehidupan modern yang serba terbuka perkembangan kognisi merupakan unsur yang sangat penting. Bukanlah abad 21 merupakan abad terbuka yang dikuasai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerlukan kemampuan kognitif yang besar? Oleh sebab itu pengembangan kognisi di dalam proses pendidikan yang menuntut adanya interaksi dengan lingkungan berarti pula menuntut pengenalan dan apresiasi budaya lokal.

b. Pendidikan Kebudayaan sebagai Sarana Kesatuan Negara

Apabila kita lihat peranan kebudayaan sebagai perekat persatuan bangsa, maka kebudayaan juga berfungsi sebagai alat perekat sebagai kesatuan negara. Di samping apresiasi terhadap budaya lokal atau etnis maka tahap selanjutnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia ialah apresiasi terhadap kebudayaan nasional. Memang kebudayaan nasional belum terbentuk tetapi di dalam proses pembentukan yang terus-menerus sebagaimana yang telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tahun 1928. Di dalam

²⁰. Michael Hill & Lian Kwen Fee, **The Politics of Nation Building and Citizenship in Singapore**, khusus Bab 3 mengenai "Education and Bilingualism," hal. 67-90.

kebudayaan nasional antara lain kita lihat peranan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dijadikan sebagai perekat kesatuan negara. Dengan bahasa nasional dapat terjadi komunikasi antar etnis yang beragam. Dan dengan demikian pula dapat merupakan salah satu unsur untuk melaksanakan efisiensi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu tugas pendidikan nasional ialah pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan merupakan salah satu unsur kebudayaan nasional. Pengembangan kebudayaan nasional bukan berarti menghilangkan kebudayaan lokal atau kebudayaan etnis. Kebudayaan etnis merupakan unsur-unsur fundasi dari kebudayaan nasional.

4. MENINGKATKAN APRESIASI BUDAYA DALAM PENDIDIKAN FORMAL

Intelektualisme yang telah menjadi ciri pendidikan nasional telah mengasingkan budaya dan apresiasi budaya di dalam pendidikan nasional. Bukan berarti bahwa kognisi tidak diperlukan di dalam pengembangan kepribadian manusia. Seperti yang telah diuraikan terdahulu justru kognisi merupakan syarat penting di dalam apresiasi budaya. Apabila kita lihat apa yang dikemukakan van Peursen²¹ mengenai perkembangan kebudayaan dengan tiga tahap yaitu tahap mistis, ontologis, dan fungsional, maka tahap ontologis dan fungsional tidak dapat berkembang tanpa tahap mistis yang sangat membutuhkan kemampuan apresiasi yang sangat bersifat emosional. Kekurangan dari sifat yang sangat intelektualistis di dalam pendidikan ialah mengenyampingkan apresiasi nilai-nilai budaya yang lain yang tidak kurang pentingnya seperti pengembangan inteligensi emosional yang sangat diperlukan di dalam kehidupan masyarakat, pengembangan

²¹ C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan, hal. 18.

nilai-nilai estetik dan religius yang merupakan dasar dari pengambilan keputusan etis dan yang merupakan basis dari suatu kehidupan masyarakat madani. Oleh sebab itu paradigma pendidikan nasional yang pada masa yang lalu cenderung kepada pandangan yang segmentaris, diganti dengan suatu pandangan yang komprehensif dan didasarkan kepada realitas kehidupan yaitu kehidupan yang dihidupi oleh kebudayaan baik lokal maupun nasional.

Pengembangan apresiasi budaya terjadi sejak manusia itu lahir. Apabila kita simak apa yang dikemukakan oleh para ahli antropologi ekologis serta ahli-ahli teori-teori linguistik seperti Lev Vygotsky, maka pengembangan kognisi tidak dapat dipisahkan dari lingkungan atau proksimitas seseorang.²² Dengan kata lain seorang manusia dan suatu masyarakat tidak mungkin dicerdaskan tanpa pengembangan kognisi yang berkaitan dengan lingkungan serta kebudayaannya.

a. Pengembangan Apresiasi Budaya dalam Kekayaan Budaya Nusantara

Teori Vygotsky menunjukkan dengan jelas kepada betapa lingkungan budaya yang dimulai dengan lingkungan yang terdekat yaitu keluarga, masyarakat sangat menentukan di dalam perkembangan kognisi anak manusia. Tanpa apresiasi budaya yang ada di sekitarnya tidak mungkin terjadi perkembangan kemampuan kognitif. Apabila pada suatu tingkat tertentu perkembangan nilai-nilai etis dan estetika meminta pengembangan kemampuan kognisi, maka dengan sendirinya penghayatan secara total dari nilai-nilai kebudayaan tidak dapat berjalan tanpa pengembangan kemampuan kognitif. Oleh sebab itu kebudayaan daerah merupakan dasar dari pengembangan pribadi seorang anak manusia serta dasar modernisasi. Menghilangkan kebudayaan daerah di dalam berbagai bentuknya berarti memotong alur komunikasi yang merupakan kondisi serta perangsang untuk

²² Lihat: H.A.R. Tilaar, **Quo Vadis Anak Bangsa?** (terbit 2000).

perkembangan kepribadian dan perkembangan kebudayaan.²³ Dengan demikian tingkah laku manusia dengan berbagai jenis nilai tidak mungkin dapat dilaksanakan. Anak manusia yang hidup dari keterasingan dan tercabut dari akar budayanya akan kehilangan pegangan di dalam kehidupan selanjutnya. Di dalam dunia modern yang terbuka seperti di dalam lingkungan kehidupan kota metropolitan, perkembangan anak di dalam situasi yang demikian akan menjadi sangat peka dari unsur-unsur pengaruh luar atau nilai-nilai yang asing baginya. Dengan demikian tingkah laku mereka itu menjadi tidak menentu tanpa arah dan mudah jatuh pada nilai-nilai yang merusak kehidupan bersama. Lebih-lebih lagi di dalam dunia terbuka dan globalisasi berbagai ancaman terhadap kehidupan anak manusia seperti penggunaan narkoba akan mudah menimpa generasi muda. Apabila anak manusia itu hidup dan berakar dari kebudayaan lokal maka ini berarti kontrol dari masyarakat akan terjadi terus-menerus sehingga pembentukan kepribadian anak akan berjalan secara wajar. Partisipasi masyarakat di dalam proses pendidikan anak termasuk di dalamnya sistem *reward and punishment* akan berjalan dengan efektif. Lihat misalnya mengenai akibat menyalahgunaan narkoba terutama di kota-kota besar kini telah menjangkau para siswa sekolah dasar. Antara keluarga, sekolah dan masyarakat di dalam kehidupan kota-kota besar telah kehilangan komunikasi. Anak telah lepas dari kontrol non-formal dari masyarakat luas. Apabila pendidikan dirumuskan sebagai suatu *proses hominisasi dan proses humanisasi*²⁴ maka ini berarti pendidikan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam kebudayaan yang nyata dari kehidupan anak. Dengan proses humanisasi, manusia itu bukan hanya sekadar untuk hidup dan makan tetapi juga bertanggung

²³ Mursal Esten, **Desentralisasi Kebudayaan**, Bab 18, Tradisi versus Negara, hal. 153-160.

²⁴ H .A.R. Tilaar, **op.cit.** hal. 171; Mudji Sutrisno, **loc.cit.**

jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan proses humanisasi, anak manusia itu menguasai ilmu pengetahuan serta penerapannya, penghayatan terhadap seni dalam berbagai bentuknya. Proses hominisasi dan proses humanisasi merupakan suatu kesatuan yang terjadi di dalam kehidupan kebudayaan yang mengandung unsur-unsur universal, partikular dan global.²⁵ Mengutip pendapat Edwards dan Richey yang mengatakan sebagai berikut: *If education is to find its sense of direction and the kind of civilization we hope to build, we must, of course reach some agreement about the core values that will serve as the touchstone of human behavior.*²⁶ Nilai-nilai inti tersebut terjadi di dalam lingkungan kebudayaan lokal dan nasional.

Melihat bahwa kebudayaan itu merupakan suatu totalitas yang integratif, maka pendidikan baik formal maupun non-formal haruslah berkenaan dengan keseluruhan aspek kebudayaan dan bukan semata-mata dibatasi kepada nilai-nilai ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan saja baru merupakan salah satu aspek dari suatu kebudayaan. Dengan demikian pendidikan nasional bukan hanya meliputi pelajaran tetapi lebih esensi ialah nilai-nilai kebudayaan sebagai keseluruhan.

b. Apresiasi Budaya dalam berbagai Tingkat atau Jenjang Pendidikan

Oleh sebab pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan maka berbagai jalur pendidikan haruslah berada di dalam dan untuk kebudayaan. Pengembangan apresiasi budaya tentunya harus disesuaikan dengan perkembangan kognisi anak. Apabila kita mengambil konsep perkembangan kebudayaan dari van Peursen yaitu tingkat pengembangan mistis, ontologis, fungsional, maka pengembangan

²⁵ *Ibid.* hal. 170.

²⁶ *Ibid.* hal. 172.

apresiasi budaya juga dapat diprogramkan mengikuti tingkat-tingkat pengembangan kebudayaan manusia.²⁷

Peningkatan Apresiasi Budaya Untuk Pendidikan Dasar

Pada masa Orde Baru sebenarnya telah dikembangkan konsep wawasan Wiyata Mandala. Di dalam konsep tersebut sekolah dianggap sebagai suatu pusat kebudayaan. Artinya program pendidikan di sekolah bukan hanya pengembangan kemampuan intelektual tetapi juga pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Demikian pula sekolah tidak terasing dari kehidupan masyarakatnya tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Dengan demikian sebenarnya model pendidikan yang dianjurkan dewasa ini, pendidikan dari dan oleh masyarakat (*communitybased education*) sebenarnya telah terangkum dengan wawasan Wiyata Mandala. Sayang sekali pelaksanaan konsep ini hanya terbatas pada tingkat konseptual saja.

Di dalam prakteknya pendidikan di sekolah dasar telah dimanipulasikan untuk tujuan-tujuan politis serta suatu sistem yang sentralistik. Dengan berbagai mekanisme dari suatu sistem yang sentralistik misalnya dengan adanya kurikulum yang terpusat dan seragam, evaluasi yang terpusat dan seragam di dalam bentuk EBTANAS, maka jiwa dari wawasan Wiyata Mandala mati di tengah jalan. Akibatnya ialah pendidikan terasing dari masyarakat, dan selanjutnya pendidikan terlepas dari kebudayaan. Masyarakat tidak merasa memiliki pendidikannya. Sistem pengawasan masyarakat di dalam bentuk *reward and punishment* menjadi sirna. Pendidikan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah dengan birokrasi-

²⁷ Tentunya tidak ada paralelisme antara evolusi perkembangan kebudayaan dengan pengembangan apresiasi budaya, namun perkembangan kognitif anak berkaitan pula dengan daya fantasi dan logika anak. Anak tertarik pada cerita dongeng dan dunia khayal, remaja mulai mempertanyakan keberadaan realitas, pemuda mulai mempertanyakan makna atau fungsi dari realitas.

nya. Hal ini berarti tidak ada tempat untuk kebudayaan apalagi untuk tumbuhnya apresiasi budaya. Kebudayaan lokal menjadi asing dari masyarakat dan tidak mempunyai tempat di dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan menjadi kering dari nilai-nilai budaya yang luhur dan digantikan dengan program indoktrinasi dengan mengajarkan mengenai nilai-nilai dan bukan bertindak dan berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan bertumpu di dalam kebudayaan lokal.²⁸ Pendidikan dari dan untuk masyarakat mengharuskan hidupnya nilai-nilai kebudayaan di dalam kurikulum. Hal ini berarti perlunya adanya otonomi kelembagaan yang disebut sekolah yang terikat dengan erat dengan nilai-nilai budaya lokal. Selanjutnya, sesuai dengan fungsi sekolah sebagai lembaga sosial yang mengandung visi nasional secara berangsur-angsur mengembangkan apresiasi terhadap budaya nasional seperti misainya bahasa Indonesia dan pengenalan terhadap budaya-budaya lokal atau etnis lainnya. Hal ini dapat dicapai bukan hanya melalui sumber-sumber tertulis dan tradisi lisan mengenai kebudayaan lokal dan antar daerah tetapi juga melalui lembaga-lembaga atau situs-situs budaya yang berada di sekitar anak didik.

Keterikatan antara pendidikan dengan apresiasi budaya lokal mengharuskan penggalian dari peninggalan-peninggalan budaya seperti ceritera-ceritera rakyat, tarian, artifak-artifak kebudayaan yang berada di sekitar sekolah. Unsur-unsur kebudayaan itu perlu dipelihara, dikembangkan dan diperkenalkan kepada anak didik. Demikian pula di dalam program kurikulum sekolah digiatkan pengenalan terhadap nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya, penulisan, mengarang mengenai nilai-nilai budaya yang ada. Buku-buku mengenai budaya lokal perlu disusun dan digunakan di masing-masing daerah. Kurikulum muatan lokal yang hingga kini tidak mempunyai wujudnya perlu dijadikan titik tolak pengembangan apresiasi budaya.

²⁸ Mursal Esten, *loc.cit.*

Pada tingkat pendidikan menengah, para siswa diperkenalkan kepada unsur-unsur kebudayaan yang lebih luas dan lebih beragam. Sesuai dengan perkembangan ontologis kebudayaan, para siswa bukan hanya disodorkan mengenai fakta-fakta budaya tetapi mulai mengembangkan kemampuannya penalaran terhadap nilai-nilai budaya. Kepada mereka telah mulai dikembangkan kemampuan untuk menganalisis secara kritis mengenai nilai-nilai adat-istiadat mana yang bermanfaat mana yang dapat ditinggalkan dan nilai-nilai apa saja yang perlu dikembangkan. Perkembangan kebudayaan ontologis meminta kemampuan kognisi untuk apresiasi. Dengan demikian apresiasi budaya pada tingkat pendidikan menengah telah mulai diperkaya dengan nilai-nilai budaya yang lebih luas dari kebudayaan regional bahkan kebudayaan dunia. Untuk apresiasi seni dan literatur misalnya para siswa sekolah menengah kita sangat minim.²⁹ Berbeda misalnya dengan tuntutan bacaan literatur para siswa sekolah menengah pada jaman kolonial yang sudah diharuskan mengenal dan menguasai literatur dunia. Di dalam hal ini penguasaan bahasa asing telah merupakan suatu tuntutan mutlak apalagi di dalam dunia terbuka dewasa ini.

Pada tingkat pendidikan tinggi perkembangan fungsional kebudayaan meminta kemampuan penalaran secara kritis mengenai nilai-nilai yang ada. Hal ini berarti lembaga-lembaga pendidikan tinggi bukan hanya merupakan pusat riset untuk ilmu pengetahuan tetapi juga pusat riset untuk kebudayaan. Pada tingkat pendidikan tinggi diperlukan kajian-kajian konseptual mengenai pengembangan nilai-nilai dan sikap toleransi dari bangsa Indonesia yang majemuk. Seterusnya bagaimana mengembangkan kerjasama antar etnis yang berbeda kebudayaan tetapi bertekad dan mempunyai komitmen untuk bekerjasama di dalam negara kesatuan.

²⁹ Kemampuan membaca serta pengembangan apresiasi sastra di sekolah menengah kita sangat minim dibandingkan dengan di negara-negara tetangga dikemukakan oleh sastrawan Taufiq Ismail dalam berbagai ceramahnya.

Demikian pula nilai-nilai hukum dan disiplin hidup bersama perlu dikaji keberlakuannya di dalam lingkungan budaya lokal (etnis) sehingga dapat dijadikan landasan bagi kehidupan masyarakat yang berdisiplin. Masyarakat tanpa disiplin tidak mungkin mempunyai kelanjutan hidup. Di dalam kaitan ini barangkali sudah pada waktunya untuk meninjau kembali Tri Dharma pendidikan tinggi yaitu melaksanakan pengajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Rumusan mengenai Tri Dharma pendidikan tinggi perlu disesuaikan dengan perubahan kehidupan masyarakat.³⁰

Di dalam kajian UNESCO mengenai perubahan dan pengembangan pendidikan tinggi di dalam abad 21 dikemukakan berbagai kecenderungan yang perlu diperhitungkan yaitu proses demokratisasi, globalisasi, regionalisasi, polarisasi, marginalisasi, dan fragmentasi.³¹ Keenam kecenderungan tersebut menempatkan pendidikan tinggi untuk merumuskan kembali visi dan misinya agar dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat. Demokratisasi meminta pendidikan tinggi untuk membuka pintu seluas-luasnya bagi yang mempunyai kemampuan intelektual. Globalisasi menuntut pendidikan tinggi untuk tidak picik di dalam pandangannya menghadapi masyarakat yang terbuka. Regionalisasi menuntut pendidikan tinggi bisa bekerjasama dengan pendidikan tinggi dalam lingkup regional agar supaya dapat maju dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Polarisasi perlu dicegah agar supaya pendidikan tinggi dapat menjaga jarak yang semakin besar antara negara maju dan negara berkembang di dalam proses globalisasi. Selanjutnya marginalisasi pendidikan tinggi dapat menyebabkan terlemparnya para mahasiswa dari arus perubahan yang cepat apabila

³⁰ H.A.R. Tilaar, "Mencari Paradigma Baru Perguruan Tinggi dalam Milenium III," Bab 12 dalam **Beberapa Agenda Refomasi Pendidikan Nasional**, hal. 208-227.

³¹ UNESCO, **Policy Paper for Change and Development In Higher Education** (1995).

program pendidikan tinggi tidak peka terhadap perubahan yang terjadi dengan cepat. Akhirnya fragmentalisasi merupakan bahaya bagi pendidikan tinggi yang dapat memecah-belah masyarakat apabila pendidikan tinggi tidak peka terhadap perkembangan yang ada.

Pembentukan masyarakat Indonesia baru sebagai suatu masyarakat madani (civil society) memerlukan partisipasi pendidikan tinggi agar tidak terjadi pengotak-ngotakan kehidupan di dalam masyarakat antara sekelompok elit pendidikan tinggi dengan masyarakat luas. Dengan demikian Tri Dharma pendidikan tinggi yang ada yang mempunyai arti yang sempit perlu diberikan rumusan kembali menghadapi tuntutan perubahan kehidupan global dan perkembangan kehidupan nasional. Kecenderungan kehidupan nasional akhir-akhir ini yang mengkhawatirkan ke arah disintegrasi bangsa perlu dikuatkan kembali melalui nilai-nilai kebudayaan yang dikaji oleh pendidikan tinggi dapat dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan. Di dalam usaha untuk pengembangan pendidikan tinggi sebagai *research university* yang sangat diperlukan sebagai lokomotif pengembangan ekonomi, maka kita tidak dapat menutup mata kepada perlunya riset bukan hanya pada bidang teknologi dan ilmu pengetahuan tetapi juga di dalam kebudayaan di dalam artinya yang luas. Pendidikan tinggi haruslah pula merupakan pusat pengembangan kebudayaan baik lokal maupun nasional.³²

Apabila telah kita lihat fungsi pendidikan formal di dalam pengembangan apresiasi budaya di dalam rangka mengembangkan persatuan bangsa dan kesatuan negara Indonesia, maka tampak dengan jelas fungsi kebudayaan sebagai perekat integrasi bangsa.³³

³² David Damrosch, **We Scholars, Changing the Culture of the University** (1995).

³³ Dalam evaluasi satu dasawarsa Education for All (EFA) yang diselenggarakan di Bangkok, 17-20 Januari 2000 disimpulkan peran penting pendidikan sebagai kunci membangun toleransi dan perdamaian dunia.

Dengan apresiasi nilai-nilai kebudayaan baik lokal maupun nasional, akan ditumbuhkembangkan berbagai komitmen dari manusia Indonesia yaitu: 1) Komitmen pada kesadaran dan penghormatan pada kebhinnekaan budaya nusantara. 2) Komitmen pada kebhinnekaan bangsa Indonesia dengan nilai-nilainya sendiri. Nilai-nilai tersebut dipelihara dan dikembangkan melalui program kurikulum di dalam setiap tingkat dan jenis pendidikan. 3) Kenyataan kehidupan bermasyarakat akhir-akhir ini terganggu dengan adanya konflik yang berbau SARA. Di dalam kaitan ini perlu dikembangkan sikap toleransi di dalam masyarakat Indonesia melalui apresiasi budaya nusantara yang beragam namun direkat oleh komitmen untuk hidup bersama sebagai satu bangsa dan satu negara ialah negara kesatuan Republik Indonesia.

REFERENSI

- Baswir, Revrisond cs., **Pembangunan Tanpa Perasaan**, Pustaka Pelajar, IDEA, ELSAM, Yogyakarta, 1999.
- Bidney, David, **Theoretical Anthropology**, Schocken Books, New York, 1967.
- Brameld, Theodore, **Cultural Foundations of Education**, Harver & Brothers, New York, 1957.
- CSIS, **Nalar dan Naluri, 70 Tahun Daoed Joesoef**, Jakarta, 1996.
- Damrosh, David, **We Scholars, Changing the Culture of the University**, Howard University Press, Cambridge, 1995.
- Esten, Mursal, **Desentralisasi Kebudayaan**, Angkasa, Bandung, 1999.
- Erickson, Paul A.; Liam D. Murphy, **A History of Anthropological Theory**, Broadview Press, Ontario, 1999.
- Fadjar, A. Malik, “Kembalikan Pendidikan Nasional ke Basisnya.” **KOMPAS**, 15 November 1999.
- Fukuyama, Francis, **Trust**, Penguin Books, New York 1996.
- Fukuyama, Francis, **The End of History and the Last Man**, Free Press, New York, 1992.
- Hassan, Fuad, **Cultural Dimension and Human Development**, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- Hill, Michael; Lian Kwen Fee, **The Politics of Nation Building and Citizenship in Singapore**, Routledge, London, 1995.
- Huntington, Samuel P., **The Clash of Civilizations and the Re-making of World Order**, Simon & Schuster, New York, 1996.

Koentjaraningrat, **Pengantar Ilmu Antropologi**, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

KOMPAS, Mengenang Romo Mangun: “**Surat Bagimu Negeri**,” Jakarta, 1999.

Kleden, Ignas, **Pendidikan Tinggi di Indonesia: Logika, Politik, dan Kebudayaan**, Jakarta 6 September 1999.

KOMPAS, 23 Januari 2000, “Lebih Jauh dengan Daoed Joesoef.”

Massachusetts Institute of Technology, **The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences**, The MIT Press, Cambridge, 1999.

Mihardja, Achdiat K., **Polemik Kebudayaan**, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

Mudji Sutrisno, “Gugat Pikiran Driyarkara,” **KOMPAS**, 5 Februari 2000.

Pai, Young; Susan A. Adler, **Cultural Foundations of Education**, Merrill Prentice Hall, Columbus, 1997.

Panitia Kongres Kebudayaan 1994, **Kongres Kebudayaan 1991**.

Peursen C.A. van, **Strategi Kebudayaan**, Kanisius, Yogyakarta, 1988.

Sarjono, Agus R. (editor), **Pembebasan Budaya-Budaya Kita**, Gramedia, Jakarta, 1999.

Sartono Kartodirdjo, **Sejarah Pergerakan Nasional**, Jilid 2, Gramedia, Jakarta, 1993.

Sedyawati, Edi, “Perkembangan Tradisi dalam Perspektif Sejarah,” **KOMPAS**, 3 Februari 2000.

Soekarno, **Warisilah Api Sumpah Pemuda**, Haji Masagung, Jakarta, 1988.

Suparlan, Parsudi (editor), **Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996.

Tap MPR-RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Taufiq Ismail, **Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia**, Yayasan Ananda, Jakarta, 1998.

UNESCO, **Policy Paper for Change and Development in Higher Education**, Paris, 1995.

UU-RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Wardiman Djojonegoro, **Education and Culture**, Jakarta, 1998.

World Development Report 1997, The World Bank, Washington D.C., 1997.

PENINGKATAN APPRESIASI BUDAYA BANGSA MELALUI MEDIA MASSA

Djafar H. Assegaff
Pemred Media Indonesia
GM Pemberitaan RCTI

Membicarakan masalah apresiasi budaya kita memasuki bidang yang luas sekali. Hampir seluruh hasil karya bangsa merupakan budaya, mulai dari seni, kesusastraan dan teknologi (betapapun sederhananya) termasuk dalam kategori budaya bangsa. Namun rasanya kita dapat membatasi pengertian mengenai budaya hanyalah menyangkut seni dan kesusastraan.

Justru kalau kita ingin membicarakannya secara jujur, pada saat ini kita tengah dihadapai kepada kemunduran baik dalam bidang kreativitas dan penciptaannya maupun masyarakat yang menghargai hasil seni tadi. Bukan hanya kemunduran kreativitas dan penciptaan, namun syarat untuk dapat menikmati hasil budaya tadi juga mengalami kemerosotan. Dalam hal ini adalah budaya baca (*reading habit*) yang menurun dan sangat mengkhawatirkan. Penyair Taufik Ismail pernah memintakan perhatian kepada para pimpinan redaksi surat-kabar terhadap hal ini. Dengan kata-kata yang plastis ia menyatakan bahwa “Bangsa Indonesia sudah rabun matanya dan lunglai tangannya.”

Tidak perlu dicari siapakah yang bersalah, karena mundurnya “budaya baca” tadi dihadapi diseluruh dunia. Namun yang sangat parah adalah Indonesia. Tampaknya tanah air kita tengah dilanda semua macam penyakit yang parah. Sokoguru atau tiang utama untuk dapat membina apresiasi budaya adalah pada kebiasaan membaca. Untuk menjadi seorang yang berbudaya dan bijak, orang harus banyak membaca.

Disinilah pula letaknya situasi yang mengkhawatirkan, yakni retaknya kesatuan bangsa. Generasi muda tampaknya berada di ambang situasi asing satu dengan yang lainnya. Karena mereka tidak diasuh untuk dapat mengenal suku-suku dan sejarah etnis di tanah air. Bayangkanlah di tahun limapuluhan pengertian dan apresiasi terhadap suku-suku bangsa didapat dengan bacaan buku-buku kesusastraan yang menggambarkan suku-suku kita, misalnya “Toraja Sa’dan” karya Mohamad Rajab, “Tambera” karya Utuy Tatang Sontani, “I Swasta Setahun di Bedulu” karya Nyoman Panji Tisna, “Pahlawan Minahasa” dan sebagainya. Film-Film yang dihasilkan di tahun limapuluhan juga memberikan apresiasi terhadap hal-hal yang terkait kepada budaya bangsa, seperti “Tamu Agung” yang diadaptasi dari karya Gogol dengan suasana daerah miskin di gunung Kidul, “Antara Bumi dan Langit” (hubungan antar etnis Belanda Indo dan pejuang), Lewat Jam Malam (Pengalaman bekas-bekas pejuang, setelah merdeka). Demikian pula dalam seni patung, seni lukis dan karya-karya theater. Bahkan di kala itu “Mis Cicih” sandiwara Sunda masih hidup dan Wayang Wong Ngesti Pendowo masih ramai dikunjungi penonton (bukan hanya Jawa tetapi juga generasi muda dari luar Jawa yang ingin mengenal budaya Jawa).

Pada saat itu media massa (dikala itu hanya ada media cetak dan radio), isinya penuh dengan hasil budaya bangsa. Orkes Simphoni Jakarta dibawah pimpinan Syaiful Bahri terkenal dan sangat dihargai. Resensi seni dan lembar-lembar budaya dan sastra merupakan panduan para seniman. Majalah-majalah budaya seperti “Indonesia” (penerbitan BMKN) dan “Bahasa dan Budaya” terbit secara teratur, disamping majalah-majalah Kisah dan majalah Budaya lainnya.

Sengaja saya menukilkan hal ini, tidak ingin mengingatkan kepada kemampuan, kreativitas dan apresiasi masyarakat dikala itu, akan tetapi untuk menyentak kita “agar bangun dari tidur, dan bahwa kita perlu memperbaiki diri jika kita ingin hadir sebagai bangsa.”

Kalau kita ingin bicara tentang peran media massa didalam membangkitkan apresiasi pada budaya bangsa, kitapun harus pula melihat kedalam kepada pengelola media massa yang ada, baik surat kabar, majalah maupun televisi. Umumnya mereka itu sudah tidak seperti generasi terdahulu yang sebenarnya berkeinginan “menjadi penulis” atau “budayawan” dan kemudian terjun kedunia surat kabar. Generasi sekarang jauh lebih banyak terampil pada hal-hal yang bersifat politik, ekonomi dengan wawasan budaya yang tumpul. Maafkan jika saya memakai istilah ini, karena penulis juga menyamaratakan generasi wartawan sekarang, pada hal ada beberapa (sedikit) yang mempunyai wawasan budaya dan bahkan jika dikembangkan dan didorong dengan apresiasi masyarakat mereka akan bangkit sebagai generasi budayawan yang tangguh.

Saya ingin menunjukkan contoh yang saya alami, yang mengemukakan saya dan kemudian menyadarkan saya bahwa wartawan baik di media cetak maupun radio dan elektronika memerlukan peningkatan pemahamannya terhadap budaya bangsa dan hasil-hasil budaya bangsanya. Ceritanya demikian. Saya ingin mewawancarai Dubes Cina. Saya membawa salah seorang produser reporter dan jurukamera. Sebelum diterima Dubes Cina kami diterima oleh sekretaris Kedubes Cina. Ia berbahasa Indonesia dengan amat baik mendekati sempurna dan indah.

Saya berkomentar, “Bahasa Indonesia anda baik sekali”.

Ia menjawab, “Saya belajar bahasa Indonesia di Beijing pada jurusan bahasa Indonesia dan mendalami kesusteraan modern Indonesia”. Pembicaraan kami sampai kepada karya-karya Pramudya Anantatur. Mulai dari yang ditulis tahun limapuluhan seperti Cerita dari Blora, Perburuan, Ditepi Kali Bekasi, Keluarga Gerilya” dan sampai hasil-hasil karya terbarunya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca dan bahkan Nyanyi Sunyi dan Arus Balik. Pembicaraan saya dengan Sekretaris Politik tentang kesusasteraan tadi begitu intens.

Namun apa lacur ketika saya tanyakan kepada produser yang mengikuti saya yang juga seorang “pembaca berita”, buku-buku yang disebutkan tadi belum pernah dibacanya. Ia dari jurusan bahasa Inggris Fakultas Sastra. Tidakkah hal itu sangat menyedihkan?

Setelah uraian ini marilah kita masuki tema seminar ini, yakni peran media massa untuk meningkatkan apresiasi budaya. Tidak ada yang meragukan bahwa media massa memainkan peran yang penting dan tangguh untuk dapat menumbuhkan kembali apresiasi terhadap budaya bangsa. Seperti dikemukakan dibagian awal, penyebab utama menurunnya apresiasi pada budaya bangsa adalah karena menurunnya minat baca. Karena itu kita harus mampu membangun kembali minat baca di masyarakat. (Contoh: Webb-site The New York Times). Kampanye mengembalikan minat baca, patut sekali dikembangkan; karena kemajuan teknologi elektronika juga telah menyaingi keinginan membaca tadi.

Saya baru kembali dari Inggris untuk mengikuti seminar yang bertema: “Managing Newspaper in the 21 Century”. Seorang penyaji, John Ryan menguraikan, betapa menurunnya minat baca surat kabar datang dari London ke Cardiff dengan naik kereta api. Di Deresi kereta api itu ada 44 orang. Dari 44 orang itu kalau dahulu hampir 90% membaca surat kabar. Sekarang hanya 3 orang saja. Selebihnya ada 8 anak muda yang main “elektronik games”, 9 anak muda asyik mendengarkan music dari walk-mannya dan yang lainnya menyaksikan tayangan televisi di kereta.

Karena itu haruslah ada usaha untuk kembali membangkitkan minat baca. Ia tidak hanya dibicarakan dalam seminar namun diusahakan melalui sebuah kampanye Nasional mengenai usaha meningkatkan minat baca dan penyebaran buku murah. Bukan hanya minat baca yang digerakkan, namun juga usaha penerbitan buku dengan harga yang terjangkau.

Setelah itu patut pula dilakukan usaha mencapai kelompok strategis, untuk dapat menjadi nucleus inti yang menggerakkan

apresiasi budaya di media massa (baik surat kabar, tv dan radio). Secara singkat dapatlah disebutkan lima usaha yang sudah patut digerakkan, yakni:

1. Mengembangkan kemampuan redaktur-redaktur budaya atau sastra di media massa, untuk kembali mengembangkan rubrik-rubrik budaya dan sastra di media massa.
2. Membangun suatu pusat pengembangan kelompok redaktur budaya media massa syukur jika dapat dibentuk kelompok wartawan peminat budaya dan sastra.
3. Mengembangkan pelembagaan untuk memberikan “hadiah jurnalistik” bagi penulis resensi Film, theater dan resensi buku.
4. Lembaga tadi harus pula dapat mengembangkan usaha untuk mendorong tumbuhnya lembar sastra dan budaya di media cetak dan media siaran.

Dengan usaha ini dan ditambah dengan kegiatan yang serentak dan menyeluruh dari kalangan yang terkait, barangkali usaha untuk mengembangkan apresiasi budaya bangsa akan dapat berhasil. Yang jelas kita harus profesional menanganinya dan tidak terjerumus dalam lingkaran setan “verbalisme”.

Terimakasih.

Jakarta, 23 Pebruari 2000.

Perkembangan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini berada pada titik rawan yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan kesatuan negara. Tampaknya, masyarakat tidak memahami proses yang sedang terjadi, mereka seperti kehilangan pedoman dalam menentukan arah dan harapan bangsa Indonesia pada masa depan. Berbagai kerusuhan dan kerusakan yang terjadi di beberapa wilayah/daerah nyaris mencampakkan bangsa Indonesia yang dahulu dikenal sebagai bangsa yang bersatu, ramah, dan berbudaya menjadi bangsa yang rapuh dan mudah retak. Integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mulai diragukan banyak pihak. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika seolah-olah tak menjiwai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Isu-isu politik, ekonomi, agama, suku bangsa, dan antargolongan telah memicu pergolakan keretakan persatuan bangsa dan kesatuan negara.

Berbagai pendapat yang telah dilontarkan oleh

Prof. Dr. Daoed Joesoef, Prof. Dr. Fuad Hassan, Dr. Asim Gunarwan, Prof. Dr. Fuad Abdul Hamied, Dr. Kuntowijoyo, M.A., Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., Putu Wijaya, Slamet Sukirnanto, Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A., Dr. Mukhlis Paeni, Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, Prof. Dr. Sardjono Jatiman, Dr. Imam B. Prasodjo, Drs. Endro Sumarjo, Prof. Dr. Bambang Pranowo, M.A., dan Drs. Djafar H. Assegaff diharapkan akan melahirkan gagasan-gagasan demi peningkatan ketahanan budaya yang dapat memberikan solusi yang terbaik dalam mengatasi permasalahan bangsa di tengah-tengah persiapan memasuki era globalisasi ini.